



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025 - 2029**



BUPATI TANA TORAJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam

- rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tana Toraja.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
 11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur pola ruang Kabupaten Tana Toraja.
 12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja.
 13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 15. Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 17. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. bab i pendahuluan;
 - b. bab ii gambaran umum Daerah;

- c. bab iii visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab iv program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab v penutup.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG



Diundangkan di Makale

pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDILOLO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.01.043.25.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberi arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan Peraturan daerah tentang RPJMD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada Landasan Idiil yaitu Pancasila, Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Landasan Operasional yang meliputi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tana Toraja serta mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RTRW Kabupaten Tana Toraja serta memperhatikan RPJMD kabupaten tetangga.

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2029 memuat Visi yaitu "*Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya*", dengan harapan dapat mewujudkan keinginan masyarakat Tana Toraja dengan tetap mengacu pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja setiap Tahun Anggaran dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 40



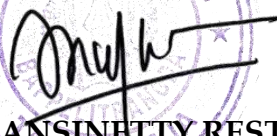
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Karunia-Nya, dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 ini dapat disusun sesuai dengan amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta bentuk dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tana Toraja yang disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, *Top-Down* dan *Bottom-Up*, serta politis. Selain itu secara substansi, Dokumen RPJMD ini disusun dengan pendekatan holistiktematik, tematik, integratif, dan spasial.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Tana Toraja.

Kepala BAPPELITBANGDA
Kabupaten Tana Toraja



FRANSINETTY RESTU, SH. M.Si.
Nip. 19730417 199803 2 006



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 10
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 12
1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029	I - 13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 65
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	II - 97
2.1.4. Aspek Layanan Umum	II - 124
2.1.5. Aspek Pembangunan Lainnya	II - 187
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II - 201
2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	II - 203
2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	II - 226
2.2.3. Kerangka Pendanaan	II - 237
2.2.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	II - 253
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II - 257
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 257
2.3.2. Isu Strategis	II - 271
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III - 1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III - 1
3.1.1. Visi dan Misi	III - 1
3.1.2. Tujuan dan Sasaran	III - 10
3.2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III - 18



3.2.1.	Arah Kebijakan dan Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029	III - 18
3.2.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III - 32
3.3.	Arah Pembangunan Kewilayahan	III - 66
3.3.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional	III - 66
3.3.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan	III - 68
3.3.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Tana Toraja ...	III - 74
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA	
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV - 1
4.1.	Program Perangkat Daerah.....	IV - 1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV - 52
4.2.1.	Indikator Kinerja Makro	IV - 52
4.2.2.	Indikator Kinerja Utama	IV - 54
4.2.3.	Indikator Kinerja Daerah Daerah	IV - 56
4.2.4.	Indikator Kinerja Kunci	IV - 68
4.2.5.	Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)	IV - 103
4.2.6.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)	IV - 108
BAB V	PENUTUP	V - 1
5.1.	Kesimpulan Substansial	V - 1
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	V - 1
5.3.	Pengendalian dan Evaluasi	V - 3



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024	II - 2
Tabel 2.2	Morfologi Wilayah Kabupaten Tana Toraja	II - 4
Tabel 2.3	Topografi Wilayah Kabupaten Tana Toraja	II - 5
Tabel 2.4	Kondisi Geologi Kabupaten Tana Toraja	II - 9
Tabel 2.5	Kondisi Hidrologi Kabupaten Tana Toraja	II - 11
Tabel 2.6	Kondisi DAS Kabupaten Tana Toraja	II - 12
Tabel 2.7	Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tana Toraja	II - 14
Tabel 2.8	Kondisi Suhu (°C) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024	II - 15
Tabel 2.9	Kondisi Kelembababn Udara (%) Kabupaten Tana Toraja	II - 15
Tabel 2.10	Kecepatan Angin (knot) Kabupaten Tana Toraja	II - 16
Tabel 2.11	Tekanan Udara (mbar) Kabupaten Tana Toraja	II - 16
Tabel 2.12	Jenis Tanah Kabupaten Tana Toraja	II - 18
Tabel 2.13	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Toraja	II - 21
Tabel 2.14	Luas Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja	II - 26
Tabel 2.15	Persebaran Kawasan Hutan Produksi di Kab. Tana Toraja	II - 27
Tabel 2.16	Persebaran Kawasan Perkebunan Rakyat di Kab. Tana Toraja..	II - 28
Tabel 2.17	Persebaran Kawasan Pertanian Lahan Pangan di Kabupaten Tana Toraja	II - 29
Tabel 2.18	Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Tana Toraja	II - 30
Tabel 2.19	Pesebaran Kawasan Pertanian Hortikultura di Kabupaten Tana Toraja	II - 31
Tabel 2.20	Luas dan Persebaran Kawasan Perkebunan di Kab. Tana Toraja	II - 32
Tabel 2.21	Luas dan Persebaran Kawasan Peternakan di Kabupaten Tana Toraja	II - 33
Tabel 2.22	Persebaran Objek Wisata di Kabupaten Tana Toraja	II - 33
Tabel 2.23	Pesebaran Hutan Lindung di Kabupaten Tana Toraja	II - 39
Tabel 2.24	Pesebaran Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Tana Toraja	II - 39
Tabel 2.25	Daya Dukung Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2025	II - 41
Tabel 2.26	Daya Dukung Ketersediaan dan Kebutuhan Air Tahun 2029	II - 42
Tabel 2.27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II - 48



Tabel 2.28	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 ..	II - 53
Tabel 2.29	Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Tana Toraja	II - 53
Tabel 2.30	Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Tana Toraja	II - 55
Tabel 2.31	Rawan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tana Toraja	II - 56
Tabel 2.32	Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 58
Tabel 2.33	Perkembangan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 - 2024	II - 62
Tabel 2.34	Asumsi proyeksi demografi Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2029 ...	II - 63
Tabel 2.35	Capaian Literasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 - 2024	II - 84
Tabel 2.36	Capaian Numerasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 - 2024	II - 85
Tabel 2.37	Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 90
Tabel 2.38	Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitasi di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 92
Tabel 2.39	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 102
Tabel 2.40	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 104
Tabel 2.41	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024....	II - 105
Tabel 2.42	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kab Tana Toraja Tahun 2020-2024 ..	II - 106
Tabel 2.43	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 107
Tabel 2.44	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 108
Tabel 2.45	Jumlah wisatawan dan Lama Kunjungan Wisata di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 110
Tabel 2.46	Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 115
Tabel 2.47	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 116
Tabel 2.48	Indeks Desa Membangun Kab. Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 121
Tabel 2.49	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2024	II - 126
Tabel 2.50	Persentase Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 132
Tabel 2.51	Angka Kriminalitas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024 ...	II - 133
Tabel 2.52	Jenis Kejahatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 133



Tabel 2.53	Kerjasama Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 135
Tabel 2.54	Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 138
Tabel 2.55	Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 139
Tabel 2.56	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (%) di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 140
Tabel 2.57	Angka Putus Sekolah SD/SMP, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/ MTs dan dari SMP/SMPLB/ MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 140
Tabel 2.58	Persentase Persentase Penduduk Usia > 15 Tahun Melek Huruf dan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15–24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki di Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024 ...	II - 141
Tabel 2.59	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 142
Tabel 2.60	Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 146
Tabel 2.61	Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 147
Tabel 2.62	Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tana Toraja Tahun 2020–2024	II - 148
Tabel 2.63	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 149
Tabel 2.64	Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 150
Tabel 2.65	Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 150
Tabel 2.66	Kinerja Urusan Pangan Kab. Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 152
Tabel 2.67	Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 153
Tabel 2.68	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 154
Tabel 2.69	Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 155
Tabel 2.70	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 156
Tabel 2.71	Status Desa di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 156
Tabel 2.72	Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024 ...	II - 157



Tabel 2.73	Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 158
Tabel 2.74	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 159
Tabel 2.75	Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 161
Tabel 2.76	Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Investasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 162
Tabel 2.77	Capaian Pembangunan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 164
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 165
Tabel 2.79	Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 166
Tabel 2.80	Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 167
Tabel 2.81	Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 168
Tabel 2.82	Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Tana Toraja Tahun 2010 – 2024	II - 169
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 170
Tabel 2.84	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 171
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 172
Tabel 2.86	Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (persen) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 172
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 – 2024	II - 174
Tabel 2.88	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (persen) Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 175
Tabel 2.89	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 176
Tabel 2.90	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 176
Tabel 2.91	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 177



Tabel 2.92	Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 177
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 178
Tabel 2.94	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 179
Tabel 2.95	Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 180
Tabel 2.96	Opini BPK Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 180
Tabel 2.97	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 181
Tabel 2.98	Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 182
Tabel 2.99	Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 183
Tabel 2.100	Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 184
Tabel 2.101	Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 185
Tabel 2.102	Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 186
Tabel 2.103	Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 187
Tabel 2.104	Capaian Target Indikator TPB/SDG's Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 192
Tabel 2.105	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 206
Tabel 2.106	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 213
Tabel 2.107	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 215
Tabel 2.108	Neraca Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 217
Tabel 2.109	Rasio Lancar Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 223
Tabel 2.110	Rasio Cepat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 224
Tabel 2.111	Rasio Hutang terhadap Aset Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 225
Tabel 2.112	Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 226



Tabel 2.113	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 228
Tabel 2.114	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 232
Tabel 2.115	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 233
Tabel 2.116	Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 233
Tabel 2.117	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 234
Tabel 2.118	Analisis Realisasi Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 236
Tabel 2.119	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2030	II - 238
Tabel 2.120	Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030	II - 241
Tabel 2.121	Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030	II - 246
Tabel 2.122	Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kab. Tana Toraja Tahun 2026 – 2030	II - 248
Tabel 2.123	Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030	II - 250
Tabel 2.124	Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030	II - 252
Tabel 3.1	Penyelarasan Visi RPJMD Kab. Tana Toraj, RPJMD Prov. Sulsel dan RPJMN Tahun 2025 – 2029	III - 4
Tabel 3.2	Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Tana Toraja Tahun 2025 – 2029	III - 5
Tabel 3.3	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029	III - 6
Tabel 3.4	Keselarasan Misi RPJMD Kab. Tana Toraj, RPJMD Prov. Sulsel dan RPJMN Tahun 2025 – 2029	III - 8
Tabel 3.5	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2029	III - 13
Tabel 3.6	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Toraja 2025 - 2030	III - 15
Tabel 3.7	Tahapan Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2025 - 2030	III - 19



Tabel 3.8	Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 - 2030	III - 20
Tabel 3.9	Rumusan Strategi Pembangunan	III - 23
Tabel 3.10	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029	III - 32
Tabel 3.11	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah	III - 41
Tabel 3.12	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Prioritas Pembangunan Prov. Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional	III - 43
Tabel 3.13	Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030	III - 46
Tabel 3.14	Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Palopo Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030	III - 69
Tabel 3.15	Arah Pembangunan Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten Tana Toraja	III - 79
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030	IV - 2
Tabel 4.2	Penetapan Target Kinerja Indikator Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030	IV - 53
Tabel 4.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030	IV - 55
Tabel 4.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030	IV - 57
Tabel 4.5	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030	IV - 69
Tabel 4.6	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030	IV - 104
Tabel 4.7	Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030	IV - 109



Daftar Grafik

Grafik 2.1	Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 43
Grafik 2.2	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 44
Grafik 2.3	Prevalence of Undernourishment (PoU) (%) Kab. Tana Toraja Tahun, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II - 45
Grafik 2.4	Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Kabupaten Tana Toraja Tahun Tahun 2020 - 2024 (%)	II - 46
Grafik 2.5	Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum yang Layak di Kab. Tana Toraja Tahun Tahun 2021 - 2024 (%)	II - 47
Grafik 2.6	Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 49
Grafik 2.7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 - 2023	II - 50
Grafik 2.8	Capaian Pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 51
Grafik 2.9	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 52
Grafik 2.10	Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 59
Grafik 2.11	Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 59
Grafik 2.12	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 60
Grafik 2.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum Kab. Tana Toraja Tahun 2024	II - 61
Grafik 2.14	Perbandingan Migrasi Penduduk Usia 15 - 29 Tahun menurut Jenis Kelamin di Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 64
Grafik 2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II - 66
Grafik 2.16	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tana Toraja dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024	II - 67
Grafik 2.17	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II - 68



Grafik 2.18	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2020-2024	II - 68
Grafik 2.19	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja 2020-2024	II - 69
Grafik 2.20	Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 70
Grafik 2.21	Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 - 2024	II - 71
Grafik 2.22	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II - 72
Grafik 2.23	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020 - 2024	II - 73
Grafik 2.24	Perbandingan Gini Ratio Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 -2024	II - 74
Grafik 2.25	Perbandingan Gini Ratio Kab. Tana Toraja dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024	II - 74
Grafik 2.26	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	II - 75
Grafik 2.27	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020 - 2024	II - 76
Grafik 2.28	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II - 77
Grafik 2.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019- 2024	II - 78
Grafik 2.30	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II - 79
Grafik 2.31	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 80
Grafik 2.32	Prevalensi Stunting di Kab. Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 81
Grafik 2.33	Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024 (kasus)	II - 82
Grafik 2.34	Cakupan Penemuan Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 82
Grafik 2.35	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 83
Grafik 2.36	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kab. Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 84
Grafik 2.37	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 ...	II - 86
Grafik 2.38	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 ...	II - 87



Grafik 2.39	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kab. Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 88
Grafik 2.40	Indeks Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 89
Grafik 2.41	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 90
Grafik 2.42	Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kab. Tana Toraja, Prov. Sulsel dan Nasional Tahun 2019 – 2023	II - 92
Grafik 2.43	Indeks Kualitas Keluarga Kab. Tana Toraja Tahun 2019 – 2023	II - 93
Grafik 2.44	Persentase Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 94
Grafik 2.45	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II - 95
Grafik 2.46	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II - 96
Grafik 2.47	IPG dan IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 97
Grafik 2.48	Angka Ketergantungan Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 98
Grafik 2.49	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2020 – 2024	II - 100
Grafik 2.50	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2020 – 2024	II - 101
Grafik 2.51	PDRB ADHB dan ADHK (Menurut Lapangan Usaha) Kab. Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 102
Grafik 2.52	Perkembangan PDRB ADHK 2010 dan ADHB menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2020 – 2024	II - 109
Grafik 2.53	Persentase Koperasi Sehat di Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024 ..	II - 111
Grafik 2.54	Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 112
Grafik 2.55	Indeks Kualitas Air (IKA) di Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024 ...	II - 113
Grafik 2.56	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 114
Grafik 2.57	Perbandingan PDRB ADHB menurut Pengeluaran dengan Net Ekspor Barang dan Jasa di Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 117
Grafik 2.58	Indeks Layanan Infrastruktur di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 118
Grafik 2.59	Akses Rumah Layak Huni Nasional, Prov. Sulsel dan Kab. Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 119
Grafik 2.60	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 120
Grafik 2.61	Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kab. Tana Toraja Tahun 2020 – 2024	II - 122
Grafik 2.62	Perkembangan Laju Inflasi Kab. Tana Toraja, Prov. Sulawesi Selatan dan Nasional serta Zona Sekitar Tahun 2020 – 2024	II - 124



Grafik 2.63	Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 124
Grafik 2.64	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kab. Tana Toraja Tahun 2022-2024	II - 127
Grafik 2.65	Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2024	II - 128
Grafik 2.66	Indeks Maturitas SPIP Kab. Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 129
Grafik 2.67	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kab. Tana Toraja Tahun 2021-2024	II - 130
Grafik 2.68	Perbandingan Indeks Reformasi Hukum Kab. Tana Toraja dan Prov. Sulsel Tahun 2023 dan 2024	II - 131
Grafik 2.69	Indeks Inovasi Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2021-2024	II - 135
Grafik 2.70	Capaian AKB dan AKI Kab. Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 144
Grafik 2.71	Prevalensi Stunting dan Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2024	II - 145
Grafik 2.72	Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Kategori Sehat di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024	II - 161
Grafik 2.73	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) dan Perikanan Tangkap Kabupaten Tana Toraja 2020-2024	II - 169
Grafik 2.74	Rata-rata Proporsi Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 205
Grafik 2.75	Rata-rata Proporsi Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 207
Grafik 2.76	Rata-rata Proporsi Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 208
Grafik 2.77	Rata-rata Proporsi Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024	II - 209
Grafik 2.78	Alokasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024 (persen)	II - 211
Grafik 2.79	Alokasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 - 2024 (persen)	II - 211
Grafik 2.80	Alokasi Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 - 2024 (persen)	II - 212



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I - 11
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Toraja	II - 1
Gambar 2.2	Peta Morfologi Kabupaten Tana Toraja	II - 5
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Tana Toraja	II - 7
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Tana Toraja	II - 10
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kabupaten Tana Toraja	II - 13
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Tana Toraja	II - 14
Gambar 2.7	Peta Jenis Tanah Kabupaten Tana Toraja	II - 19
Gambar 2.8	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Toraja	II - 22
Gambar 2.9	Peta Bencana Tanah Longsor Kabupaten Tana Toraja	II - 54
Gambar 2.10	Peta Bencana Banjir Kabupaten Tana Toraja	II - 56
Gambar 3.1	Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029	III - 67
Gambar 3.2	Alur Pikir Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	III - 68



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 - 2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah yang menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana



Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Toraja telah diselenggarakan pada tahun 2024 dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu dr. Zadrak Tombeg, Sp.A., dan Erianto Laso' Paundanan, S.H., M.H. telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029 ini memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Proses penyusunannya menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif serta pendekatan perpaduan antara *Top-Down* dengan *Bottom-Up Planning*. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan daerah. Pelibatan mereka dimaksudkan untuk mendapatkan saran dan



masuk, mengakomodir aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up* dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten, mengarah pada percepatan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Lebih lanjut, secara substansi RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029 menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik bermakna dilakukannya penanganan menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian program prioritas sehingga kegiatan yang dilaksanakan betul-betul ditujukan untuk terwujudnya misi. Pendekatan integratif bermakna adanya keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras antara organisasi perangkat daerah dalam mencapai prioritas daerah. Adapun pendekatan spasial bermakna kegiatan-kegiatan direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan. Proses penyusunan RPJMD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi : (1) tahap persiapan penyusunan, (2) tahap penyusunan rancangan awal, (3) tahap penyusunan rancangan, (4) tahap pelaksanaan musrenbang, (5) tahap perumusan rancangan akhir dan (6) tahap penetapan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Keberadaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029 akan menjadi pedoman kerja bagi Kepala Daerah terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).



Penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja tahun 2025-2029 telah mempertimbangkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini dibuktikan dengan mengintegrasikan hasil KLHS berupa skenario capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD, serta mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Semua ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Pencapaian sasaran pembangunan kabupaten harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi, demikian juga pencapaian sasaran pembangunan provinsi harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Tana Toraja.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor



- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 845);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor XX, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor XXX);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);



39. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 38);
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yaitu secara vertikal berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program prioritas serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah Kabupaten Tana Toraja. Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Tana Toraja.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja secara horizontal berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045, dan juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Tana Toraja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pola penataan ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, penyusunan RPJMD

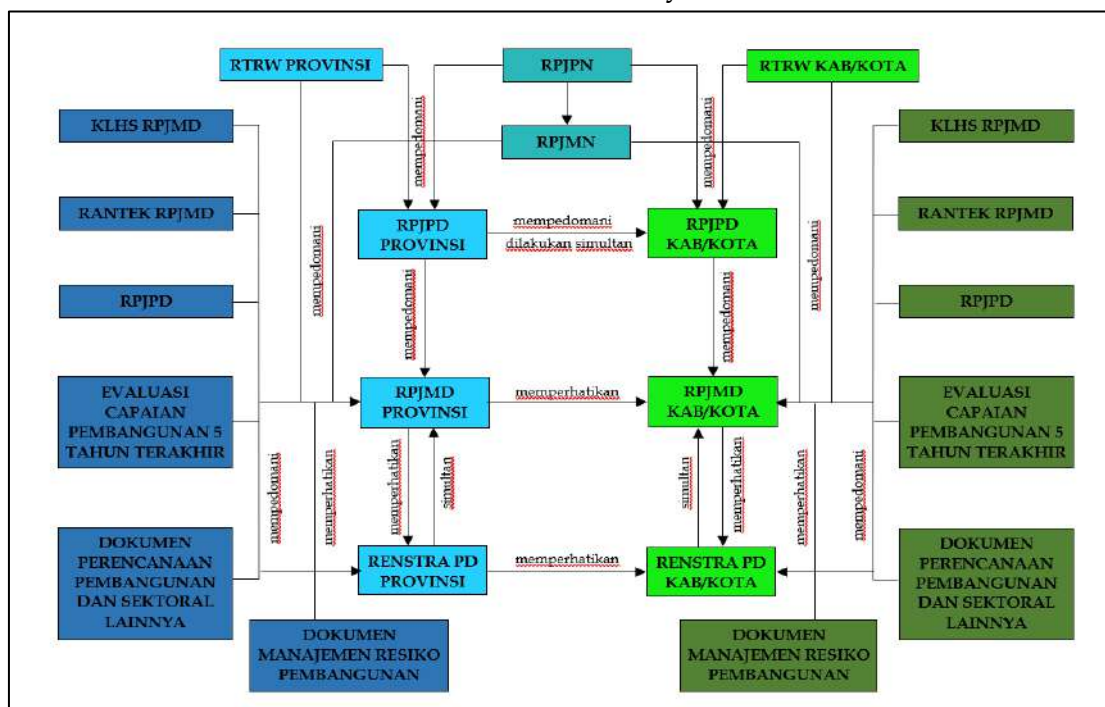
ini juga memperhatikan dokumen KLHS-RPJMD yang menekankan pada upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) serta dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun seperti Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan.

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjabarkan lebih lanjut RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode 2025-2029.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah.
5. Untuk menyediakan arah kebijakan Pembangunan daerah yang jelas dan terarah serta merumuskan program Pembangunan yang prioritas dan realistis.
6. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah.
7. Untuk memberikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.



8. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
9. Untuk menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN, memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya;
4. Maksud dan Tujuan; dan
5. Sistematika penyusunan.

Bab II GAMBARAN UMUM DAERAH, memuat :

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri dari :
 - a. Aspek Geografi dan Demografi, yang menyajikan data dan informasi indikator pembangunan meliputi Posisi dan Peran Strategis Daerah, Potensi Sumber Daya Alam, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Kondisi energi, air, dan pangan, Kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Kondisi resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, serta Kondisi Demografi.
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang menyajikan data dan informasi indikator pembangunan yang menjelaskan karakteristik Kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi, Kondisi kesehatan masyarakat, Kondisi pendidikan masyarakat, Kondisi perlindungan sosial



- masyarakat, Kondisi keagamaan dan pemajuan kebudayaan, Kondisi keluarga, kesetaraan gender dan kepemudaan.
- c. Aspek Daya Saing Daerah, yang menyajikan data dan informasi indikator pembangunan yang menjelaskan Kondisi daya saing SDM, Kondisi Iptek dan Inovasi, Kondisi produktifitas daerah, Kondisi penerapan ekonomi hijau dan biru, Kondisi pengarusutamaan transformasi digital, Kondisi integrasi ekonomi domestik dan global, Kondisi pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan, serta Kondisi stabilitas ekonomi makro daerah.
 - d. Aspek Pelayanan Umum, yang menyajikan data dan informasi indikator pembangunan yang menjelaskan kondisi tatakelola pemerintahan, kondisi pembangunan hukum dan keamanan serta demokrasi, serta capaian kinerja setiap urusan pemerintahan daerah kewenangan kabupaten.
 - e. Aspek Pembangunan Lainnya, termasuk Standar Pelayanan Minimal, SDG's, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN di Kabupaten Tana Toraja serta BUMD.
2. Gambaran Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu;
 - b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu;
 - c. Kerangka Pendanaan;
 - d. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya.
 3. Permasalahan dan Isu Strategis, terdiri dari :
 - a. Permasalahan Pembangunan Daerah, yang dirumuskan dari kondisi umum daerah pada Bab II dan memperhatikan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.
 - b. Isu Strategis Daerah, yang dirumuskan dari permasalahan utama, potensi, isu strategis global, nasional, dan regional serta isu strategis KLHS yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah baik langsung maupun tidak langsung.



Bab III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,
memuat :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
2. Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.
3. Arah Pembangunan Kewilayahan

**Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,** memuat :

1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah serta Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - a. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
 - b. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bab V PENUTUP, memuat :

1. Kesimpulan Substansial;
2. Kaidah Pelaksanaan;
3. Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

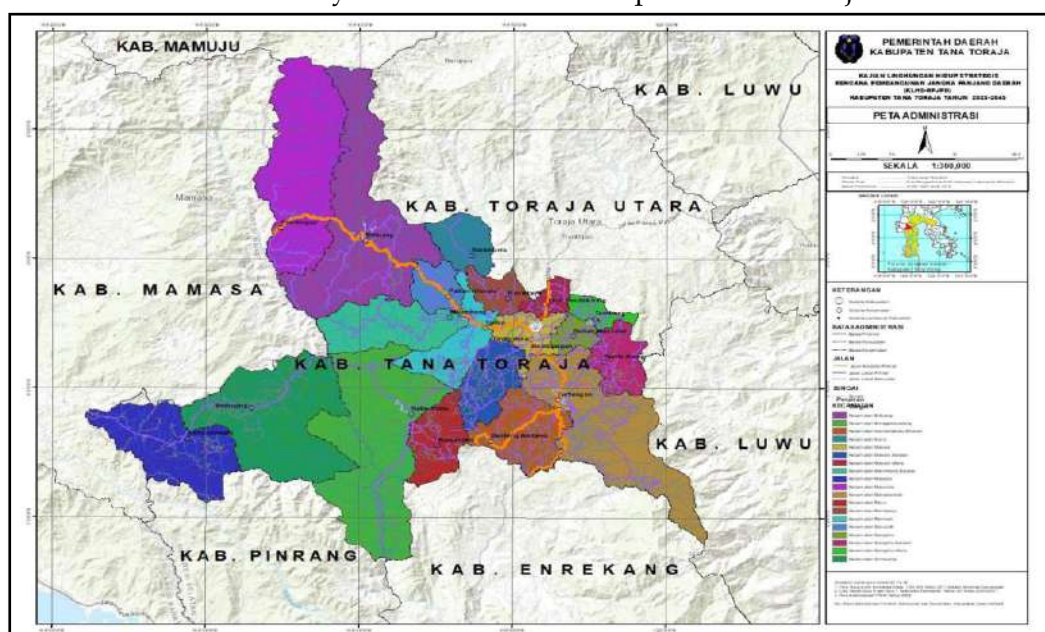
2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Makale yang secara geografis terletak pada koordinat antara 119⁰ - 120⁰ Bujur Timur dan 2⁰ - 3⁰ Lintang Selatan dengan elevasi ketinggian 125 - 3.075 mdpl yang merupakan pusat kegiatan pariwisata budaya di Sulawesi Selatan serta sebagai pintu gerbang antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Secara administratif wilayah, Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja terbagi kedalam 19 Kecamatan, dimana Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 210,37 Km² atau mencakup 10,26 persen dari total luas wilayah dan 205,69 Km² atau setara 10,06 persen sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangalla Utara dengan luas masing-masing 25,94 Km² atau setara 1,27 persen dari total luas wilayah dan 36,05 Km² atau setara 1,36 persen. Kecamatan Makale yang merupakan ibu kota kabupaten luas wilayahnya hanya 39,54 Km² atau sekitar 1,93 persen dari luas Kabupaten Tana Toraja. Dari 19 kecamatan, terbagi menjadi 159 lembang/kelurahan yang terdiri dari 112 lembang dan 47 kelurahan. Luas Kabupaten Tana Toraja ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau bahwa luas Kabupaten Tana Toraja tetap sebesar 2.044,623 km² dengan jumlah penduduk 258.934 jiwa. Berikut rincian data administrasi wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		(Km ²)	(%)	Kel.	Lemb.	
1	Bonggakaradeng	205,69	10,06	1	5	7.069
2	Simbuang	193,81	9,48	1	5	6.662
3	Rano	88,97	4,35	-	5	6.613
4	Mappak	165,16	8,08	1	5	5.850
5	Mengkendek	195,16	9,58	4	13	33.553
6	Gandangbatu Sillanan	108,07	5,29	3	9	21.252
7	Sangalla	36,05	1,76	2	3	7.484
8	Sangalla Selatan	47,55	2,33	1	4	8.699
9	Sangalla Utara	27,81	1,36	2	4	8.378
10	Makale	39,54	1,93	14	1	36.835
11	Makale Selatan	61,38	3,00	4	4	15.424
12	Makale Utara	25,94	1,27	5	-	12.358
13	Saluputti	87,09	4,26	1	8	9.444
14	Bittuang	162,42	7,95	1	14	17.552
15	Rembon	133,77	6,55	2	11	22.895
16	Masanda	134,07	6,56	-	8	7.973
17	Malimbong Balepe	210,37	10,29	1	5	9.598

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		(Km ²)	(%)	Kel.	Lemb.	
18	Rantetayo	60,04	2,94	3	3	13.275
19	Kurra	60,19	2,95	1	5	7.020
Kabupaten Tana Toraja		2.043,62	100,00	47	112	258.934

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

A. Morfologi

Kondisi morfologi suatu wilayah merupakan aspek penting dalam penentuan kesesuaian pemanfaatan lahan atau kemampuan daya dukung lahan dalam melakukan perencanaan. Kondisi morfologi Kabupaten Tana Toraja yang berada pada daerah perbukitan yang cukup tinggi merupakan limitasi dalam pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Tana Toraja. Faktor morfologi juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam terjadinya longsor pada suatu wilayah, adapun faktor-faktor penyebab lereng rawan longsor meliputi faktor internal (dari tubuh lereng sendiri) maupun faktor eksternal (dari luar lereng), antara lain kegempaan, iklim (curah hujan), vegetasi, morfologi, batuan/tanah maupun situasi setempat, tingkat kelembaban tanah (moisture), adanya rembesan, dan aktivitas geologi seperti patahan (terutama yang masih aktif), rekahan dan liniasi.

Satuan morfologi di wilayah Kabupaten Tana Toraja dirumuskan dalam satuan yaitu:

1. Satuan morfologi dataran; Bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng 0 - 2% dan 0 - 5%.
2. Satuan morfologi bergelombang dengan kemiringan lereng antara 5% - 15% dan memperlihatkan relief halus
3. Satuan morfologi perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 15% - 40% dan memperlihatkan relief sedang; dan
4. Satuan morfologi Pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar.

Adapun klasifikasi satuan morfologi yang terdapat pada kabupaten Tana Toraja diuraian pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Morfologi Wilayah Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Luas Morfologi				Total
	Pedataran	Bergelombang	Perbukitan	Pegunungan	
Bittuang	-	5995,14	9088,48	11250,69	26334,32
Bonggakaradeng	248,31	1870,67	2119,00	22604,63	26842,60
Gandangbatu Sillanan		1851,36	6137,15	420,79	8409,30
Kurra	90,56	4465,65	290,78	-	4846,99
Makale	200,31	2549,22	1317,86	-	4067,39
Makale Selatan	-	184,64	3551,50	3455,92	7192,05
Makale Utara	45,51	1926,77	444,07		2416,35
Malimbong Balepe		2323,15	272,03	7513,20	10108,38
Mappak	-	-	3389,59	11515,21	14904,79
Masanda	-	-	5819,34	17358,88	23178,21
Mengkendek	849,26	5058,72	9382,38	7125,00	22415,37
Rano	-	1486,48	627,10	3370,58	5484,16
Rantetayo	0,08	2308,88	1081,75	-	3390,72
Rembon	-	1444,65	1209,75	4535,31	7189,71
Saluputi	218,73	2312,54	790,91	1066,09	4388,26
Sangalla	366,24	603,24	822,38	-	1791,86
Sangalla Selatan	350,17	998,64	3729,05	654,28	5732,15
Sangalla Utara	439,15	1041,09	413,24	-	1893,48
Simbuang	-	-	6405,25	17370,91	23776,15
Grand Total	2808,32	36420,84	56891,62	108241,47	204362,25

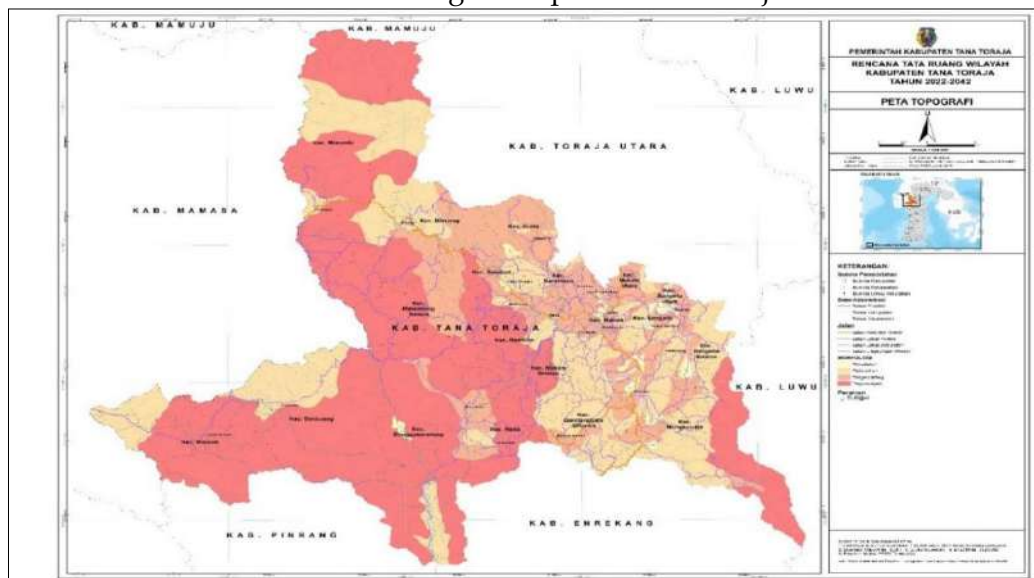
Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Satuan morfologi Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil uraian pada klasifikasi morfologi didominasi oleh jenis morfologi pegunungan dengan luas 108241,47 Ha atau setara dengan 51 persen dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja. Pada jenis morfologi pegunungan dominan berada pada 3 Kecamatan, Kecamatan Bonggakaradeng merupakan kecamatan yang jenis morfologi pegunungan terluas yaitu 84 persen dari luas wilayah administrasi kecamatan atau setara dengan 22604,62 Ha, Kecamatan Masanda dan Kecamatan Simbuang.

Pada satuan morfologi perbukitan pada kabupaten Tana Toraja sekitar 28 persen yang dominan dijumpai di Kecamatan Mengkendek. Satuan morfologi bergelombang dominan dijumpai di Kecamatan Mengkendek. Pada satuan morfologi pedataran merupakan klasifikasi morfologi wilayah terkecil dengan luas total 2808,32 Ha dominan berada pada Kecamatan Mengkendek.

Gambar 2.2

Peta Morfologi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Topografi

Kondisi topografi pada suatu wilayah merupakan aspek yang sangat penting untuk diketahui dalam merencanakan dan penataan ruang, aspek ini menunjang dalam menentukan kesesuaian lahan dan kemampuan lahan. Pada umumnya topografi digunakan dalam membahas tentang kemungkinan proses geologi muda yang mungkin saja terjadi, seperti proses erosi, gerak tanah atau bahaya longsor dan aktifitas pergerakan tanah lainnya. Demikian juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya topografi suatu wilayah. Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan kabupaten yang wilayahnya didominasi pegunungan yang menjadikan Kabupaten Tana Toraja salah satu kabupaten yang dikunjungi sebagai tempat wisata selain kunjungan tujuan wisata berbasis budaya dan religi.

Adapun rincian mengenai kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Topografi Wilayah Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Luas Elevasi Mdpl							Grand Total
	125-300	300-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	>2500	
Bittuang	-	362,78	5096,09	10830,59	4243,79	6339,36	577,27	27449,89
Bongkakaradeng	4166,14	7830,97	11725,23	4036,78	492,05	-	-	28251,18



Kecamatan	Luas Elevasi Mdpl							Grand Total
	125-300	300-500	500-1000	1000-1500	1500-2000	2000-2500	>2500	
Gandangbatu Sillanan	494,60	4582,02	3826,27	33,81	-	-	-	8936,71
Kurra	-	-	2399,44	2490,92	-	-	-	4890,36
Makale	-	312,29	3707,02	219,42	0,84	-	-	4239,57
Makale Selatan	584,07	3484,79	2283,92	15,95	-	-	-	6368,73
Makale Utara	-	-	2068,18	59,22	-	-	-	2127,40
Malimbong Balepe	-	500,58	2920,33	4625,73	1988,05	-	-	10034,69
Mappak	-	-	1257,66	10522,89	2769,98	15,93	-	14566,47
Masanda	-	69,05	2291,84	5241,57	6599,20	8727,58	98,45	23027,70
Mengkendek	-	1550,05	8795,58	7786,30	2302,43	1055,29	321,42	21811,07
Rano	889,06	2926,42	2545,46	0,14	-	-	-	6361,08
Rantetayo	-	-	3024,68	158,41	-	-	-	3183,08
Rembon	-	1,09	3334,20	2424,10	1137,80	-	-	6897,18
Saluputti	-	-	2699,98	983,35	69,91	-	-	3753,24
Sangalla	-	-	2024,82	225,59	-	-	-	2250,42
Sangalla Selatan	-	-	3981,12	1296,25	0,93	-	-	5278,30
Sangalla Utara	-	-	1752,80	190,27	129,45	0,09	-	2072,61
Simbuang	271,83	1871,98	7600,21	9345,03	3624,59	148,85	-	22862,49
Grand Total	6405,70	23492,02	73334,83	60486,34	23359,02	16287,11	997,15	204362,17

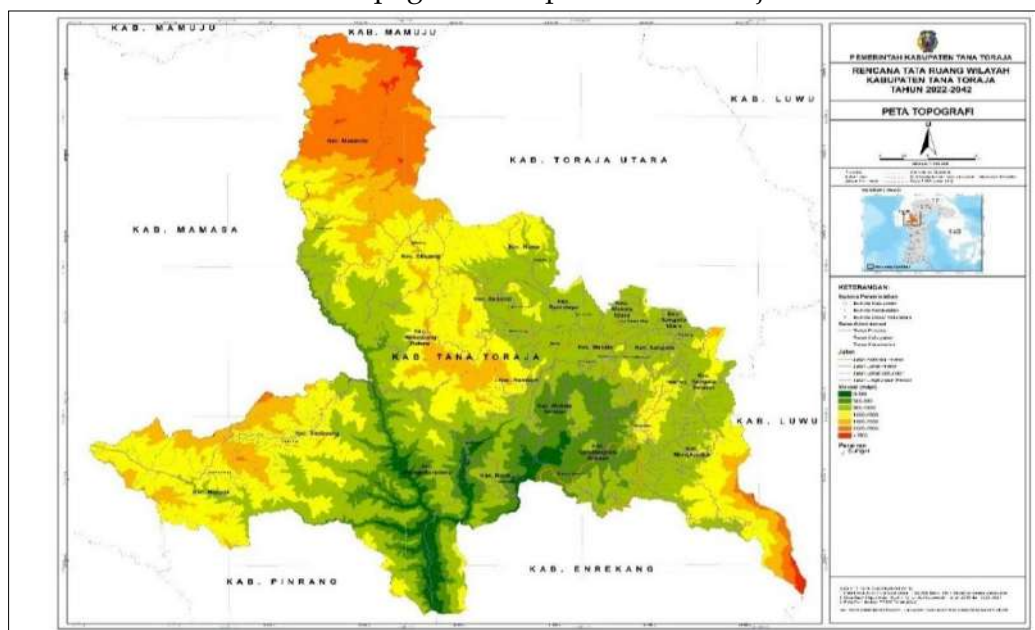
Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Berdasarkan kondisi topografinya Kabupaten Tana Toraja berada pada elevasi 125 - 3.075 mdp. Peta topografi yang dianalisis dari peta kontur dikategorikan sebagai berikut : topografi terendah yaitu pada 125 - 300 mdpl yang luasnya mencapai 6405,70 Ha yang tersebar pada 4 kecamatan yaitu pada kecamatan Bonggakaradeng, Gandangbatu sillanan dan Makale Selatan.

Topografi dominan di Kabupaten Tana Toraja pada ketinggian 500 - 1000 mdpl dengan persentase luasan mencapai 36 persen atau seluas 73.334,84 Ha yang tersebar di semua kecamatan, adapun Kecamatan Bonggakaradeng yang merupakan wilayah terluas pada ketinggian 500 – 1000 mdpl dengan luas 11725,23 Ha.

Gambar 2.3

Peta Topografi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

C. Geologi

Geologi pulau sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya mempunyai kondisi yang kompleks. Hal ini disebabkan kawasan itu merupakan tempat tumbukan aktif dari tiga lempeng (*triple junction*): Lempeng Hindia-Australian yang bergerak relatif ke arah utara, Lempeng Samudra Pasifik bergerak relatif ke barat dan Lempeng Eurasia yang relatif diam. Tumbukan ketiganya mengakibatkan (diantaranya) kawasan itu mempunyai struktur geologi dan stratigrafi yang rumit, serta komposisi batuan yang beragam. Akan tetapi, kerumitan itu justru menarik para ahli ilmu kebumihan dari dalam dan luar negeri untuk meneliti.

Geologi pada Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peta Geologi Lembar Mamuju, Lembar Palopo dan Lembar Majene Bagian Barat jenis - jenis litologi yang dapat ditemukan di Kabupaten Tana Toraja antara lain :

- **Formasi Latimojong;** Secara umum formasi ini mengalami pemalihan lemah-sedang; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer, kuarsit dan breksi terkersikkan; diterobos oleh batuan beku menengah sampai basa; di Lembar Mamuju (Ratman dan Atmawinata, 1993) juga dijumpai batu lempung mengandung fosil Globotruncana berumur Kapur Akhir, dengan lingkungan pengendapan laut dalam. Tabal formasi lebih dari 1000 m.



- **Endapan Kipas Aluvium;** Breksi, batu pasir sedang-kasar, lempung dan pasir. Satuan ini umumnya terdapat pada lereng bukit yang berbatuan gunung api dan batuan beku (andesit, basal dan granit). Komponen batuan umumnya berbentuk menyudut tanggung-menyudut, berukuran pasir-bongkah, terpilah buruk. Breksi dan batu pasirnya berlapis buruk, dengan massa dasar pasir lempungan; kurang mampat sampai lepas.
- **Tuf Barupu;** Tufa, putih hingga kelabu muda, mengandung biotit dan batu apung, bersusunan dasit; setempat dijumpai breksi, batu apung umurnya diduga Plistosen dan tebalnya sekitar 300 m.
- **Formasi Toraja;** terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah alau ungu. Formasi ini mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah Eosen Akhir. Serpih coklat kemerahan, serpih napalan kelabu, batu gamping, batu pasir kuarsa, konglomerat, batu gamping, dan setempat batubara. Tebal formasi diduga tidak kurang dan 1000 m.
- **Napal (Formasi Mandar);** Batu pasir, batu lanau dan serpih, berlapis baik, mengandung lensa lignit, mengandung foraminifera berumur Miosen Akhir, tebal mencapai 400 m, mungkin diendapkan di lingkungan laut dangkal sampai deltaik; di Lembar Mamuju formasi ini dikuasai oleh napal dan batu gamping dengan sisipan tuf, batu pasir dan konglomerat.
- **Batuan Terobosan;** umumnya batuan beku bersusunan asam sampai menengah seperti granit, granodiorit, diorit, senit, monzonit kuarsa dan riolit;
- **Formasi Sekala;** Batu pasir, konglomerat, serpih, tuf, sisipan lava andesit – basalt; mengandung foraminifera berumur Miosen Tengah – Pliosen dengan lingkungan pengendapan laut dangkal; tebalnya sekitar 500 m.
- **Batu Pasir Bersusunan Andesit;** umumnya batu pasir bersusunan andesit, batu lanau, konglomerat dan breksi.
- **Batuan Gunung api Walimbong;** Lava bersusunan basal sampai andesit, sebagian lava bantal; breksi andesit piroksin, breksi andesit trakit; mengandung feldspatoid di beberapa tempat.

- **Batuan Gunung api Talaya;** terdiri dari breksi, lava dan tuf yang bersusunan andesit-basal dan mempunyai Anggota Tuf Beropa.
- **Batuan Gunung api Lamasi;** yang terdiri dari batuan gunung api, sedimen gunung api dan batu gamping yang berumur Oligo-Miosen atau Oligosen Akhir - Miosen Awal.
- **Formasi Walanae;** Konglomerat, sedikit batu pasir glaokonit dan serpih; mengandung kokuina, moluska dan foraminifera yang menunjukkan umur Pliosen.
- **Formasi Makale;** Batu gamping terumbu, terbentuk di laut dangkal. Umurnya diduga Miosen Awal - Miosen Tengah.

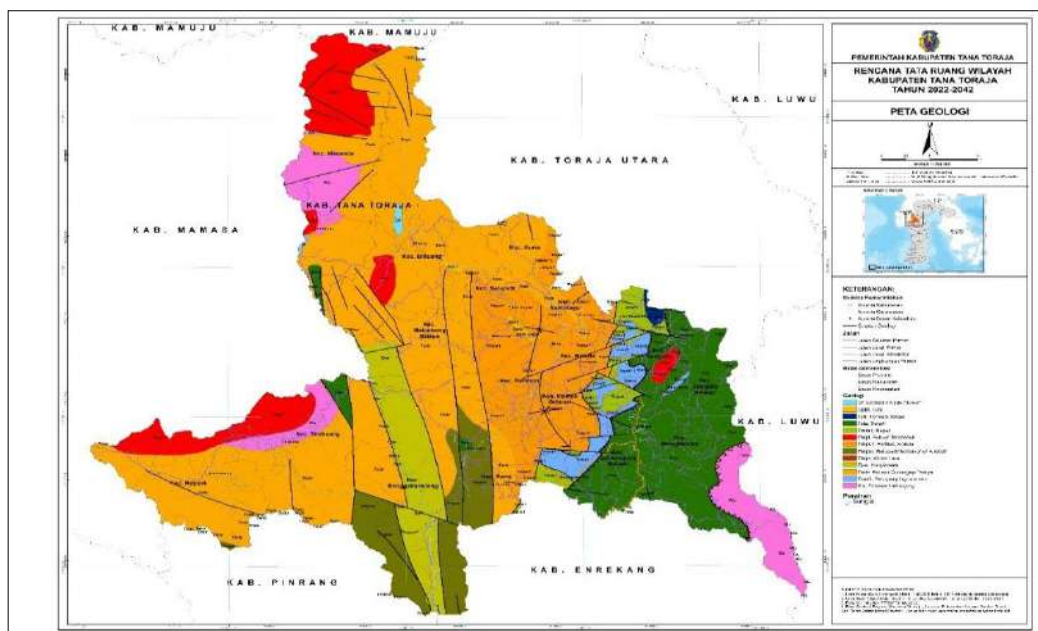
Tabel 2.4
Kondisi Geologi Kabupaten Tana Toraja

Formasi	Luas (ha)	Luas (%)
Aliran Lava	7,54	0,004
Batuan Gunungapi Talaya	85.322,93	41,751
Batuan Terobosan	15.841,54	7,752
Batugamping terumbu	4.750,61	2,325
Batupasir bersusunan Andesit	13.071,33	6,396
Endapan Kipas Aluvium	364,00	0,178
Formasi Latimojong	13.851,31	6,778
Formasi Sekala	25.594,11	12,524
Formasi Toraja	432,84	0,212
Konglomerat	12.208,07	5,974
Napal	4.539,23	2,221
Serpih	27.829,12	13,618
Tufa	549,55	0,269

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Formasi Batuan Gunungapi Talaya merupakan formasi yang terluas pada Kabupaten Tana Toraja dengan luas 85322,92 Ha atau setara 41,7 persen dari luas wilayah. Sementara kondisi Geologi dengan Formasi terkecil pada Endapan Kipas Aluvium yang luas formasinya 364 Ha atau setara dengan 0,178 persen.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

D. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Tana Toraja dibedakan menjadi air permukaan (sungai, rawa) dan air yang bersumber dari bawah permukaan (air tanah). Air permukaan pada suatu daerah sangat dipengaruhi oleh bentuk morfologi yang dominan pada suatu daerah. Demikian pula pada air bawah permukaan yang dipengaruhi oleh morfologi dan kondisi geologi pada suatu daerah.

Kabupaten Tana Toraja dengan dominasi morfologi pegunungan sangat mempengaruhi kondisi hidrologi air permukaan. Karakteristik Hidrologi Kabupaten Tana Toraja dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan secara gravitasi yang dimana jenis hidrologi ini mencakup 81 persen dari wilayah Kabupaten Tana Toraja, jenis hidrologi mata air dengan memanfaatkan aliran Sungai bawah tanah 16 persen dan jenis hidrologi pemboran dengan mesin bor jenis rotari merupakan kondisi hidrologi yang terkecil, pada jenis hidrologi ini hanya terdapat pada satu kecamatan yaitu pada Kecamatan Mengkendek dengan luas 1523,39 Ha atau setara 1 persen dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja. Kondisi hidrologi detail pada Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Kondisi Hidrologi Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Air permukaan dan mata air dengan sistim perpipaan secara gravitasi	Mata air dengan memanfaatkan aliran sungai bawah tanah.	Pemboran dengan mesin bor jenis rotari	Grand Total
Bittuang	27449,89	-	-	27449,89
Bongkaradeng	21644,52	6606,66	-	28251,18
Gandangbatu Sillanan	5473,41	3463,30	-	8936,71
Kurra	316,23	4574,14	-	4890,36
Makale	2842,94	1396,63	-	4239,57
Makale Selatan	187,22	6181,51	-	6368,73
Makale Utara	2127,40	-	-	2127,40
Malimbong Balepe	9800,88	233,81	-	10034,69
Mappak	14566,47	-	-	14566,47
Masanda	23027,70	-	-	23027,70
Mengkendek	20015,01	272,67	1523,39	21811,07
Rano	3390,62	2970,46	-	6361,08
Rantetayo	302,55	2880,54	-	3183,08
Rembon	3402,39	3494,79	-	6897,18
Saluputi	3645,80	107,44	-	3753,24
Sangalla	2250,42	-	-	2250,42
Sangalla Selatan	5278,30	-	-	5278,30
Sangalla Utara	2072,61	-	-	2072,61
Simbuang	22494,35	368,14	-	22862,49
Grand Total	170288,70	32550,08	1523,39	204362,17

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Klasifikasi kondisi hidrologi yang dominan pada kabupaten Tana Toraja yaitu jenis air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan secara gravitasi yang terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Tana Toraja.

Kabupaten Tana Toraja terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Paremang. DAS Saddang merupakan daerah aliran sungai yang melintasi provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Daerah Airan Sungai Saddang mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Peta Daerah Aliran Sungai. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang mencapai 98 persen dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja yang terdapat di semua kecamatan. Debit air secara umum untuk Daerah Aliran



Sungai Saddang mencapai 244,23 m³/dt. Untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Paremang dengan luas DAS 3705 Ha tersebar di dua kecamatan yaitu Pada Kecamatan Mengkendek dengan luas 1459 Ha dan pada kecamatan Sangalla Selatan dengan luas 2246 Ha.

Tabel 2.6
Kondisi DAS Kabupaten Tana Toraja

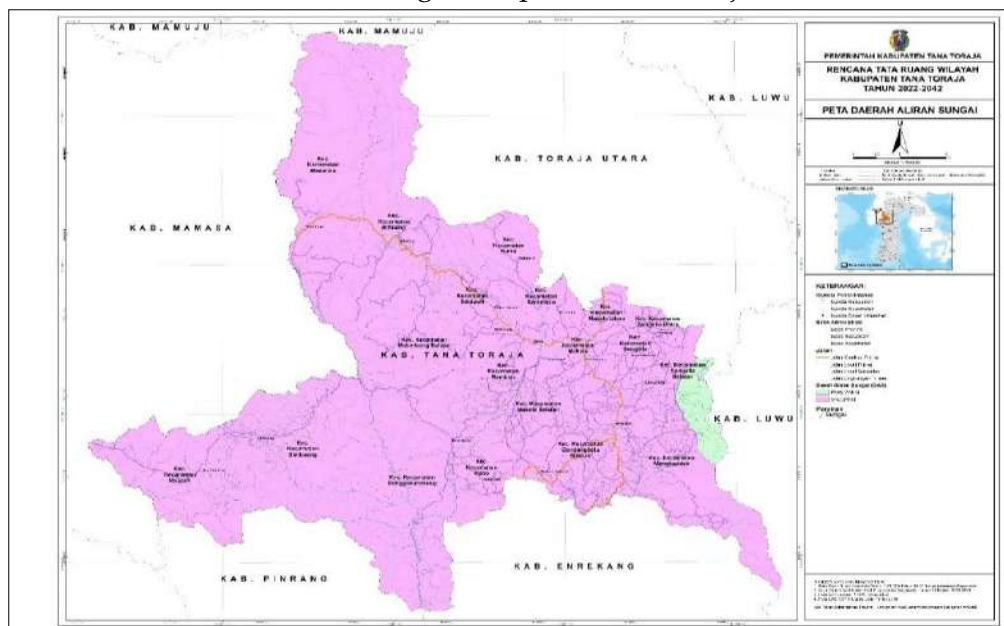
Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (km ²)		Grand Total (km ²)
	Paremang	Saddang	
Bittuang	-	26334	26334
Bonggakaradeng	-	26843	26843
Gandangbatu Sillanan	-	8409	8409
Kurra	-	4847	4847
Makale	-	4067	4067
Makale Selatan	-	7192	7192
Makale Utara	-	2416	2416
Malimbong Balepe	-	10108	10108
Mappak	-	14905	14905
Masanda	-	23178	23178
Mengkendek	1459	20956	22415
Rano	-	5484	5484
Rantetayo	-	3391	3391
Rembon	-	7190	7190
Saluputi	-	4388	4388
Sangalla	-	1792	1792
Sangalla Selatan	2246	3486	5732
Sangalla Utara	-	1893	1893
Simbuang	-	23776	23776
Grand Total	3705	200657	204362

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Pada DAS Saddang di Kabupaten Tana Toraja terdapat pula Embung Lemo Menduruk sebagai penyediaan air baku dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan pembangunan tampungan air dengan kapasitas tampungan 28.811 m³.

Gambar 2.5

Peta Hidrologi Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

E. Klimatologi

Dalam aspek klimatologi, unsur iklim yang utama adalah curah hujan, temperatur, kecepatan angin dan kelembapan udara. Wilayah Kabupaten Tana Toraja pada umumnya sama dengan wilayah Indonesia lainnya dengan iklim Tropis dan mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Aspek klimatologi sering dipergunakan sebagai data yang mendukung pernyataan kesesuaian lahan dan lokasi bagi pengembangan fungsi sebuah kawasan, terutama untuk pengembangan perancangan dan perencanaan kawasan perkotaan.

1. Curah Hujan

Kondisi curah hujan dalam setahun di Kabupaten Tana Toraja menurut masing – masing kecamatan tertinggi pada kisaran >2500 s/d 3000 mm/tahun seluas 56,70 persen dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja, Sedangkan kondisi terendah pada curah hujan besaran 3500 s/d 4000 mm/tahun seluas 0,15 persen dari luas wilayah. Adapun rincian curah hujan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

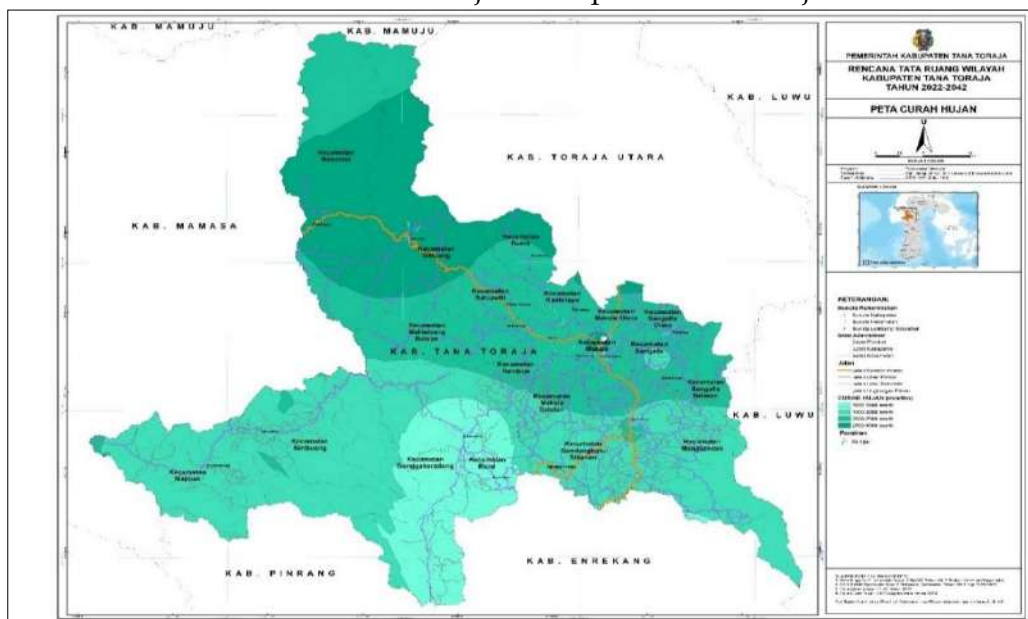
Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tana Toraja

No.	Curah Hujan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	1000-1500 mm	1003,25	0,83
2.	1500-2000 mm	64.72,02	5,38
3.	2000-2500 mm	18.134,06	15,06
4.	2500-3000 mm	68.261,93	56,70
5.	3000-3500 mm	26.336,98	21,88
6.	3500-4000 mm	178,25	0,15
Grand Total		120.386,49	100

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Gambar 2.6

Peta Curah Hujan Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

2. Suhu dan Kelembaban

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tana Toraja, Toraja dalam Angka 2025, rata-rata suhu tahunan pada Kabupaten Tana Toraja yaitu 23.01 °C. Dimana Suhu terendah pada Kabupaten Tana Toraja terjadi pada bulan September yaitu 41.20 °C sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 63.80 mm/tahun.

Tabel 2.8

Kondisi Suhu (°C) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024

Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	17.20	23.44	31.80
Februari	17.50	23.57	31.40
Maret	17.40	23.73	31.60
April	19.00	23.40	30.50
Mei	18.30	23.40	31.00
Juni	14.90	22.76	30.00
Juli	14.70	22.25	29.80
Agustus	15.10	21.95	30.00
September	14.20	22.72	32.50
Oktober	16.80	23.05	30.40
November	18.10	23.21	29.60
Desember	18.90	22.70	29.80
Rata - rata	16.84	23.01	30.70

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, Toraja Dalam Angka Tahun 2025

Kondisi morfologi yang didominasi oleh jenis morfologi pegunungan pada Kabupaten Tana Toraja juga selaras dengan tingginya tingkat kelembaban udara. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat kelembaban terendah pada kabupaten Tana Toraja yaitu 48,00 persen yang terjadi pada bulan Oktober. Adapun rata-rata kelembaban setiap bulannya diantara 88,82 persen.

Tabel 2.9

Kondisi Kelembababn Udara (%) Kabupaten Tana Toraja

Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	61.00	90.15	100.00
Februari	62.00	90.54	100.00
Maret	29.00	90.27	100.00
April	68.00	92.73	100.00
Mei	69.00	71.73	100.00
Juni	65.00	91.03	100.00
Juli	72.00	92.34	100.00
Agustus	85.75	90.58	94.76
September	82.50	88.36	92.25
Oktober	80.25	88.40	95.50
November	85.50	90.57	93.50
Desember	78.25	89.22	96.25
Rata - rata			

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, Toraja Dalam Angka Tahun 2024

3. Kecepatan Angin dan Tekanan Udara

Kecepatan angin adalah kecepatan udara yang bergerak secara horizontal yang dipengaruhi oleh gradien barometris letak tempat, tinggi tempat, dan keadaan topografi suatu tempat. Kecepatan Angin pada Kabupaten Tana Toraja rata-rata perbulan mencapai 1,75 knot, dimana kecepatan angin maksimum terjadi pada bulan Juli dan Oktober dengan kecepatan angin 8.75 knot. Secara terperinci kecepatan angin perbulan pada Kabupaten Tana Toraja di uraikan pada tabel di berikut ini :

Tabel 2.10
Kecepatan Angin (knot) Kabupaten Tana Toraja

Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	0,00	1.36	8.70
Februari	0,00	1.41	7.70
Maret	0,00	1.31	8.70
April	0,00	1.10	6.70
Mei	0,00	1.52	7.70
Juni	0,00	1.67	8.20
Juli	0,00	1.40	8.75
Agustus	0,00	1.89	8.23
September	0,00	2.20	7.72
Oktober	0,00	2.47	8.75
November	0,00	1.94	7.20
Desember	0,00	2.84	7.20
Rata - rata	0,00	1.75	7.96

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, Toraja Dalam Angka Tahun 2025

Sementara pada Tekanan udara yang terjadi pada kabupaten Tana Toraja berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tekanan udara minimum terjadi pada bulan Desember yaitu 908,00 mbar, sedangkan tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan April dengan angka 1.011,60 mbar.

Tabel 2.11
Tekanan Udara (mbar) Kabupaten Tana Toraja

Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	909,70	914,69	919,40
Februari	910,90	915,72	925,70
Maret	910,10	915,01	918,80
April	910,30	914,20	1011,60
Mei	910,70	914,54	917,50
Juni	911,40	915,54	918,60

Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Juli	911,50	916,21	1010,00
Agustus	915,20	917,07	918,80
September	914,00	916,43	918,70
Oktober	911,00	912,04	913,70
November	908,10	910,93	913,30
Desember	908,00	910,09	913,20
Rata - rata	910,91	914,37	933,28

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, Toraja Dalam Angka Tahun 2025

F. Jenis Tanah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang berperan penting dalam Pembangunan dan perencanaan suatu daerah. Penurunan kapasitas tanah tersebut diwujudkan dengan meningkatnya laju erosi, yang seharusnya menunjukkan kemampuan untuk mengurangi fungsi lingkungan. Dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan, serta mencegah terjadinya degradasi tanah, maka perlu dipahami persebaran jenis tanah, karena dapat dijadikan acuan untuk pengembangan suatu wilayah tertentu.

Jenis tanah di Kabupaten Tana Toraja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yang tersebar di kecamatan yaitu :

- 1) Aluvial Hidromorf, jenis tanah ini mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman.
- 2) Podsolik Merah Kekuningan merupakan tanah yang telah mengalami pelapukan tingkat lanjut dan terdapat timbunan liat di horison bawah. Adanya endapan liat ini menyebabkan tanah Ultisol tidak mendapatkan daya resap air yang cukup dan hal ini sebagai tanah dengan kemasaman kurang dari 5 sehingga dianggap tanah yang kurang subur. Ultisol juga memerlukan upaya pengelolaan untuk dijadikan sebagai tanah pertanian yang disebabkan kandungan Aluminium yang tinggi akibat kemasaman tanah.
- 3) Podsolik Coklat Kekuningan merupakan tanah muda yang proses pembentukannya tergolong cepat dari hasil pelapukan bahan induk.[1] Tanah Inceptisol mempunyai sifat fisik yang terbatas pada pengembangan sistem akar dan perakaran tanah,

memiliki kedalaman efektif yang tipis untuk pengolahan tanah, memiliki berat isi yang lebih besar akibat dari sebagian pori diisi oleh partikel debu.

- 4) Mediteran Coklat Kelabuan merupakan tanah kapur atau mediterania ini merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Ciri-ciri tanah kapur adalah berasal dari bebatuan kapur, miskin unsur hara, dan kurang subur.
- 5) Kompleks Rensina dan Litosol merupakan kompleks tanah organik diatas tanah kapur yang memiliki kadar lempung sebagai hasil pelapukan baruan beku. Ciri - Tanah ini mengandung kadar lempung tinggi, tekstur halus dan memiliki kemampuan mengikat air yang tinggi dengan kedalaman dangkal.
- 6) Kompleks Rensina dan Regosol merupakan tanah yang merupakan hasil dari peristiwa vulkanisme. Maka dari itu tanah regosol ini merupakan hasil dari erupsi gunung berapi. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergunung, mempunyai sifat subur, mempunyai tekstur tanah yang kasar, butiran- butiran kasar, mempunyai sifat peka terhadap erosi tanah, berwarna keabuan, kaya unsur hara, cenderung gembur, mempunyai kemampuan menyerap air yang tinggi, serta mudah terkena erosi.

Berdasarkan Klasifikasi Jenis Tanah Pada Kabupaten Tana Toraja disajikan terperinci perkecamatan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Jenis Tanah Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Aluvial Hidromorf	Brown Forest Soil	Kompleks Rensina dan Litosol	Kompleks Rensina dan Regosol	Mediteran Coklat Kelabuan	Podsolik Coklat Kekuningan	Podsolik Merah Kekuningan	Podsolik Violet	Grand Total
Bittuang	-	-	-	-	9353,29	-	14113,16	2867,87	26334,32
Bongkaradeng	-	-	1030,03	-	22923,12	-	2889,46		26842,60
Gandangbatu Sillanan	1014,61	-	-	433,98	79,56	-	2405,83	4475,33	8409,30
Kurra	-	-	-	-	-	-	-	4846,99	4846,99
Makale	-	-	-	905,82	-	-	-	3161,57	4067,39
Makale Selatan	-	-	-	259,62	38,61	-	3268,89	3624,93	7192,05
Makale Utara	-	-	-	1,08	-	-	-	2415,27	2416,35
Malimbong Balepe	-	-	-	-	8616,21	-	1492,17	-	10108,38
Mappak	189,63	-	-	-	54,06	14661,11	-	-	14904,79
Masanda	-	-	-	-	5649,16	4680,47	12848,58	-	23178,21

Kecamatan	Aluvial Hidromorf	Brown Forest Soil	Komplex Rensina dan Litosol	Komplex Rensina dan Regosol	Mediteran Coklat Kelabuan	Podsolik Coklat Kekuningan	Podsolik Merah Kekuningan	Podsolik Violet	Grand Total
Mengkendek	14526,73	-	-	2371,29	1208,25	-	-	4309,10	22415,37
Rano	-	-	-	-	4665,82	-	818,35	-	5484,16
Rantetayo	-	-	-	-	-	-	-	3390,72	3390,72
Rembon	-	1,65	-	-	4895,31	-	838,82	1453,93	7189,71
Saluputi	-	-	-	-	1171,41	-	1347,46	1869,39	4388,26
Sangalla	-	-	-	1089,93	-	-	-	701,93	1791,86
Sangalla Selatan	4806,09	-	-	-	-	-	-	926,06	5732,15
Sangalla Utara	156,97	-	-	14,75	208,34	-	-	1513,41	1893,48
Simbuang	-	-	-	-	19871,24	3904,91	-	-	23776,15
Grand Total	20694,02	1,65	1030,03	5076,48	78734,37	23246,49	40022,71	35556,49	204362,25

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Gambar 2.7
Peta Jenis Tanah Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil analisa di dominasi oleh lahan hutan dengan luas 71971,69 Ha atau 35,22 persen dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja, dimana kecamatan yang memiliki wilayah lahan hutan terluas yaitu pada Kecamatan Masanda yang meliputi hampir 3/4 dari luas wilayah administrasinya. Pada klasifikasi penggunaan lahan lainnya yaitu kebun campuran dengan luas area mencapai 61317,39 Ha dengan persentase luasan 30 persen dari luas



wilayah Kabupaten Tana Toraja, lahan kebun campuran ini merupakan penggunaan lahan terluas setelah penggunaan lahan Hutan.

Pada wilayah Kabupaten Tana Toraja terdapat pula padang rumput yang tersebar di beberapa Kecamatan dengan luasnya areanya 19144,59 Ha dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan wilayah padang rumput terluas dengan luasa 8703,99 Ha atau sekitar 45 persen dari luas lahan padang rumput yang ada pada Kabupaten Tana Toraja dan pada kecamatan Bonggakaradeng pula telah dijadikan salah satu daerah tujuan wisata dengan objek wisata panorama padang rumput.

Pada penggunaan lahan non pertanian dan perkebunan yaitu lahan permukiman perkotaan yang luasnya mencapai 6005,82 Ha dan lahan permukiman perkotaan 1140,06 Ha, secara terperinci penggunaan lahan secara terperinci di uraikan pada tabel berikut :



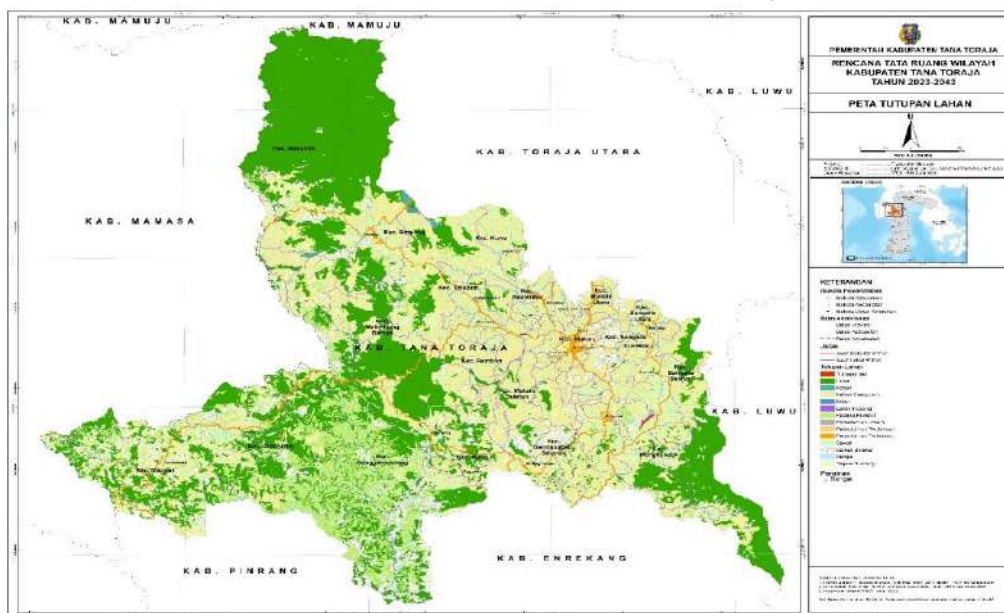
Tabel 2.13
Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Transportasi	Hutan	Kebun	Kebun Campuran	Kolam	Lahan Kosong	Padang Rumput	Pemukaman umum	Permukiman Perdesaan	Permukiman Perkotaan	Sawah	Semak Belukar	Sungai	Tegalan Ladang	Grand Total
Bittuang	0,00	13.537,68	311,55	7.316,28	10,02	-	8.703,99	0,27	317,47	40,04	1.146,37	1.380,78	59,94	1.368,04	26.334,32
Bonggakaradeng	0,00	9.979,70	-	2.128,92	-	-	8,08	0,05	117,33	7,55	313,72	4.147,83	261,70	1.181,81	26.842,60
Gandangbatu Sillanan	0,00	757,02	-	4.533,06	-	0,77	4,17	1,64	610,45	16,90	768,43	1.025,32	-	687,64	8.409,30
Kurra	0,00	357,11	3,81	2.708,21	-	-	-	-	196,21	4,71	1.074,15	72,46	0,45	425,71	4.846,99
Makale	1,21	-	-	1.886,70	1,71	-	24,22	1,36	479,76	504,13	654,85	334,35	34,17	169,15	4.067,39
Makale Selatan	0,00	902,66	-	4081,03	0,27	-	8.703,99	0,21	448,27	15,49	279,69	602,35	41,14	796,70	7.192,05
Makale Utara	0,00	-	-	1.140,69	0,04	-	-	0,10	302,37	166,68	511,84	184,50	32,38	77,74	2.416,35
Malimbong Balepe	0,00	3.426,47	-	3980,68	2,08	-	470,24	1,19	189,45	9,87	593,27	673,87	15,29	745,97	10.108,38
Mappak	0,00	5.203,20	-	3.985,98	1,23	0,23	1.250,50	-	97,90	10,56	385,44	2.366,96	29,56	1.573,25	14.904,79
Masanda	0,00	16.584,06	96,56	3.821,98	-	-	342,19	-	120,26	10,18	317,08	999,36	17,26	869,25	23.178,21
Mengkendek	34,56	7.992,76	-	7.468,50	4,13	38,43	417,42	2,42	953,32	100,29	2.530,04	1.647,64	-	1.225,86	22.415,37
Rano	0,00	1.963,66	-	1.759,05	2,72	-	252,88	-	120,73	9,86	393,67	522,23	33,75	425,62	5.484,16
Rantetayo	18,34	30,87	-	1.539,52	-	-	-	0,86	406,02	61,59	1.118,80	3,49	34,93	175,70	3.390,72
Rembon	0,00	1.302,19	-	3.960,82	0,38	4,01	0,01	-	570,77	18,94	935,93	302,55	67,72	296,38	7.189,71
Saluputi	0,00	564,40	-	2.352,44	0,97	-	96,44	2,05	246,48	46,64	902,79	4,88	28,92	142,24	4.388,26
Sangalla	0,00	-	-	784,60	1,34	-	-	0,37	186,64	49,58	430,04	307,98	-	31,30	1.791,86
Sangalla Selatan	0,00	1.261,55	-	2.728,78	0,15	3,94	13,90	2,05	283,20	6,23	1.003,28	97,53	-	331,23	5.732,15
Sangalla Utara	0,00	-	-	830,02	-	-	-	-	253,38	55,86	606,82	128,99	-	18,41	1.893,48
Simbuang	0,00	8.378,05	-	4.310,15	4,89	6,60	6.714,67	0,26	105,78	4,97	520,42	2.602,17	111,44	1.016,76	23.776,15
Grand Total	54,71	71.971,69	411,94	61.317,39	29,93	53,99	19.144,59	12,84	6.005,82	1.140,06	14.486,61	17.405,25	768,65	11.558,76	204.362,25

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Gambar 2.8

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.1.2. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Pengembangan wilayah Kabupaten Tana Toraja diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja guna mewujudkan ruang Tana Toraja yang produktif, kompetitif dan berkelanjutan, yang diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten Tana Toraja.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan Pusat Pelayanan Lingkungan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan



pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Secara fungsional rencana sistem perkotaan yang terkait dengan pola pembagian pusat kegiatan di Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan yang dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan- kegiatan yang akan dikembangkan ke depan pada kawasan pusat kegiatan skala kecamatan.

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti 1) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional dan regional, 2) kondisi eksisting sistem perkotaan wilayah Kabupaten Tana Toraja yang ada saat ini, 3) sistem jaringan prasarana wilayah yang ada yang melayani pergerakan antar intra dan inter wilayah, dan 4) interaksi fungsional antar pusat-pusat kegiatan dengan daerah pelayanannya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka rencana struktur ruang sistem pusat permukiman wilayah Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal pada Kabupaten Tana Toraja ditetapkan di Kawasan Perkotaan Makale yang secara administrasi meliputi seluruh wilayah Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Utara. Kawasan Perkotaan Makale akan dikembangkan fasilitas dan kegiatan perkantoran kabupaten dan regional, kecuali perkantoran skala kawasan dan lingkungan akan terdistribusi secara proporsional di pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan. fasilitas dan kegiatan pariwisata nasional dan fasilitas pendukungnya termasuk fasilitas pendidikan, komersial/perdagangan dan jasa secara proporsional di seluruh wilayah perkotaan Makale.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Berdasarkan kriteria penetapan PPK serta potensi masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Tana Toraja, maka pusat-pusat kegiatan yang diarahkan sebagai PPK di wilayah Kabupaten Tana Toraja adalah :

- 1) Pusat Pelayanan Kawasan Bittuang di Kecamatan Bittuang.
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan Ratte Buttu di Kecamatan Bonggakaradeng.
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan Benteng Ambeso di Kecamatan Gandangbatu Sillanan.
- 4) Pusat Pelayanan Kawasan Rattekurra di Kecamatan Kurra.
- 5) Pusat Pelayanan Kawasan Tiromanda di Kecamatan Makale Selatan.
- 6) Pusat Pelayanan Kawasan Lion Tondok Iring di Kecamatan Makale Utara.
- 7) Pusat Pelayanan Kawasan Malimbong di Kecamatan Malimbong Balepe.
- 8) Pusat Pelayanan Kawasan Kondodewata di Kecamatan Mappak.
- 9) Pusat Pelayanan Kawasan Pongdingao' di Kecamatan Masanda.
- 10) Pusat Pelayanan Kawasan Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek.
- 11) Pusat Pelayanan Kawasan Rumandan di Kecamatan Rano.
- 12) Pusat Pelayanan Kawasan Rantetayo di Kecamatan Rantetayo.
- 13) Pusat Pelayanan Kawasan Talion di Kecamatan Rembon.
- 14) Pusat Pelayanan Kawasan Pattan Ulusalu' di Kecamatan Saluputi.
- 15) Pusat Pelayanan Kawasan Bulian Massabu di Kecamatan Sangalla.
- 16) Pusat Pelayanan Kawasan Rante Alang di Kecamatan Sangalla Selatan.
- 17) Pusat Pelayanan Kawasan Tombang di Kecamatan Sangalla Utara.
- 18) Pusat Pelayanan Kawasan Simbuang di Kecamatan Simbuang.

Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Tana Toraja merekomendasikan PPK Bittuang di Kecamatan Bittuang, PPK Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek, PPK Rantetayo di Kecamatan Rantetayo, dan PPK Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng untuk kemudian kelimanya

didorong pengembangannya sebagai kota Satelit untuk menunjang dan menarik pusat kegiatan atau pertumbuhan di perkotaan Makale disamping kota satelit dalam kota.

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Berdasarkan kriteria dan potensinya, terdapat beberapa pusat permukiman yang diarahkan sebagai PPL di Kabupaten Tana Toraja, yaitu :

- 1) Pusat Pelayanan Lingkungan Bau di Kecamatan Bittuang.
- 2) Pusat Pelayanan Lingkungan Bau Selatan di Kecamatan Bonggakaradeng.
- 3) Pusat Pelayanan Lingkungan Bau di Kecamatan Bonggakaradeng.
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan Salubarani di Kecamatan Gendangbatu Sillanan.
- 5) Pusat Pelayanan Lingkungan Buntu Malimbong di Kecamatan Gendangbatu Sillanan.
- 6) Pusat Pusat Pelayanan Lingkungan Ratte Kurra di Kecamatan Kurra.
- 7) Pusat Pelayanan Lingkungan Randan Batu di Kecamatan Makale Selatan.
- 8) Pusat Pelayanan Lingkungan Sarira di Kecamatan Makale Utara.
- 9) Pusat Pelayanan Lingkungan Balepe di Kecamatan Malimbong Balepe.
- 10) Pusat Pelayanan Lingkungan Miallo di Kecamatan Mappak.
- 11) Pusat Pelayanan Lingkungan Butang di Kecamatan Mappak.
- 12) Pusat Pelayanan Lingkungan Paliorong di Kecamatan Masanda.
- 13) Pusat Pelayanan Lingkungan Maliba di Kecamatan Mengkendek.
- 14) Pusat Pelayanan Lingkungan Rante Dada di Kecamatan Mengkendek.
- 15) Pusat Pelayanan Lingkungan Tengan di Kecamatan Mengkendek.
- 16) Pusat Pelayanan Lingkungan Rano di Kecamatan Rano.
- 17) Pusat Pelayanan Lingkungan Tapparan di Kecamatan Rantetayo.
- 18) Pusat Pelayanan Lingkungan Batusura di Kecamatan Rembon.
- 19) Pusat Pelayanan Lingkungan Bebo' di Kecamatan Sangalla Utara.
- 20) Pusat Pelayanan Lingkungan Pongbembe di Kecamatan Simbuang.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tana Toraja merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budi daya secara asri dan lestari. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka rencana pola ruang Kabupaten Tana Toraja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Luas Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja

No.	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Badan Air	480.46	0.24
2.	Kawasan Cagar Budaya	6.66	0.00
3.	Kawasan Hortikultura	6,277.77	3.07
4.	Kawasan Hutan Lindung	83,539.12	40.88
5.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	19,638.85	9.61
6.	Kawasan Pariwisata	116.33	0.06
7.	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	9.24	0.00
8.	Kawasan Perkebunan	51,483.94	25.19
9.	Kawasan Perkebunan Rakyat	9,517.96	4.66
10.	Kawasan Perlindungan Setempat	873.45	0.43
11.	Kawasan Permukiman Perdesaan	6,422.95	3.14
12.	Kawasan Permukiman Perkotaan	2,489.19	1.22
13.	Kawasan Pertambangan Mineral Logam	1,265.86	0.62
14.	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	33.34	0.02
15.	Kawasan Peternakan	2,408.36	1.18
16.	Kawasan Tanaman Pangan	15,515.26	7.59
17.	Kawasan Transportasi	205.40	0.10
18.	Taman Hutan Raya	4,007.44	1.96
19.	Taman Nasional	70.68	0.03
	Total	204,362.25	100.00

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Kawasan peruntukan budi daya di Kabupaten Tana Toraja yang diarahkan berdasarkan potensinya, terdiri atas :

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Tana Toraja adalah kawasan hutan produksi Terbatas di Kabupaten Tana Toraja adalah merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 19.638,85 ha. yang terdistribusi dalam 11 (Sebelas) kecamatan. Kawasan hutan produksi dikelola dengan konsep hutan desa serta dilakukan tebang pilih dan peremajaan secara berkelanjutan untuk menghindari perubahan tutupan vegetasi yang signifikan. Mengimplementasikan konsep dan kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari. Adapun distribusi dan luasan masing-masing kecamatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Persebaran Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Kecamatan Bittuang	5.919,32	30,18
2.	Kecamatan Bonggakaradeng	2.217,16	11,30
3.	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	2.404,87	12,26
4.	Kecamatan Makale Selatan	1.464,72	7,47
5.	Kecamatan Malimbong Balepe	674,99	3,44
6.	Kecamatan Mappak	2.174,46	11,09
7.	Kecamatan Masanda	1.179,36	6,01
8.	Kecamatan Mengkendek	2.685,42	13,69
9.	Kecamatan Rano	336,97	1,72
10.	Kecamatan Saluputi	558,24	2,85
11.	Kecamatan Simbuang	23,34	0,12
Total		19.638,85	100

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

2. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat di Kabupaten Tana Toraja diarahkan seluas 13.483,35 ha yang terdistribusi dalam 19 (Sembilan Belas) kecamatan. Berdasarkan hasil KLHS Revisi RTRW Kabupaten Tana Toraja, direkomendasikan konsep pengelolaan Kawasan hutan rakyat yang berkelanjutan dengan menjaga tutupan vegetasi pada lahan tersebut dengan konsep Agroforestry. Daerah yang rawan longsor tinggi pada kawasan hutan rakyat, harus tetap dijaga penutupan vegetasi untuk tetap berupa hutan tanaman dan ditetapkan sebagai kawasan

perlindungan dari rawan bencana. Melakukan rehabilitasi lahan atau revegetasi kembali lahan terbuka menjadi hutan tanaman. Membuat daerah tangkapan air atau embung pada kawasan hutan rakyat khususnya pada daerah yang memiliki jasa ekosistem tata air sangat rendah. Kawasan hutan rakyat yang memiliki potensi penyedia KEHATI yang tinggi harus dijaga penutupan vegetasi untuk tetap berupa hutan tanaman.

Adapun distribusi dan luasan masing-masing kecamatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Persebaran Kawasan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Kecamatan Bittuang	473,08	3.51
2.	Kecamatan Bonggakaradeng	1.897,69	14.07
3.	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	244,69	1.81
4.	Kecamatan Kurra	58,09	0.43
5.	Kecamatan Makale	320,03	2.37
6.	Kecamatan Makale Selatan	1.663,05	12.33
7.	Kecamatan Makale Utara	167,54	1.24
8.	Kecamatan Malimbong Balepe	64,29	0.48
9.	Kecamatan Mappak	1.505,47	11.17
10.	Kecamatan Masanda	1.122,59	8.33
11.	Kecamatan Mengkendek	657,60	4.88
12.	Kecamatan Rano	1.836,67	13.62
13.	Kecamatan Rantetayo	44,66	0.33
14.	Kecamatan Rembon	811,60	6.02
15.	Kecamatan Saluputi	239,56	1.78
16.	Kecamatan Sangalla	120,89	0.90
17.	Kecamatan Sangalla Selatan	152,67	1.13
18.	Kecamatan Sangalla Utara	63,98	0.47
19.	Kecamatan Simbuang	2.039,19	15.12
Total		13.483,35	100

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

3. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Tana Toraja, terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tana Toraja direncanakan seluas 15.515,26 ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan yang bervariasi sesuai dengan potensi wilayahnya. Adapun persebaran dan luasan pada masing-masing kecamatan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Persebaran Kawasan Pertanian Lahan Pangan di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Kecamatan Bittuang	1.099,47	7,09
2.	Kecamatan Bonggakaradeng	404,49	2,61
3.	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	923,00	5,95
4.	Kecamatan Kurra	1.229,07	7,92
5.	Kecamatan Makale	642,65	4,14
6.	Kecamatan Makale Selatan	431,41	2,78
7.	Kecamatan Makale Utara	544,65	3,51
8.	Kecamatan Malimbong Balepe	603,14	3,89
9.	Kecamatan Mappak	366,37	2,36
10.	Kecamatan Masanda	342,20	2,21
11.	Kecamatan Mengkendek	2.776,28	17,89
12.	Kecamatan Rano	467,49	3,01
13.	Kecamatan Rantetayo	1.164,85	7,51
14.	Kecamatan Rembon	966,82	6,23
15.	Kecamatan Saluputi	934,57	6,02
16.	Kecamatan Sangalla	445,75	2,87
17.	Kecamatan Sangalla Selatan	1.050,31	6,77
18.	Kecamatan Sangalla Utara	620,55	4,00
19.	Kecamatan Simbuang	502,16	3,24
Total		15.515,26	100,00

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Kecamatan Mengkendek merupakan Kecamatan dengan potensi Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan terluas yaitu 2.516,28 Ha, persebaran kawasan pertanian Hortikulutra seluas 856,43 Ha, luas dan persebaran kawasan perkebunan seluas 7.208,42 Ha. Untuk ketersediaan air di kecamatan

Mengkendek didukung oleh Bendung DI Bongli, Bendung DI Malillin, Bendung DI Mandalan, Bendung DI Mararin2, Bendung DI Sarombon, Bendung DI Sumarambu Ps, Bendung DI To'Kua, Bendung Kambuno, Bendung Kapa'Kapa', Bendung Kasisi', Bendung Mamara, Bendung Mararin 3, Bendung Mararin1, Bendung Maririn 4, Bendung Pong Toding, Bendung Pong Toding2, Bendung Randanan, Bendung Salumalino, Bendung Sangka Dawang, Bendung Sanglelen, Bendung Tabang, Bendung Tangkalloan, Bendung To' Lamba' dan Embung Pakala serta jaringan irigasi yaitu D.I. Aa' Batu, D.I. Bongli, D.I. Kambuno, D.I. Kapa-Kapa, D.I. Kasisi, D.I. Malillin, D.I. Mamara, D.I. Pong Toding, D.I. Randanan, D.I. Rante Dollok, D.I. Salu Paniki, D.I. Sangkadawang, D.I. Sarombon, D.I. Sipate To' Induk, D.I. Sumarambu, D.I. To'kua, D.I. To'lamba'

Dari luas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tana Toraja 15.515,26 ha diantaranya ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B), dengan luasan 13.440,60 hektar. Lebih jelasnya sebaran ruang KP2B, di perlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	935,70	6,96
2	Kecamatan Bonggakaradeng	367,69	2,74
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	805,01	5,99
4	Kecamatan Kurra	1010,15	7,52
5	Kecamatan Makale	570,24	4,24
6	Kecamatan Makale Selatan	392,89	2,92
7	Kecamatan Makale Utara	490,71	3,65
8	Kecamatan Malimbong Balepe	504,88	3,76
9	Kecamatan Mappak	247,74	1,84
10	Kecamatan Masanda	290,46	2,16
11	Kecamatan Mengkendek	2516,28	18,72
12	Kecamatan Rano	422,55	3,14
13	Kecamatan Rantetayo	1011,55	7,53
14	Kecamatan Rembon	827,06	6,15
15	Kecamatan Saluputi	756,18	5,63



No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
16	Kecamatan Sangalla	403,25	3,00
17	Kecamatan Sangalla Selatan	951,15	7,08
18	Kecamatan Sangalla Utara	548,39	4,08
19	Kecamatan Simbuang	388,74	2,89
Total		13.440,60	100

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

b. Kawasan Pertanian Holtikultura

Kawasan peruntukan pertanian holtikultura di Kabupaten Tana Toraja seluas 5.794,51 ha, yang terdistribusi di 19 kecamatan di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Adapun distribusi dan luasan pada masing-masing kecamatan sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.19

Persebaran Kawasan Pertanian Holtikultura di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	665,22	11.31
2	Kecamatan Bongkarakadeng	355,58	6.14
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	323,22	5.58
4	Kecamatan Kurra	292,39	5.05
5	Kecamatan Makale	67,98	1.17
6	Kecamatan Makale Selatan	342,45	5.91
7	Kecamatan Makale Utara	29,56	0.51
8	Kecamatan Malimbong Balepe	494,99	8.54
9	Kecamatan Mappak	529,97	9.15
10	Kecamatan Masanda	545,23	9.41
11	Kecamatan Mengkendek	856,43	14.78
12	Kecamatan Rano	145,61	2.51
13	Kecamatan Rantetayo	127,76	2.20
14	Kecamatan Rembon	132,07	2.28
15	Kecamatan Saluputi	192,19	3.32
16	Kecamatan Sangalla	22,70	0.39
17	Kecamatan Sangalla Selatan	271,53	4.69
18	Kecamatan Sangalla Utara	8,37	0.14
19	Kecamatan Simbuang	401,25	6.92
Total		5.794,51	100

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

4. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Tana Toraja seluas 48.001,60 ha, tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pengembangan kegiatan budi daya tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Tana Toraja diarahkan pada beberapa potensi perkebunan. Adapun distribusi dan luasan pada masing-masing kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Luas dan Persebaran Kawasan Perkebunan di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bittuang	4.842,76	10.09
2	Kecamatan Bonggakaradeng	1.864,94	3.89
3	Kecamatan Gandangbatu Sillanan	3.822,82	7.96
4	Kecamatan Kurra	3.025,52	6.30
5	Kecamatan Makale	1.600,28	3.33
6	Kecamatan Makale Selatan	2.729,11	5.69
7	Kecamatan Makale Utara	999,45	2.08
8	Kecamatan Malimbong Balepe	2.272,63	4.73
9	Kecamatan Mappak	2.305,35	4.80
10	Kecamatan Masanda	2.723,25	5.67
11	Kecamatan Mengkendek	7.208,42	15.02
12	Kecamatan Rano	1.250,63	2.61
13	Kecamatan Rantetayo	1.289,59	2.69
14	Kecamatan Rembon	2.887,31	6.02
15	Kecamatan Saluputi	1.981,33	4.13
16	Kecamatan Sangalla	850,60	1.77
17	Kecamatan Sangalla Selatan	2.748,5	5.73
18	Kecamatan Sangalla Utara	734,68	1.53
19	Kecamatan Simbuang	2.864,39	5.97
Total		48.001,60	100

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

5. Kawasan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tana Toraja seluas 2.407,61 Ha. Adapun distribusi dan luasan pada masing-masing kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21

Luas dan Persebaran Kawasan Peternakan di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Bonggakaradeng	594,92	24,7
2	Kecamatan Mappak	573,88	23,85
3	Kecamatan Rano	13,07	0,54
4	Kecamatan Simbuang	1.225,74	50,89
total		2.407,61	100

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

6. Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja seluas 116,33 ha, tersebar di beberapa wilayah kecamatan, Adapun persebaran pada masing-masing kecamatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22

Persebaran Objek Wisata di Kabupaten Tana Toraja

No.	Nama Usaha Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata-Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/ Lembang	Kecamatan
1.	Lemo	- Situs cagar budaya (Liang Paa') - Tau-tau - Rumah Tongkonan sasana Budaya	Kelurahan Lemo	Kecamatan Makale Utara
2.	Tilangnga	- Kolam alam untuk rekreasi tirta - Situs budaya	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara
3.	Sirope	- Liang Paa' - Tau-tau - Liang Pia (Passillirian)	Kelurahan Lion Tondok Iring	Kecamatan Makale Utara
4.	Sarapung	- Passillirian (kuburan bayi di pohon)	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
5.	Suaya	- Liang Paa' - Tau-tau - Erong - Pemandangan alam	Lembang Kaero	Kecamatan Sangalla'
6.	Tampangallo	- Gua purba - Tau-tau - Erong - Pemandangan alam	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
7.	Buntu Kalando	- Rumah adat (tongkonan) - Museum mini	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
8.	Makula	- Kolam dan sumber air panas alam - Inn (penginapan) - Restoran	Lembang Tokesan	Kecamatan Sangalla' Selatan



No.	Nama Usaha Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata-Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/ Lembang	Kecamatan
9.	Goa Sullukan	- Goa alam - Pemandangan alam	Lembang Tokesan	Kecamatan Sangalla' Selatan
10.	Desa Wisata Bebo'	- Pemukiman tradisional - Kuburan gantung Tana'tak - Benteng pertahanan purba - Mata air todolo - passillirian	Kelurahan Bebo'	Kecamatan Sangalla' Utara
11.	Desa Wisata Tumbang datu	- Pemukiman tradisional - Kuburan gantung Tana'tak - Benteng pertahanan purba	Lembang Tumbang Datu	Kecamatan Sangalla' Utara
12.	Sillanan	- Pemukiman tradisional - Pemakaman purba - Rante - Mata air todolo - Agro wisata - Desa wisata	Lembang Sillanan	Kecamatan Gandang Batu Sillanan
13.	Potok Tengan Kandora	- Situs purbakala Puang Parranan - Pemukiman tradisional - Kuburan gantung - Mata air purba - Panorama alam	Kelurahan Tengan	Kecamatan Mengkendek
14.	Tumakke	- Cagar budaya (rumah adat tongkonan beratap batu) - Perkampungan tradisional	Lembang Banga	Kecamatan Rembon
15.	Pango-pango	- Kawasan Agro Wisata kopi - Panorama alam - Desa wisata	Kelurahan Tosapan	Kecamatan Makale Selatan
16.	Wisata Religi Buntu Burake	- Patung Yesus Kristus memberkati - Panorama alam - Goa Maria - Kuburan purba - Pemukiman tradisional	Kelurahan Buntu Burake	Kecamatan Makale
17.	Sarambu Assing	- Kawasan wisata alam - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Patongloan	Kecamatan Bittuang
18.	Barereng	- Kawasan wisata alam - Kola pemancingan - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Rante Limbong	Kecamatan Kurra
19.	Talondo tallu	- Kawasan wisata alam - Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi	Lembang Balepe'	Kecamatan Malimbong Balepe'
20.	Sassa'	- Pemukiman tradisional - Situs purbakala - Panorama alam - Perkebunan kopi	Lembang Gasing	Kecamatan Mengkendek



No.	Nama Usaha Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata-Wisata	Lokasi	
			Kelurahan/ Lembang	Kecamatan
21.	Tapparan (Arung Jeram)	- Sungai Mai'ting untuk arung Jeram - Panorama alam	Lembang Maroson	Kecamatan Kurra
22.	Buntu Tondon	- Kuburan pahat - Tau-tau - Erong - Panorama alam	Kelurahan Tondon Mamullu	Kecamatan Makale
23.	Pattan Ulusalu	- Tongkonan layuk (rumah adat) - Rante - Simbuang batu (menhir)	Kelurahan Pattan	Kecamatan Saluputti
24.	Lo'ko Tongko	- Goa alam purba - Pemukiman tradisional - Panorama alam	Kelurahan Tongko Sarapung	Kecamatan Sangalla'
25.	Banua Kasalle Bau	- Rumah adat - Perkampungan tradisional - Panorama alam	Lembang Kaero	Kecamatan Sangalla'
26.	Rurak	- Goa alam - Kuburan alam	Lembang Ke'Pe' Tinoring	Kecamatan Mengkendek
27.	Buntu Sarira	- Panorama alam - Hamparan awan pada pagi hari - Matahari terbit dan matahari terbenam - Perkebunan kopi rakyat - Situs perjuangan Topada Tindo - Perkampungan tradisional	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara
28.	Goa Alam Kambuno	- Goa alam - Sungai bawah tanah	Kelurahan Sarira	Kecamatan Makale Utara
29.	Padang Savana Ollon dan Kendenan	- Padang savana - Panorama alam - Kuburan purba Liang Saratu' - Desa Wisata Ollon - Sungai Masuppu	Lembang Bau Selatan	Kecamatan Bonggakarade ng
30.	Ratte Sarumbu	- Air terjun - Hutan wisata - Perkebunan kopi toraja di Bolokan - Panorama alam	Lembang Balla	Kecamatan Bittuang
31.	Sa'pak Bayo- bayo	- Keluarga Kudus Nasaret - Goa alam bersejarah - Kuburan purba - Situs sumur Puang - Pemukiman tradisional - Sungai dari batu - Labirin doa - Trekking dalam kawasan - Penginapan (wisma) - Restoran	Lembang Saluallo	Kecamatan Sangalla Utara

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja, 2025

Wisata yang menonjolkan potensi alam antara lain Padang Savana Ollon dan Kendenan yang terletak di Lembang Bau Kecamatan Bonggakaradeng. Kondisi

jalan akses ke Daya Tarik Wisata tersebut yang sudah ditangani yaitu sejauh 9 km, dengan fasilitas antara lain gazebo dan spot foto. Pada tahun 2024 sebanyak 21.649 wisatawan nusantara yang berkunjung ke DTW Ollon dan sebanyak 17.897 wisatawan nusantara yang berkunjung ke DTW Kendenan Tebing Romantis. Wisata alam yang lain yaitu Daya Tarik Wisata Pango-pango terletak di Kelurahan Pasang, Kecamatan Makale Selatan. Fasilitas pendukung di DTW ini antara lain Homestay, Gazebo, Wahana Adrenalin Jembatan Gantung, Rumah Hobit, Open Stage, Kios Kuliner dan Toilet. Pada tahun 2024 sebanyak 14.222 wisatawan nusantara yang berkunjung ke DTW ini. Selain itu ada DTW Buntu Sarira yang menawarkan wisata alam, terletak di Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, berjarak sekitar 14 kilometer dari ibu kota Kabupaten Tana Toraja. Wisatawan nusantara yang berkunjung selama tahun 2024 sebanyak 5.571 orang. Fasilitas yang tersedia antara lain Tempat Parkir, TIC, Kios Cendramata, Kios Kuliner, Plaza Area Pengunjung, Menara Pandang, Amphitheater, Gazebo, Aula / Tempat Ibadah, Spot Foto dan Toilet.

7. Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Tana Toraja diarahkan sesuai dengan lokasi pengembangannya yang terdiri atas :

a. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perkotaan PKL Makale, kawasan perkotaan PPK dan atau kawasan permukiman perkotaan PPL lainnya dengan luas 2.513,17 ha.

b. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perdesaan dan kawasan permukiman lainnya dengan luas 6.418,88 Ha.

8. Kawasan Transportasi

Pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Tana Toraja tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dipadukan secara keseluruhan dari pembangunan sektor transportasi Provinsi Sulawesi, terutama Kota Makassar yang

menjadi Kota inti. Dengan adanya pengintegrasian antar sistem transportasi ini didalam Provinsi Sulawesi, khususnya Kota Makassar dengan Kabupaten Tana Toraja sebagai kawasan/destinasi wisata dapat semakin menarik dan meningkatkan wisatawan.

Selanjutnya untuk mewujudkan sistem transportasi terpadu yang efektif dan efisien, maka perencanaan sistem transportasi Kabupaten Tana Toraja harus diselaraskan dengan arahan yang tertuang dalam rencana tata ruang Kota Makassar. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dan perencanaan transportasi di masa mendatang tidak menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga tatanan sistem transportasi Kabupaten Tana Toraja berkembang sesuai dengan rencana yang diharapkan, dimana perencanaan sistem transportasi tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan harus dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif wilayah.

Sistem transportasi Kabupaten Tana Toraja hanya terbentuk oleh sistem transportasi darat, yakni transportasi jalan dan bandar udara umum. Seiring dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tana Toraja sebagai kawasan wisata dan keterkaitan wilayah dengan Kota Makassar sebagai Kota Inti, maka Kabupaten Tana Toraja memiliki peranan dalam mewujudkan sistem transportasi multimoda, baik antarmoda maupun intermoda. Adapun kawasan transportasi pada Kabupaten Tana Toraja memiliki luasan seluas 186,46 hektare yang terdapat di Kecamatan Makale Kecamatan Mengkendek, dan Kecamatan Rantetayo.

9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang dimaksud adalah kawasan yang merupakan aset pertahanan dan keamanan/TNI NKRI, yang harus dijaga dan dipelihara dengan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar. Adapun Kawasan pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Tana Toraja terdiri atas : Koramil 1414-08/Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng, Koramil 1414-01/Makale di Kecamatan Makale, dan Koramil 1414/06 Sangalla'di Kecamatan Sangalla Utara.

2.1.1.3. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tana Toraja. Di sekitar pusat-pusat pertumbuhan, konversi kawasan lindung ke kawasan budi daya pertanian, permukiman serta kawasan perkotaan lainnya akan lebih intensif. Dilihat dari fungsinya, kawasan lindung di Kabupaten Tana Toraja terdiri atas :

1. Badan Air

Badan Air merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Badan air pada Kabupaten Tana Toraja memiliki luas kurang lebih seluas 480,46 Ha yang terdapat pada Kecamatan Bittuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Kurra, Kecamatan Makale, Kecamatan Makale Selatan, Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Malimbong Balepe, Kecamatan Mappak, Kecamatan Masanda, Kecamatan Rano, Kecamatan Rantetayo, Kecamatan Rembon, Kecamatan Saluputi, dan Kecamatan Simbuang.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengontrol tata air permukaan. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Tana Toraja merupakan kawasan hutan lindung dengan luas 83.539,12 ha yang tersebar pada 10 (sepuluh) kecamatan. Persentase terbesar sebaran luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Tana Toraja terdapat di Kecamatan Bonggakaradeng seluas 19.108,17 ha dan Kecamatan Simbuang seluas 16.509,38. Adapun persebaran hutan lindung di Kabupaten Tana Toraja sebagaimana diuraikan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.23

Pesebaran Hutan Lindung di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Hutan Lindung	Persentase (%)
1.	Kecamatan Bituang	8.661,03	10,37
2.	Kecamatan Bonggakaradeng	19.108,17	22,87
3.	Kecamatan Malimbong Balepe	5.752,59	6,89
4.	Kecamatan Mappak	7.271,34	8,70
5.	Kecamatan Masanda	15.814,25	18,93
6.	Kecamatan Mangkendek	6.540,05	7,83
7.	Kecamatan Rano	1.212,12	1,45
8.	Kecamatan Rembon	1.571,31	1,88
9.	Kecamatan Sanggalla Selatan	1.098,88	1,31
10.	Kecamatan Simbuang	16.509,38	19,76
Total		83.539,12	100,00

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

3. Kawasan perlindungan setempat

Persebaran kawasan perlindungan setempat pada Kabupaten Tana Toraja tersebar pada beberapa Kecamatan, dengan kawasan perlindungan setempat terluas ada pada Kecamatan Bonggakaradeng seluas 169,56 Ha. untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.24

Pesebaran Kawasan Perlindungan Setempat di Kabupaten Tana Toraja

No.	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Kecamatan Bittuang	145,71
2.	Kecamatan Bonggakaradeng	169,56
3.	Kecamatan Kurra	1,23
4.	Kecamatan Makale	51,28
5.	Kecamatan Makale Selatan	54,15
6.	Kecamatan Makale Utara	37,57
7.	Kecamatan Malimbong Balepe	0,66
8.	Kecamatan Mappak	53,40
9.	Kecamatan Masanda	24,65
10.	Kecamatan Rano	49,32
11.	Kecamatan Rantetayo	35,87
12.	Kecamatan Rembon	106,86
13.	Kecamatan Saluputi	65,56
14.	Kecamatan Simbuang	77,64
Total		873,45

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025



Hasil perhitungan potensi ketersediaan air di Kabupaten Tana Toraja sebesar 1.866.152.744,88 m³/tahun, dimana ketersediaan air bersih yang tinggi terdapat di Kecamatan Bittuang, Bonggakaradeng dan Masanda. Hasil perhitungan daya dukung ketersediaan dan kebutuhan air pada tahun 2025 diperlihatkan pada Tabel 3. 35 dan pada tahun 2029 diperlihatkan pada Tabel 3. 359 . Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Hasil perhitungan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air lahan untuk tahun 2025 dan tahun 2029 menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih yang tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Mengkendek, Simbuang dan Bittuang. Hasil analisis daya dukung ketersediaan air bersih di Kabupaten Tana Tana Toraja menunjukkan bahwa nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2025 pada semua kecamatan berkisar 8.472 – 4.236.100,19 (Tabel 3. 358) dan nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2029 berkisar 6.794,97 – 3.185.505,63 (Tabel 3. 36). Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Tana Toraja memiliki kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui. Semua wilayah kecamatan berada pada daerah kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui (Sumber : KLHS RPJMD Kabupatten Tana Toraja Tahun 2025-2029).



Tabel 2.25

Daya dukung ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (m ³ /tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Ambang Batas	Status Daya Dukung Air 5	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (ha)	Terlampaui (%)
Bittuang	23.525	2.032.539,28	55.196.640,00	57.229.179,28	257.598.757,49	2.845.957	200.369.578,20	26800,689	97,50	686,257	2,50
Bonggakaradeng	8.986	776.384,39	32.016.384,00	32.792.768,39	242.987.269,20	2.421.408	210.194.500,81	27801,152	98,27	489,724	1,73
Gandangbatu Silanan	27.151	2.345.832,32	28.719.360,00	31.065.192,32	79.014.458,39	280.749	47.949.266,08	8316,067	92,90	635,642	7,10
Kurra	10.397	898.282,50	39.255.840,00	40.154.122,50	48.750.176,29	13.974	8.596.053,79	4307,305	87,94	590,7	12,06
Makale	43.279	3.739.341,44	22.941.792,00	26.681.133,44	38.706.366,53	23.881	12.025.233,10	3720,386	87,61	526,326	12,39
Makale Selatan	21.589	1.865.282,54	6.962.112,00	8.827.394,54	58.673.136,72	155.517	49.845.742,18	6259,194	98,12	119,802	1,88
Makale Utara	17.938	1.549.880,96	13.950.144,00	15.500.024,96	19.963.224,71	22.239	4.463.199,76	1773,255	83,21	357,805	16,79
Malimbong Balepe	11.639	1.005.573,22	33.208.704,00	34.214.277,22	94.477.402,55	648.134	60.263.125,33	9563,328	95,17	485,654	4,83
Mappak	8.490	733.496,95	50.466.240,00	51.199.736,95	124.273.307,37	418.335	73.073.570,42	13580,292	95,98	569,468	4,02
Masanda	11.006	950.906,01	25.855.200,00	26.806.106,01	227.043.095,97	4.236.100	200.236.989,97	22744,681	98,84	266,484	1,16
Mengkendek	48.316	4.174.534,77	67.804.128,00	71.978.662,77	196.159.589,89	1.167.146	124.180.927,13	20104,694	92,01	1746,57	7,99
Rano	9.465	817.770,47	13.439.520,00	14.257.290,47	59.939.025,65	343.395	45.681.735,18	6217,734	97,60	152,989	2,40
Rantetayo	19.538	1.688.096,41	35.124.192,00	36.812.288,41	33.368.968,65	8.472	-3.443.319,77	2488,924	78,07	699,316	21,93
Rembon	32.908	2.843.221,86	34.074.432,00	36.917.653,86	67.385.759,88	100.926	30.468.106,01	6310,403	91,35	597,479	8,65
Saluputi	12.531	1.082.667,26	36.920.448,00	38.003.115,26	40.112.077,59	36.272	2.108.962,33	3152,483	83,87	606,444	16,13
Sangalla	9.340	806.974,07	10.907.136,00	11.714.110,07	19.985.198,17	49.892	8.271.088,10	1984,374	88,02	270,042	11,98
Sangalla Selatan	12.163	1.050.848,19	26.028.864,00	27.079.712,19	50.879.462,71	252.508	23.799.750,53	4665,931	88,23	622,188	11,77
Sangalla Utara	10.909	942.558,43	12.317.184,00	13.259.742,43	20.114.833,54	58.560	6.855.091,10	1812,529	87,29	263,851	12,71
Simbuang	10.072	870.222,21	58.436.640,00	59.306.862,20	186.720.633,57	478.962	127.413.771,37	22263,348	97,45	582,219	2,55
Total	349.241	30.174.413,27	603.624.960,00	633.799.373,27	1.866.152.744,89	13.562.429	1.232.353.371,61	193866,77	94,97	10268,96	5,03

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029



Tabel 2.26

Daya dukung ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2029

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Domestik (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (m ³ /tahun)	Total Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Ambang Batas	Status Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (ha)	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (ha)	Terlampaui (%)
Bittuang	30.420	2.628.303,67	55.196.640,00	57.824.943,67	257.598.757,49	2.201.404	199.773.813,81	26.788,43	97,46	698,52	2,54
Bongkaradeng	10.087	871.546,57	32.016.384,00	32.887.930,57	242.987.269,20	2.157.011	210.099.338,63	27.800,22	98,27	490,66	1,73
Gandangbatu Silanan	32.468	2.805.223,54	28.719.360,00	31.524.583,54	79.014.458,39	234.998	47.489.874,85	8.306,36	92,79	645,35	7,21
Kurra	15.306	1.322.445,33	39.255.840,00	40.578.285,33	48.750.176,29	10.773	8.171.890,96	4.292,57	87,64	605,43	12,36
Makale	48.389	4.180.807,76	22.941.792,00	27.122.599,76	38.706.366,53	21.584	11.583.766,78	3.713,51	87,44	533,20	12,56
Makale Selatan	28.974	2.503.371,66	6.962.112,00	9.465.483,66	58.673.136,72	116.094	49.207.653,06	6.248,08	97,95	130,91	2,05
Makale Utara	22.574	1.950.369,16	13.950.144,00	15.900.513,16	19.963.224,71	17.790	4.062.711,55	1.758,97	82,54	372,09	17,46
Malimbong Balepe	12.837	1.109.159,10	33.208.704,00	34.317.863,10	94.477.402,55	588.017	60.159.539,45	9.563,22	95,17	485,76	4,83
Mappak	10.442	902.192,53	50.466.240,00	51.368.432,53	124.273.307,37	342.082	72.904.874,84	13.578,47	95,96	571,29	4,04
Masanda	14.646	1.265.393,59	25.855.200,00	27.120.593,58	227.043.095,97	3.185.506	199.922.502,39	22.739,04	98,82	272,13	1,18
Mengkendek	66.860	5.776.669,11	67.804.128,00	73.580.797,11	196.159.589,89	844.330	122.578.792,78	20.069,57	91,85	1.781,70	8,15
Rano	11.988	1.035.726,27	13.439.520,00	14.475.246,27	59.939.025,65	271.865	45.463.779,38	6.211,86	97,51	158,87	2,49
Rantetayo	27.125	2.343.604,23	35.124.192,00	37.467.796,23	33.368.968,65	6.795	- 4.098.827,59	2.473,36	77,58	714,88	22,42
Rembon	45.620	3.941.580,52	34.074.432,00	38.016.012,52	67.385.759,88	73.788	29.369.747,36	6.283,96	90,97	623,92	9,03
Saluputi	16.642	1.437.827,64	36.920.448,00	38.358.275,64	40.112.077,59	27.864	1.753.801,95	3.144,82	83,66	614,10	16,34
Sangalla	11.107	959.650,25	10.907.136,00	11.866.786,24	19.985.198,17	41.994	8.118.411,92	1.978,71	87,77	275,71	12,23
Sangalla Selatan	15.944	1.377.600,18	26.028.864,00	27.406.464,18	50.879.462,71	192.769	23.472.998,53	4.659,55	88,11	628,57	11,89
Sangalla Utara	13.413	1.158.860,40	12.317.184,00	13.476.044,40	20.114.833,54	47.699	6.638.789,14	1.809,58	87,15	266,80	12,85
Simbuang	13.095	1.131.419,91	58.436.640,00	59.568.059,91	186.720.633,57	370.983	127.152.573,66	22.257,61	97,43	587,95	2,57
Total	447.937	38.701.751,42	603.624.960,00	642.326.711,42	1.866.152.744,89	10.753.345	1.223.826.033,47	193.677,90	94,88	10.457,83	5,12

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2029

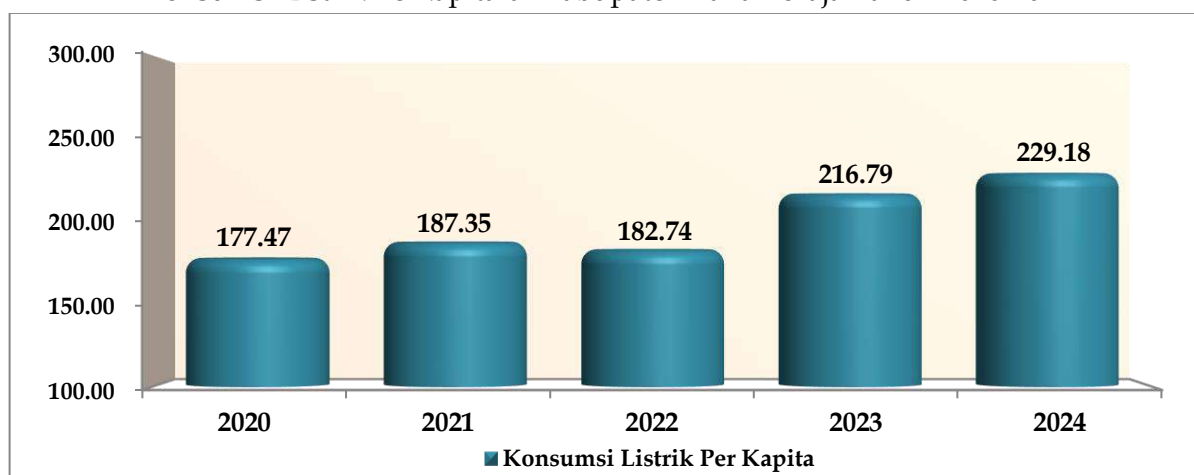
2.1.1.4. BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Gambaran ketahanan energi, air dan kemandirian pangan di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan 1) Indeks Ketahanan Energi dengan indicator antara lain Konsumsi listrik per Kapita (kWh) dan Jumlah Pelanggan Listrik, 2) Indeks Ketahanan Pangan, 3) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan, 4) Indeks Ketahanan Air dan 5) Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Air Minum.

A. Indeks Ketahanan Energi

Energi listrik merupakan energi yang banyak digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan energi listrik tergolong sebagai energi utama yang sangat diperlukan manusia. Besarnya manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari membuat manusia sangat bergantung pada keberadaan energi tersebut karena listrik tidak hanya memungkinkan kita untuk mengoperasikan berbagai peralatan, tetapi juga membuat kehidupan manusia lebih mudah. Hal ini terutama penting dalam era modern, di mana banyak orang yang menggunakan peralatan listrik untuk memudahkan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan. Konsumsi listrik per kapita memberikan indikasi tentang tingkat konsumsi energi oleh setiap individu dalam masyarakat. Hal ini penting dalam analisis kebutuhan energi, pembangunan infrastruktur listrik, serta dalam mengevaluasi kebijakan energi dan keberlanjutan lingkungan. Konsumsi listrik per kapita dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan 12,39 Kwh dari tahun 2023.

Grafik 2.1
Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, jumlah pelanggan listrik PLN mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 tercatat ada sekitar 47.977 pelanggan kemudian meningkat menjadi 56.365 pelanggan pada tahun 2024 dengan persentase peningkatan tercatat sebesar 4,37 persen per tahun.

Grafik 2.2

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

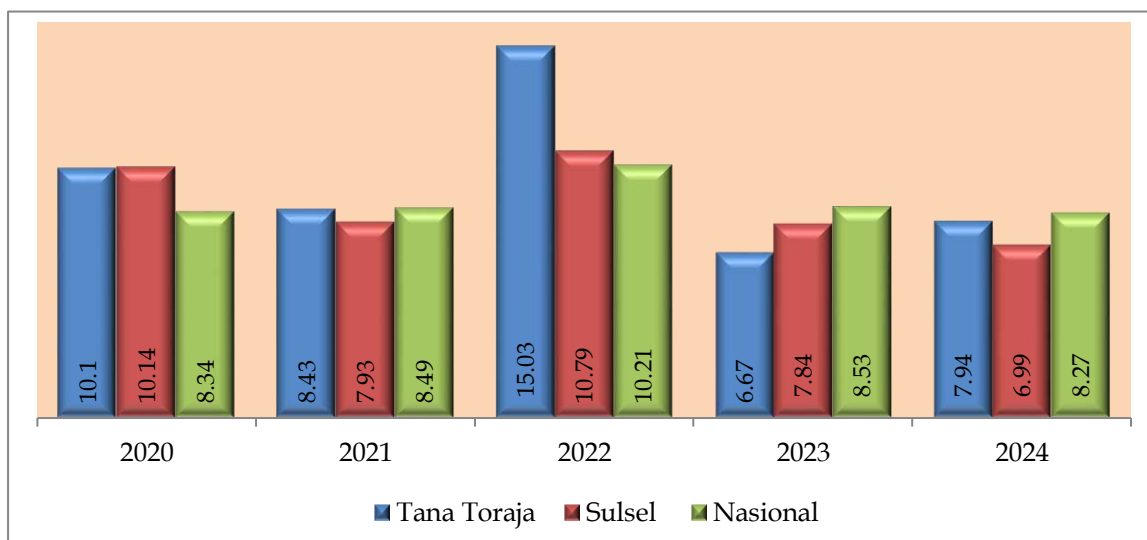
B. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan ukuran kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah yang dihasilkan dari beberapa indikator yang meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Indeks ketahanan pangan kabupaten Tana Toraja tahun 2020 berada pada peringkat 203 dengan nilai 76,88, pada tahun 2021 berada peringkat 254 dengan nilai 73,45, pada tahun 2022 peringkat 201 dengan nilai 76,52 dan pada tahun 2023 berada pada peringkat 196 dengan nilai 77,74. Sedangkan untuk data tahun 2024 belum dirilis oleh Badan Pangan Nasional. Peningkatan nilai Indeks Ketahanan Pangan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Tana Toraja semakin mampu mengakses pangan yang cukup, aman dan bergizi secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh produksi pangan lokal yang semakin membaik, distribusi pangan yang semakin merata serta pendapatan masyarakat semakin meningkat.

C. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan merupakan proporsi penduduk yang asupan energinya dari konsumsi pangan berada di bawah kebutuhan energi minimum yang ditetapkan untuk hidup sehat dan aktif. Angka prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 berada pada angka 10,1 persen lebih rendah dari capaian provinsi 10,14. Kemudian pada tahun 2024 angka PoU berada pada angka 7,94 persen lebih rendah dari PoU Sulsel sebesar 6,99 persen, angka ini menunjukkan risiko ketahanan pangan di Kabupaten Tana Toraja moderat dan perlu mendapatkan intervensi terbatas. Hal ini diakibatkan oleh harga pangan di Kabupaten Tana Toraja yang relatif tinggi dan fluktuatif serta ketersediaan pangan yang terbatas.

Grafik 2.3
Prevalence of Undernourishment (PoU) (%) Kabupaten Tana Toraja Tahun, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

D. Indeks Ketahanan Air

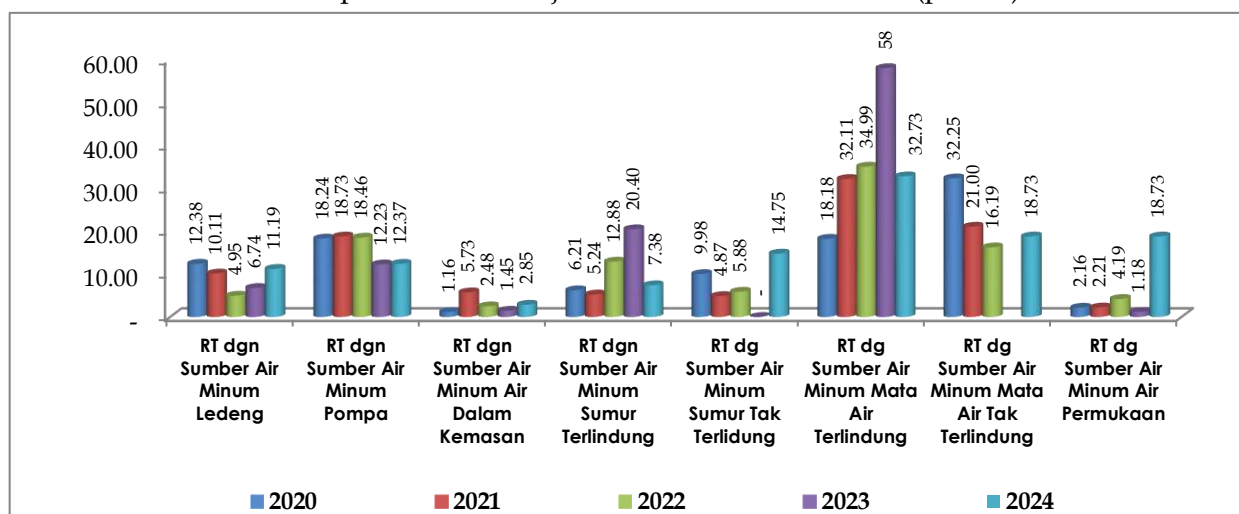
Kondisi Ketahanan air di kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan jumlah kapasitas air baku (m³/detik). Pada tahun 2024 sebanyak 145 unit SPAM dengan kapasitas air baku 536 liter/detik, kapasitas terpasang 534 liter/detik, kapasitas produksi 489,70 liter/detik, kapasitas distribusi 338,45 liter/detik, kapasitas air terjual 246,07 liter/detik, Idle Cap terpasang 2 liter/detik dan Idle Cap produksi liter/detik. Sementara

itu Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum Perpipaan, sebanyak 28.302 jumlah sambungan rumah dan 43,58 persen masyarakat yang mengakses air minum perpipaan. Sedangkan sebanyak 14,48 persen masyarakat yang dapat mengakses air siap minum perpipaan atau sebanyak 28.302 rumah tangga yang terlayani air minum aman.

Indeks ketahanan Air di Kabupaten Tana Toraja juga dapat dilihat dari distribusi rumah tangga dan sumber air minum. Berdasarkan data distribusi rumah tangga dan sumber air minum menunjukkan bahwa pengguna Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Mata Air Terlindung merupakan yang banyak di Kabupaten Tana Toraja yaitu sebanyak 32,73 persen di tahun 2024 selanjutnya di dominasi oleh Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Pompa. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4

Distribusi Persentase Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Kabupaten Tana Toraja Tahun Tahun 2020 - 2024 (persen)



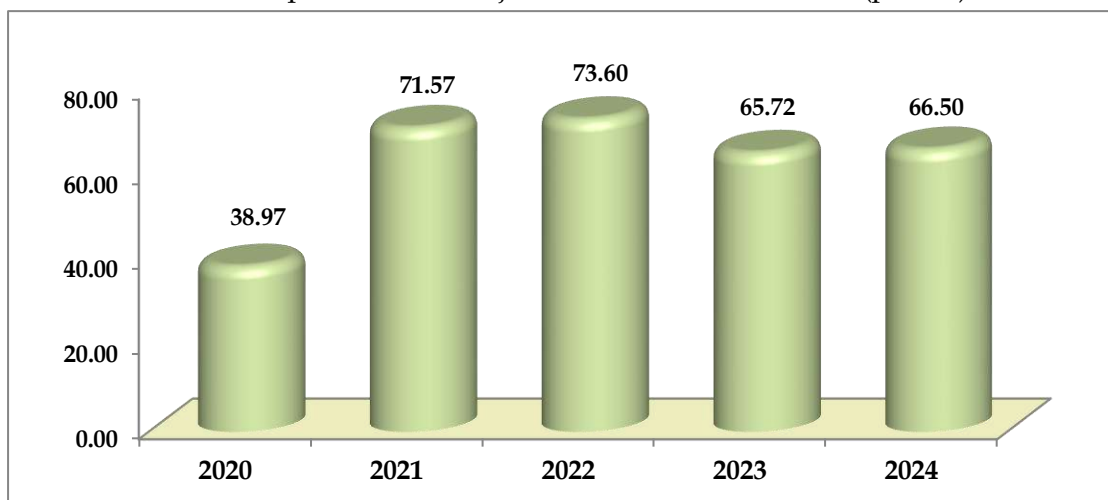
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

E. Akses Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum yang Layak

Berdasarkan data BPS, rumah tangga yang memiliki sumber air minum yang layak pada tahun 2020 sebanyak 38,97 persen kemudian berturut-turut meningkat menjadi 71,57 persen dan 73,60 persen pada tahun 2021 dan 2022, namun turun menjadi 65,73 persen pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perbedaan indikator yang digunakan dalam menghitung jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum yang layak. Pada tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 66,50 persen.

Grafik 2.5

Rumah Tangga yang Memiliki Sumber Air Minum yang Layak
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.1.5. LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

Lingkungan hidup berkualitas merupakan kondisi lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan, yang mampu mendukung kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan secara optimal. Lingkungan yang berkualitas menjadi fondasi penting untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD), Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Pengelolaan Sampah, Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang, dan Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperoleh berdasarkan tiga indikator utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas lahan (IKL), perhitungannya menggunakan rumus $IKLH = (0.376 * IKA) + (0.405 * IKU) + (0.219 * IKL)$. Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 termasuk kategori baik. Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten

Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH Tana Toraja	68,18	71,27	74,27	70,38	73,24
IKLH Sulawesi Selatan	70,70	73,23	74,17	74,30	75,69
IKLH Nasional	70,27	71,45	72,42	72,54	75,53

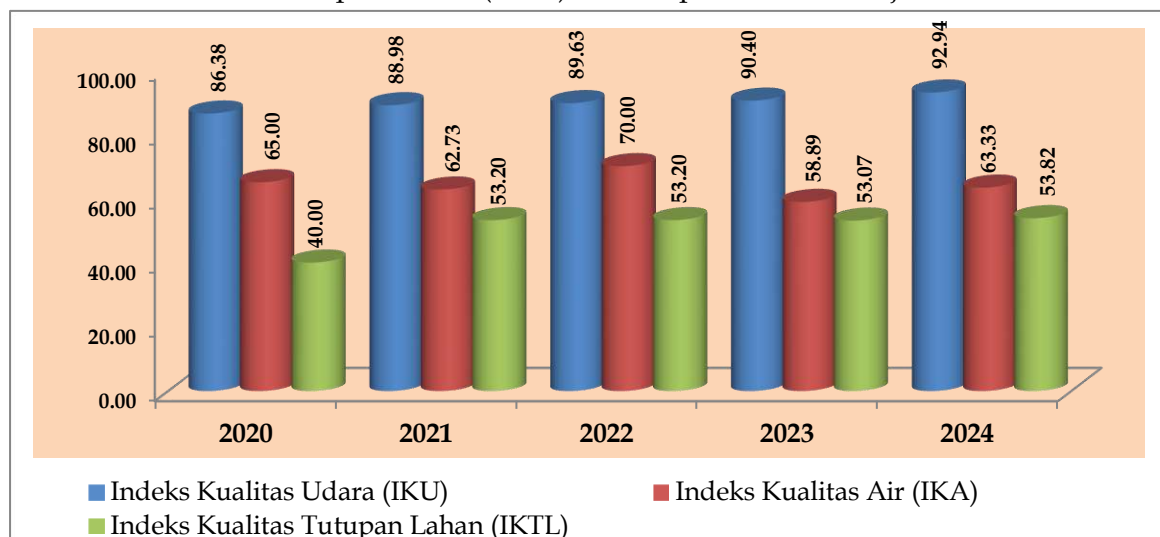
Sumber : Dinas LHK Provinsi Sulawesi Selatan, diolah 2025

Nilai IKLH merupakan perhitungan komposisi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara disuatu daerah yang pengukurannya dapat dilakukan dengan mengamati kualitas udara menggunakan kombinasi berbagai macam alat dan metode termasuk jaringan sensor polutan dan sistem informasi geografis dengan kisaran angka 0 sampai 500. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup. Kualitas udara yang baik berkisar antara 0 – 50, kualitas udara yang sedang berkisar antara 51 – 100, kualitas udara yang tidak sehat untuk kelompok sensitive berkisar antara 101 – 150, kualitas udara yang tidak sehat berkisar antara 151 – 200, kualitas udara yang sangat tidak sehat berkisar antara 201 – 300 dan kualitas udara yang sangat berbahaya berkisar antara 301 – 500 atau lebih tinggi. Meskipun dalam kurun waktu lima tahun indeks kualitas udara di Kabupaten Tana Toraja menurun namun masih menunjukkan kualitas udara sedang. Pada tahun 2024 nilai indeks kualitas udara di Kabupaten Tana Toraja bernilai 92,94. Indeks kualitas air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020, nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 65,00 kemudian turun menjadi 63,33 pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa kualitas air tercemar sedang. Gambaran

mengenai Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Tana Toraja tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6

Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air (IKA) dan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, 2025

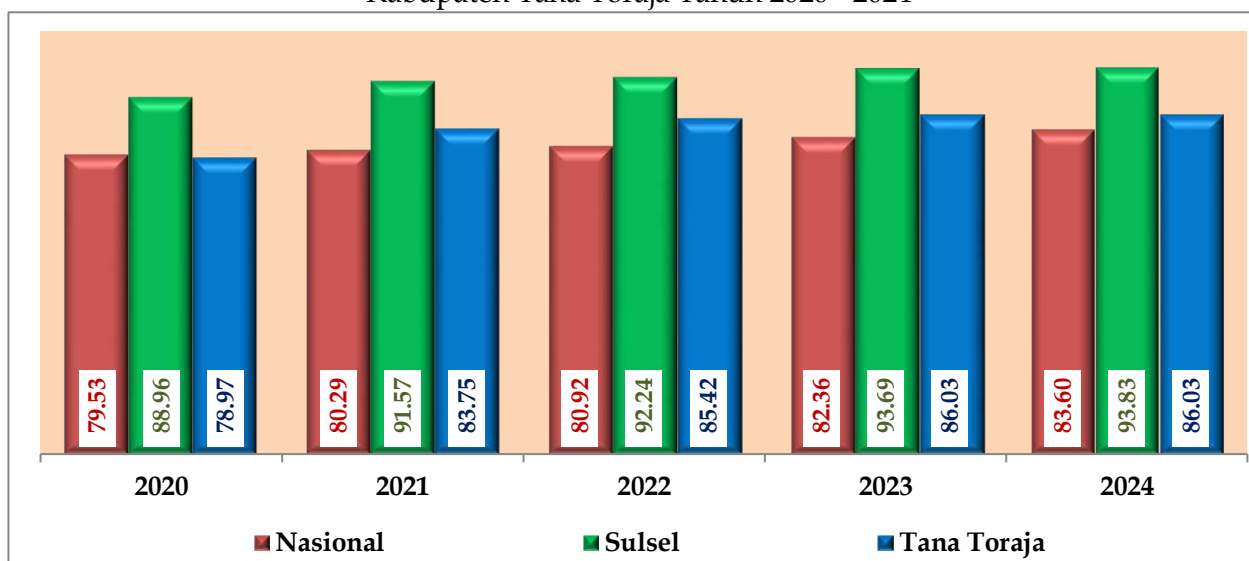
B. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan indikator yang menunjukkan proporsi rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang layak, bersih, dan tidak mencemari lingkungan. Rumah dianggap layak huni apabila memiliki akses sanitasi layak yang dilihat dari beberapa komponen. Antara lain (1) penggunaan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu, (2) bangunan atas/jenis kloset berupa leher angsa dan (3) bangunan bawah/tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Perkembangan rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Tana Toraja sebesar 78,97 persen dan meningkat menjadi 86,03 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menandakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam meningkatkan akses sanitasi yang layak telah

membuahkan hasil yang cukup baik. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian tersebut masih dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan tetapi di atas capaian nasional. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi yang Layak di Kabupaten Tana Toraja tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Nasional, Prov. Sulsel dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



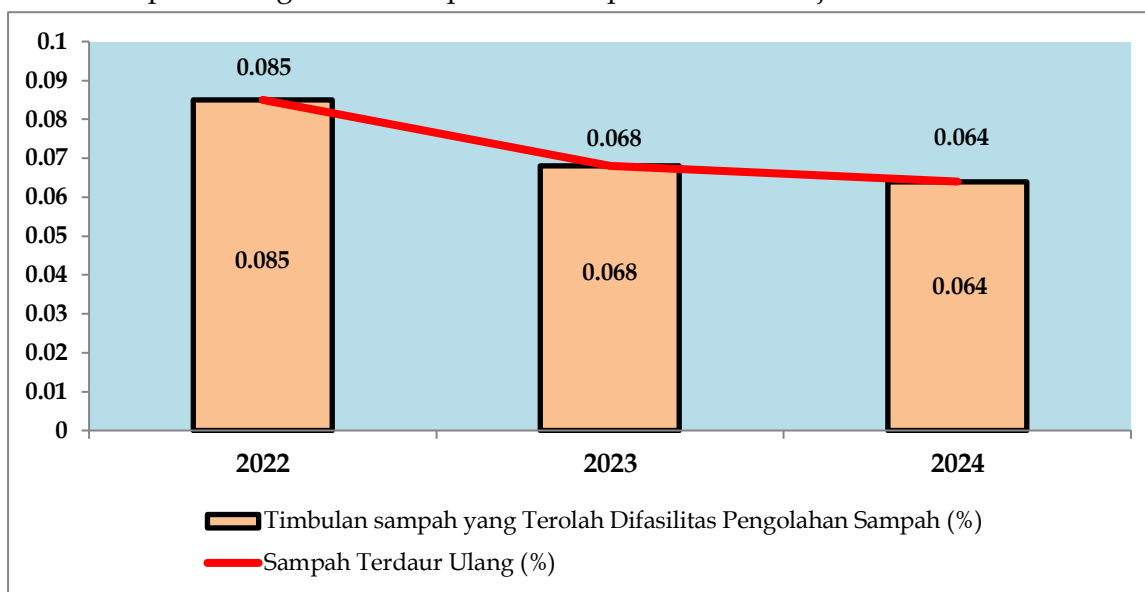
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

C. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Berdasarkan data yang tersedia di SIPSN persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami penurunan. Pada tahun 2022 sebanyak 0,085 persen timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dan sebanyak 0,085 persen sampah yang terdaur ulang. Pada tahun 2024 hanya 0,064 persen timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dan 0,064 persen sampah yang terdaur ulang. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sampah yang tidak tertangani. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong pemilahan sampah dari rumah, meningkatkan kapasitas dan jumlah fasilitas pengolahan sampah atau mendorong teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan.

Grafik 2.8

Capaian Pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja, 2025

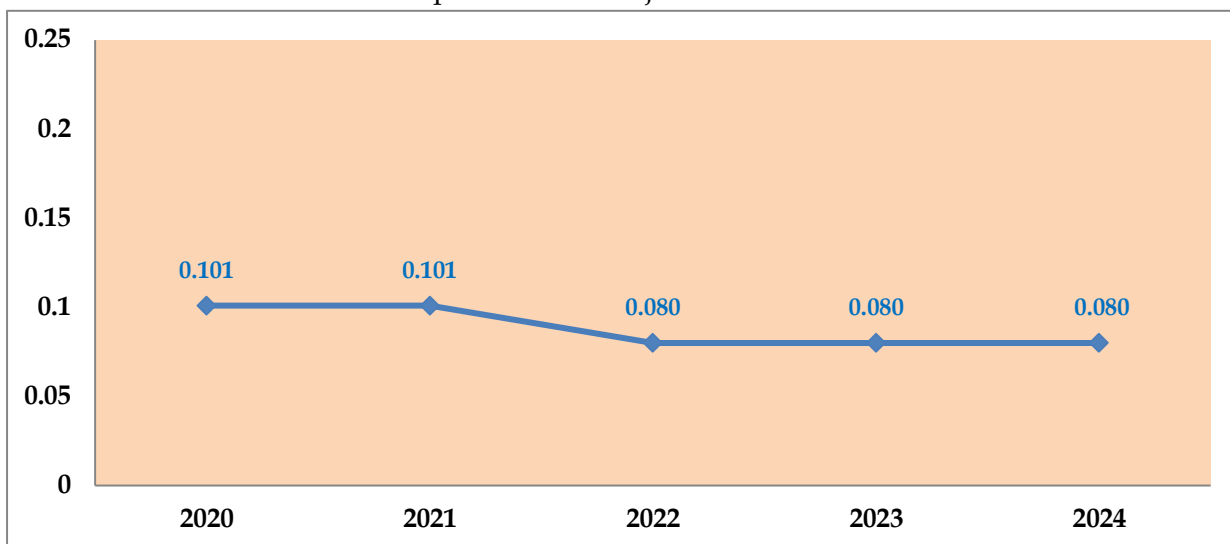
D. Persentase Kawasan Lingkungan Permukiman Kumuh

Kawasan lingkungan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya tidak layak huni, dengan ciri-ciri berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan terhadap penyakit sosial hingga penyakit lingkungan serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan permukiman. Salah satu faktor terciptanya kawasan kumuh adalah karena adanya lonjakan jumlah penduduk yang sangat besar dan tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan lahan serta kondisi ekonomi yang buruk sehingga terjadi ketidakmampuan untuk memiliki tanah dan membangun rumah di kawasan perumahan.

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami trend menurun. Pada tahun 2020 persentase lingkungan permukiman kumuh mencapai 0,101 persen, namun dengan berbagai intervensi program dari pemerintah maka persentase lingkungan permukiman kumuh dapat diturunkan sehingga pada tahun 2024 tercatat menjadi 0,08 persen.

Grafik 2.9

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas PRKP Kab. Tana Toraja, 2025

2.1.1.6. RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan individu, komunitas, pemerintah, dan sistem sosial-ekologi untuk mengantisipasi, menanggapi, pulih, dan beradaptasi terhadap dampak bencana dan perubahan iklim dengan cara yang mengurangi risiko dan kerugian, serta memperkuat ketahanan jangka panjang. Gambaran Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan indikator Indeks Risiko Bencana.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 sampai hingga tahun 2024, nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja mengalami tren penurunan. Pada tahun 2024 IRB Kabupaten Tana Toraja sebesar 110,72, ada penurunan sebesar 32,1 dari tahun 2023, kondisi ini termasuk dalam kategori risiko sedang terhadap kerentanan dan kapasitas. Wilayah Kabupaten Tana Toraja memiliki ancaman bencana tinggi disebabkan oleh adanya sesar aktif di wilayah Sulawesi Selatan, keterbukaan wilayah pantai, dan wilayah sungai serta hamparan dataran rendah yang memiliki keterbatasan daerah resapan air. Perubahan iklim memberi tekanan lebih pada intensitas bencana di Kabupaten Tana Toraja. Kejadian banjir secara konsisten terjadi sepanjang tahun, memperlihatkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan sebagai akibat alih fungsi lahan dan lahan kritis yang diperparah oleh perubahan iklim. Perubahan

iklim yang menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara dan cuaca ekstrim akan mempengaruhi periode musim, dimana musim kemarau akan lebih panjang dan musim hujan semakin pendek atau sebaliknya.

Tabel 2.28
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IRB Kabupaten Tana Toraja	150,00	166,70	150,18	142,80	110,72

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Kondisi Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan kejadian tanah longsor, banjir dan banjir bandang.

A. Kawasan Longsor

Longsor merupakan proses alam dalam mencari keseimbangan baru yang mengakibatkan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kejadian longsor dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu aspek kemiringan lereng/morfologi, kondisi geologi, curah hujan, penggunaan lahan dan lainnya. Kabupaten Tana Toraja yang dikenal dengan kabupaten dengan dominasi morfologi pegunungan yang sangat rentan terhadap terjadinya peristiwa longsor. Hal ini selaras dengan hasil analisis tingkat kerawanan longsor pada kabupaten Tana Toraja yang telah dilakukan dimana 67 persen dari luas wilayahnya termasuk dalam kategori kerawanan terhadap bencana longsor yang tinggi, berikut ini tabel terperinci dari kerawanan terjadinya bencana longsor di Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 2.29
Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Tana Toraja

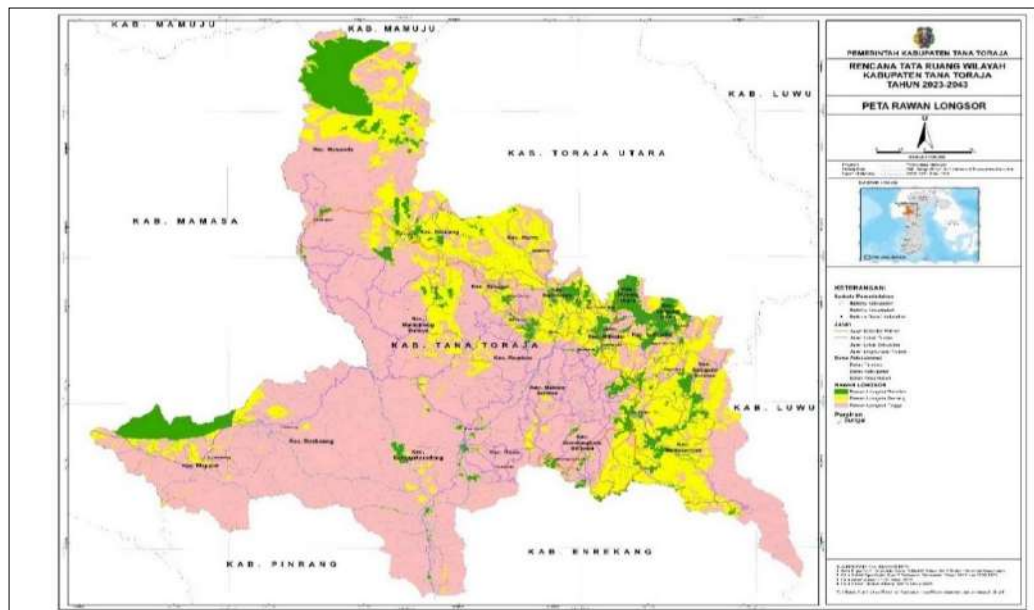
Kecamatan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi	Grand Total
Bittuang	1879,40	10628,30	13826,62	26334,32
Bongkaradeng	426,02	899,95	25516,64	26842,60
Gandangbatu Sillanan	636,91	2298,92	5473,47	8409,30
Kurra	29,98	3328,04	1488,96	4846,99
Makale	532,92	2182,10	1352,37	4067,39
Makale Selatan	20,00	452,15	6719,90	7192,05
Makale Utara	1316,62	627,83	471,90	2416,35

Kecamatan	Rawan Longsor Rendah	Rawan Longsor Sedang	Rawan Longsor Tinggi	Grand Total
Malimbong Balepe	91,05	2000,59	8016,74	10108,38
Mappak	2187,56	1385,89	11331,35	14904,79
Masanda	5408,18	3337,98	14432,05	23178,21
Mengkendek	1791,35	10541,51	10082,50	22415,37
Rano	162,36	66,40	5255,40	5484,16
Rantetayo	704,74	2061,85	624,13	3390,72
Rembon	267,62	1484,47	5437,63	7189,71
Saluputi	140,58	2004,11	2243,58	4388,26
Sangalla	527,47	717,33	547,06	1791,86
Sangalla Selatan	506,41	3178,32	2047,43	5732,15
Sangalla Utara	912,58	692,98	287,92	1893,48
Simbuang	667,80	1153,66	21954,70	23776,15
Grand Total	18209,55	49042,36	137110,35	204362,25

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Gambar 2.9

Peta Bencana Tana Longsor Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, umumnya disebabkan oleh hujan lebat dan lingkungan geografis yang tidak mendukung. Informasi Kerawanan terhadap banjir merupakan aspek sangat penting dalam mempertimbangkan perencanaan dan penataan suatu wilayah. Tingkat

kerawanan terhadap banjir di dapatkan dari melakukan analisis berdasarkan data curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah dan DAS. Berdasarkan analisis kerawanan terhadap banjir, luas wilayah yang masuk katerogi rawan banjir pada Kabupaten Tana Toraja termasuk kecil yaitu 1924,44 Ha yang tersebar di 13 dari 19 kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Tana Toraja. Adapun informasi terperinci tingkat kerawanan terhadap banjir di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Tana Toraja

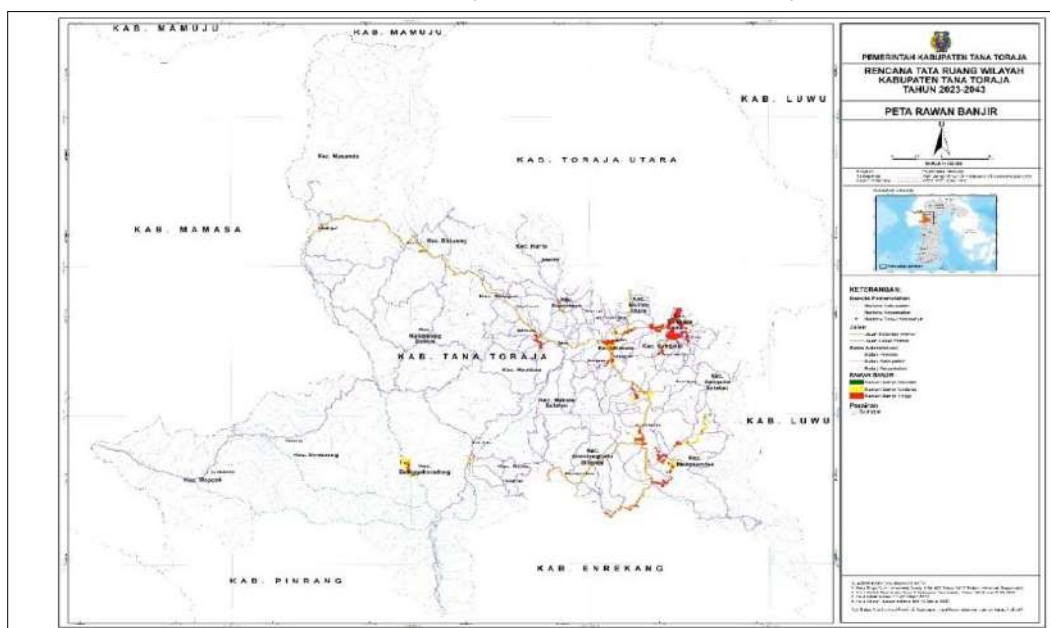
Kecamatan	Rawan Banjir Rendah	Rawan Banjir Sedang	Rawan Banjir Tinggi	Grand Total
Bonggakaradeng	-	99,95	50,65	150,60
Gandangbatu Sillanan	-	16,85	118,44	135,29
Makale	-	75,08	130,53	205,61
Makale Utara	-	16,51	76,51	93,02
Malimbong Balepe	-	2,91	19,34	22,24
Mengkendek	1,99	240,21	340,14	582,34
Rano	-	16,69	3,18	19,86
Rantetayo	-	34,90	13,96	48,86
Rembon	-	11,05	47,47	58,53
Saluputi	-	1,99	1,00	2,99
Sangalla	1,00	22,12	126,06	149,18
Sangalla Selatan	3,99	14,83	6,98	25,80
Sangalla Utara	-	41,40	388,71	430,11
Grand Total	6,98	594,50	1322,96	1924,44

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Kerawanan Banjir Kabupaten Tana Toraja di kategorikan menjadi tiga yaitu rawan banjir rendah dengan luas 6,98 Ha yang berada pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Mengkendek, Sangalla, dan Sangalla Selatan. Pada katerogi rawan banjir sedang berada pada 13 kecamatan dengan luas 594,50 dan kategori rawan banjir tinggi yang merupakan tingkat kerawanan terluas yaitu 1322,96 Ha tersebar pada 13 kecamatan yang ada pada Kabupaten Tana Toraja.

Gambar 2.10

Peta Bencana Banjir Kabupaten Tana Toraja



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

C. Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar disebabkan karena terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Akibat terbendungnya alur pada sungai membuat kecepatan aliran dan debit banjir yang tinggi terkadang disertai dengan material kayu, batu, lumpur hasil sedimentasi yang banyak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa pada daerah yang dilalui karena datangnya secara tiba-tiba. Beberapa aspek yang menjadi penyebab terjadinya banjir bandang yaitu curah hujan yang tinggi pada suatu wilayah, alih fungsi lahan/deforestasi, tingginya sedimentasi atau erosi, urbanisasi, drainase dan gempa bumi. Tingginya tingkat kerawanan terhadap longsor pada Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu faktor perlunya analisis mengenai tingkat kerawanan banjir bandang.

Tabel 2.31

Rawan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Tana Toraja

Kecamatan	Rawan Banjir Bandang Rendah	Rawan Banjir Bandang Sedang	Rawan Banjir Bandang Tinggi	Grand Total
Bittuang	811,57	698,24	944,39	2454,20
Bonggakaradeng	1455,17	831,55	1094,97	3381,69
Gandangbatu Sillanan	182,12	184,35	401,16	767,63
Kurra	162,46	195,93	313,71	672,10

Kecamatan	Rawan Banjir Bandang Rendah	Rawan Banjir Bandang Sedang	Rawan Banjir Bandang Tinggi	Grand Total
Makale	31,70	103,02	304,04	438,76
Makale Selatan	298,84	177,16	201,68	677,68
Makale Utara	25,26	58,67	190,55	274,47
Malimbong Balepe	513,70	226,71	341,54	1081,95
Mappak	744,90	438,61	413,84	1597,35
Masanda	581,60	474,80	621,98	1678,38
Mengkendek	332,86	388,76	1043,62	1765,24
Rano	221,36	176,55	196,81	594,71
Rantetayo	28,79	78,87	207,48	315,14
Rembon	521,51	238,56	350,80	1110,87
Saluputi	148,24	139,42	279,83	567,49
Sangalla	-	8,35	47,92	56,27
Sangalla Selatan	43,65	111,95	245,39	400,99
Sangalla Utara	8,97	51,14	266,67	326,79
Simbuang	1117,14	567,25	708,08	2392,47
Grand Total	7229,85	5149,88	8174,45	20554,18

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

Tingkat kerawanan banjir bandang kabupaten Tana Toraja dengan total luas 20554,18 Ha dimana tingkat kerawanan terhadap banjir bandang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kerawanan banjir. Kecamatan Bongkaradeng dan Mengkendek merupakan kecamatan dengan tingkat kerawanan banjir bandang yang tertinggi.

2.1.1.7. ASPEK DEMOGRAFI

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah memiliki sifat yang dinamis karena adanya perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari wilayah tersebut. Data demografi di Kabupaten Tana Toraja terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, distribusi penduduk dan struktur penduduk.

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 mencapai 258.934 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar -10,16 persen. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk tertinggi berada di

Kecamatan Makale mencapai 36.835 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 932 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada kecamatan Mappak mencapai 5.850 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 35 jiwa/km².

Tabel 2.32
Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

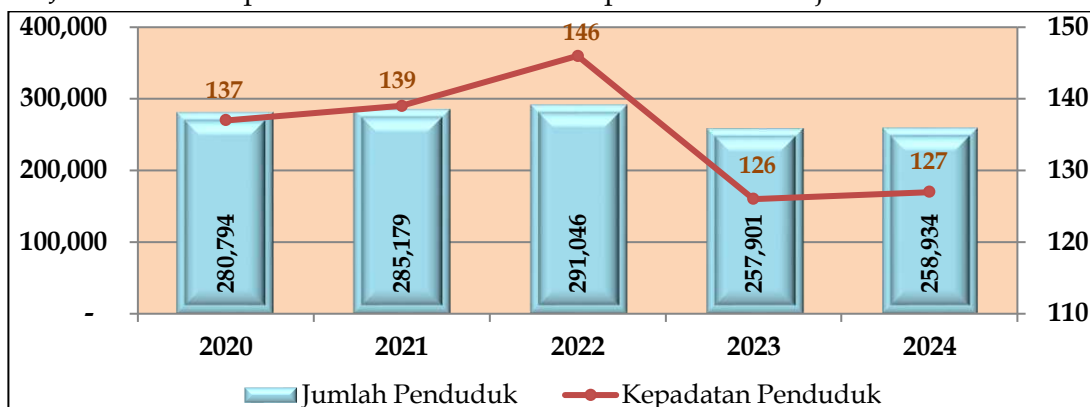
Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju pertumbuhan Penduduk (%) Tahun 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Bonggakaradeng	8.023	8.080	8.239	6.990	7.069	-14,12
Simbuang	7.959	8.107	8.276	6.640	6.662	-17,74
Rano	7.649	7.766	7.926	6.610	6.613	-13,54
Mappak	7.018	7.120	7.266	5.840	5.850	-15,78
Mengkendek	36.390	37.092	37.868	33.500	33.553	-11,93
Gandang Batu Sillanan	23.049	23.276	23.742	21.190	21.252	-11,88
Sangalla	7.958	8.041	8.202	7.510	7.484	-10,51
Sangalla Selatan	9.557	9.727	9.929	8.660	8.699	-8,46
Sangalla Utara	9.041	9.157	9.343	8.370	8.378	-7,00
Makale	38.814	39.040	39.805	36.310	36.835	-7,94
Makale Selatan	16.609	16.956	17.314	15.490	15.424	-7,95
Makale Utara	14.602	14.796	15.097	13.350	12.358	-6,29
Saluputti	9.741	9.922	10.129	9.930	9.444	-7,33
Bittuang	18.692	19.012	19.406	17.450	17.552	-10,00
Rembon	24.662	25.220	25.756	22.650	22.895	-10,38
Masanda	8.495	8.695	8.881	9.610	7.973	-7,00
Malimbong Balepe	10.517	10.603	10.813	13.380	9.598	-9,67
Rantetayo	14.614	14.957	15.097	7.041	13.275	-12,43
Kurra	7.404	7.612	7.778	7.040	7.020	-7,25
Jumlah	280.794	285.179	291.046	257.901	258.934	-10,16

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Perbandingan jumlah penduduk dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kabupaten Tana Toraja tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 146 jiwa/km². Pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Tana Toraja turun menjadi 127 jiwa/km². Penyebab terjadinya kondisi ini, salah satunya adalah pertambahan penduduk yang melambat. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 yaitu -10,16 persen.

Grafik 2.10

Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



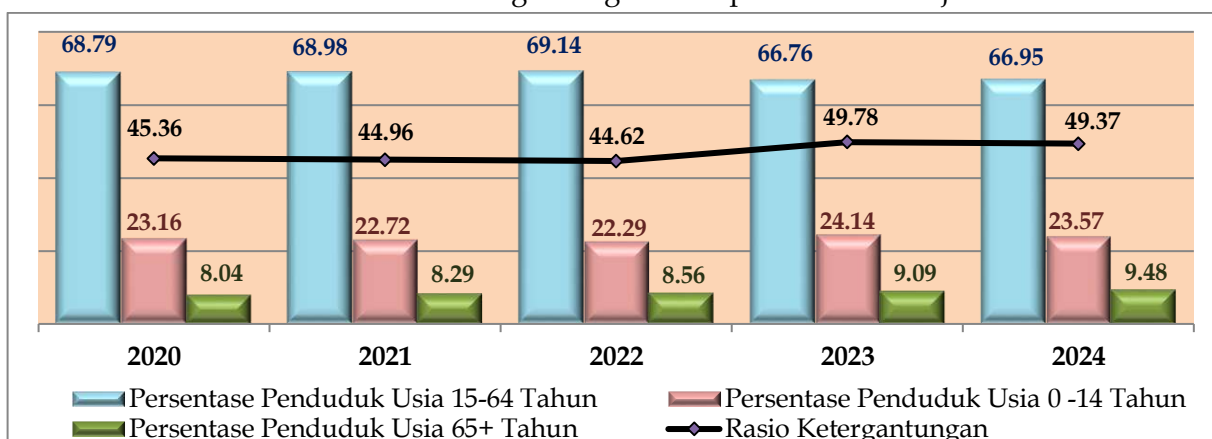
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Komposisi Penduduk

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Kabupaten Tanana Toraja tercatat sebesar 45,36 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung 46 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2022 menjadi 44,62 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung 45 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun. Namun pada tahun 2024 rasio ketergantungan mengalami penurunan menjadi 49,37 angka ini menunjukkan setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung 50 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun.

Grafik 2.11

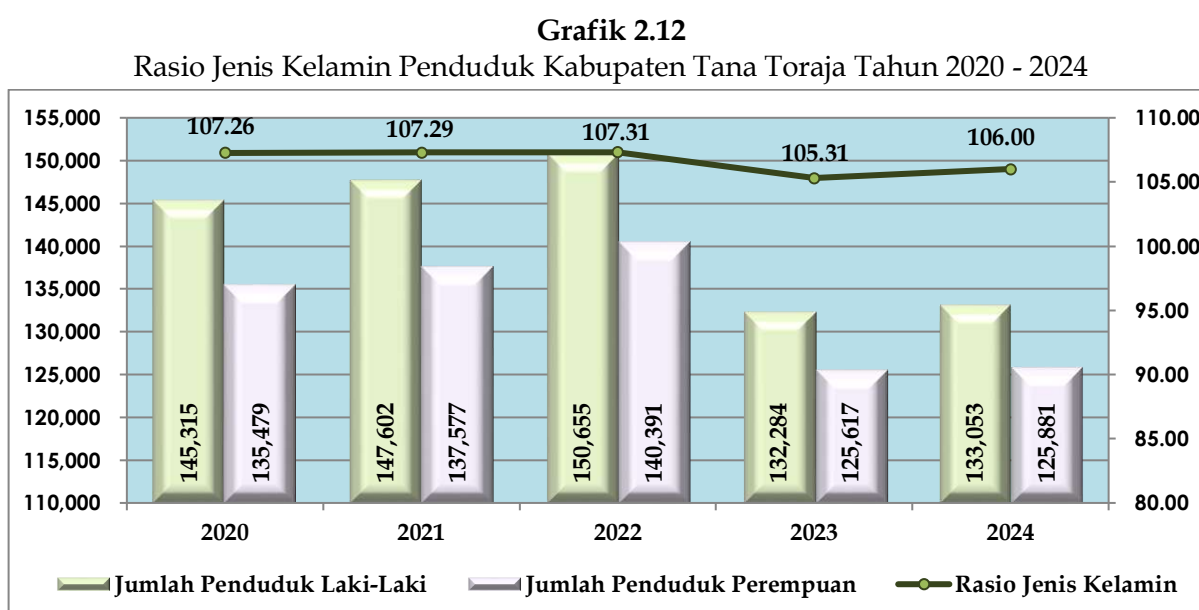
Struktur Penduduk dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

C. Rasio Penduduk

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 106 yang menggambarkan bahwa terdapat 106 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 133.053 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 125.881 jiwa. Perbandingan rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami tren fluktuasi dimana nilai tertinggi tercatat sebesar 107,31 pada tahun 2022.

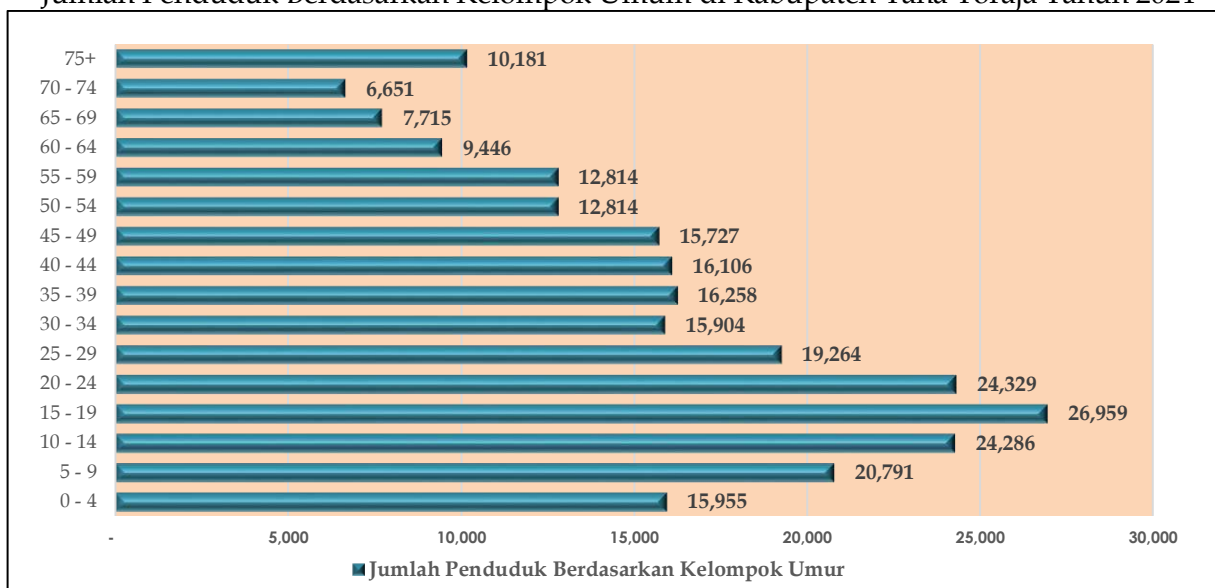


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 berada pada kelompok umur 15 – 19 tahun dengan jumlah 26.959 jiwa disusul kelompok umur 20 - 24 tahun sejumlah 24.326 jiwa. Hal ini menggambarkan jumlah penduduk usia produktif pada kelompok usia 20 – 24 tahun merupakan bonus demografi dimana jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut lebih besar daripada jumlah penduduk pada kelompok usia non produktif. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah dengan peningkatan kualitas SDM, maka kondisi ini akan menjadi modal penting untuk pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Grafik 2.13

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umum di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

D. Kepadatan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk akibat luas wilayah yang bersifat tetap. Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja saat ini sebesar 2.043,62 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 258.934 jiwa sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja sebesar 127 jiwa/km². Berdasarkan data sensus penduduk, Kabupaten Tana Toraja menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang relatif stabil namun cenderung meningkat pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja tercatat 280.794 jiwa, pada tahun 2021 bertambah menjadi 285.179 jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 291.046 jiwa. Namun pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja turun menjadi 257.901 jiwa. Penurunan jumlah penduduk di tahun 2023 dikarenakan adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk per tahun menjadi -10,51. Setelah tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja meningkat kembali menjadi 258.934 jiwa dengan kepadatan penduduk 127 orang per km². Peningkatan jumlah penduduk ini didorong oleh program kesehatan yang semakin baik sehingga berkontribusi dalam pengurangan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Perkembangan kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33

Perkembangan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 - 2024

Kecamatan	Luas Wilayah	2022		2023		2024	
		Jml. Pddk.	Kepadatan	Jml. Pddk.	Kepadatan	Jml. Pddk.	Kepadatan
Bonggakaradeng	205,69	8.239	40	6.990	40	7.069	34
Simbuang	193,81	8.276	42	6.640	42	6.662	34
Rano	88,97	7.926	89	6.610	89	6.613	74
Mappak	165,16	7.266	44	5.840	44	5.850	35
Mengkendek	195,16	37.868	192	33.500	192	33.553	171
Gandangbatu Sillanan	108,07	23.742	219	21.190	219	21.252	197
Sangalla	36,05	8.202	226	7.510	226	7.484	208
Sangalla Selatan	47,55	9.929	208	8.660	208	8.699	183
Sangalla Utara	27,81	9.343	334	8.370	334	8.378	301
Makale	39,54	39.805	1001	36.310	1001	36.835	932
Makale Selatan	61,38	17.314	281	15.490	281	15.424	251
Makale Utara	25,94	15.097	579	13.350	579	12.358	515
Saluputti	87,09	10.129	116	9.930	116	9.444	108
Bittuang	162,42	19.406	119	17.450	119	17.552	108
Rembon	133,77	25.756	192	22.650	192	22.895	171
Masanda	134,07	8.881	66	9.610	66	7.973	59
Malimbong Balepe	210,37	10.813	51	13.380	51	9.598	46
Rantetayo	60,04	15.276	253	7.041	253	13.275	221
Kurra	60,19	7.778	129	7.040	129	7.020	117
TOTAL	2.043,62	291.046	142	257.901	142	258.934	127

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

E. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

Proyeksi demografi memberikan ukuran dan struktur umur penduduk Kabupaten Tana Toraja di masa mendatang. Pemerintah telah melakukan proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan skenario tren dan scenario. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, terdapat hasil perhitungan parameter penduduk Kabupaten Tana Toraja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.34

Asumsi proyeksi demografi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029

Asumsi Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029
Fertility					
TFR	2,62	2,58	2,54	2,51	2,47
GRR	1,27	1,25	1,24	1,22	1,21
NRR	1,23	1,21	1,2	1,19	1,17
Mean age of childbearing	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1
Child-woman ratio	0,36	0,38	0,4	0,4	0,4
Mortality					
Male LE	71,7	71,9	72,1	72,3	72,5
Female LE	75,5	75,6	75,8	76	76,1
Total LE	73,5	73,7	73,9	74	74,2
IMR	16,8	18,4	18	17,6	17,2
U5MR	22,6	21,9	21	20,6	20,1
Total 45q15	111,54	109,83	107,95	106,05	104,15
Vital Rates					
CBR per 1000	21,2	20,8	20,5	20,1	19,7
CDR per 1000	6,3	6,3	6,8	7,1	7,3
RNI percent	1,49	1,46	1,37	1,3	1,24
GR percent	-42,48	-40,93	-39,49	-38,09	-36,75
Annual births and deaths					
Births	6,209	6,198	6,184	6,154	6,107
Deaths	1,836	1,864	2,049	2,174	2,253
Population					
Percent 0-4	9,62	10,07	10,33	10,36	10,12
Percent 5-14	12,88	12,63	12,66	12,99	13,65
Percent 15-24	18,64	17,96	17,18	16,35	15,49
Percent 15-49	55,86	55,31	54,7	54,02	53,31
Percent 15-64	69,23	68,93	68,58	68,19	67,72
Percent 65 and over	8,27	8,37	8,43	8,46	8,51
Percent females 15-49	54,55	54,05	53,5	52,91	52,28
Sex ratio	106,75	106,65	106,58	106,51	106,44
Dependency ratio	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
Median age	30	30	30	31	31

Sumber : Badan Pusat Statistik, diproyeksi Tim Penyusun, 2025

F. Migrasi Penduduk

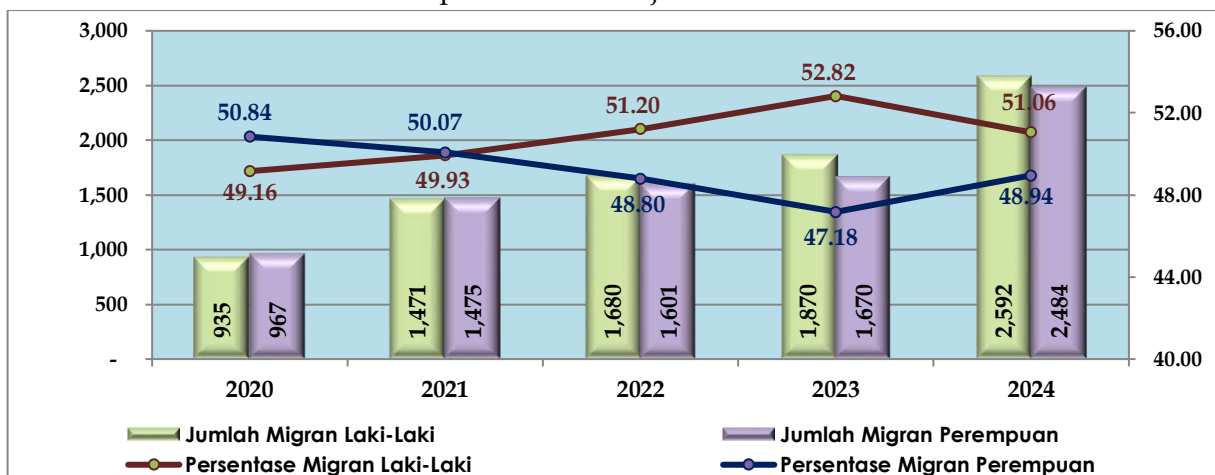
Migrasi penduduk merupakan salah satu mobilitas atau perpindahan penduduk yang terjadi secara permanen atau sifatnya menetap. Berdasarkan sifatnya yang permanen tersebut, maka migrasi penduduk tersebut termasuk faktor yang memengaruhi adanya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Migrasi yang dilakukan oleh penduduk umumnya bertujuan untuk mencari kesejahteraan, keamanan,

ataupun peruntungan hidup yang lebih baik di wilayah yang baru. Pasalnya aktivitas migrasi tersebut bisa dipengaruhi oleh banyaknya faktor, seperti masalah ekonomi, sosial budaya, atau bahkan didorong oleh pandangan politik tertentu.

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024, jumlah migrasi penduduk usia 15 sampai 29 tahun di Kabupaten Tana Toraja bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2020 tercatat ada 1.902 penduduk, kemudian pada tTahun 2022 ada 3.281 penduduk dan meningkat menjadi 3.540 penduduk pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah penduduk yang melakukan migrasi sebanyak 5.076 jiwa. Jika dilihat dari jenis kelamin, pada periode yang sama persentase migrasi penduduk masih didominasi oleh laki-laki, terbanyak pada tahun 2024, kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2021 itupun dengan selisih yang kecil, persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yakni sebesar 50,84 persen pada tahun 2020 dan 50,07 pada tahun 2021. Budaya perempuan melakukan migrasi pada era modern sekarang ini sudah dianggap hal yang biasa. Perempuan masa kini tidak hanya mengurus urusan dalam rumah tangga saja, akan tetapi sudah banyak terlibat kegiatan di luar rumah, bahkan tidak sedikit perempuan melakukan migrasi dengan alasan mencari pekerjaan maupun pendidikan. Pernikahan atau keluarga juga menjadi salah satu alasan migran risen perempuan lebih banyak daripada laki-laki dimana ketika seorang perempuan telah menikah akan memilih ikut tinggal bersama suaminya.

Grafik 2.14

Perbandingan Migrasi Penduduk Usia 15 - 29 Tahun menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui Pembangunan daerah yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, ekonomi yang mandiri, distribusi kesejahteraan yang merata, serta memiliki keberlanjutan. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi Aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kondisi kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut :

2.1.2.1. KESEJAHTERAAN EKONOMI

Gambaran kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja dicerminkan dari kondisi pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, gini rasio, tingkat pengangguran terbuka, Tingkat kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja serta tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan.

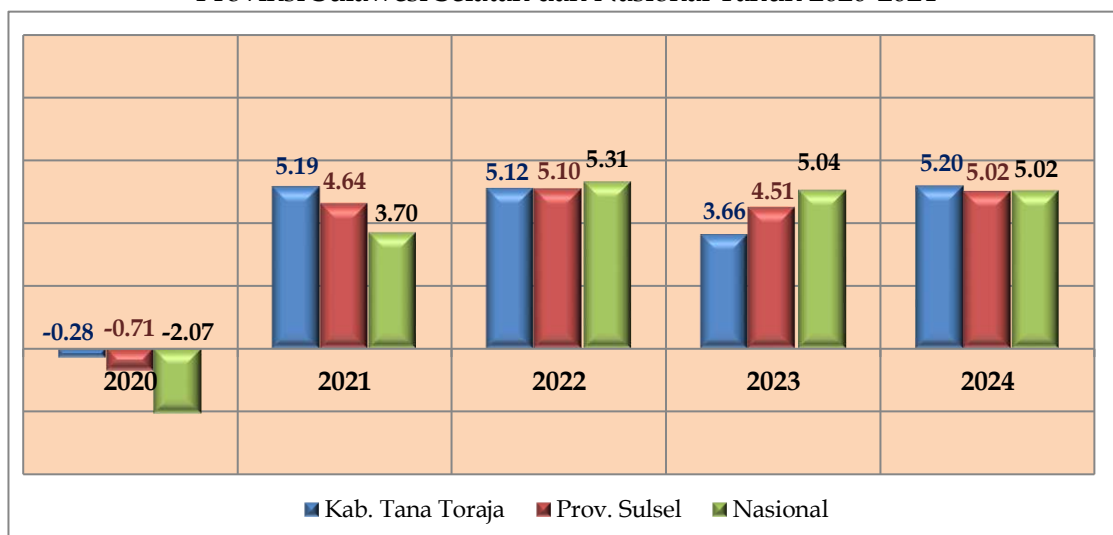
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami tren fluktuatif. Setelah mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 akibat pandemic Covid-19 yang merupakan pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada angka -0,28 persen, tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,19 persen namun mengalami perlambatan pada tahun 2022 sebesar 5,12 persen. Demikian pula pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih lambat sebesar 3,66 persen. Namun pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 5,20 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja utamanya disumbang oleh Sektor Tersier sebanyak 6,16 persen antara lain lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, Transportasi Dan Pergudangan, lapangan usaha Transportasi Dan Pergudangan, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi, lapangan usaha Real Estate, lapangan usaha Jasa Perusahaan, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Jasa Pendidikan, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Selanjutnya penyumbang kedua laju PDRB adalah sektor sekunder sebanyak 3,94 persen sedangkan sektor primer yang terdiri dari

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan sebesar -0,59 persen. Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan dan laju pertumbuhan nasional yang angka sama yaitu 5,02 persen. Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.15

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

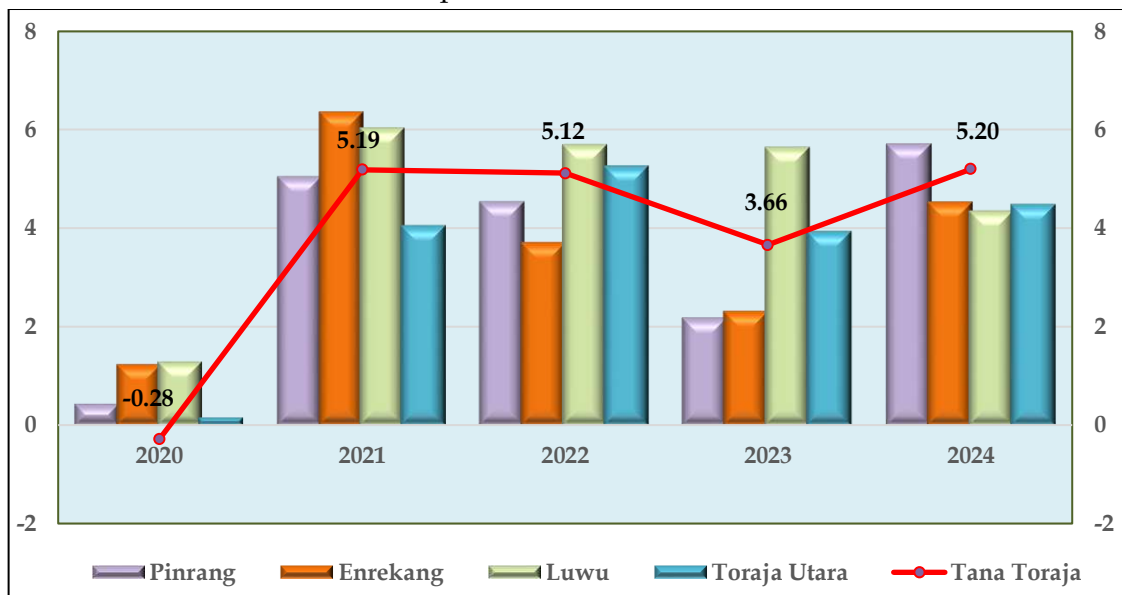


Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 menempati urutan keenam dibawah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pinrang, Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tana Toraja juga diikuti oleh laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah pemekaran, pertumbuhan ekonominya juga mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 4,49 persen dibanding pada tahun 2023 yang hanya sebesar 3,94 persen. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan sebesar 4,54 persen dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 2,33 persen.

Grafik 2.16

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja
dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024



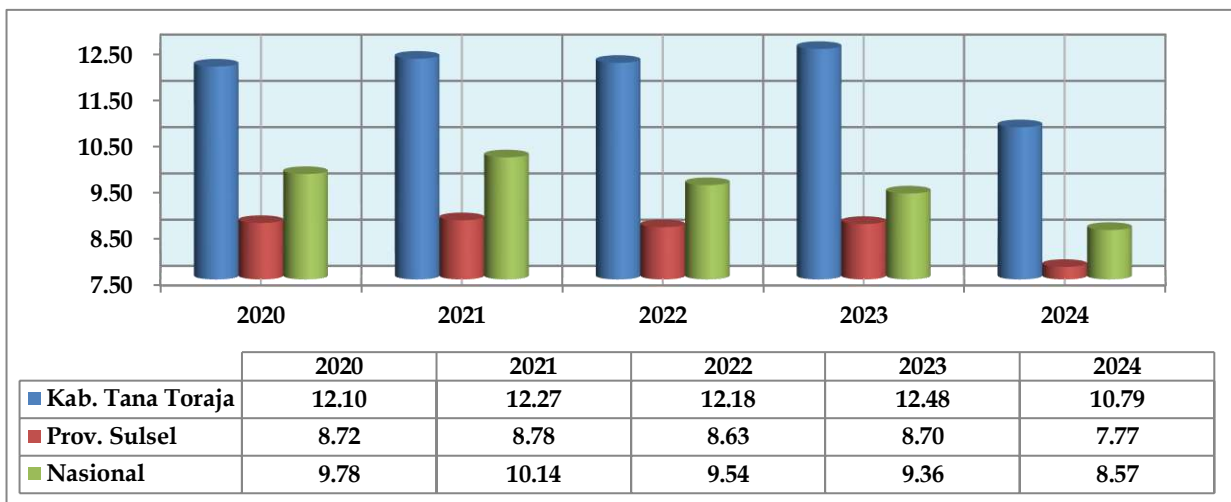
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2020 sebesar 12,10 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2023 pada angka 12,48 persen. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan turun pada angka 10,79 persen. Tingkat kemiskinan di Tana Toraja masih diangka “dua digit” dan lebih besar jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja dipengaruhi oleh faktor peningkatan akses infrastruktur, program pemerintah dan bantuan sosial, pengembangan pertanian dan perkebunan serta peningkatan sektor pariwisata sehingga mendorong meningkatnya pendapatan UMKM lokal, seperti pengrajin, penjual oleh-oleh, dan penyedia jasa transportasi.

Grafik 2.17

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Pada periode yang sama, perkembangan jumlah penduduk miskin di Tana Toraja juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2020 tercatat terdapat 28.410 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Tana Toraja namun pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 29.330 jiwa. Pada tahun 2023 merupakan tahun terbanyak penduduk miskin selama lima tahun terakhir sebanyak 30.230 jiwa. Pada tahun 2024 penduduk miskin menurun drastis menjadi hanya 26.300 jiwa.

Grafik 2.18

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2020-2024

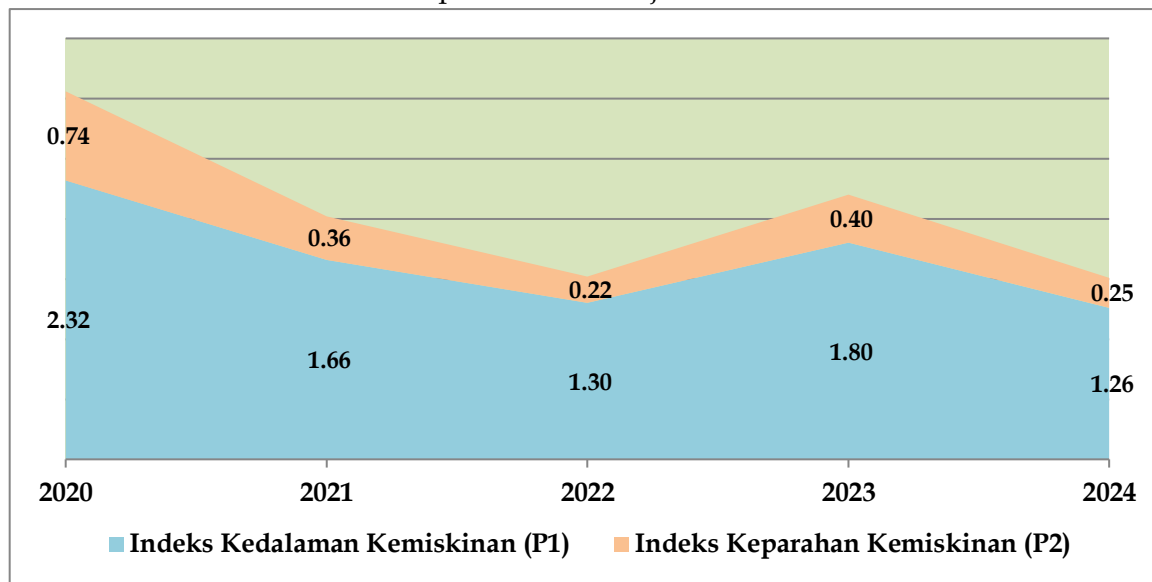


Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2024, Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja sebesar 0,25 dan berada sedikit di bawah provinsi yang mencapai 0,34. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabu. Tana Toraja sebesar 1,26 dan berada di atas provinsi yang mencapai angka 1,38.

Grafik 2.19

Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan
Kabupaten Tana Toraja 2020-2024



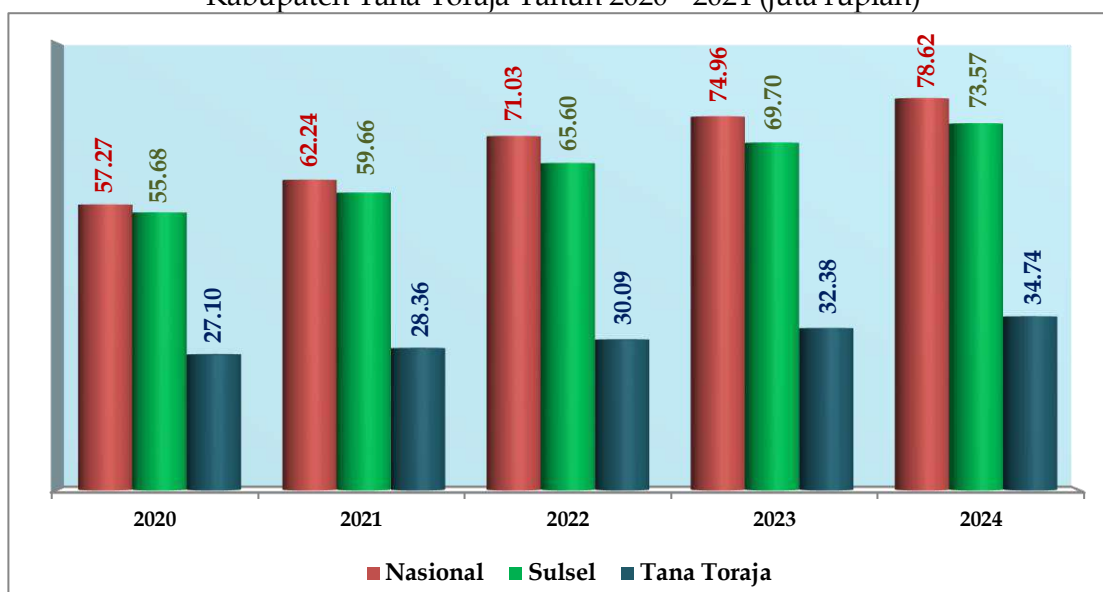
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

C. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. PDRB Perkapita Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.10 juta meningkat menjadi 28,38 juta pada tahun 2021. Capaian tahun 2021

meningkat setelah terjadinya Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Pendapatan rata-rata penduduk Kabupaten Tana Toraja sampai tahun 2024 menunjukkan tren meningkat. Faktor yang mendorong peningkatan ini antara lain adanya pertumbuhan di sektor Pariwisata, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penggunaan teknologi maupun. Selain itu dengan adanya investasi di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur menjadi faktor pendorong meningkatnya PDRB perkapita di Kabupaten Tana Toraja. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Tana Toraja dengan PDRB Perkapita Sulawesi Selatan dan PDB Perkapita Nasional tahun 2020 hingga 2024 selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.20
Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Nasional, Provinsi Sulsel dan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah)

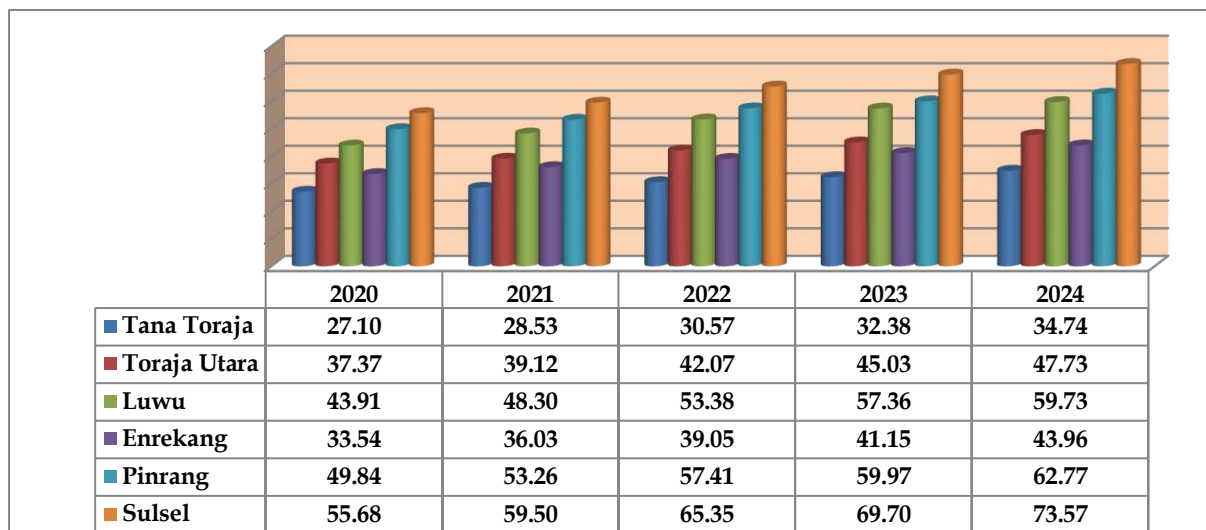


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, nilai PDRB per kapita penduduk Kabupaten Tana Toraja lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Untuk mengetahui gambaran pencapaian PDRB Perkapita Kabupaten Tana Toraja dibandingkan dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.21

Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 – 2024



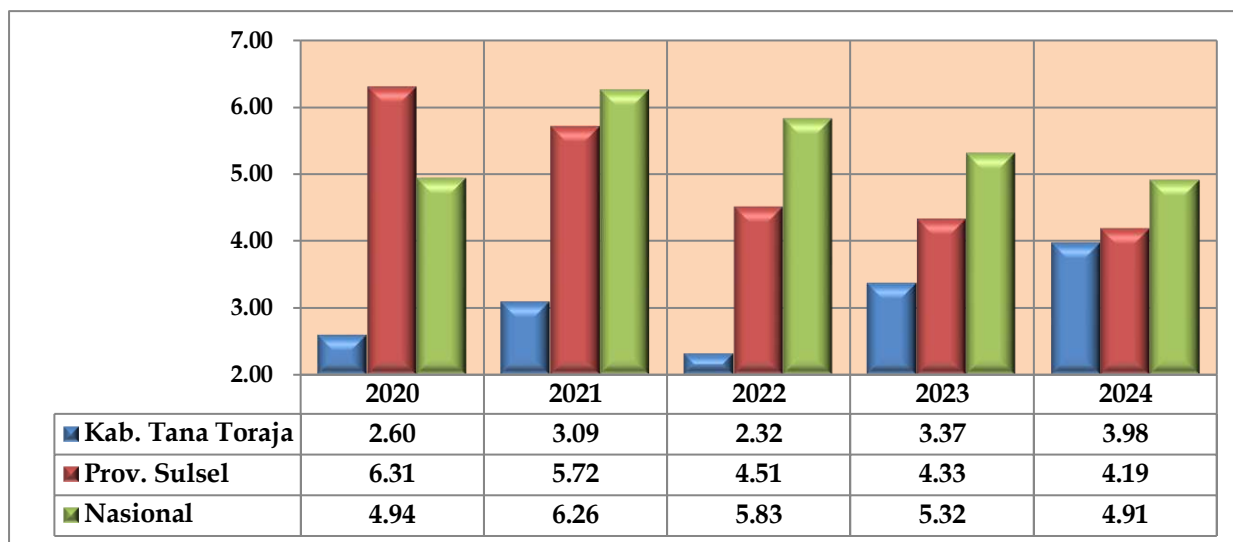
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Secara umum, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,41 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 sebesar 3,37 persen. Peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja. Kondisi ini tidak sejalan dengan capaian Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2023 TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,33 persen berkurang menjadi 4,91 persen pada tahun 2024. Untuk TPT tingkat Nasional pada tahun 2023 sebesar 5,32 persen turun menjadi 4,91 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional mengalami penurunan pada tahun 2024.

Perkembangan TPT kabupaten Tana Toraj, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Grafik 2.22
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

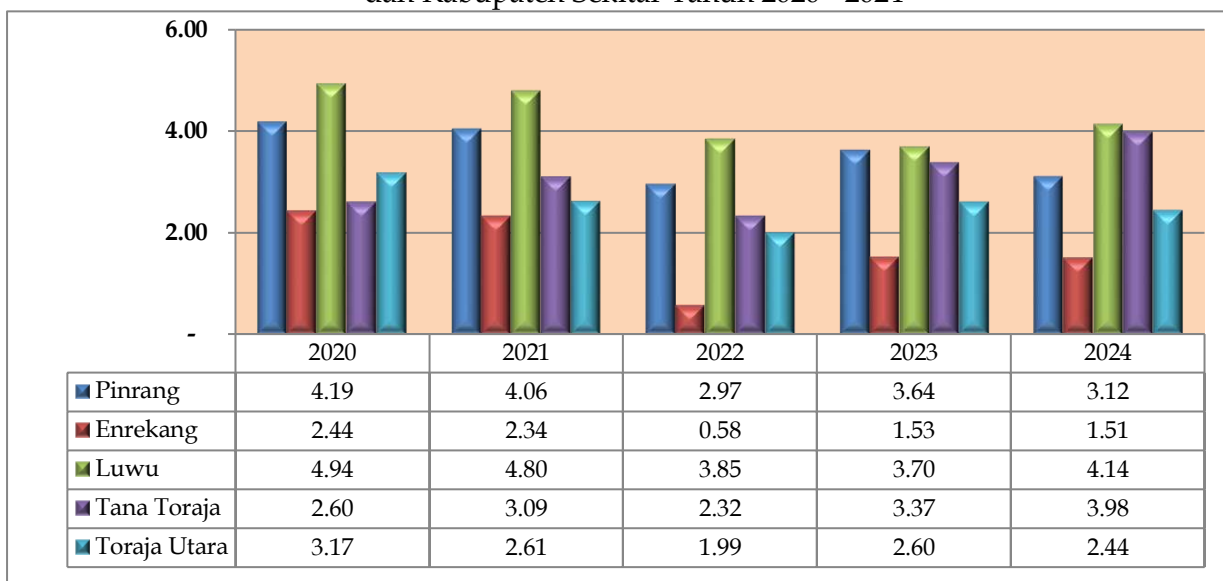


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja menempati urutan ke sepuluh terendah dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dan jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, capaian Kabupaten Tana Toraja lebih baik dibandingkan Kabupaten Luwu, namun masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pinrang, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten dan Kabupaten Enrekang. Peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja, hal ini terjadi karena ketersediaan lapangan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Banyak lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang memasuki pasar kerja setiap tahun, tetapi pertumbuhan sektor formal yang menyerap tenaga kerja terbatas. Selain itu meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka disebabkan oleh ketergantungan pada sektor musiman, hal ini terjadi karena banyak masyarakat menggantungkan pekerjaan pada sektor pertanian musiman dan pariwisata, yang sifatnya tidak stabil dan tergantung musim atau situasi ekonomi.

Grafik 2.23

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tana Toraja
dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020 - 2024



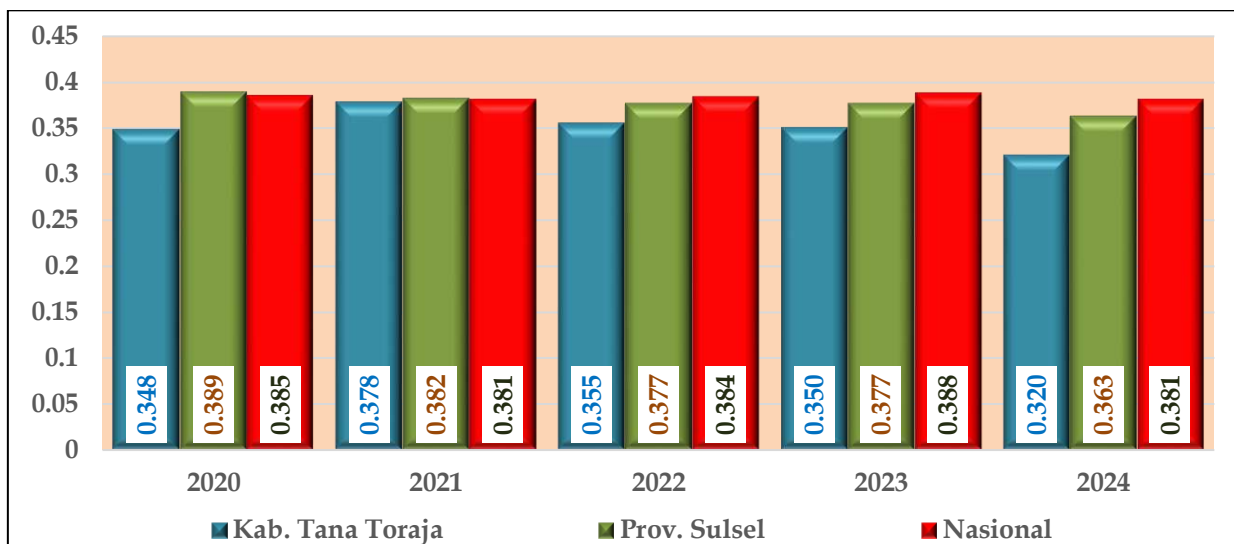
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

E. Gini Ratio (Indeks Gini)

Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kecenderungan perbaikan. Pada tahun 2022 gini ratio Kabupaten Tana Toraja sebesar 0,348 dan pada tahun 2024 gini ratio sebesar 0,320, kondisi ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Tana Toraja semakin kecil. Penurunan Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan sosial yaitu pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal, adanya peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan yang berasal dari program pemerintah seperti bantuan sosial (PKH, BPNT, BLT) sehingga meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Indeks Gini di Kabupaten Tana Toraja lebih baik dari provinsi dan nasional yang artinya bahwa ketimpangan di Kabupaten Tana Toraja lebih kecil dari rata-rata provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2.24

Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 -2024

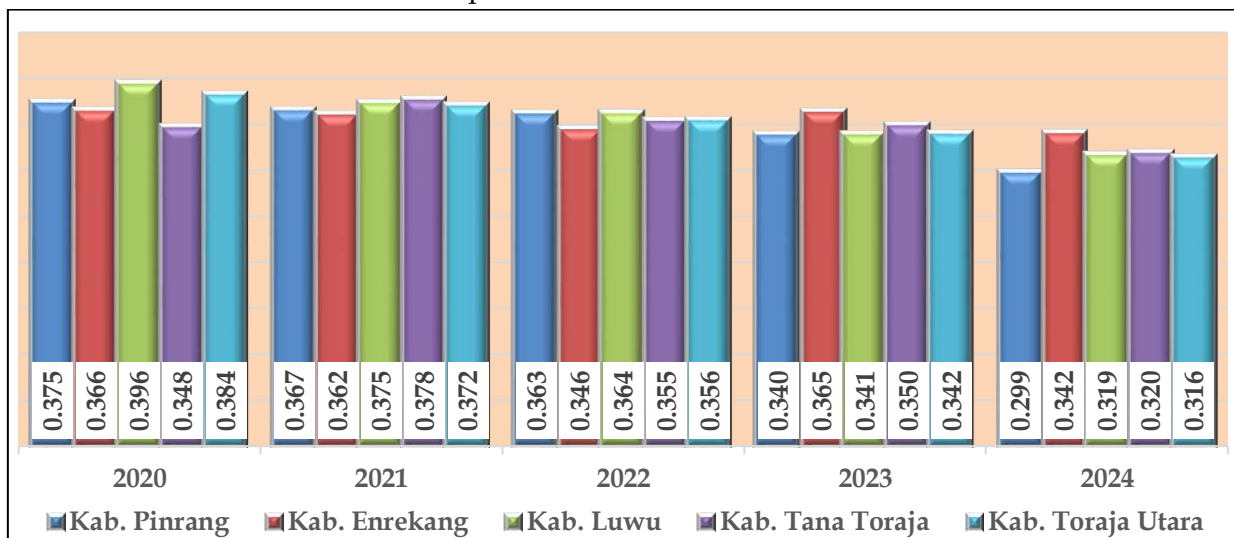


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar, capaian indeks Gini Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sebesar 0,320 masih lebih baik dari Kabupaten Enrekang dengan capaian 0,342 namun masih di bawah Kabupaten Luwu sebesar 0,319, Kabupaten Toraja Utara sebesar 0,316 dan Kabupaten Pinrang sebesar 0,299. Perbandingan capaian Indeks Gini Kabupaten Tana Toraja dan kabupaten sekitar dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.25

Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Tana Toraja dengan
Kabupaten Sekitar Tahun 2020-2024

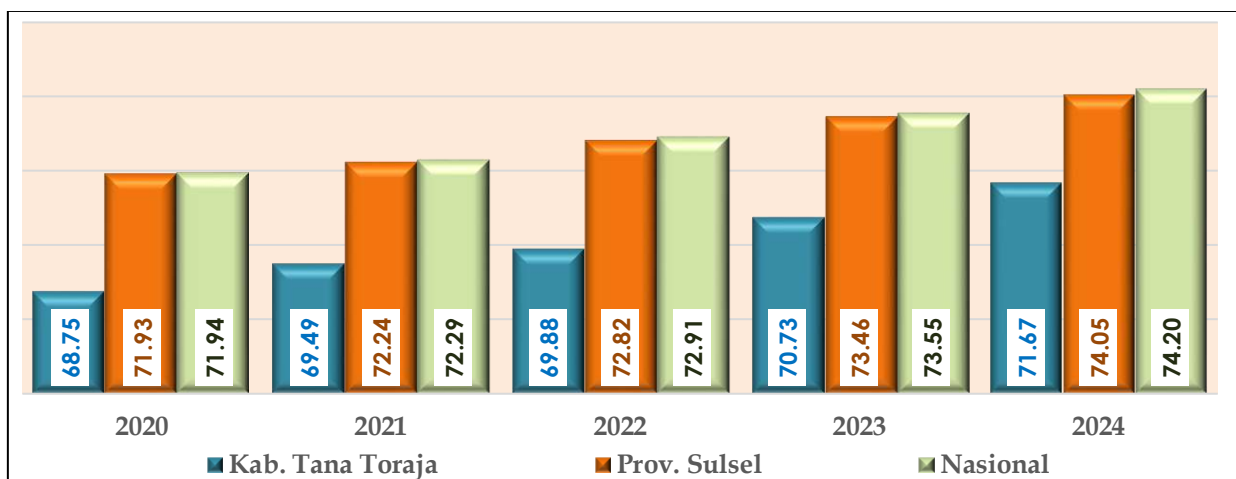


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum, capaian IPM Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,01 persen, dimana capaian IPM pada tahun 2020 sebesar 68,75 dan meningkat menjadi 71,67 di tahun 2024. Peningkatan tersebut didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya yang terdiri dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun kondisi IPM di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tersebut selalu di bawah angka pencapaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Meningkatnya Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Tana Toraja didorong oleh kemajuan dari tiga dimensi utama yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak seperti adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, perbaikan di sektor kesehatan, perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan pendapatan per Kapita.

Grafik 2.26
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

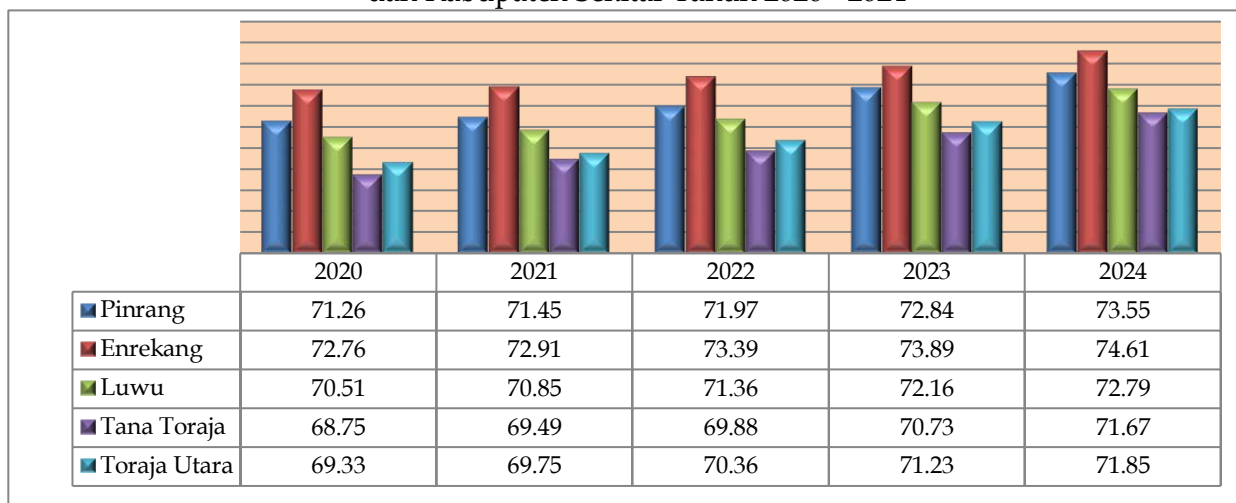


Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Meskipun terus mengalami perkembangan, namun Capaian IPM Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 masih menempati posisi kesepuluh terendah di Sulawesi Selatan dan serta paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya perbandingan IPM Kabupaten Tana Toraja dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.27

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Toraja
dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Pertumbuhan positif merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Tana Toraja yang lebih baik. Selama kurun waktu lima tahun terakhir Rata-rata Lama Sekolah mengalami tren peningkatan dimana pada tahun 2024 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja sebesar 8,77 tahun yang artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tana Toraja adalah selama 8,77 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas 2.

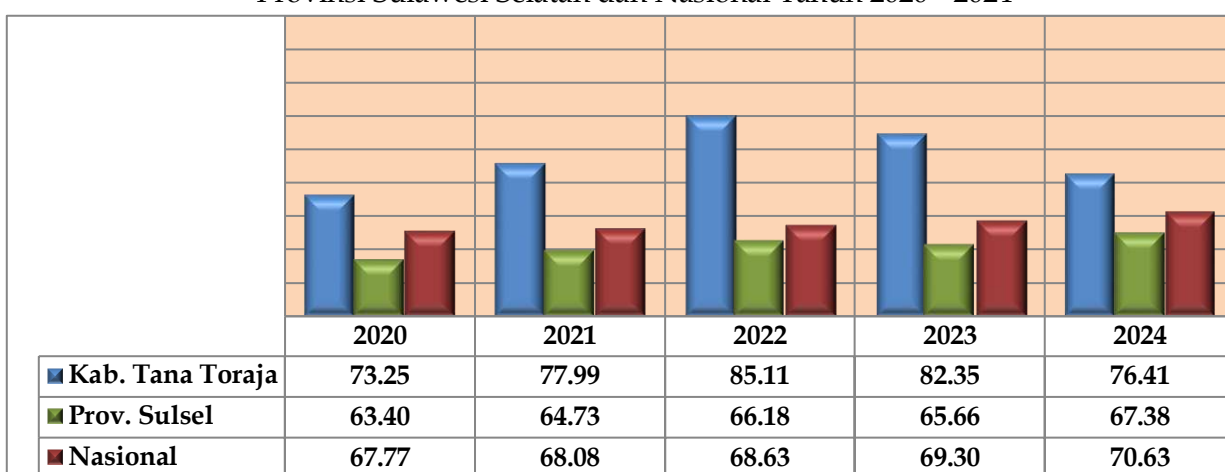
G. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja serta merupakan Indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan penduduk usia produktif terhadap kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/ daerah. Semakin tinggi TPAK, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di daerah tersebut ingin terlibat dalam kegiatan produksi, sehingga produktivitas daerah dapat didorong, namun jika yang terjadi sebaliknya, maka bonus demografi Kabupaten Tana Toraja akan menjadi bencana demografi.

Pada Tahun 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 76,41 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 82,35 persen seiring dengan meningkatnya jumlah TPT dari 3,98 persen pada tahun 2023 menjadi 3,98 persen pada tahun 2024. Nilai TPAK Kabupaten Tana Toraja masih jauh di atas capaian provinsi sebesar 67,38 persen dan capaian Nasional sebesar 70,63 persen.

Grafik 2.28

Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



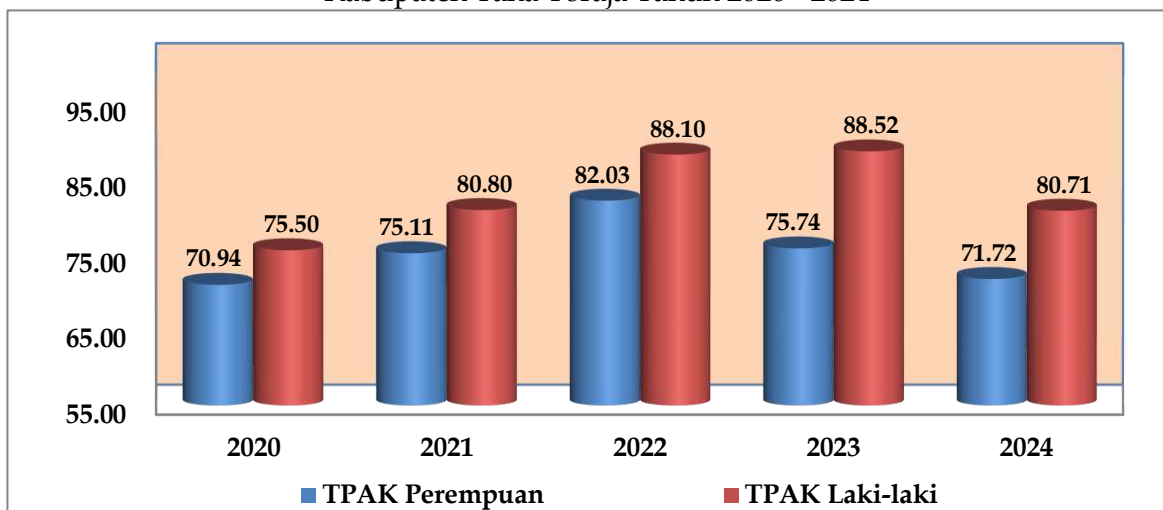
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

H. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pada tahun 2024, berdasarkan jenis kelamin TPAK laki-laki sebesar 80,71 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK Perempuan yang tercatat sebesar 71,72 persen. Kondisi di Kabupaten Tana Toraja saat ini menggambarkan bahwa paradigma laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga sudah mulai terkikis. Hal ini ditandai bahwa meskipun TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK Perempuan namun selisihnya tidak terlalu besar. Berdasarkan nilai TPAK tahun 2024 menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja sekitar 81 orang sedangkan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan ada sekitar 73 orang yang termasuk angkatan kerja. Hal ini menandakan bahwa dominasi laki-laki sudah mulai berkurang dalam dunia kerja. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.29

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.2. KESEHATAN UNTUK SEMUA

Aspek kesejahteraan masyarakat tidak hanya digambarkan melalui kesejahteraan ekonomi, namun juga digambarkan melalui kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini dapat ditunjukkan oleh beberapa kondisi bidang kesehatan, perlindungan sosial, agama dan kebudayaan, serta keluarga dan kesetaraan gender.

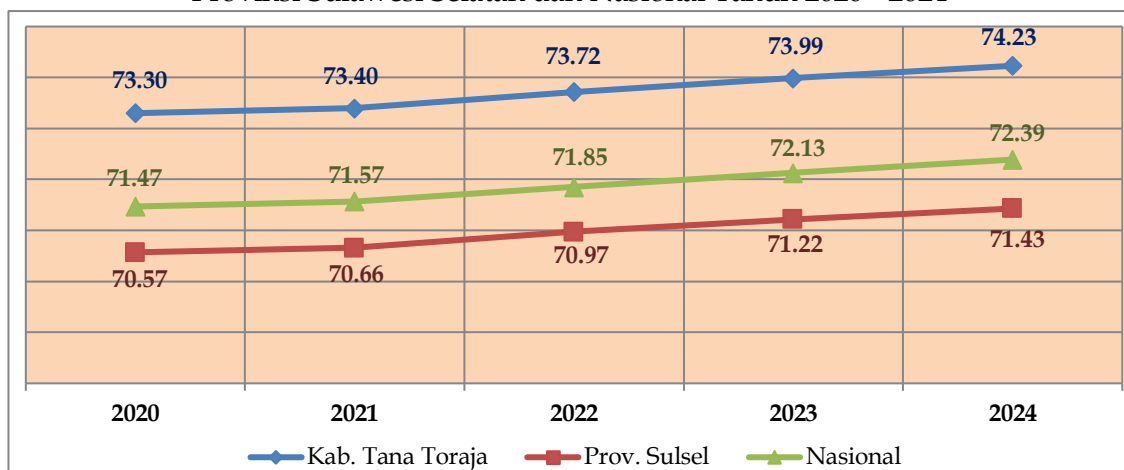
A. Usia Harapan Hidup

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang menggambarkan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi capaian Umur Harapan Hidup maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut relevan dengan

capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tana Toraja sebesar 73,30 tahun. Capaian tersebut mengalami peningkatan setiap tahun dimana pada tahun 2024 tercatat menjadi 74,23 tahun. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 merupakan yang tertinggi diantara 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. Capain Umur Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,43 tahun dan Nasional sebesar 72,39 tahun.

Grafik 2.30
Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



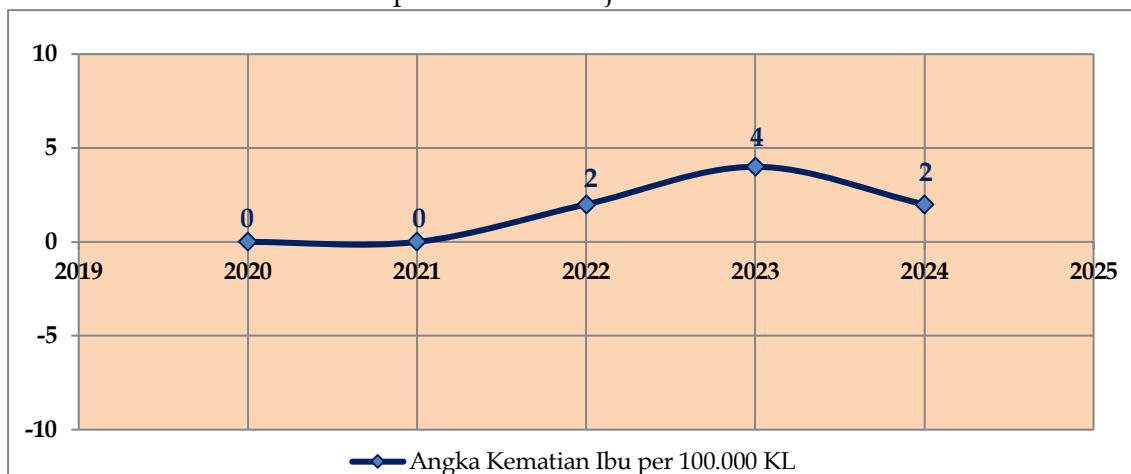
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Grafik 2.31

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Dari grafik terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024, AKI tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 4 Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tercatat tidak ada Kematian Ibu dari 100.000 Kelahiran Hidup. Adanya kasus kematian ibu disebabkan oleh kondisi dimana ibu tidak siap mengalami kelahiran yaitu mengalami 4T (terlalu sering, terlalu banyak, terlalu muda dan terlalu tua) melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan seperti kasus pendarahan telah mengalami penurunan namun karena infeksi penyakit dan penyakit penyerta (jantung, hipertensi, kanker dll) mengalami peningkatan.

C. Prevalensi Stunting

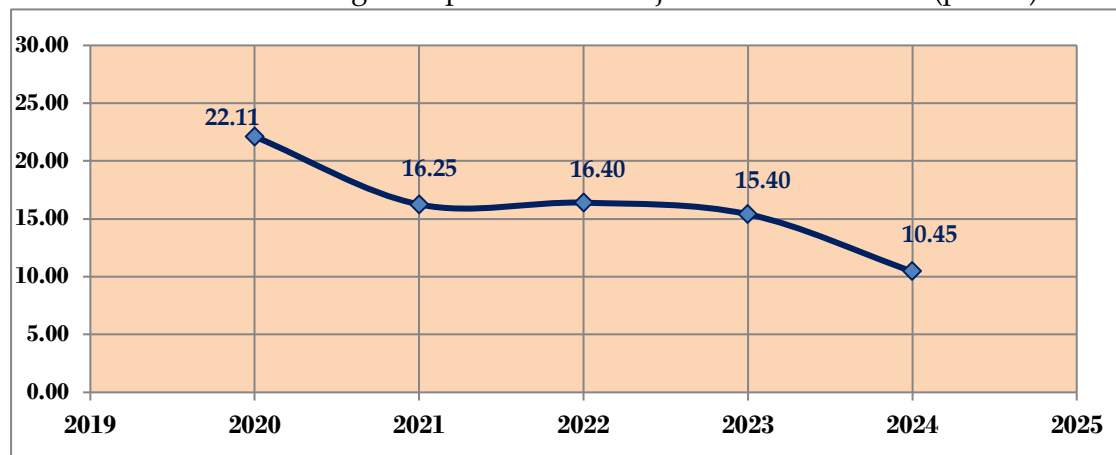
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memberikan gambaran status gizi balita (stunting, wasting, underweight, overweight) yang determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Pemberian kolostrium dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada stunting. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka stunting di Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 sebesar 22,11 persen dan menjadi 10,45 persen pada tahun 2024, yang artinya terjadi penurunan rata-rata sebesar 4,78

persen per tahun. Beberapa faktor penghambat laju penurunan stunting adalah perilaku keluarga yang belum memahami secara komprehensif akan pentingnya menjaga kualitas janin dengan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil termasuk pencegahan penyakit. Hambatan lainnya yang ditemukan adalah rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran program untuk pencegahan stunting secara konvergen di tingkat kabupaten hingga desa, sasaran intervensi yang kurang tepat, serta kurangnya tenaga gizi dan sebarannya yang belum merata.

Grafik 2.32

Prevalensi Stunting Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024 (persen)



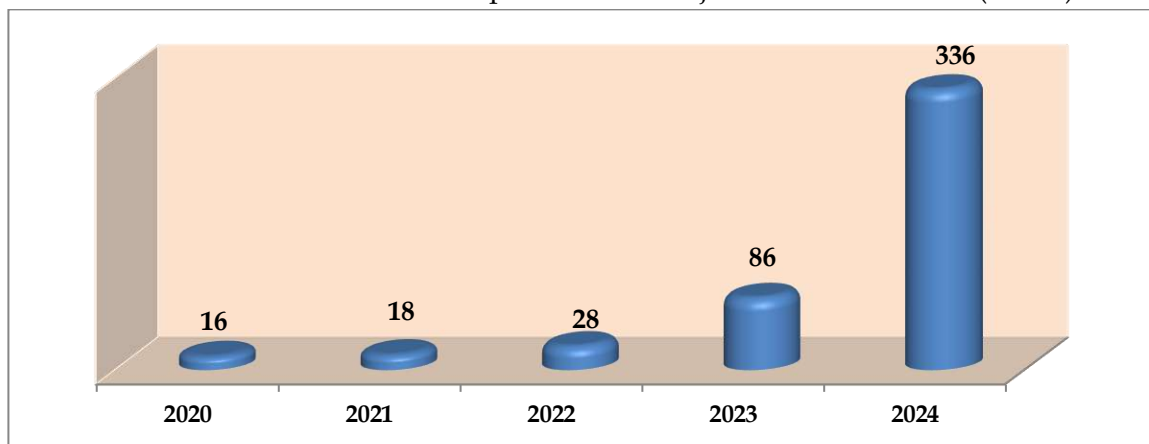
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2025

D. Insidensi Tuberkulosis

Beban masalah penyakit Tuberkulosis di dunia dan setiap wilayah direpresentasikan dalam angka kejadian Insiden, Prevalensi, dan Kematian akibat penyakit Tuberkulosis (TB). Penghitungan insiden TBC ini termasuk orang yang hidup dengan human immunodeficiency virus (HIV). Jumlah Kasus Insidensi Tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2020 tercatat ada 16 kasus per 100.000 penduduk kemudian turun menjadi 18 kasus pada tahun 2021. Namun setelah itu terus mengalami kenaikan setiap tahunnya Dimana pada tahun 2022 tercatat ada 28 kasus kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 86 kasus per 100.000 penduduk dan di tahun 2024 meningkat drastis menjadi 336 kejadian tuberkolosis di Kabupaten Tana Toraja Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.33

Insidensi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024 (Kasus)

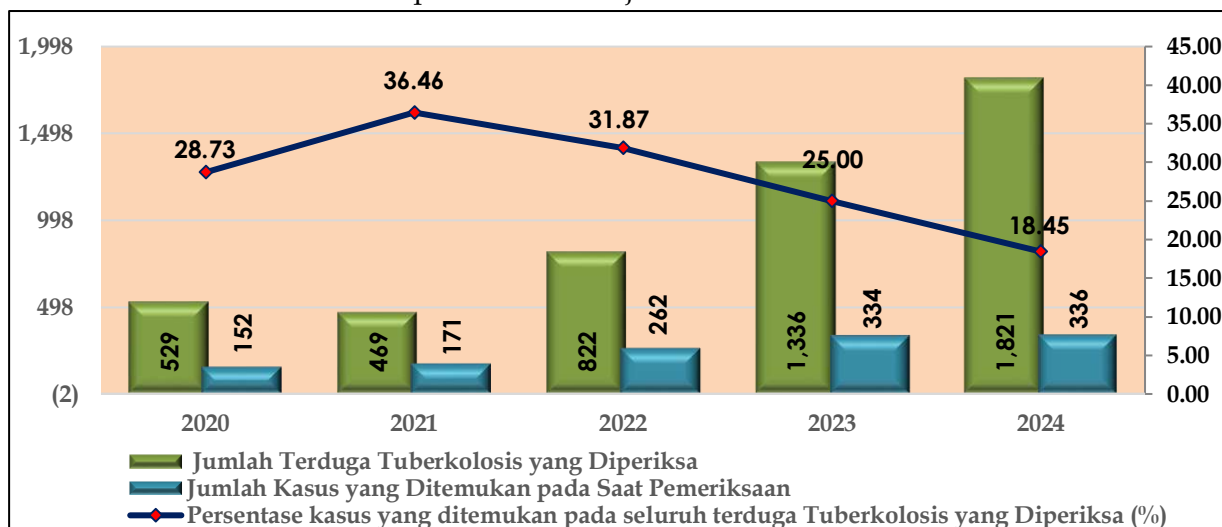


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Cakupan penemuan pada terduga kasus tuberkulosis diukur dari perbandingan antara jumlah kasus yang ditemukan dengan jumlah terduga tuberculosi yang diperiksa. Cakupan penemuan pada terduga kasus tuberculosi di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami tren peningkatan dari 28,73 persen pada tahun 2020 menjadi 36,46 pada tahun 2021 namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan dimana tahun 2022 tercatat menjadi 31,87 persen kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 18,45 persen.

Grafik 2.34

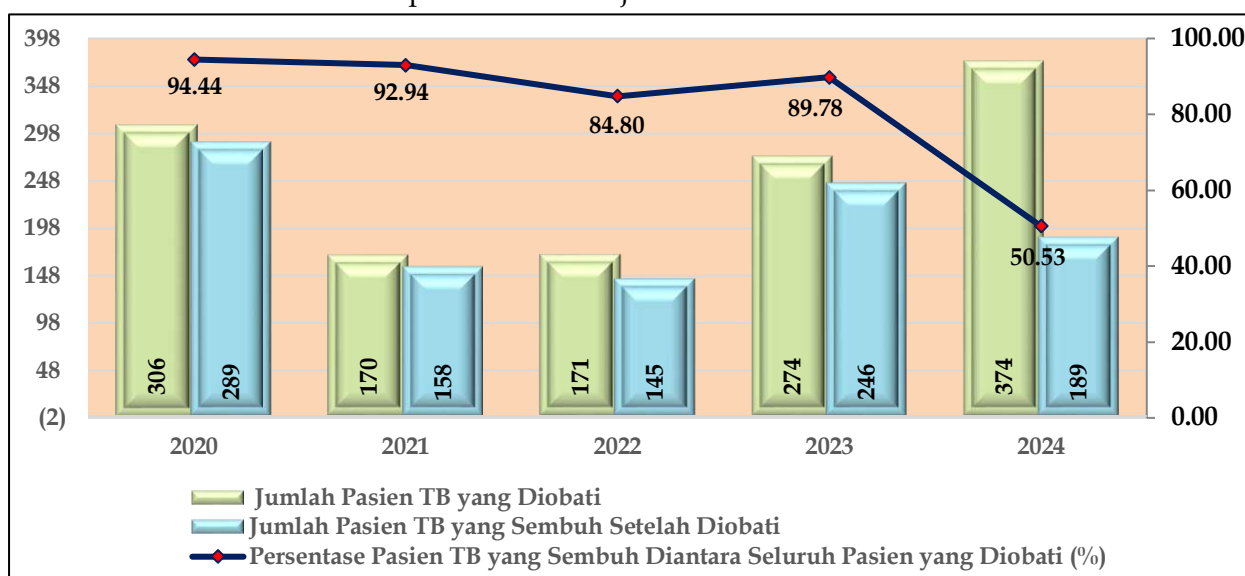
Cakupan Penemuan Tuberkulosis
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis diukur dari persentase pasien yang sembuh diantara seluruh pasien yang diobati. Pada tahun 2024, Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Tana Toraja sebesar 50,53 persen sedangkan capaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2020 sebesar 94,44 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.35
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



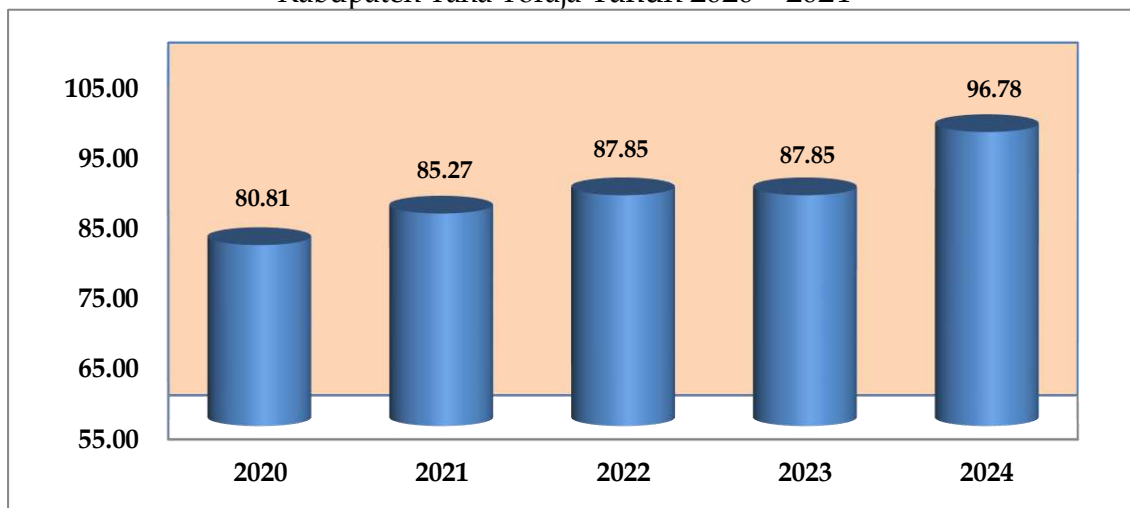
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2025

E. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap penduduk Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera yang diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care). Kepesertaan JKN penduduk Tana Toraja meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kepesertaan JKN tercatat sebesar 80,81 persen kemudian meningkat menjadi 96,78 persen di tahun 2024.

Grafik 2.36

Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.2.3. PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN MERATA

A. Literasi Membaca

Literasi membaca adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Kemampuan literasi terdiri atas kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks.

Tabel 2.35

Capaian Literasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2024

Jenjang	Skor Literasi Rapor Tahun 2022	Skor Literasi Rapor Tahun 2023	Skor Literasi Rapor Tahun 2024	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Peringkat Secara Nasional
SD	46,51	51,06	53,00	Naik 1,94	Peringkat Menengah (41% – 60%)
SMP	56,92	59,40	60,00	Naik 0,60	Peringkat Menengah (41% – 60%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik jenjang pendidikan SD maupun SMP, skor literasi di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dimana jenjang Sekolah Dasar (SD) mengalami peningkatan sebesar 1,94 poin dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami kenaikan 0,60 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

B. Numerasi

Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Terdapat beberapa aspek dalam kemampuan numerasi yaitu kompetensi pada domain bilangan, domain aljabar, domain geometri, domain data dan ketidakpastian, kompetensi mengetahui, kompetensi menerapkan dan kompetensi menalar.

Tabel 2.36
Capaian Numerasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2024

Jenjang	Skor Numerasi Rapor Tahun 2022	Skor Numerasi Rapor Tahun 2023	Skor Numerasi Rapor Tahun 2024	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Peringkat Secara Nasional
SD	26,16	48,20	50,00	Naik 1,80	Peringkat Menengah (41% – 60%)
SMP	52,66	52,59	54,00	Naik 1,41	Peringkat Menengah (41% – 60%)

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

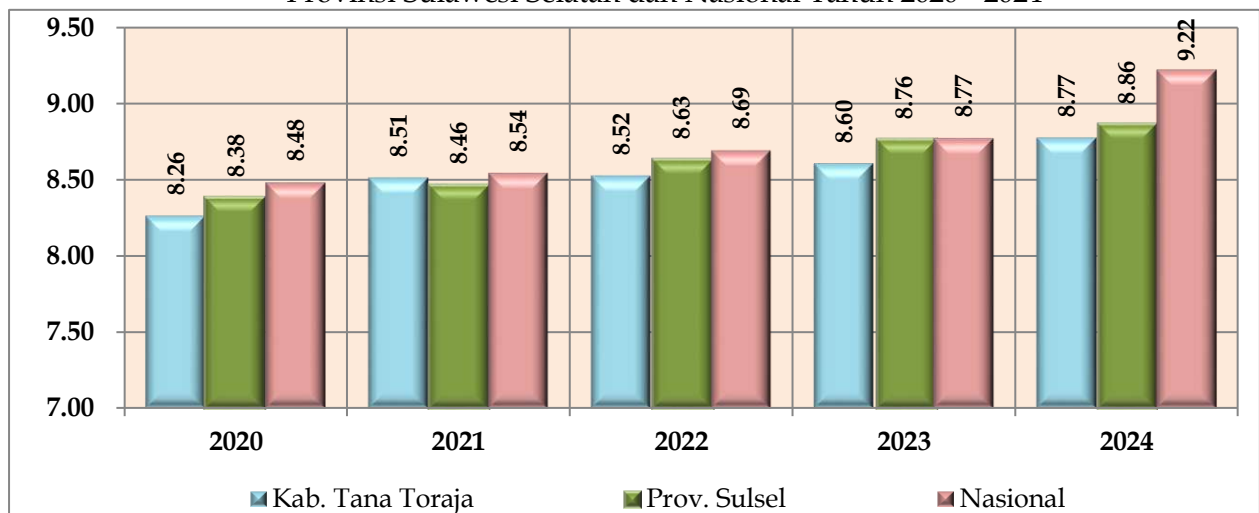
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa skor numerasi terjadi perubahan yang signifikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan perubahan skor naik 1,80 poin sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama hanya mengalami sedikit kenaikan yakni sebesar 1,41 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah yaitu jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan beberapa informasi yaitu : a) partisipasi sekolah; b) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; c) ijazah tertinggi yang dimiliki; dan d) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian Kabupaten Tana Toraja selalu dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional kecuali pada tahun 2021, capaian Kabupaten Tana Toraja melampaui capaian Provinsi Sulawesi Selatan namun masih di bawah capaian Nasional. Untuk mengetahui perbandingan capaian angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja, Provinsi

Sulawesi Selatan dan Nasional dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.37
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



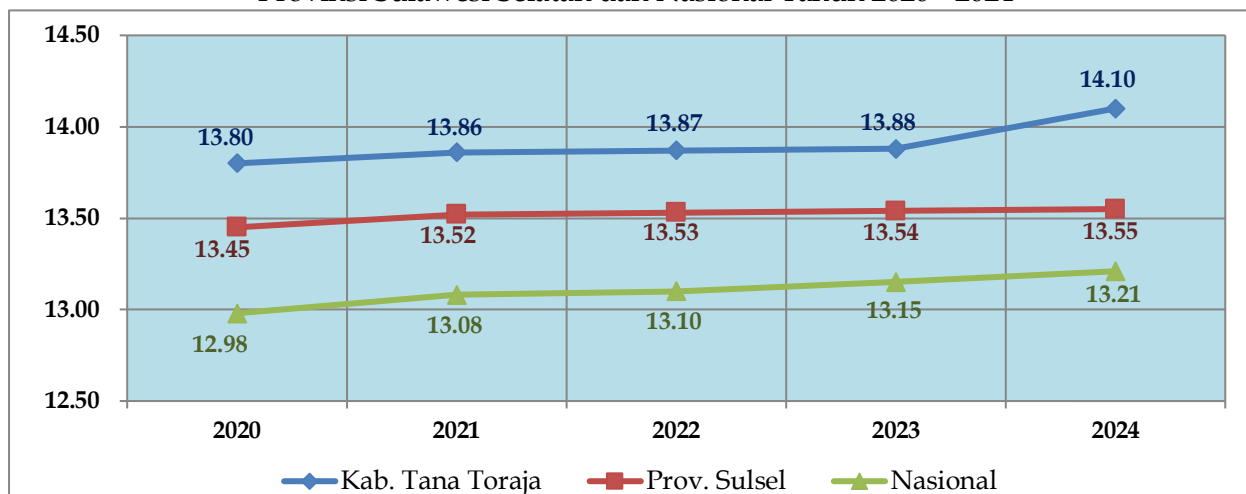
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

D. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak usia sekolah. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tana Toraja dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang menggembirakan. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 13,80 tahun kemudian meningkat menjadi 14,10 pada Tahun 2024. Capaian tersebut berada di atas capaian Sulawesi Selatan dan Nasional. Angka capaian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Tana Toraja memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 13 tahun lebih atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma II.

Grafik 2.38

Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



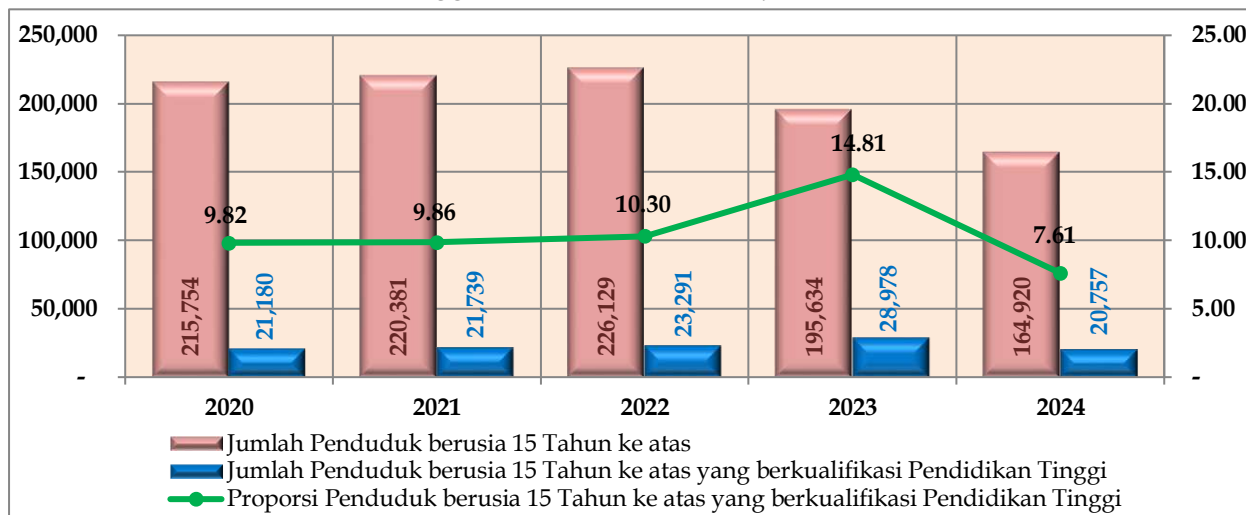
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

E. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing harus didukung oleh akses pendidikan yang berkualitas dan merata dengan sasaran meningkatkan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi khususnya penduduk usia 15 tahun ke atas. Secara umum jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2023 semakin meningkat dimana tahun 2020 tercatat ada 215.754 penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan tinggi atau sekitar 9,81 persen dari jumlah penduduk di atas 15 tahun kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 28.978 penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan tinggi atau sekitar 14,81 persen. Namun pada tahun 2024 proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Tana Toraja turun menjadi 7,61 persen, dimana hanya 12,58 persen Penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi. Perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.39

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



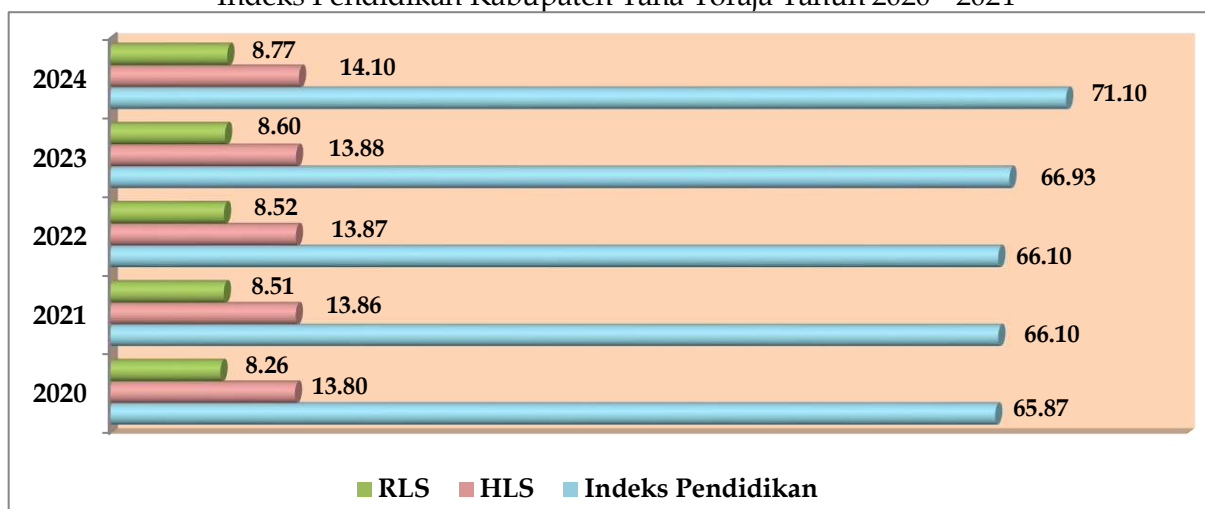
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

F. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan berdasarkan metode baru yang digunakan oleh BPS memperhitungkan 2 faktor yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) merupakan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan didapatkan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS dihitung pada rentang usia 7 tahun ke atas sesuai kebijakan program wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pemilihan rentang umur 25 tahun ke atas pada penghitungan RLS diasumsikan bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Berdasarkan standar internasional yang digunakan UNDP batas maksimum Harapan Lama Sekolah 18 tahun sedangkan batas maksimum Rata-rata Lama Sekolah 15 tahun. Indeks Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja pada kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tana Toraja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.40

Indeks Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.2.4. PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merujuk pada partisipasi tenaga kerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada pekerja terhadap risiko-risiko kerja. Sektor pertanian merupakan bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Tana Toraja. Pada tahun 2020 sebanyak 96.673 orang atau sekitar 79,34 persen dari angkatan kerja Tana Toraja bekerja di sektor ini. Sektor ini juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Tana Toraja. Adapun perusahaan yang menerapkan BPJS Ketenagakerjaan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2.638 orang dari 63 perusahaan yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Setelah tahun 2024 jumlah tenaga kerja yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menurun menjadi 2.544 orang dari 132 perusahaan. Penurunan jumlah pegawai yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disebabkan oleh tingginya angka pergantian karyawan (Turnover), terutama sektor padat karya, tingkat pergantian karyawan cukup tinggi. Hal ini menyulitkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja baru secara tepat waktu, sehingga beberapa pekerja tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2.37

Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

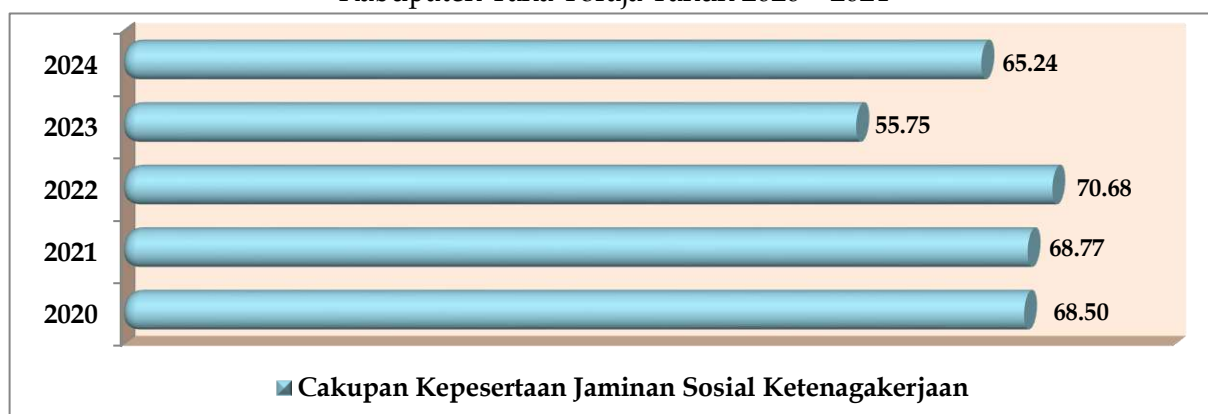
Tahun	Penerapan BPJS Ketenagakerjaan		Keterangan
	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	
2020	63	2.638	-
2021	73	2.729	-
2022	69	2.740	-
2023	84	2.040	-
2024	132	2.544	-

Sumber ; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Tana Toraja, 2025

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 angka cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Tana Toraja sebanyak 68,50 angka ini meningkat di tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi 68,77 dan 70,68. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Tana Toraja hanya berada pada angka 55,75. Penurunan angka ini karena alokasi anggaran yang terbatas. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya bersama antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat. Peningkatan sosialisasi, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk memperluas cakupan kepesertaan Jamsostek.

Grafik 2.41

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024



Sumber ; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 persentase tenaga kerja formal di Kabupaten Tana Toraja sebesar 20,62 persen. Sementara itu data Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal sejumlah 1 orang jumlah ini belum bertambah sejak tahun 2023. Upaya Pemerintah terkait peningkatan partisipasi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal digambarkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan bahwa perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota 1 persen dari jumlah tenaga kerja di sektor swasta dan 2 persen di instansi pemerintah. Atas dasar kebijakan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mendorong inklusi disabilitas dalam sektor ketenagakerjaan dengan membuka formasi penerimaan ASN bagi penyandang disabilitas, hal ini ditunjukkan oleh pengumuman penerimaan CPNS dan PPPK yang mencakup formasi khusus bagi penyandang disabilitas.

2.1.2.5. BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A. Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/ Fasilitas

Dukungan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah khususnya pada sektor keagamaan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama khususnya di Kabupaten Tana Toraja. Dukungan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja antara lain sosialisasi kerukunan umat beragama, seminar moderasi beragama serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sudah terbentuk di setiap kecamatan sejak tahun 2019. Meskipun rutin dilaksanakan setiap tahun, namun pada tahun 2020 dan tahun 2021 kegiatan sosialisasi kerukunan umat beragama tidak dapat dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan Pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38

Persentase Kegiatan Keagamaan yang Mendapatkan Dukungan/Fasilitasi
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

Kegiatan Keagamaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	0 %	0 %	100 %	100 %	100%
• Target	9 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.
• Realisasi	-	-	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.
b. Seminar Moderasi Beragama	-	-	100 %	100 %	100 %
• Target	-	-	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.
• Realisasi	-	-	1 Keg.	1 Keg.	1 Keg.
c. Terbentuknya FKUB Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

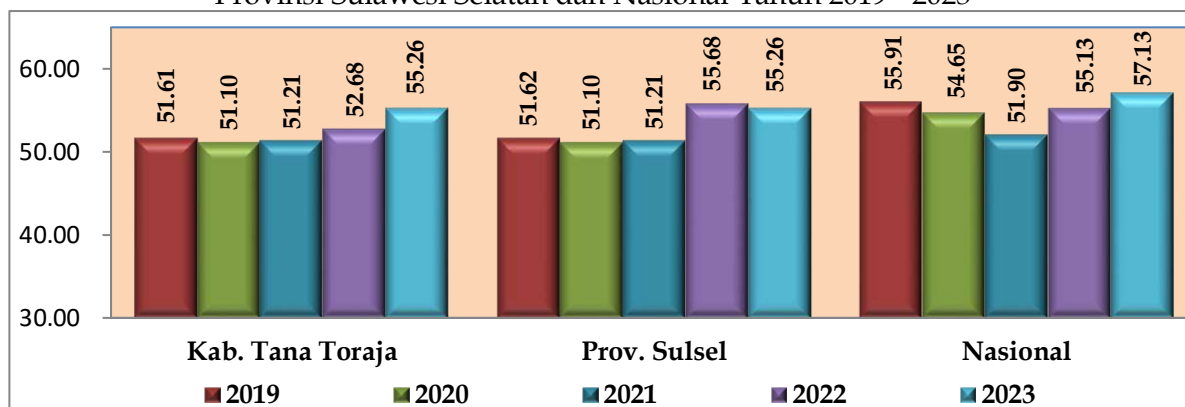
Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan dibentuk oleh 7 dimensi meliputi Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Tana Toraja dalam Kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada skor IPK Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2019 sebesar 51,61 kemudian pada tahun 2023 menjadi 55,26.

Grafik 2.42

Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 - 2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

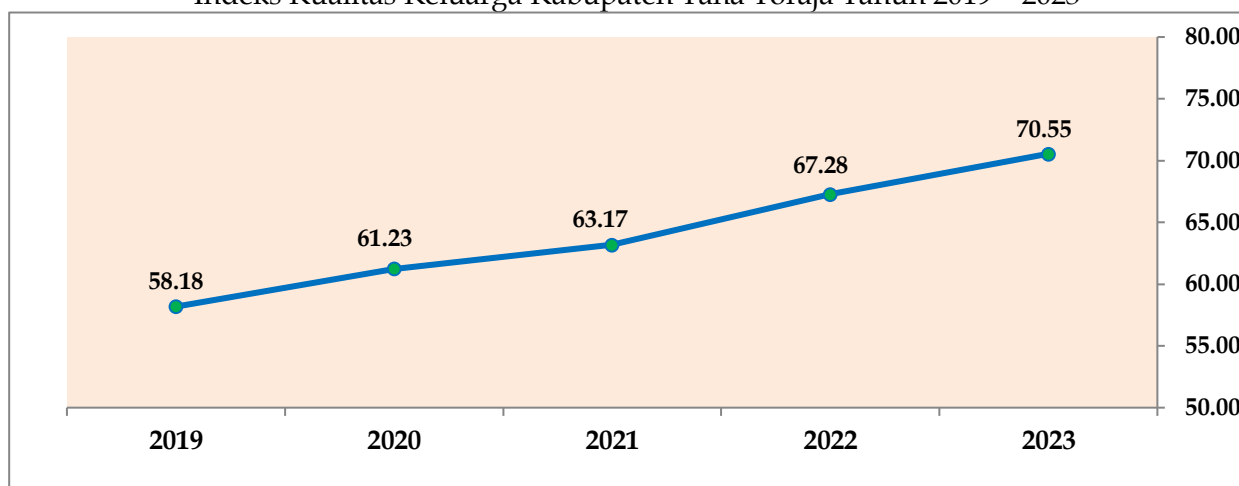
2.1.2.6. KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A. Indeks Kualitas Keluarga

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dipengaruhi oleh Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur, Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik, Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi, Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi, dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya. Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 58,18 pada tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 70,55 pada tahun 2023. Adapun perkembangan nilai Indeks Kualitas Keluarga di kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.43

Indeks Kualitas Keluarga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 – 2023



Sumber : DPPPA PP dan KB Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Persentase Anak Korban Kekerasan

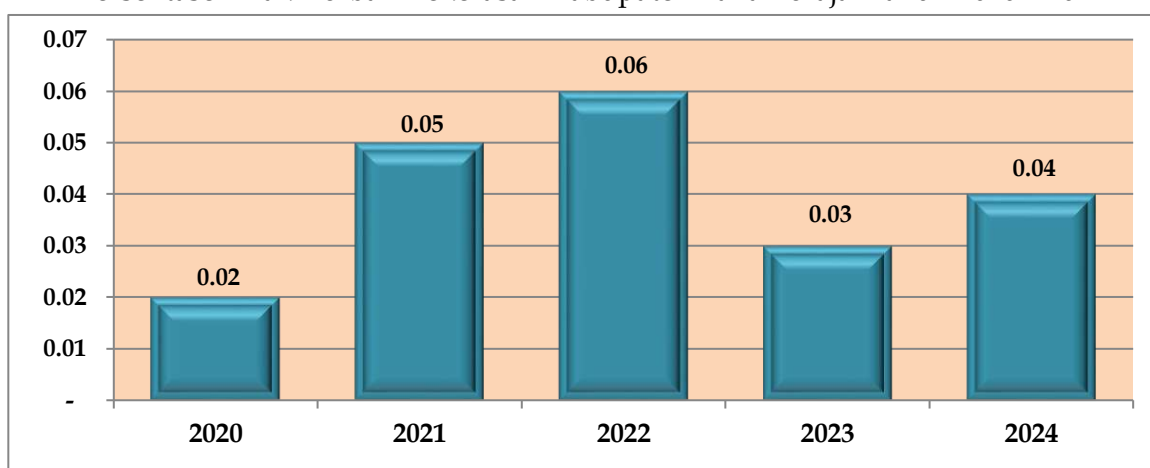
Maraknya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini menjadi keprihatinan bersama. Sejumlah kasus, seperti pemerkosaan anak oleh ayah kandung, pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, hingga anak meninggal akibat depresi dirundung oleh teman sebayanya mencuat ke publik. Kasus kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak semakin banyak terungkap lantaran masyarakat memiliki keberanian melapor. Di satu sisi, perkembangan media sosial membuat sebuah kasus terkait anak sulit untuk disembunyikan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak ini

menimbulkan penderitaan bagi korban, yakni tidak hanya fisik namun juga psikis, ekonomi dan sosial yang berdampak langsung terhadap korban saat kekerasan terjadi, juga dapat meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban. Karena itu, kekerasan menimbulkan kerugian besar terhadap korban, keluarga korban, bahkan masyarakat dan negara.

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, persentase anak korban kekerasan di Tana Toraja terus mengalami fluktuasi setiap tahun dimana tahun 2020 terdapat 0,02 persen anak mengalami kekerasan kemudian terus meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2022 tercatat ada 0,06 persen anak yang mengalami korban kekerasan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,04 persen. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan risiko lewat pendidikan yang mengutamakan pendekatan disiplin positif, bukan penghukuman salah satunya melalui edukasi tentang pengasuhan dan penyediaan ruang-ruang layanan konseling keluarga yang mudah diakses masyarakat serta langkah-langkah pencegahan lainnya. Selain itu, situasi keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang anak merupakan prasyarat terciptanya kedekatan anak dengan orang tua serta kesempatan bagi anak untuk mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari orangtua. Hal ini penting dalam membentuk dan memupuk kecerdasan emosional anak agar belajar menghindarkan diri dari bahaya kekerasan, baik menjadi pelaku maupun karena menjadi korban.

Grafik 2.44

Persentase Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024



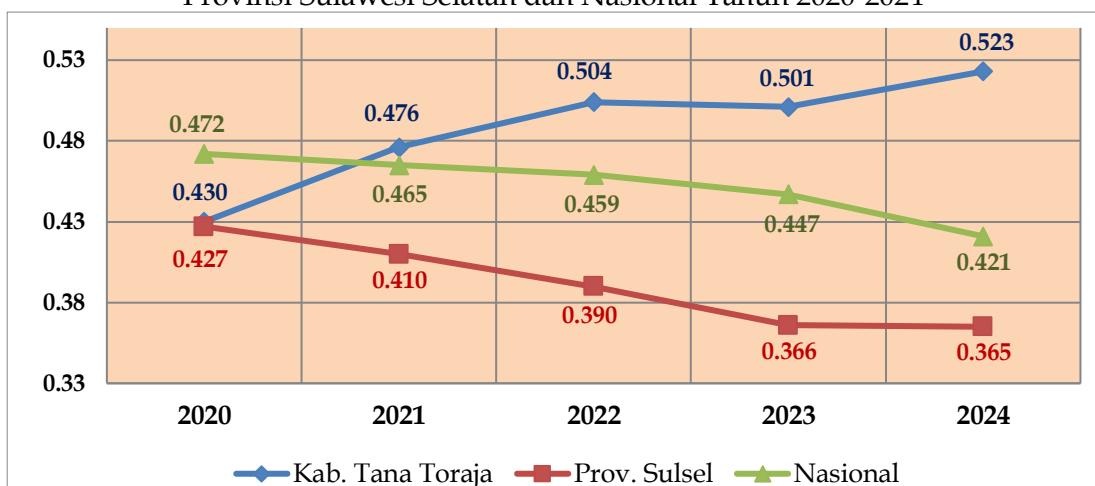
Sumber : Dinas PPPA PP dan KB Kabupaten Tana Toraja, 2025

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender di Kabupaten Tana Toraja sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat yang artinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai Pembangunan semakin besar. Pada Tahun 2020, Indeks Ketimpangan Gender di Tana Toraja tercatat sebesar 0,430 kemudian mengalami kenaikan dua tahun berturut-turut Dimana pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,504. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,501 dan kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,523 dimana capaian tersebut lebih besar dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,365 dan Nasional sebesar 0,421.

Grafik 2.45

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



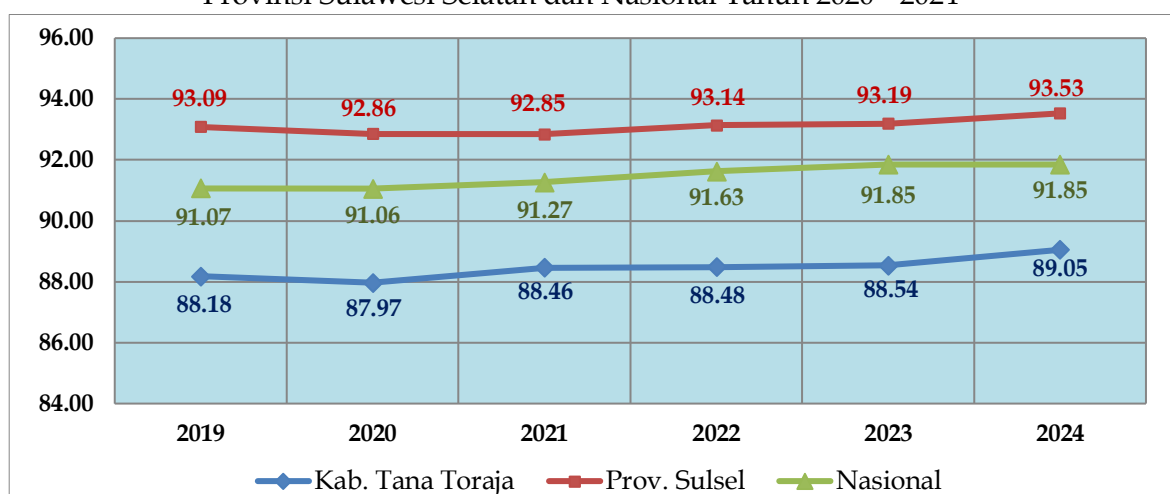
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Masih terdapatnya kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan IPG Tana Toraja masih berada jauh di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Meskipun capaian pembangunan perempuan masih belum mampu menyamai laki-laki, namun secara trend, perkembangan pembangunan manusia

perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun terakhir selalu berada di bawah IPD Sulawesi Selatan dan IPG Nasional. Berikut ini disajikan perkembangan IPG Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang disandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2.46
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tana Toraja,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



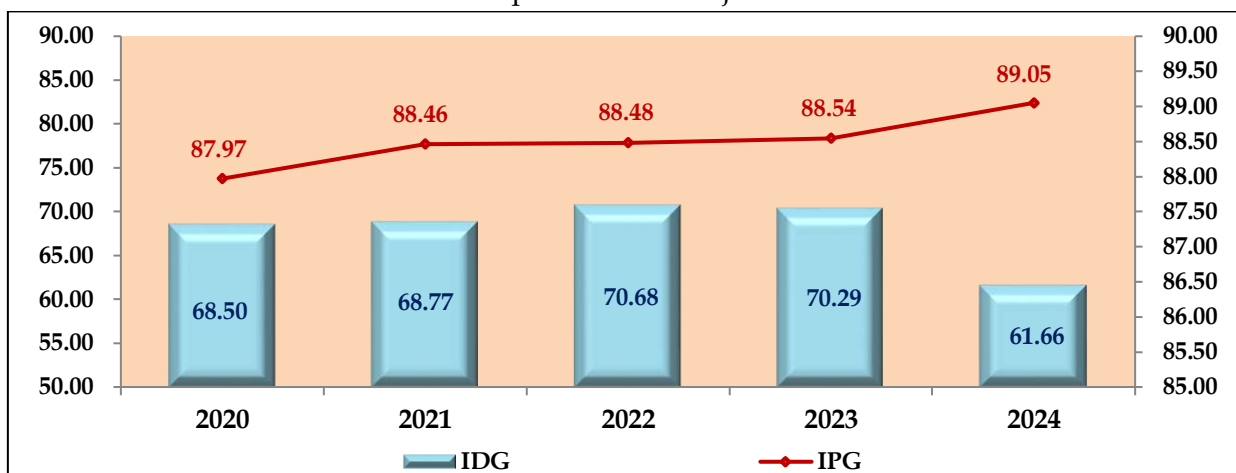
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

E. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir IDG Kabupaten Tana Toraja mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 68,50 kemudian meningkat menjadi 70,29 pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 61,66. Meskipun demikian masih perlunya peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang, serta partisipasi dan pengambilan keputusan dari aspek ekonomi yang mempertimbangkan kesetaraan posisi pekerjaan dan pendapatan laki-laki dan Perempuan.

Grafik 2.47

IPG dan IDG Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

2.1.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah merupakan elemen-elemen atau faktor-faktor strategis yang secara langsung maupun tidak langsung menentukan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal untuk menciptakan nilai tambah, menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan kedalam 12 pilar daya saing meliputi pilar institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, system keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Penyajian gambaran kondisi daerah terkait aspek daya saing dibagi dalam 7 aspek yaitu Daya Saing Sumber Daya Manusia, Iptek, Inovasi, dan Produktivitas

Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas Ekonomi Makro.

2.1.3.1. DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

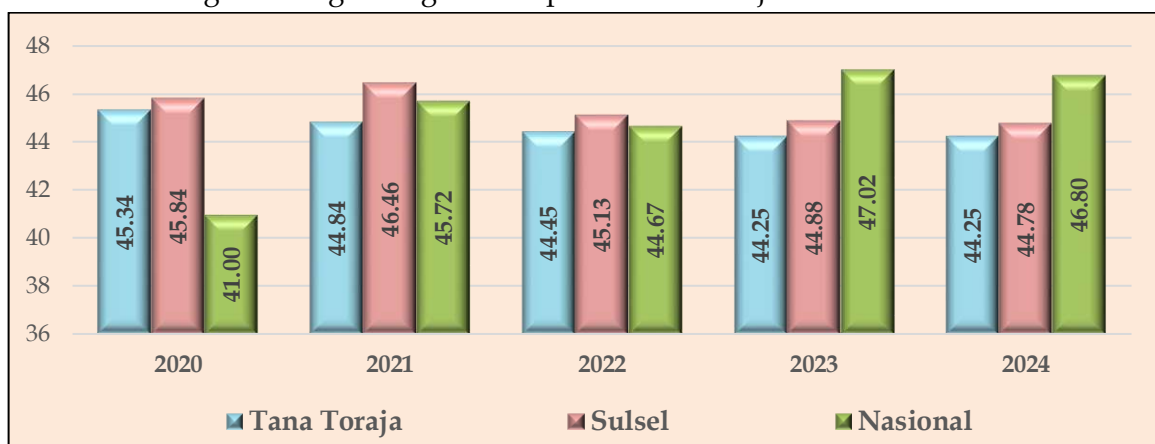
A. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang berada dalam usia tidak produktif (biasanya usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15–64 tahun). Angka Ketergantungan adalah angka yang menunjukkan berapa banyak orang usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh setiap 100 orang usia produktif dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.

Angka beban ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 adalah 44,25 persen. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 orang usia produktif (15-59 tahun), ada sekitar 45 orang yang tidak produktif (anak-anak dan lansia) yang menjadi beban ketergantungan. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan angka ketergantungan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 yakni sebesar 45,34 persen yang artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 46 orang tidak produktif. Penurunan angka ini didorong oleh peningkatan proporsi penduduk usia produktif dan penurunan proporsi penduduk usia non-produktif.

Grafik 2.48

Angka Ketergantungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

B. Indeks Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah adalah berbagai faktor dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 menduduki peringkat ketiga dengan skor nilai 3,52 setelah Kabupaten Gowa (skor 3,65) sebagai peringkat pertama dan Maros (3,59) sebagai peringkat kedua. Pengukuran produktifitas dan kemajuan daerah berdasarkan empat komponen utama diantaranya, sumber daya manusia (SDM), pasar, ekosistem inovasi dan lingkungan pendukung. Indikator dalam SDM dilihat dari kualitas tenaga kerja, keterampilan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian komponen pasar diukur dari daya saing pasar dan produk. Selanjutnya, ekosistem inovasi diukur dari kemampuan daerah dalam menciptakan inovasi, riset dan adopsi teknologi serta pengembangannya. Sementara, komponen lingkungan pendukung diukur dari infrastruktur, institusi, stabilitas ekonomi, dan aspek lainnya yang memengaruhi daya saing daerah.

2.1.3.2. IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

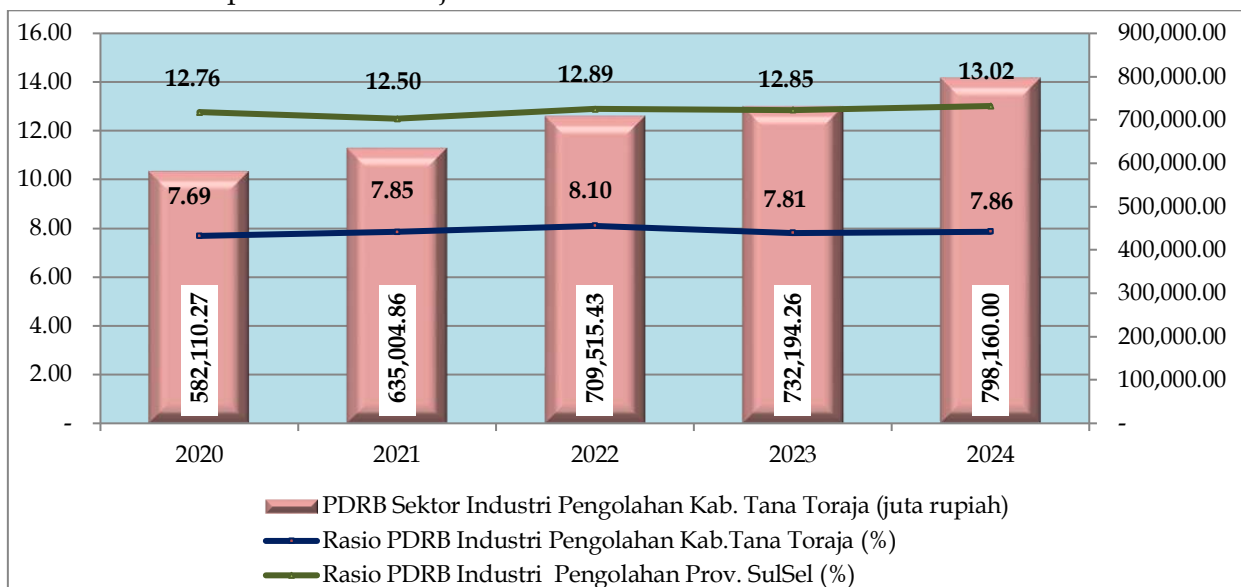
IPTEK dan Inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi dalam jangka Panjang. Beberapa indikator berikut memberikan gambaran kondisi kemajuan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas ekonomi di Kabupaten Tana Toraja.

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Secara umum, pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Rasio PDRB Industri pengolahan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 8,10 persen. Sektor Industri pengolahan menyumbang Rp. 709.515,43 miliar. Meskipun pada tahun 2024 PDRB ADHB menurut lapangan usaha sektor Industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar Rp. 798.160 miliar namun rasionya sebesar 7,86 persen sedikit turun dibanding pada tahun 2020 sebesar 8,10 persen. Perkembangan PDRB sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.49

Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024



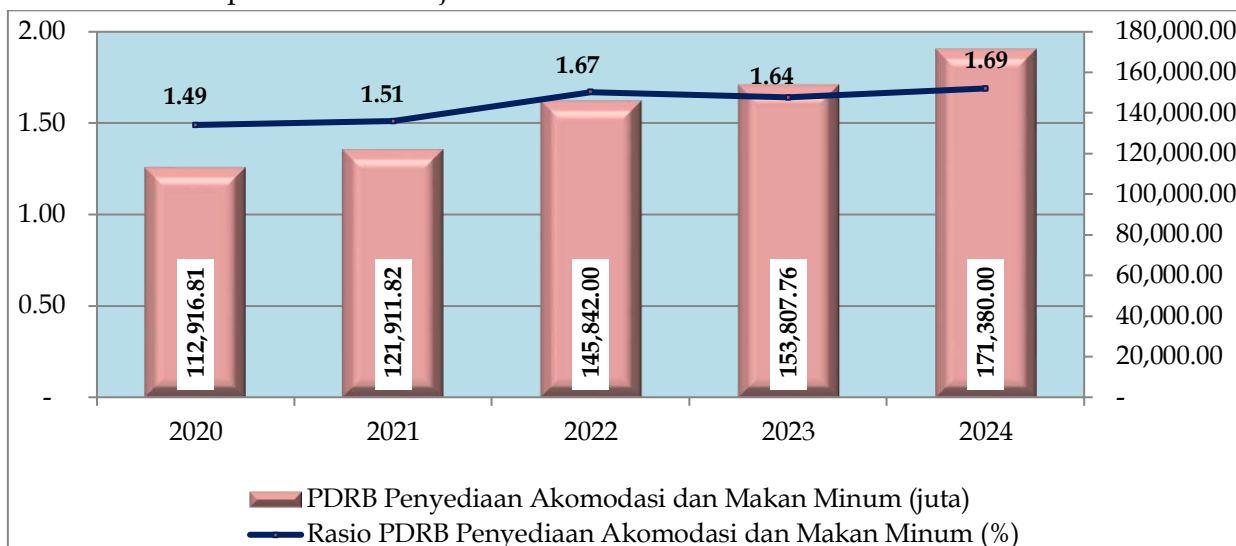
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pertumbuhan rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 Rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum sebesar 1,49 persen atau sebesar Rp. 112.916,81 juta. Kondisi ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 sebesar 1,69 persen atau Rp. 171.380 juta. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan yang datang untuk menikmati keunikan budaya dan alam Toraja meningkatkan kebutuhan akan akomodasi dan layanan makan minum. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan sektor akomodasi dan makan minum. Selain itu pembangunan Infrastruktur juga mendorong peningkatan pertumbuhan rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Tana Toraja. Peningkatan infrastruktur, seperti jalan yang lebih baik, transportasi yang lebih lancar, serta fasilitas umum yang lebih memadai, mempermudah akses ke Tana Toraja. Hal ini dapat menarik lebih banyak wisatawan, sehingga meningkatkan permintaan akan hotel, restoran, dan warung makan.

Grafik 2.50

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

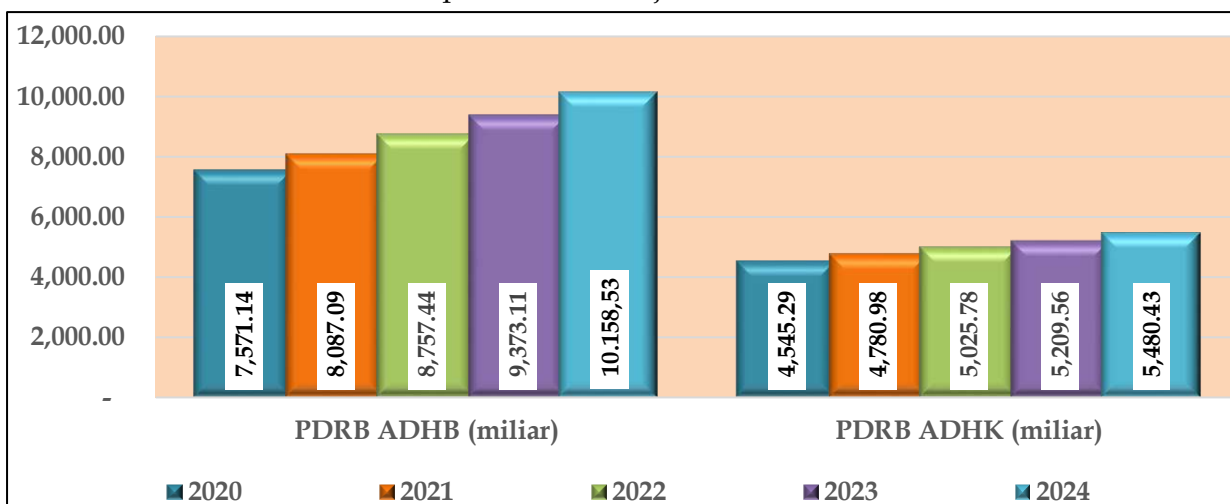
C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi secara makro di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Dua kriteria kinerja ekonomi makro yang terkait dengan PDRB ialah laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi.

Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 7.571,14 miliar kemudian meningkat menjadi Rp. 10.125,53 miliar pada tahun 2024. Pada periode yang sama nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 4.545,29 miliar setelah itu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 tercatat mencapai Rp. 5.480,43 miliar. Penyumbang terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar RP. 2.268,37 miliar disusul oleh

Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.072,50 miliar.

Grafik 2.51
PDRB ADHB dan ADHK (Menurut Lapangan Usaha)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, Toraja dalam Angka, 2025

PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 tertinggi berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 1.200,37 miliar rupiah, lebih tinggi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 1.106,69 miliar. Sedangkan, capaian terendah pada tahun 2024 berasal dari sektor Jasa Perusahaan sebesar yaitu sebesar 4,36 miliar rupiah. Lebih lanjut, kondisi ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

LAPANGAN USAHA	Nilai PDRB – ADHK (milliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	1.039,75	1.105,43	1.110,52	1.113,02	1.106,69
B. Pertambangan Dan Penggalian	58,78	59,54	62,17	66,25	69,46
C. Industri Pengolahan	327,73	352,25	385,30	389,55	415,54
D. Pengadaan Listrik Dan Gas	8,58	9,22	10,90	11,28	11,94
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	5,75	5,98	6,40	6,68	6,78
F. Konstruksi	521,49	535,69	552,62	580,38	594,56

LAPANGAN USAHA	Nilai PDRB – ADHK (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	870,28	944,99	1.031,81	1.098,91	1.200,37
H. Transportasi Dan Pergudangan	100,01	111,64	130,37	140,20	147,51
I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	62,35	66,96	78,41	81,34	88,49
J. Informasi Dan Komunikasi	286,88	306,71	318,80	342,44	369,52
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi	123,45	127,71	133,40	142,04	150,95
L. Real Estate	221,89	230,38	247,13	263,05	278,17
M,N. Jasa Perusahaan	3,78	3,98	4,14	4,44	4,36
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	412,83	388,77	385,08	371,49	402,18
P. Jasa Pendidikan	268,87	279,79	295,46	299,50	313,74
Q. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	141,09	152,76	167,14	181,91	189,51
R,S,T,U. Jasa Lainnya	91,77	99,19	106,14	117,08	130,66
PDRB	4.545,29	4.780,98	5.025,78	5.209,56	5.480,43

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Berdasarkan tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 hingga 2023, dapat dilihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi pilar utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga Konstan di Kabupaten Tana Toraja. Namun pada tahun 2024 sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar Rp. 1.200,37 miliar menggeser sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang selama beberapa tahun sebelumnya menjadi pilar utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga Konstan di Kabupaten Tana Toraja.

Sebaliknya, sektor Jasa Perusahaan mencatat kontribusi terendah terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, hanya sebesar Rp. 4,36 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam sektor tersebut, yang mungkin memerlukan perhatian lebih dalam pengembangan dan peningkatan kontribusi ekonominya. Secara keseluruhan, data menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang menyeluruh, termasuk peningkatan sektor-sektor yang kurang berkembang dan penguatan sektor-sektor utama yang telah menunjukkan kinerja baik, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.40

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020– 2024

LAPANGAN USAHA	Nilai PDRB – ADHB (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	1.775,46	1.893,82	1.953,22	2.075,58	2.68,37
B. Pertambangan Dan Penggalian	103,29	106,22	114,32	125,27	131,04
C. Industri Pengolahan	582,11	635,00	709,52	732,19	798,16
D. Pengadaan Listrik Dan Gas	8,91	9,59	11,52	12,25	13,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	7,33	7,70	8,33	8,77	8,91
F. Konstruksi	974,19	1.059,05	1.131,34	1.215,66	1,248,49
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	1.332,96	1.476,46	1.658,91	1.853,56	2,072,50
H. Transportasi Dan Pergudangan	175,15	200,71	250,97	295,11	319,28
I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	112,92	121,91	145,84	153,81	171,38
J. Informasi Dan Komunikasi	335,63	356,96	373,82	400,17	433,38
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi	226,75	243,94	275,29	299,75	324,11
L. Real Estate	408,98	424,65	468,15	507,49	540,94
M,N. Jasa Perusahaan	6,06	6,45	7,03	7,78	7,81
P. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	678,77	647,03	646,50	632,56	701,49
R. Jasa Pendidikan	443,52	463,12	496,59	516,40	542,73
S. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	251,95	273,73	302,71	337,75	352,51
R,S,T,U. Jasa Lainnya	147,18	160,75	176,40	198,99	224,29
PDRB	7.571,14	8.087,09	8.757,44	9.373,11	10.158,53

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Berdasarkan tabel di atas, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 mampu memberikan nilai tambah mencapai Rp. 10.158,53 miliar dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp. 9.373,11 miliar. Sejalan dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan, kontribusi terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor dan pada urutan ketiga berasal dari sektor lapangan usaha Konstruksi.

Dari sisi distribusi menunjukkan bahwa lapangan usaha jasa perusahaan adalah penyumbang PDRB terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu konstan diangka 0,08 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor ini tidak

memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang sebagai sektor unggulan di Kabupaten Tana Toraja. Sebaliknya lapangan usaha seperti Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan, lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor dan lapangan usaha konstruksi menunjukkan kontribusi yang lebih stabil dan signifikan dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku, seperti yang dapat dilihat pada tabel distribusi persentase PDRB berikut.

Tabel 2.41
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB – ADHB (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	23,45	23,42	22,30	22,14	22,33
B. Pertambangan Dan Penggalian	1,36	1,31	1,31	1,34	1,29
C. Industri Pengolahan	7,69	7,85	8,10	7,81	7,89
D. Pengadaan Listrik Dan Gas	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
F. Konstruksi	12,87	13,10	12,92	12,97	12,29
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	17,61	18,26	19,25	19,78	20,40
H. Transportasi Dan Pergudangan	2,31	2,48	2,87	3,15	3,14
I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1,49	1,51	1,67	1,64	1,69
J. Informasi Dan Komunikasi	4,43	4,41	4,27	4,27	4,27
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi	2,99	3,02	3,14	3,20	3,19
L. Real Estate	5,40	5,250,13	5,35	5,41	5,32
M,N. Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Q. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	8,97	8,00	7,38	6,75	6,91
T. Jasa Pendidikan	5,86	5,76	5,67	5,51	5,34
U. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	3,33	3,38	3,46	3,60	3,47
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,94	1,99	2,01	2,12	2,21
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Dalam lima tahun terakhir, terdapat tiga sektor utama yang menjadi target pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tana toraja yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor dan sektor Konstruksi. Pada tahun 2024 sektor yang Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor dan sektor Konstruksi merupakan sektor yang paling tinggi

mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 0,62 persen dibanding tahun 2023. Disusul oleh oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 0,19 persen dibanding tahun 2023. Sementara itu sektor yang mengalami penurunan adalah sektor Konstruksi yang mengalami penurunan drastis sebesar minus 0,68 persen, ini menunjukkan adanya fluktuasi yang memerlukan perhatian dalam pengelolaannya. Adapun perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

LAPANGAN USAHA	Laju Pertumbuhan PDRB – ADKH (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	-0,93	6,32	0,46	0,23	-0,57
B. Pertambangan Dan Penggalian	-1,76	1,29	4,42	6,56	4,84
C. Industri Pengolahan	-4,60	7,48	9,38	1,10	6,67
D. Pengadaan Listrik Dan Gas	4,84	7,46	18,16	3,50	5,90
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	6,79	4,03	7,07	4,29	1,54
F. Konstruksi	-3,25	2,72	3,16	5,02	2,44
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	-2,12	8,58	9,19	6,50	9,23
H. Transportasi Dan Pergudangan	-9,93	11,63	16,78	7,54	5,21
I. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	-8,84	7,39	17,10	3,74	8,78
J. Informasi Dan Komunikasi	11,71	6,91	3,94	7,42	7,91
K. Jasa Keuangan Dan Asuransi	1,50	3,45	4,45	6,48	6,28
L. Real Estate	8,83	3,82	7,27	6,44	5,75
M,N. Jasa Perusahaan	-4,36	5,29	3,91	7,36	-1,95
R. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	-0,62	-5,83	-0,95	-3,53	8,26
V. Jasa Pendidikan	5,60	4,06	5,60	1,37	4,75
W. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	10,25	8,27	9,41	8,44	4,18
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-8,01	8,08	7,01	10,30	11,60
PDRB	-0,28	5,19	5,12	3,66	5,20

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Perkembangan perekonomian Kabupaten Tana Toraja selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam aktivitas ekonomi

wilayah. Kinerja perekonomian dapat dipantau melalui nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) serta tingkat pertumbuhan total PDRB. Selama periode tersebut, berbagai komponen pengeluaran memiliki kontribusi yang berbeda terhadap PDRB yang mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi, investasi, dan perdagangan, misalnya pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat secara konsisten, menunjukkan pertumbuhan konsumsi domestik yang stabil.

Tabel 2.43
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Jenis Pengeluaran
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

Jenis Pengeluaran	PDRB – ADHB menurut Jenis Pengeluaran (milliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.450,91	4.712,67	5.281,89	5.690,68	6.195,50
Pengeluaran Konsumsi LNPR	135,60	139,53	168,66	202,66	266,09
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.173,04	1.190,15	1.217,80	1.250,48	1.311,23
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.468,42	2.671,25	2.810,94	3.041,37	3.089,94
Perubahan Inventori	3,84	13,27	6,46	-1,36	0,16
Ekspor Barang dan Jasa	-660,68	-639,78	-728,31	-810,73	-704,38
PDRB	7.571,14	8.087,09	8.757,44	9.373,11	10.158,53

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Dari tabel PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di atas terlihat bahwa di Kabupaten Tana Toraja Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah merupakan pengeluaran masyarakat yang paling tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tinggi salah satunya disebabkan oleh biaya untuk mengadakan upacara-upacara tersebut. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami kenaikan dari 5.690,68 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 6.195,50 miliar rupiah pada tahun 2024, kondisi ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam belanja konsumen. Di sisi lain, pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan peningkatan, pada tahun 2024 meningkat menjadi 3.089,94 miliar dibanding tahun 2023 sebesar 3.041,37 persen. Sementara itu ekspor barang dan jasa tercatat angka negatif yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Toraja lebih banyak mengimpor dibanding melakukan ekspor.

Tabel 2.44

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Jenis Pengeluaran
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

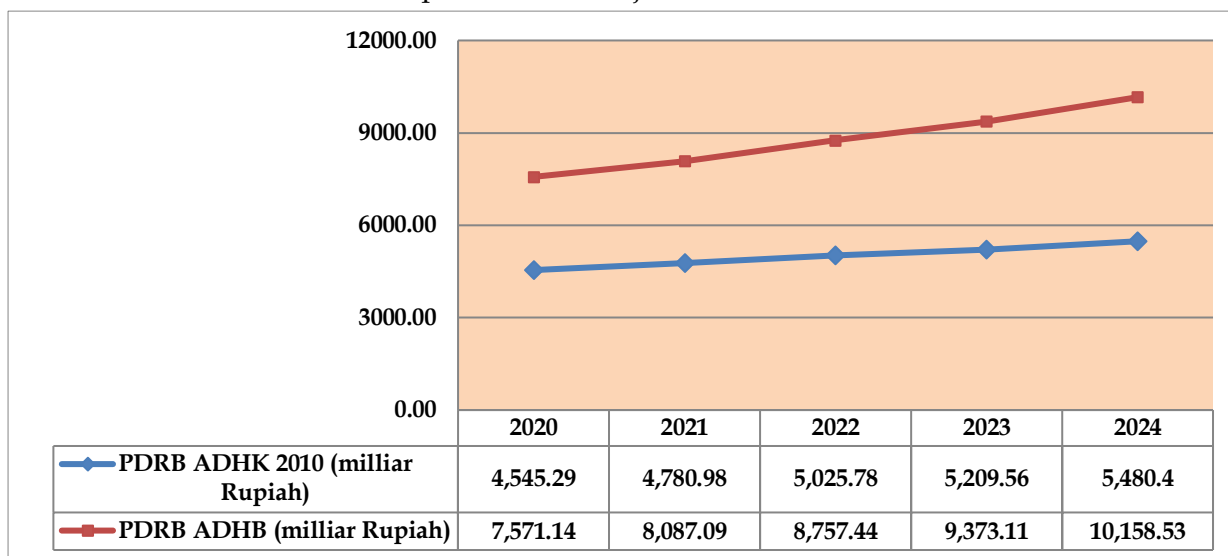
Jenis Pengeluaran	PDRB – ADHB menurut Jenis Pengeluaran (miliar rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.643,35	2.721,41	2.909,28	3.026,10	3.211,61
Pengeluaran Konsumsi LNPR	85,61	86,28	99,93	115,90	145,83
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	693,40	690,82	689,85	685,09	725,14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.506,47	1.567,99	1.594,74	1.671,53	1.694,45
Perubahan Inventori	2,17	7,32	3,08	-0,64	0,07
Ekspor Barang dan Jasa	-387,69	-292,82	-271,10	-288,42	-296,67
PDRB	4,545,29	4,780,98	5,025,78	5.209,56	5.480,43

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

Kondisi perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam nilai absolut dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), keduanya mencerminkan tren yang serupa dalam hal perubahan ekonomi. Pada tahun 2024, PDRB ADHK Kabupaten Tana Toraja tetap berada di atas angka 5 triliun rupiah, menunjukkan stabilitas ekonomi yang signifikan dalam hal nilai riil setelah disesuaikan dengan inflasi. Tabel di atas menggambarkan bahwa pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, sebagai komponen terbesar, terus mengalami kenaikan dari 2.645,35 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 3.211,61 miliar rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan positif. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa terus mencatat minus, yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Tana Toraja nilai impor lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Perbandingan antara perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut, membantu dalam memahami dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja ekonomi riil di Kabupaten Tana Toraja.

Grafik 2.52

Perkembangan PDRB ADHK 2010 dan ADHB menurut Jenis Pengeluaran
Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

D. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

Di bidang Pariwisata, keberadaan Bandara Buntu Kunyi' Tana Toraja diharapkan menjadi salah satu pintu gerbang utama yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wisatawan baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara yang masuk ke Tana Toraja. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Tana Toraja pasca Pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 masih terpengaruh akibat pasca Pandemi Covid-19. Kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Tana Toraja hanya 100 orang. Hal ini terjadi karena adanya pemberlakuan pembatasan penerbangan, larangan perjalanan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun setelah tahun 2022 sampai tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat 503.861 orang yang terdiri dari 6.400 wisatawan mancanegara dan 497.461 orang wisatawan nusantara.

Meskipun jumlah wisatawan mancanegara dan Nusantara yang berkunjung ke Tana Toraja pasca pandemi Covid-19 cenderung meningkat, namun pariwisata unggulan di Tana Toraja masih perlu lebih dioptimalkan karena masih terbatas khususnya pada atraksi, aksesibilitas dan amenitas serta kapasitas pengelolaan dan

penerapan pariwisata berkelanjutan yang sangat berpengaruh terhadap lama kunjungan wisata. Berikut ini dapat dilihat perkembangan wisatawan yang berkunjung ke tana toraja serta lama kunjungan wisata dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.45
Jumlah wisatawan dan Lama Kunjungan Wisata
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	830	100	1.355	4.024	6.400
2.	Jumlah Wisatawan Nusantara (orang)	93.787	78.193	480.631	487.481	497.461
3.	Lama Kunjungan Wisata (hari)	3	3	3	3	3

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

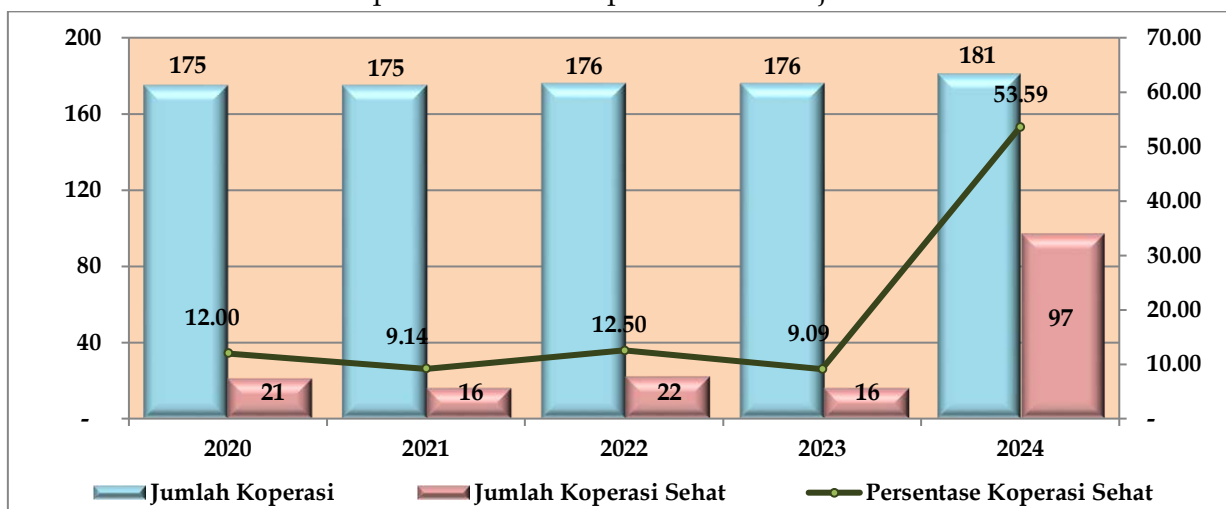
E. Persentase Koperasi Sehat

Koperasi Sehat adalah koperasi yang memiliki nilai 81 - 100 dalam penilaian kesehatan meliputi 4 Aspek Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yaitu Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan. Pemeriksaan Kesehatan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengolah dan menganalisis data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi.

Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Tana Toraja kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, dari 175 jumlah koperasi hanya ada 21 koperasi yang tergolong koperasi sehat atau sekitar 12 persen. Namun pada tahun 2021 hanya terdapat 16 koperasi yang sehat, hal ini terjadi akibat pasca pandemic Covid-19. Pada tahun 2022 kondisi koperasi sehat sudah mulai membaik. Sampai pada tahun 2024 sebanyak 59,59 persen koperasi sehat, atau dengan kata lain terdapat 97 koperasi yang sehat dari 181 koperasi yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Peningkatan ini didukung oleh adanya peningkatan kompetisi serta adanya integritas dari manajemen. Selain itu adanya partisipasi aktif anggota serta adanya tata kelola yang baik sehingga koperasi yang sehat dapat meningkat.

Grafik 2.53

Persentase Koperasi Sehat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.3.3. PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

Daya saing ekonomi yang ditunjukkan oleh beberapa indikator, dibangun dalam kerangka keberlanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan ekonomi biru.

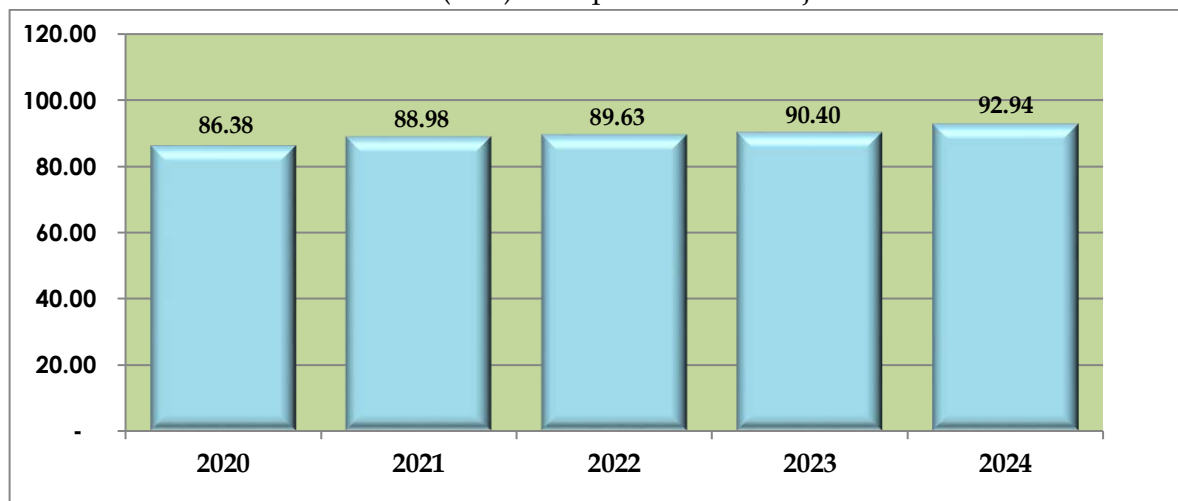
A. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu wilayah dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan, yaitu ekonomi yang efisien dalam penggunaan sumber daya, rendah emisi karbon, inklusif secara sosial, dan ramah lingkungan. Indeks ekonomi hijau mengukur perkembangan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi dan kesetaraan sosial masyarakat serta mitigasi risiko kerusakan lingkungan dan iklim, dan sekaligus menjadi alat ukur untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Indeks ini merupakan indeks komposit dari pilar lingkungan, pilar ekonomi, dan pilar sosial, berskala 0-100 dimana bila nilainya mendekati 100 maka indeks ini semakin sangat baik. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia yang ditunjang oleh beberapa pilar, salah satunya adalah pilar lingkungan yang terdiri dari indeks kualitas air, udara dan lahan.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara disuatu daerah yang pengukurannya dapat dilakukan dengan mengamati kualitas udara menggunakan kombinasi berbagai macam alat dan metode termasuk jaringan sensor polutan dan sistem informasi geografis dengan kisaran angka 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin baik kualitasnya bagi kesehatan makhluk hidup. Kualitas udara sangat baik berkisar antara 90 - 100, kualitas udara yang baik berkisar antara 70 - 90, kualitas udara yang sedang berkisar antara 50 - 70, kualitas udara yang kurang berkisar antara 25 - 50, sedangkan kualitas udara yang sangat kurang berkisar antara 0 - 25. Dari data yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir indeks kualitas udara di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 86,38, mengalami peningkatan setiap tahunnya kemudian pada tahun 2024 nilai indeks kualitas udara di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 92,94 atau kategori sangat baik.

Grafik 2.54
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

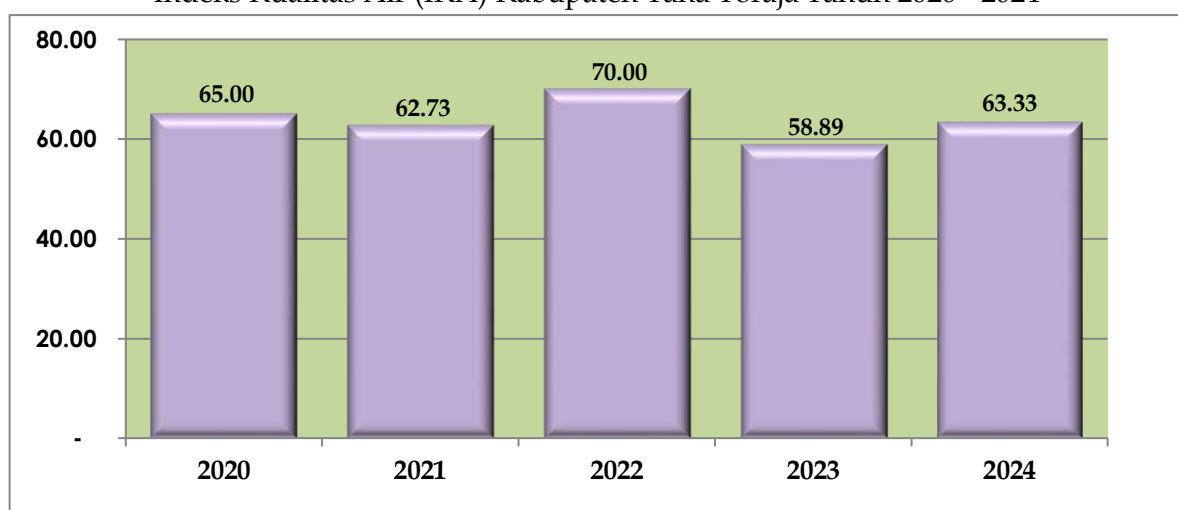


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, 2025

Indeks kualitas air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020, nilai Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 65,00 kemudian turun menjadi 63,33 pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa kualitas air tercemar sedang.

Grafik 2.55

Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

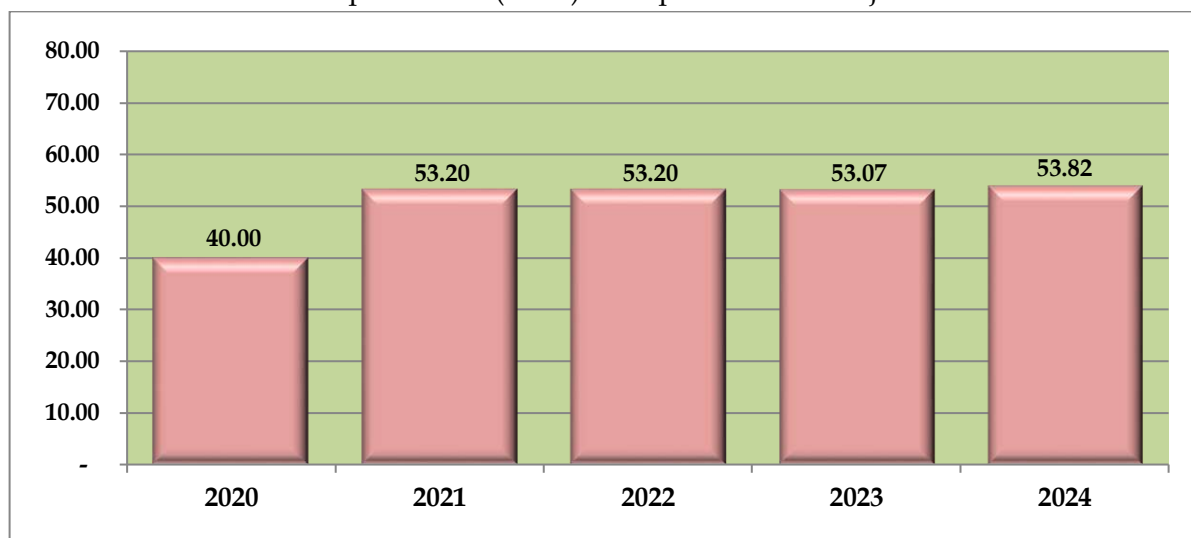


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, 2025

Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Klasifikasi IKLT, angka rentang $90 \leq x \leq 100$ sangat baik, angka rentang $70 \leq x \leq 90$ baik, angka rentang $50 \leq x \leq 70$ sedang, angka rentang $25 \leq x \leq 50$ kurang dan angka rentang $0 \leq x \leq 25$ sangat kurang. Tahun 2020 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Tana Toraja sebesar 40,00 kemudian meningkat menjadi 53,82 pada tahun 2024 kondisi ini menunjukkan bahwa angka IKLH di Kabupaten Tana Toraja tergolong sedang.

Grafik 2.56

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi sektor ekonomi berbasis kelautan dan perairan terhadap pembangunan yang berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi saat ini dari ekonomi biru dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional. Saat ini, IBEI dihitung di tingkat provinsi dan dirata-ratakan untuk mendapatkan angka nasional Indeks Ekonomi Biru. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Ekonomi Biru Sulawesi Selatan, Pada tahun 2023 nilai IBEI Kabupaten Tana Toraja sebesar 53,9 dengan kategori rendah.

2.1.3.4. TRANSFORMASI DIGITAL

Peran transformasi digital sebagai aspek daya saing dalam pembangunan Tana Toraja sangat krusial, terutama karena wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pariwisata, budaya, pertanian, dan UMKM.

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan,

serta mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan Telekomunikasi, oleh karenanya untuk dapat mewujudkan layanan telekomunikasi yang baik bagi masyarakat, diperlukan sarana infrastruktur jaringan telekomunikasi yang memadai secara kualitas maupun cakupan yang luas ke seluruh pelosok wilayah khususnya untuk daerah terpencil yang masih banyak terdapat wilayah *blank spot*.

Kondisi cakupan layanan telekomunikasi dan informatika di Kabupaten Tana Toraja semaki meningkat, hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya wilayah *blank spot* di Kabupaten Tana Toraja. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya ada 47 dari 159 Lembang/Kelurahan atau sekitar 70,44 persen yang sudah menikmati layanan telekomunikasi dan Informatika (internet), kemudian dilakukan perbaikan dan peningkatan layanan sehingga pada tahun 2024, layanan telekomunikasi dan Informatika telah dinikmati oleh masyarakat pada 150 dari 159 Lembang/Kelurahan atau sudah sekitar 94,34 persen. Meskipun demikian masih ada 9 Lembang/Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian sehingga ke depan layanan telekomunikasi dan informatika dapat dinikmati pada seluruh wilayah di Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 2.46

Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Lembang/Kelurahan	159	159	159	159	159
2.	Jumlah Lembang/Kelurahan yang dilayani Telekomunikasi dan Informatika	112	136	140	144	150
3.	Persentase cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	70,44	85,53	88,05	90,57	94,34

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.3.5. INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Integrasi ekonomi domestik dan global adalah proses menyatunya kegiatan ekonomi di dalam negeri (nasional) dengan kegiatan ekonomi di tingkat internasional (global), melalui perdagangan, investasi, teknologi, dan kebijakan yang saling berhubungan. Untuk mengetahui daya saing ekonomi daerah di tunjukkan melalui

Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten, Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) dan Ekspor barang dan jasa.

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan investasi dalam bentuk barang modal tetap di suatu wilayah dalam periode tertentu. Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Tana Toraja akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2020 s.d 2024, tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Kondisi perekonomian Kabupaten Tana Toraja 2022 semakin membaik Pasca Pandemi Covid-19 meskipun perkembangannya tidak lebih pesat dibanding tahun sebelumnya. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Tana Toraja sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) dan sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Tabel 2.47

Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
PMTB (dalam juta Rp)	1.506,47	1.567,99	1.594,74	1.671,53	1.694,45
PDRB (dalam juta Rp)	4.545,29	4.780,98	5.025,78	5.209,56	5.480,43
Andil (%)	33,14	32,79	31,73	31,09	30,92

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah 2025

Pada tahun 2021, andil PMTB terhadap PDRB mengalami penurunan setelah pada tahun 2020 sebesar 33,14 persen. Namun apabila melihat jenis pengeluaran semua jenis pengeluaran baik Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap bruto terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini didorong oleh adanya pertumbuhan sektor

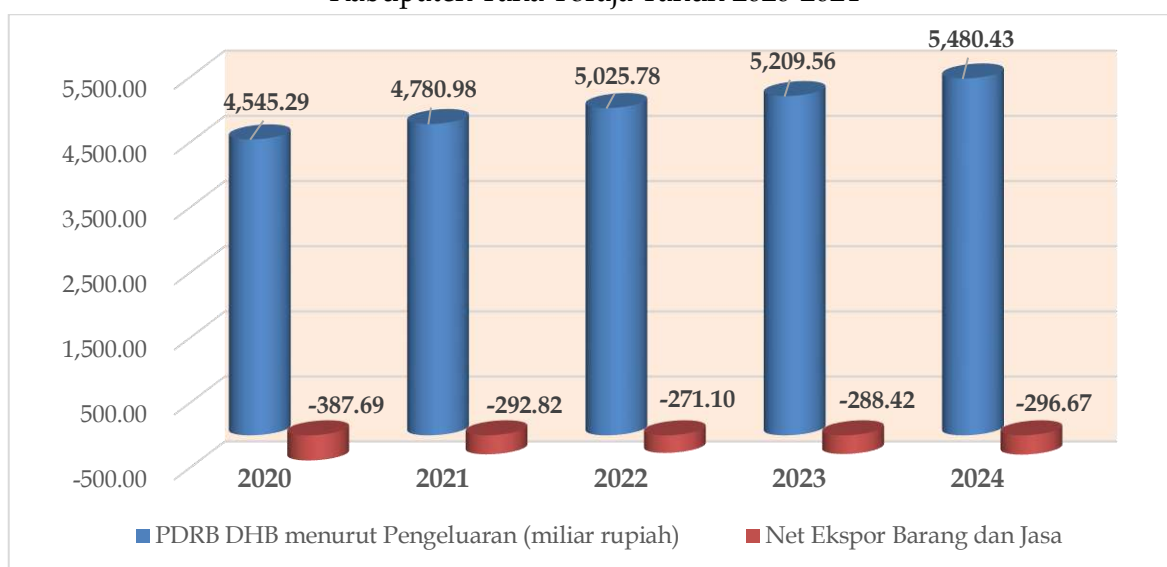
pariwisata dan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat serta adanya peningkatan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa Tana Toraja dalam fase pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural yang positif. Meskipun terdapat peningkatan, perubahan inventori mengalami perlambatan pada tahun 2024 sebesar minus 0,17 persen.

B. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa dalam lingkup Kabupaten Tana Toraja menunjukkan jumlah barang dan jasa yang masuk dan keluar dari daerah Kabupaten Tana Toraja.

Grafik 2.57

Perbandingan PDRB ADHB menurut Pengeluaran dengan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.3.6. PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan adalah meletakkan perkotaan dan perdesaan sebagai spektrum pembangunan yang setara, agar pertumbuhan ekonomi perdesaan tetap dapat mempertahankan karakteristik, lokalitas dan prinsip keberlanjutan lingkungan di desa. Beberapa indikator yang mewakili gambaran perkotaan dan perdesaan sebagai pusat

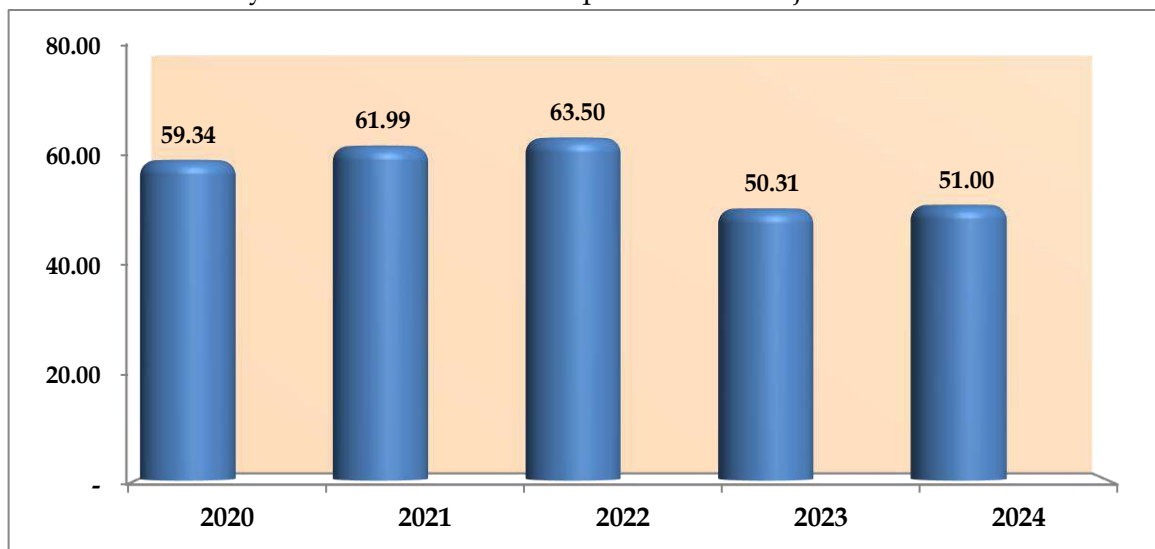
pertumbuhan ekonomi adalah Indeks Layanan Infrastruktur, Rumah tangga dengan akses hunian layak, dan persentase desa mandiri.

A. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini dapat mencakup berbagai aspek infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, sanitasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana infrastruktur mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada tahun 2024 capaian Indeks Layanan Infrastruktur di Kabupaten Tana Toraja meningkat dibandingkan pada tahun 2023. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan sarana transportasi, telekomunikasi, energi, air bersih, sanitasi. Untuk lebih jelasnya kondisi Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun dapat dilihat pada table berikut :

Grafik 2.58

Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja, 2025, diolah

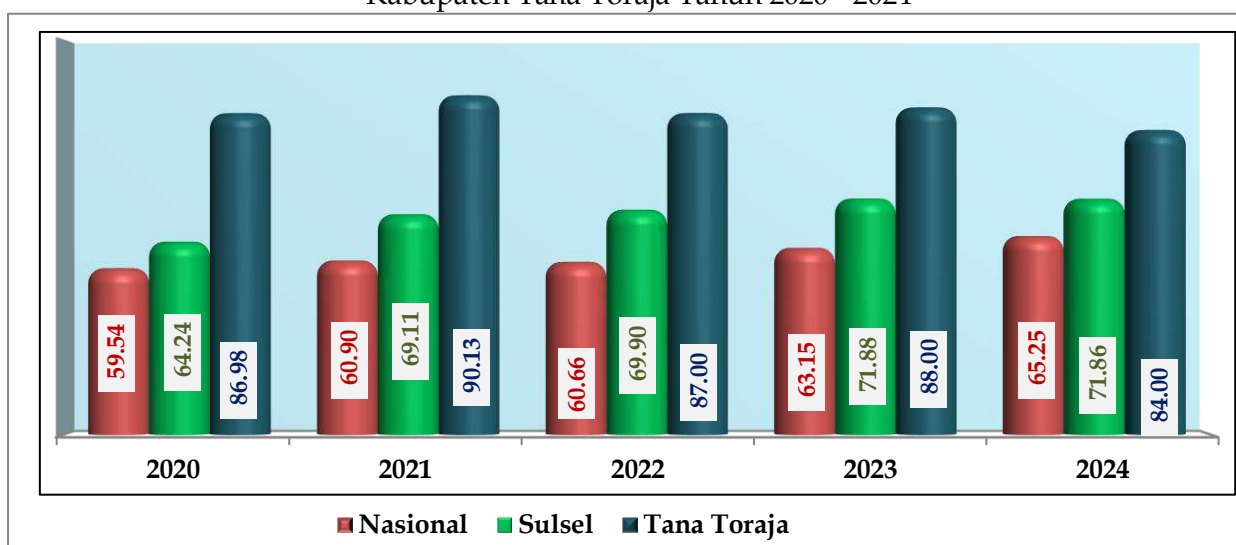
B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan

Kategori hunian layak terdiri dari 4 komponen yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas, akses air minum, dan akses sanitasi. Kondisi rumah di Kabupaten Tana Toraja sudah relatif semakin baik karena pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah layak huni pada kawasan kumuh dan kepada

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024, Akses rumah layak huni di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 akses rumah layak huni sebesar 90,13 persen turun menjadi 84,00 persen pada tahun 2024. Begitupula dengan capaian Akses rumah layak huni provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan 0,02 poin dari 71,88 persen pada tahun 2023 menjadi 71,86 persen pada tahun 2024. Hal tersebut berbeda dengan capaian secara nasional yang mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2024 persentase akses rumah layak huni 65,25 persen.

Grafik 2.59
Akses Rumah Layak Huni Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS dan Dinas PRKP Kabupaten Tana Toraja, 2025

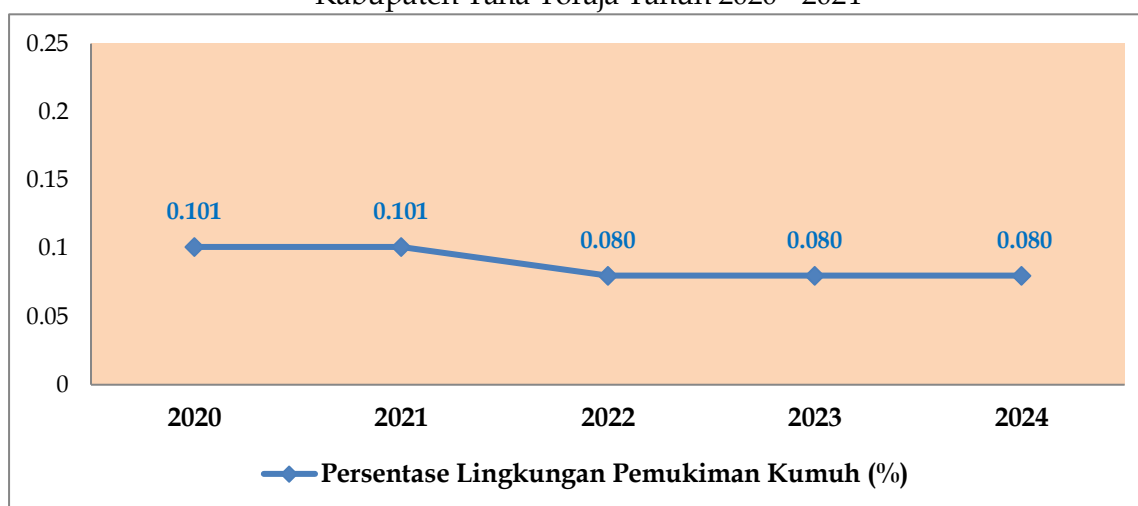
C. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kawasan lingkungan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya tidak layak huni, dengan ciri-ciri berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan terhadap penyakit sosial hingga penyakit lingkungan serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan

penghidupan permukiman. Salah satu faktor terciptanya kawasan kumuh adalah karena adanya lonjakan jumlah penduduk yang sangat besar dan tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan lahan serta kondisi ekonomi yang buruk sehingga terjadi ketidakmampuan untuk memiliki tanah dan membangun rumah di kawasan perumahan.

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami trend menurun. Pada tahun 2020 persentase lingkungan permukiman kumuh mencapai 0,101 persen, namun dengan berbagai intervensi program dari pemerintah maka persentase lingkungan permukiman kumuh dapat diturunkan sehingga pada tahun 2024 tercatat menjadi 0,08 persen.

Grafik 2.60
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas PRKP Kabupaten Tana Toraja, 2025

D. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. IDM menjadi ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam proses pembangunan desa. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dengan modal sosial, modal ekonomi dan modal lingkungan. IDM dibentuk dari tiga indeks komposit yaitu indeks ketahanan sosial yang terdiri modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman. Indeks selanjutnya yakni ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa. Pencapaian itu bakal

menjadi motivasi daerah lain untuk terus digenjot pembangunan desa di daerahnya agar terjadi pengurangan signifikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta memiliki desa mandiri sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal mereka dalam kemandirian berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan dan juga memiliki identitas dan karakteristik yang khas, serta menjaga nilai-nilai lokal yang positif dalam memperkuat perekonomian lokal. Hingga tahun 2024 belum ada desa yang berstatus Desa Mandiri di Kabupaten Tana Toraja. Perkembangan Indeks Desa membangun di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Indeks Desa Membangun Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

STATUS LEMBAH/DESA	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	0	0	0	0	0
Maju	1	2	3	7	12
Berkembang	48	63	75	76	75
Tertinggal	46	34	32	29	25
Sangat Tertinggal	17	13	2	0	0
TOTAL	112	112	112	112	112

Sumber : DPML Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.3.7. STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi makro mengacu pada kondisi di mana indikator ekonomi utama seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran tetap stabil dan terkendali dalam jangka panjang. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

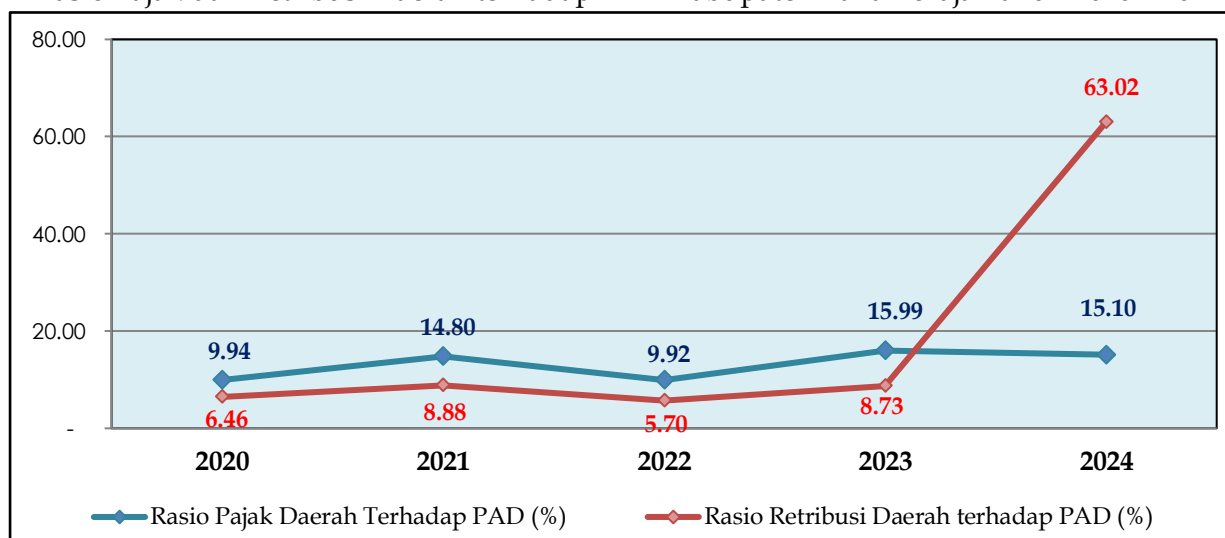
A. Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini memberikan indikasi tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengumpulkan

penerimaan dari sumber-sumber ini. Terkait Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menandakan efektivitas dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak atau diversifikasi sumber pajak. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan pajak daerah. Selanjutnya terkait Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan dari tarif layanan dan kegiatan tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengelola dan meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah. Sebaliknya rasio yang rendah dapat menunjukkan potensi untuk meninjau kembali tarif retribusi atau meningkatkan kepatuhan. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah membantu pemerintah daerah dalam memahami seberapa efektif dan beragam sumber-sumber penerimaan daerah. Analisis rasio ini dapat memberikan dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan guna meningkatkan keberlanjutan keuangan daerah.

Grafik 2.61

Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang/jasa secara umum. Perhitungan inflasi mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. IHK memberikan informasi mengenai perkembangan naik atau turunnya harga

barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Di Sulawesi Selatan terdapat lima kabupaten/kota yang menjadi sampel untuk menghitung inflasi provinsi (zona inflasi), yaitu Makassar, Parepare, Palopo, Bone (Watampone) dan Bulukumba. Inflasi Kabupaten Tana Toraja merujuk pada inflasi Kota Palopo.

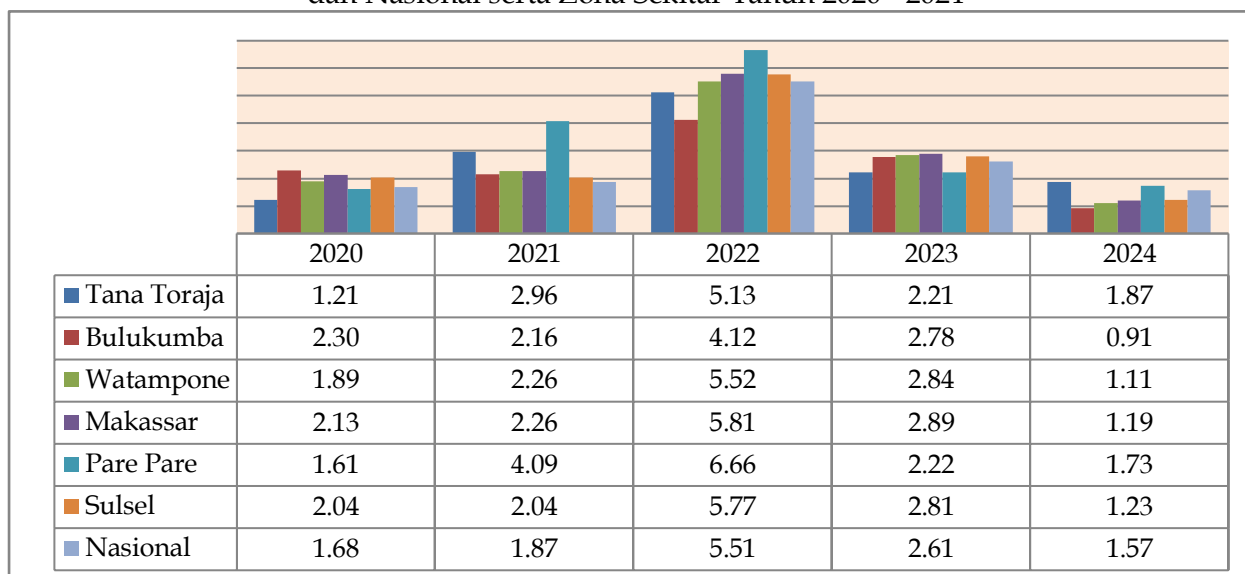
Menurut data BPS Sulawesi Selatan, nilai inflasi Kota palopo yang menjadi rujukan Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020 sebesar 1,21 persen dan Tahun 2022 meningkat menjadi 2,96 persen. Pada Tahun tingkat inflasi sebesar 2,21 persen, kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 1,87 persen. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan November 2024 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,23 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,51 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,29 persen; kelompok transportasi sebesar 1,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,42 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,90 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,16 persen. Sedangkan pada kelompok kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,05 persen; serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan juga mengalami deflasi sebesar 0,76 persen.

Pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,26. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Luwu Timur 2,02 persen dengan IHK sebesar 106,78 dan terendah terjadi di Kabupaten Wajo sebesar 0,68 persen dengan IHK sebesar 106,41. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,69 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,83 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya

sebesar 1,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,95 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,66 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,39 persen. Adapun kelompok transportasi; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,28 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada Desember 2024 sebesar 0,38 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sulawesi Selatan bulan Desember 2024 sebesar 1,23 persen. Laju inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, nasional dan Zona sekitar dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.62

Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional serta Zona Sekitar Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2025

2.1.4. ASPEK LAYANAN UMUM

Secara keseluruhan, pelayanan umum yang baik merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan stabil. Aspek pelayanan umum memiliki peran yang sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengutamakan aspek pelayanan umum dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan yang efektif. Gambaran terkait aspek pelayanan umum di Kabupaten Tana Toraja tergambar pada

regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif yang tercerminkan pada pencapaian indikator-indikator pelayanan pemerintahan.

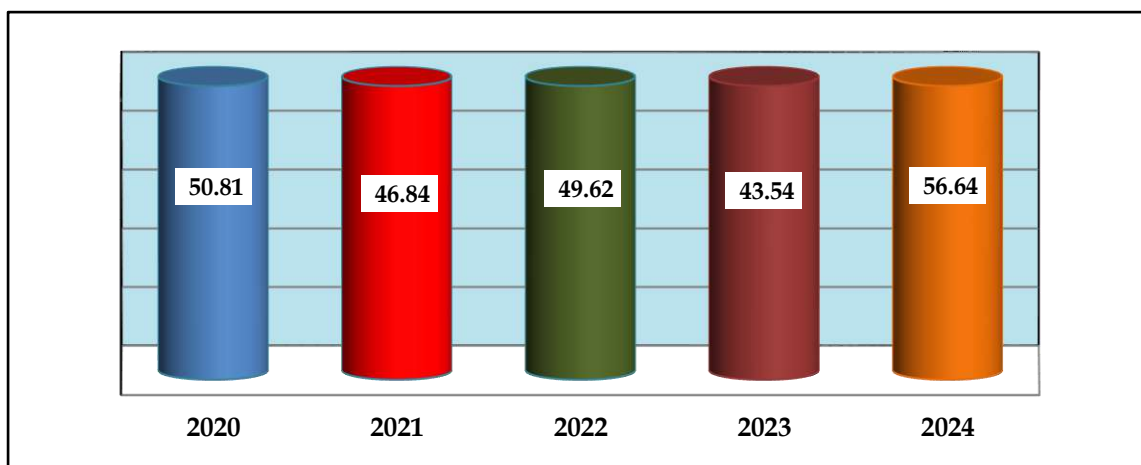
2.1.4.1. REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRASI DAN ADAPTIF

A. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Capaian Indeks Reformasi Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi. berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB RI tahun 2020, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Toraja sebesar 50,81 namun turun menjadi 48,84 pada tahun 2021. Tahun 2022 meningkat menjadi 49,62 kemudian turun pada angka 43,54 pada tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 56,64.

Grafik 2.63

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat, yang berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi

hak dan kewajibannya sebagai warganegara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan diadakannya survey kepuasan masyarakat adalah untuk mendapatkan umpan-balik atas kualitas pelayanan yang telah dilakukan penyelenggara pelayanan. Melalui survei kepuasan, masyarakat didorong untuk memberikan partisipasi sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan agar terjadi peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan masyarakat dan konsumen saat survei kepuasan

Pada tahun 2021, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yakni RSUD LakiPadada dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian sejak tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga ikut telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Tabel 2.49
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2024

No.	Perangkat Daerah	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	RSUD LakiPadada	80,632 (Baik)	81,682 (Baik)	83,364 (Baik)	85,101 (Baik)
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,000 (Baik)	88,135 (Baik)	88,340 (Baik)	89,1 (Sangat Baik)
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	82,090 (Baik)	87,820 (Baik)	88,13 (Baik)

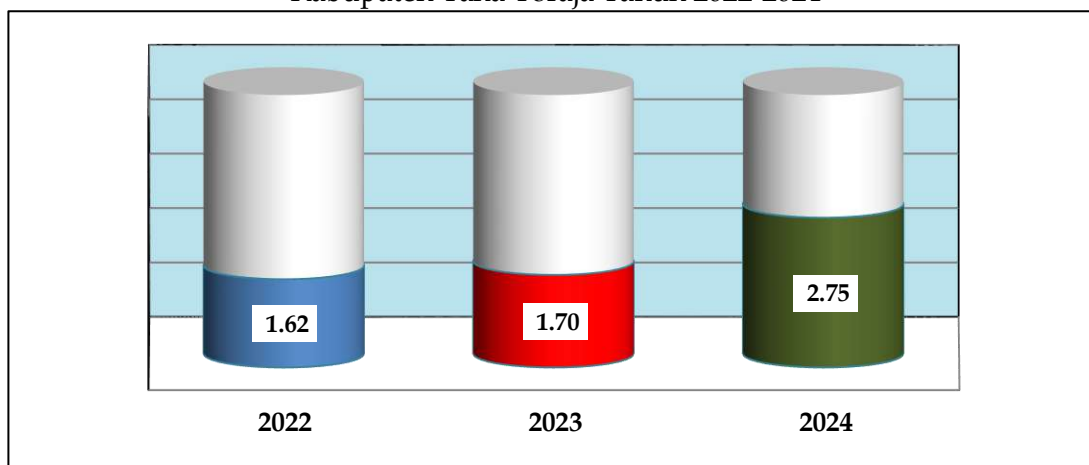
Sumber : RSUD LakiPadada, DisDukcapil & DPMPTSP Kabupaten Tana Toraja, 2025

C. INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Capaian nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sebesar 2,75 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 1,05. Meskipun mengalami sedikit kenaikan namun capaian Indeks SPBE Kabupaten

Tana Toraja masih termasuk dalam kategori Kurang. Rendahnya capaian Indeks SPBE di Kabupaten Tana Toraja diakibatkan karena belum adanya kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur SPBE serta belum memiliki perencanaan strategis yang mengatur terkait SPBE. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai capaian Indeks SPBE maka harus didukung melalui penyusunan kebijakan internal yang mengatur arsitektur SPBE serta perencanaan strategis yang mengatur SPBE. Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.64
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2024



Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, 2025

D. SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

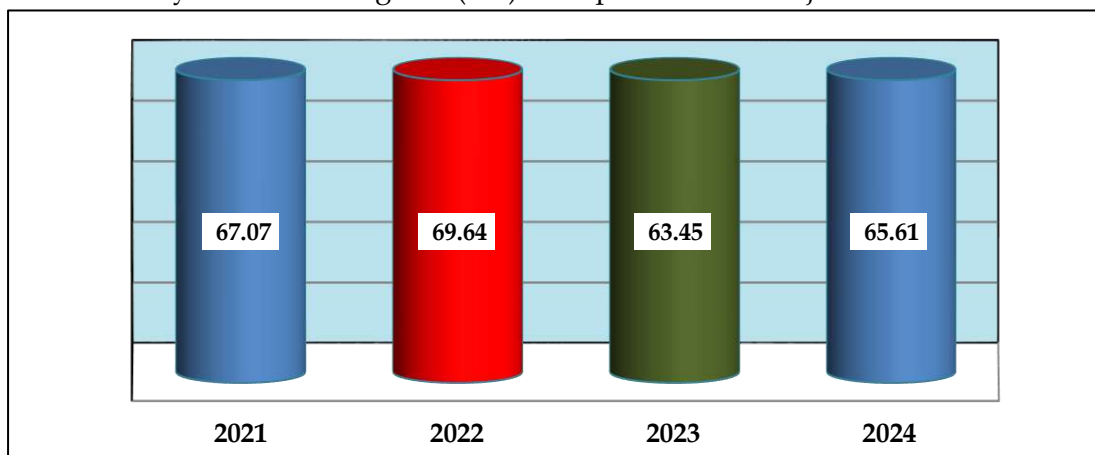
Upaya mewujudkan pemerintahan bersih terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu sumber persoalan yang diidentifikasi telah menghambat upaya ini adalah rendahnya integritas birokrasi, yang bisa menyebabkan pelayanan publik yang tidak akuntabel atau kebocoran anggaran. Pada dasarnya, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah menginisiasi upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan integritas. Namun, capaian upaya-upaya tersebut belum memiliki ukuran yang objektif, maka Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menjawab kebutuhan akan perangkat diagnostik yang dapat membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun

oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) dengan skor 100 menyatakan sangat bersih dari korupsi, dan 0 menunjukan sangat korup. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.

Hasil survey Penilaian Integritas di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang mencapai 69,64. Namun pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 65,61. Ini menandakan Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tana Toraja masuk dalam kategori baik yang menunjukkan bahwa Sistem sudah berjalan baik, namun masih ada perlu perbaikan.

Grafik 2.65

Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2024



Sumber : Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, 2025

E. INDEKS MATURITAS SPIP

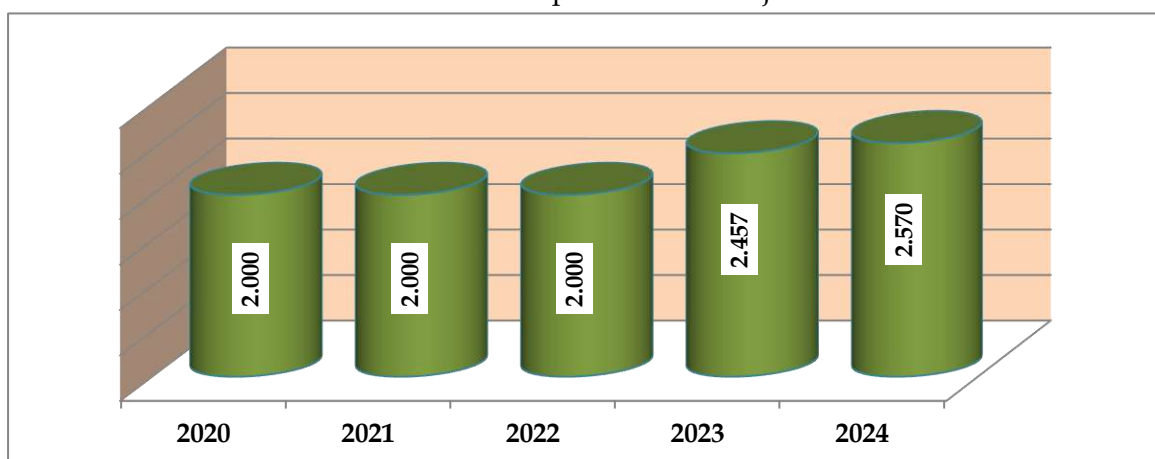
Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang

kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, nilai indeks maturitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja baru mencapai level 2 atau termasuk kategori “berkembang”. Tingkat maturitas “Berkembang” menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum tertangani secara memadai. Dari tahun 2020 hingga tahun 2022, nilai Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Tana Toraja tetap di angka 2 kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 2,547 atau sebesar 0,547 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 2,570 atau sebesar 0,113 poin dibanding pada tahun sebelumnya.

Grafik 2.66

Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



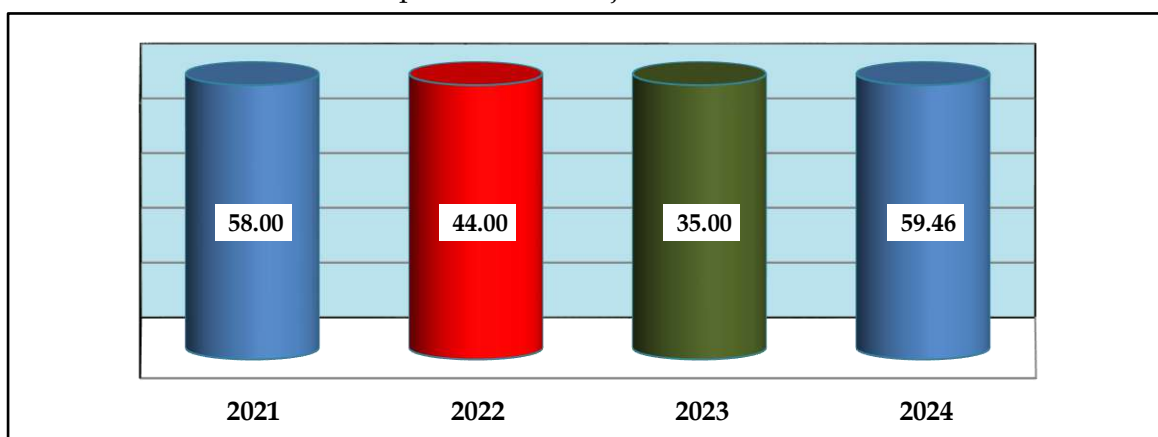
Sumber : Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, 2025

F. MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KPK

Setiap tahunnya, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). Secara umum, MCP memiliki delapan cakupan intervensi yang terdiri atas perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak

daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, angka penilaian MCP KPK Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dari 58 persen pada tahun 2021 menjadi 35 persen pada tahun 2023 yang diakibatkan beberapa hal diantaranya pemungutan pajak serta pengelolaan sertifikasi asset yang belum optimal, minimnya SDM Pengelola Barang/Jasa (PPBJ) serta belum lengkapnya Peraturan Daerah di beberapa sektor terkait 8 area intervensi. Hal ini merupakan kesatuan yang perlu disinergikan dan tidak dapat dipisahkan. Namun pada tahun 2024 MCP KPK Kabupaten Tana Toraja bisa meningkat menjadi 59,46 hal ini terjadi karena adanya perbaikan Perencanaan dan Penganggaran APBD, perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa, adanya tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal, APIP aktif dalam pengawasan sejak perencanaan serta adanya optimalisasi pendapatan daerah.

Grafik 2.67
Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2024



Sumber ; Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, 2025

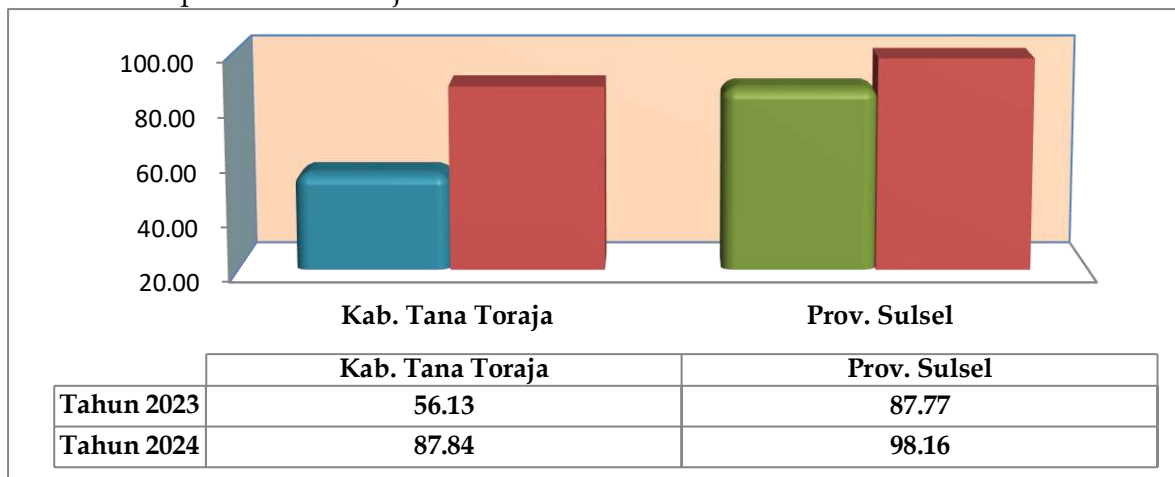
G. INDEKS REFORMASI HUKUM

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam Upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai Permenkumham nomor 17 Tahun 2022, indeks reformasi hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.

Grafik 2.68

Perbandingan Indeks Reformasi Hukum

Kabupaten Tana Toraja dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan 2024



Sumber : Bagian Hukum Setda Kabupaten. Tana Toraja, 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 sebesar 56,13 dengan kategori Cukup masih kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 87,84 dengan kategori Baik. Meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2024 namun nilai tersebut masih di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 98,16 dengan kategori Istimewa. Hal ini menandakan bahwa Indeks Reformasi hukum perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan seluruh stakeholder dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas sehingga terwujud birokrasi yang bersih dan akuntabe. Oleh karena itu dibutuhkan penggerak yang betul-betul berkomitmen terhadap reformasi hukum, memahami substansi, konsisten dengan jalur perubahan yang disepakati, memberikan keteladanan (lead by example), dan efektif mewujudkan agenda reformasi hukum dalam kebijakan pemerintah.

2.1.4.2. HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

A. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda merupakan proses pelaksanaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) agar ditaati oleh masyarakat dan lembaga yang berada dalam wilayah hukum suatu daerah. Ini merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Persentase penegakan Perda di Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun terakhir sudah mencapai 100 persen. Kondisi ini menandakan seluruh rencana kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perda sudah dilakukan selain itu penegakan dilakukan sesuai rencana dan prosedur administratif telah dijalankan. hal ini didukung oleh perencanaan dan target yang jelas maupun kapasitas dan profesionalisme satpol pp serta adanya dukungan regulasi turunan.

Tabel 2.50

Persentase Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penegakan Perda	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Damkar; BPBD Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Persentase Tindak Kriminalitas yang Tertangani

Kemampuan sebuah daerah bersaing dengan daerah lain untuk mendorong produktivitas perekonomian daerah tak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tapi faktor sosial juga tidak kalah pentingnya. Salah satu indikator aspek sosial adalah kemampuan daerah menangani kriminalitas. Menangani kriminalitas merupakan syarat mutlak jika sebuah daerah ingin meningkatkan daya saing, sebab daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi membuat aktivitas sosial-ekonomi terganggu dan akhirnya mempengaruhi daya saing daerah.

Sebagian besar penanganan tindakan kriminal tidak berada dibawah kewenangan pemerintah daerah, tapi menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Meski begitu, kerjasama antara pemangku kepentingan dalam rangka menjaga keamanan dan

ketertiban disuatu daerah. Pada tahun 2020, jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Tana Toraja tercatat sebanyak 190 kasus dengan jumlah yang ditangani sebesar 144 kasus atau 75,79 persen kemudian ditahun 2024 tercatat ada 331 kasus dan yang tertangani sebanyak 278 kasus atau sebesar 83,00 persen.

Tabel 2.51
Angka Kriminalitas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kriminalitas	190	234	404	324	331
2.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	144	187	300	275	278
3.	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	75,79	79,91	74,26	84,88	83,00

Sumber : Satpol PP & Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana Toraja, 2025

C. Jumlah Kasus Kejahatan

Kejadian tindak kriminal merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas keamanan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Selain stabilitas politik, aspek keamanan juga merupakan salah satu indikator penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah tertentu. Jumlah kasus kejahatan di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah perlindungan anak kemudian diikuti oleh kasus narkoba dan penganiayaan.

Tabel 2.52
Jenis Kejahatan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Politik	-	-	-	-	-
2.	Pembakaran	-	-	-	-	1
3.	Penyusapan	-	-	-	-	1
4.	Pemalsuan	-	-	-	-	1
5.	Kesuliaan	1	1	1	4	4
6.	Perjudian	-	-	-	12	40
7.	Penculikan	-	-	-	-	-
8.	Pembunuhan	9	4	3	2	-
9.	Penganiayaan	16	14	14	8	40
10.	Pencurian	5	11	8	18	17
11.	Perampokan	-	-	-	-	-
12.	Pemerasan	-	-	-	-	-

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
13.	Penggelapan	1	-	2	3	6
14.	Penipuan	1	9	2	6	5
15.	Narkotika	33	33	25	39	51
16.	Korupsi	-	1	-	6	5
17.	Laka Lantas	-	4	1	4	2
18.	Perlindungan Anak	75	76	63	48	84
19.	KDRT	-	-	2	2	1
20.	Penghinaan	-	-	-	-	-
21.	Penebangan Liar	1	1	2	-	-
22.	Pengancaman	-	-	-	-	1
23.	Pengrusakan	-	-	-	2	-

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2025

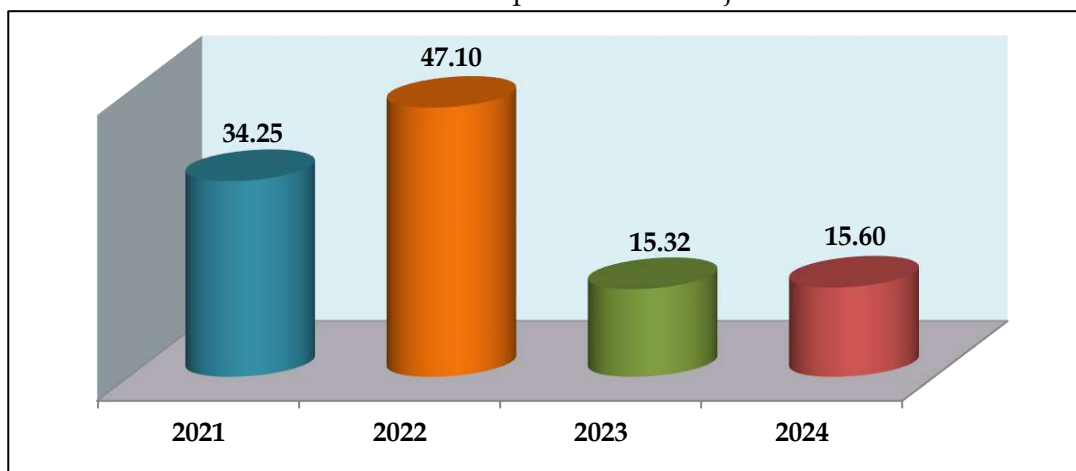
2.1.4.3. KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

A. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan sejumlah inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Indeks Inovasi Daerah) diberikan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah berhasil melakukan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2021 sebesar 34,25 dengan kategori Inovatif kemudian naik pada tahun 2022 menjadi 47,10 dengan kategori inovatif namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 15,32 dengan kategori kurang inovatif. Penurunan yang terjadi diakibatkan karena keterlambatan penginputan inovasi dan data dukung dalam aplikasi. Sampai batas akhir yang telah ditentukan. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Toraja masih perlu ditingkatkan dengan cara memberikan dukungan kepada perangkat daerah yang melakukan inovasi melalui regulasi, anggaran, serta kelengkapan administrasi lainnya. Namun pada tahun 2024 sedikit meningkat dengan nilai 15,60 meskipun masih kategori kurang inovatif

Grafik 2.69

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2024



Sumber ; Bagian Ortala Setda Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Jumlah Kerjasama Daerah

Kabupaten Tana Toraja melakukan kerja sama dengan Kabupaten lain maupun dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pendapatan daerah, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata maupun mengatasi keterbatasan anggaran atau kapasitas. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melakukan kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga. Adapun kerjasama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.53

Kerjasama Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kerjasama dengan Daerah Lain	Kerjasama dengan Pihak Ketiga
2020	1 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan BKPSDM Kab. Tana Toraja	1 Dinas Koperasi, UKM Perdagrin dengan Kab. Tana Toraja dengan TP-PKK
		2 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Universitas Kristen Indonesia
2021	1 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan BKPSDM Kab. Tana Toraja	1 Dinas Koperasi, UKM Perdagrin dengan Kab. Tana Toraja dengan TP-PKK
		2 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Universitas Kristen Indonesia



Tahun	Kerjasama dengan Daerah Lain	Kerjasama dengan Pihak Ketiga
2022	1 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan BKPSDM Kab. Tana Toraja	1 Dinas Koperasi, UKM Perdagrin dengan Kab. Tana Toraja dengan TP-PKK
		2 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Universitas Kristen Indonesia
		3 Dinas Sosial dengan Rumah Singgah ODGJs
		4 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dengan TP-PKK
		5 Pemerintah Kabupaten tana Toraja dengan PT.Telekomunikasi Indonesia
		6 Pemerintah Kabupaten tana Toraja dengan YESMa
		7 Pemerintah Kabupaten tana Toraja dengan Dandim 1414 Tana Toraja
2023		1 Dinas Koperasi, UKM Perdagrin dengan Kab. Tana Toraja dengan TP-PKK
		2 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Universitas Kristen Indonesia
		3 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan BPJS Kesehatan
		4 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan PT. Citilink
		5 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan KODIM 1414 Tana Toraja
		6 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Topografi Kodam XIV/Hasanuddin
		7 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Lembaga Administrasi Negara RI
		8 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan KAPABEL
		9 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Yayasan Putra Samporna
		10 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Universitas Mulawarman
2024	1 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Kab. Morowali Utara	1 Dinas Koperasi, UKM Perdagrin dengan Kab. Tana Toraja dengan TP-PKK
	2 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Kab. Enrekang	2 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Universitas Kristen Indonesia
	3 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Kab. Toraja Utara	3 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan KAPABEL
	4 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Kab. Bulukumba	4 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Yayasan Putra Samporna

Tahun	Kerjasama dengan Daerah Lain	Kerjasama dengan Pihak Ketiga
		5 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Universitas Mulawarman
		6 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan PT. PLN Persero
		7 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan CV. SMIDCO
		8 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan PT. Citilink
		9 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan Universitas Islam Makassar
		10 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan TIRTA BUISUN
		11 Pemerintah Kab. Tana Toraja dengan PT. TASPEN (PERSERO)

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.4.4. KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pada semua jenjang pendidikan. Di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pendidikan mengambil peran penting dengan target Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan harus juga memberhatikan kualitas pendidik atau guru. Target SDGs lain dalam bidang pendidikan pada tahun 2030 adalah secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Pencapaian tujuan tersebut bagi Kabupaten Tana Toraja harus diupayakan karena Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan urusan pendidikan bagi kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan

anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah siswa di suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat usia sekolah di jenjang pendidikan tersebut. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 APK dapat dicapai 75,30 persen kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 112,00 persen namun pada tahun 2022 angka APK PAUD turun menjadi 63,66. Setelah itu pada tahun 2023 angka APK PAUD dapat diperbaiki menjadi 92 persen, meskipun begitu pada tahun 2024 turun lagi menjadi 63,66 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A pada tahun 2024 diperoleh 92 persen, angkanya meningkat dibanding pada tahun 2023. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B tahun 2023 dan tahun 2024 diperoleh 97 persen meningkat dari tahun 2022 sebesar 87,03. Selanjutnya perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	75,30	112,00	65,20	92,00	63,66
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	persen	107,99	116,60	108,51	91,00	92,00
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	persen	106,13	110,60	87,03	97,00	97,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah yang lebih baik dibandingkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dimana tahun 2020 sebesar 98,48 persen kemudian menjadi 93 persen pada tahun 2024. Sebaliknya, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B mengalami tren peningkatan dimana tahun 2020 tercatat sebesar 81,83 persen kemudian meningkat menjadi 95 persen pada tahun 2024. Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	persen	98.48	97.21	99,53	93,00	93,00
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	persen	81.83	77.26	52,62	95,00	95,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengutamakan pendidikan dan pemerintah telah menyediakan akses pendidikan yang mudah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi. Pada kelompok umur 7-12 tahun capaian tertinggi pada tahun 2020 yaitu 99,83 persen. Untuk kelompok umur 13-15 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi diperoleh pada tahun 2024 yaitu 96,50persen. Kelompok umur 16-18 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi pada tahun 2024 yaitu 78,50 persen sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok umur 19-24 tahun tertinggi tercatat pada tahun 2024 yaitu 40,20 persen.

Kondisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur di Kabupaten Tana Toraja tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.56

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur (persen)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
2020	99,83	96,02	77,95	34,58
2021	99,71	96,04	78,37	34,54
2022	99,53	96,37	77,36	39,13
2023	99,60	96,41	78,03	37,54
2024	99,59	96,50	78,50	40,20

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Angka Putus Sekolah merupakan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat jenjang pendidikan tertentu. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk yang pernah atau sedang bersekolah. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi pada tahun 2024 angka Putus Sekolah (APS) SD berada pada angka 0,40 persen dan untuk jenjang SMP juga 0,40 persen. Meskipun persentasenya kecil, angka putus sekolah di Kabupaten Tana Toraja secara hitungan masih fluktuatif. Beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, di antaranya faktor ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, budaya, minat anak untuk sekolah maupun lokasi sekolah.

Tabel 2.57

Angka Putus Sekolah SD/SMP, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/ MTs dan dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD	persen	0.30	0.38	0,49	0,45	0,40
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	persen	0.10	0.11	0,48	0,42	0,40

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/ MTs	persen	101.40	100.00	100,00	100,00	100,00
4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/MA	persen	92.00	97.61	97.87	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf, baik dalam huruf Latin, Arab, maupun huruf lainnya. Angka ini biasanya diukur untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf juga merupakan indikator penting untuk mengetahui perkembangan pendidikan penduduk dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi AMH, maka semakin tinggi pula kualitas SDM. AMH juga digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar penduduk dalam memperluas akses informasi, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk, keluarga, maupun suatu daerah. Angka melek huruf di Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024 sebanyak 94,40 persen Penduduk Usia 15–24 Tahun di Kabupaten Tana Toraja yang melek huruf baik itu laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya perkembangan angka melek huruf di kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.58

Persentase Persentase Penduduk Usia > 15 Tahun Melek Huruf dan
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15–24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penduduk Usia > 15 Tahun Melek Huruf	persen	99,00	97,89	93,90	94,40	94,40
2.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15–24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	persen	97,80	97,89	95,93	96,01	94,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Angka Kelulusan dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 sudah mencapai 100 persen. Demikian pula dengan Angka Kelulusan dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/MA telah mencapai 100 persen pada tahun 2024 dari 99,00 persen yang tercatat tahun 2020. Angka kelulusan tersebut tidak lepas dari kondisi sarana dan prasarana pembelajaran tingkat SD maupun SMP yang semakin membaik. Namun untuk Ruang Kelas SD Kondisi Baik pada tahun 2024 baru mencapai 79 persen, sedangkan Ruang Kelas SMP Kondisi Baik sudah mencapai 84 persen. Untuk Kondisi ruang perpustakaan disekolah utamanya tingkat SD hanya 60 persen, untuk tingkat SMP baru mencapai 70 persen. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perbaikan terhadap ruang Kelas maupun Perpustakaan SD dan SMP. Untuk ketersediaan tenaga pengajar di Kabupaten Tana Toraja, pada tahun 2024 perbandingan antara guru dan siswa SD yaitu 1 orang guru mengajar 22 orang peserta didik. Untuk tingkat SMP 1 orang guru mengajar 32 orang siswa didik. Untuk Pendidik SD yang memiliki sertifikasi pada tingkat SD pada tahun 2024 hanya 30,00 persen, sedangkan untuk SMP sejumlah 32,00 persen.

Tabel 2.59

Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

NO	IN DIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kelulusan dari SD/SDLB/ MI ke SMP/SMPLB/MTs	persen	99.88	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Angka Kelulusan dari SMP/ SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/ SMK/MA	persen	99.00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	persen	22.00	73,00	73.50	75,00	79,00
4.	Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	persen	41,00	83,00	83.67	85,00	84,00
5.	Persentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	persen	49,00	55,00	57,00	58,00	60,00
6.	Persentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	persen	57,00	63,00	68,00	69,00	70,00
7.	Rasio Guru/Siswa SD	Rasio	1:15	1:15	1:15	1:28	1:22
8.	Rasio Guru/Siswa SMP	Rasio	1:14	1:14	1:14	1:32	1:32
9.	Persentase Penduduk Usia > 15 Tahun Melek Huruf	persen	99,00	97,89	93.90	94,40	94,40
10.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15–24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	persen	97,80	97,89	95,93	96,01	90,00



NO	IN DIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
11.	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	persen	86,90	91,30	89.50	90,00	90,00
12.	Persentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	persen	52,78	29,70	30.43	29,98	30,00
13	Persentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	persen	67,50	26,24	32,02	31,02	32,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Tana Toraja terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan rendahnya angka kematian.

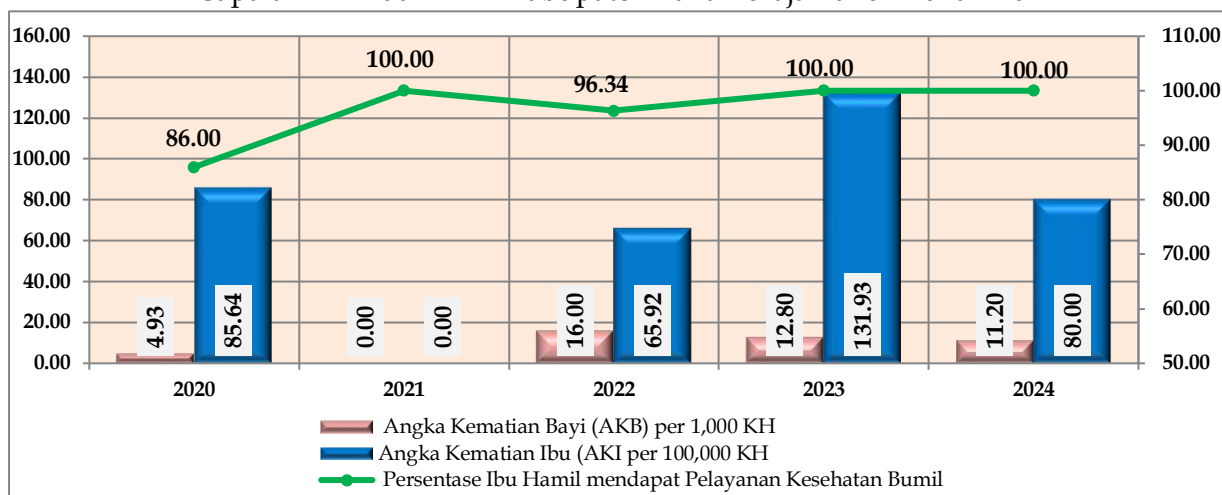
Urusan kesehatan memiliki sumbangan dalam meningkatnya UHH yaitu dengan menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian karena kesakitan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan. AKB Tahun 2020 sebesar 4,93 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) namun pada Tahun 2022 meningkat menjadi 16,00 per 1.000 KH. Meskipun demikian dalam 2 (dua) tahun terakhir AKB per 1.000 KH menurun. Pada tahun 2024 hanya 11,20 AKB per 1.000 KH disbanding pada tahun 2023 sebanyak 12,80 AKB per 1.000 KH.

Angka kematian ibu (AKI) dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, dari 85,64 Angka Kematian Ibu per 100,000 KH meningkat menjadi 131,93 Angka Kematian Ibu (AKI per 100,000 KH. Adanya kasus kematian ibu disebabkan oleh kondisi dimana ibu tidak siap mengalami kelahiran yaitu mengalami 4 T (terlalu sering, terlalu banyak, terlalu muda dan terlalu tua) melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan seperti kasus pendarahan telah mengalami penurunan namun karena infeksi penyakit dan penyakit penyerta (jantung, hipertensi, kanker dll) mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi meskipun kondisi persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil terus meningkat. Kondisi ini tentunya menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Namun pada tahun 2024 angka ini dapat ditekan menjadi hanya 80,00 Angka Kematian Ibu (AKI

per 100,000 KH. Faktor yang mendorong penurunan angka kematian ibu antara lain didukung oleh peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan serta peningkatan perawatan antenatal, persalinan dan pasca persalinan.

Grafik 2.70

Capaian AKB dan AKI Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

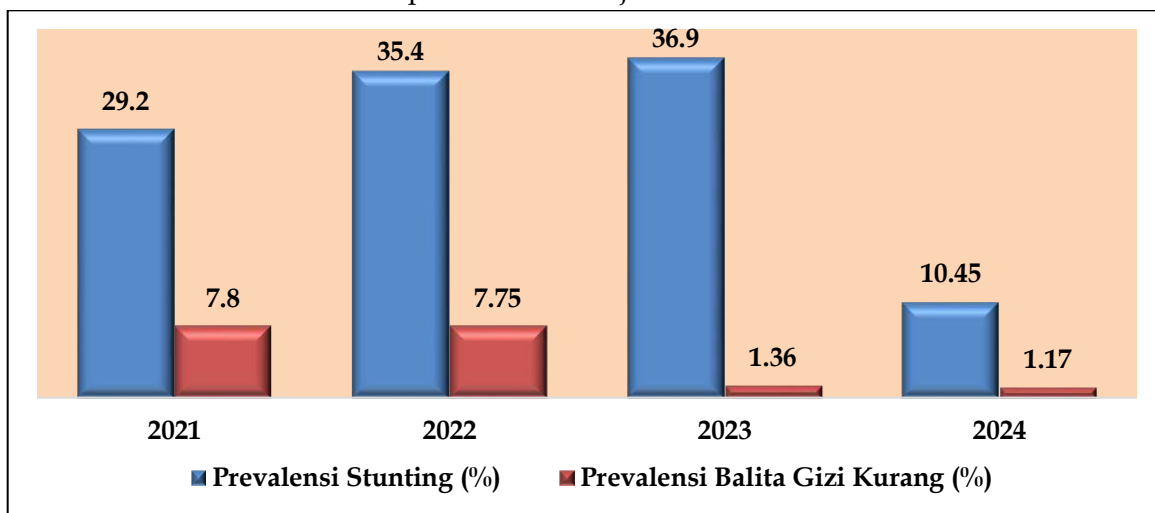


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Hasil survei berdasarkan SSGI dan SKI menyatakan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Tana Toraja mencapai sebesar 29,2 persen di tahun 2021, 35,4 persen di tahun 2022, 36,9 persen di tahun 2023 dan 10,45 persen di tahun 2024. Pada tahun 2024 menunjukkan penurunan setelah pada tahun 2023 angkanya mencapai 36,9 persen. Angka ini dapat menurun karena adanya peningkatan gizi ibu dan anak serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pola asuh yang baik.

Grafik 2.71

Prevalensi Stunting dan Prevalensi Balita Gizi Kurang
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja, 2025

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 sub urusan meliputi Sumberdaya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang.

Pada sub urusan sumber daya air menunjukkan bahwa persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik mengalami fluktuasi dari 60,21 persen pada tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 77,41 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 64,32 persen dan kembali mengalami penurunan menjadi 63,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kabupaten Tana Toraja trennya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada Tahun 2020 sebesar 32 persen kemudian meningkat menjadi 37,20 persen pada Tahun 2022, namun kondisi ini turun menjadi 36,35persen pada tahun 2024. Hal ini terjadi oleh karena adanya beberapa kerusakan pada jaringan irigasi.

Persentase kondisi mantap jalan di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020 mencapai 69,37 persen terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 hanya 60,70

persen. Hal ini terjadi karena banyak kerusakan jalan oleh karena pengaruh cuaca dan bencana longsor dll.

Pada tahun 2023 Sampah yang Tertangani di Kabupaten Tana Toraja sudah mencapai 100 persen. Demikian pula dengan Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Air Minum curah Lintas Kabupaten/Kota juga sudah mencapai kondisi 100 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.60
Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KEWENANGAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	persen	60,21	77,41	64,32	62,99	63.11
2.	Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	32	35,20	37,20	36,33	36,35
3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	711,150	914,840	928,840	807,500	589.57
4.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	persen	1 : 230	1 : 228	1 : 229	1 : 230	1:230
5.	Panjang Jalan dilalui roda 4	Km	1.252	1.252	1.256	1.190	1.252
6.	Persentase kondisi mantap jalan	persen	69.37	67.72	68,53	47,82	60.70
7.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)	persen	56.80	73.07	76,18	46,83	759.97
8.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	4.15	5.15	5,16	4,00	47.09
9.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	persen	4.15	5.15	5,16	5,17	5.5
10.	Persentase Sampah yang Tertangani	persen	35,08	18,91	100	100	100
11.	Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Air Minum curah Lintas Kabupaten/Kota	persen	81,04	100	95,05	100	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tana Toraja, 2025

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 sub urusan meliputi Perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kondisi rumah di Kabupaten Tana Toraja sudah relatif baik, pemerintah meningkatkan kualitas hunian melalui program peningkatan rumah tidak layak huni. Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sebesar 84,00 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 83,00 persen. Hal ini didukung oleh Program Pemerintah melalui perbaikan rumah layak huni.

Persentase kawasan perumahan kumuh tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 0,08 persen, namun bila dibandingkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,021 persen. Hal ini didukung oleh intervensi berbagai program dari Pemerintah sehingga menyebabkan menurunnya persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan untuk rasio rumah layak huni di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 sebesar 1,171 meningkat menjadi 0,208 pada tahun 2024. Untuk rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2024 capaiannya sebesar 99,50 persen atau meningkat 16,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 61
Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,144	0,177	0,168	0,171	0,208
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	86,98	90,13	87,00	88,00	84,00
3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	0,101	0,101	0,080	0,08	0,08
4	Prosentase Rumah tinggal bersanitasi	persen	95,58	83,31	84,20	86,03	99,50

Sumber: Dinas PRKP dan PUTR Kabupaten Tana Toraja, 2025

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bencana dan kebakaran. Cakupan penegakan Perda di Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun terakhir sudah mencapai 100 persen.

Demikian halnya dengan persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana serta persentase warga negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana selama lima tahun terakhir juga telah mencapai 100 persen. Data Capaian Kinerja Program Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.62

Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020- 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	0,43	0,43	0,43	0,70	0.70
2.	Cakupan penegakan Perda	persen	100	100	100	100	100
3.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten	persen	100	100	100	100	100
4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100	100	100	100
5.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	persen	100	100	100	100	100
6.	Persentase warga negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Damkar; BPBD Kabupaten Tana Toraja, 2025

6. Urusan Sosial

Indikator yang kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial adalah berjalannya penanganan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial serta tertangani pada Tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Sedangkan Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 juga sebesar 100 persen. Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.63

Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	persen	34,5	34,5	60	100	100
2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	100	34,5	27,72	100	100
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100
4	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	Orang	80	0	0	199	396
5	Presentase Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja, 2025

B. Urusan Pemerintahan Wajib Non Layanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen. Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 sebanyak 19,58 persen. kondisi ini cenderung memperlihatkan penurunan angka dimana pada tahun 2020 tercatat ada 70,79 persen pencari kerja yang ditempatkan. Sedangkan dari sisi ketaatan, seluruh Perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Tana Toraja telah menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan. Kinerja urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64

Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	80,09	100	100	100	100
2	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	persen	70,79	20,40	13,28	18,47	19,58
3	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketengakerjaan	persen	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja, 2025

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Indikator Agregat pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan digunakan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IDG Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024 capaian tahun IDG 89,05 lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 68,50. Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 mencapai 100 persen yang artinya seluruh laporan kasus kekerasan terhadap perempuan telah ditangani. Selain itu semua Kecamatan mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB. Selanjutnya capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65

Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,50	68,77	70,68	70,29	89,05
2	Prosentase korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	persen	30	84	86,6	142,86	100
3	Persentase kecamatan yang memiliki forum anak	persen	84,21	100	100	100	100
4	Prosentase kasus korban kekerasan	persen	0,017	0,021	0,023	0,014	0,03

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	persen	100	100	100	100	100
6	Persentase PUS peserta KB Aktif	persen	65,92	68,44	53,30	68,04	98,56
7	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	persen	100	100	100	61,04	81,05

Sumber : DPPPA PP dan KB Kabupaten Tana Toraja, 2025

3. Urusan Pangan

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Tana Toraja untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi kebijakan pangan nasional.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tana Toraja cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama sebanyak 252,27 ton, terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2024 sudah sebanyak 524,7 ton pangan utama yang tersedia. Peningkatan ini didukung oleh adanya peningkatan produksi pertanian, distribusi hasil pertanian meningkat serta adanya dukungan kebijakan dari pemerintah. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 skor PPH sebesar 75,00 kemudian mengalami peningkatan menjadi 77,1 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja semakin beragam dan proporsional. Peningkatan skor PPH didukung oleh peningkatan produksi pertanian, adanya edukasi dan promosi gizi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat disamping itu semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan sehat.

Untuk pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan pada Tahun 2020 kinerjanya sebesar 75,49 persen kemudian meningkat menjadi 100 persen pada Tahun 2024. Gambaran capaian kinerja urusan pangan, sebagai berikut:

Tabel 2.66
Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020– 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg	252,27	200,39	201.32	374,71	524,7
2	Ketersediaan Energi	kcal/ kapita/hari (kalori)	98.79	100	8.262	1.769,69	8.249
3	Ketersediaan Protein	gram/ kapita/hari (Protein)	99.13	100,68	309.35	134,95	307,24
4	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	persen	75.49	95,5	96.92	96,81	100
5	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	79.19	75,0	75,3	88,3	77,1
6	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	7.217	7.367	7.336	5.777	6.619
7	Cakupan Desa/Kelurahan yang menerapkan Rumah Pangan Lestari	persen	17.61	24.50	27.68	30,82	32,07
8	Persentase Lembang/Kelurahan yang rawan pangan	persen	12.51	13.35	19.79	6,29	2
9	Cakupan wilayah kecamatan pelaksanaan pengawasan	persen	10.50	31.57	57.89	36,80	52,63

Sumber : Dinas Pertanian, Katanahan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja, 2025

4. Urusan Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi : a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten; b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten; d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; e). penerbitan izin membuka tanah dan f). perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah. Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah Negara, dan Penyelesaian izin lokasi.

Tabel 2.67

Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas lahan bersertifikat	persen	3.590.159 M2 (0.31 %)	5.285.912 M2 ((0.46 %)	5.996.149 M2	5.606.569 M2	130.489.081
2	Penyelesaian izin lokasi	persen	-	Tidak terdapat penyelesaian izin lokasi	1	-	-

Sumber data : ATR/BPN Kabupaten Tana Toraja, 2025

5. Urusan Lingkungan Hidup

Kewenangan urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Hasil Pengukuran Indeks kualitas air di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 angkanya mencapai 60,15 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 63,33. Begitupun dengan Indeks kualitas udara Tahun 2020 mencatat angka 89,61 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 92,94 ini menandakan kualitas Udara di Kabupaten Tana Toraja tergolong bersih dan tidak berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini didorong oleh banyaknya tumbuhan yang membantu mengurangi kadar karbon dioksida (CO₂) dan polutan lainnya serta tersedianya ruang terbuka hijau. Perkembangan Tingkat pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHaTi) mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 sudah mencapai 100 persen. Untuk urusan persampahan di Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi, persentase sampah yang tertangani pada Tahun 2020 mencapai 33,33 persen dan pada Tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan menjadi 32,07 persen. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 kinerjanya sebesar 28 persen, kemudian turun menjadi hanya 1,77 persen di Tahun 2024. Hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Daur Ulang serta kebiasaan konsumsi masyarakat yang tidak mendukung 3R.

Masyarakat cenderung mengonsumsi barang sekali pakai dan menghasilkan sampah plastik dalam jumlah besar. Selain itu permasalahan pokok dalam meningkatkan kinerja bidang urusan lingkungan hidup adalah belum adanya Dokumen RPPLH Kabupaten Tana Toraja di Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.68

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kualitas air	Nilai	60,15	62,73	50	58,89	63,33
2	Indeks kualitas udara	Nilai	89,61	88,98	89,44	90,40	92,94
3	Prosentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	persen	25	16,57	30	20	100
4	Cakupan Limbah B3 Fasum/Fasos/Usaha yang diawasi	persen	17,86	15,00	13,64	33,33	100
5	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100
6	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	persen	28	30	11	5	1,77
7	Persentase sampah yang tertangani	persen	33,33	18,91	50,28	36,86	32,07
8	Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan	persen	25,81	14,48	48,00	21,74	51,85
9	Persentase fasilitasi pendampingan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA	persen	0	4,76	19,04	38,09	57,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja, 2025

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Capaian indikator kinerja untuk bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan untuk indikator kinerja rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk terus mengalami peningkatan. Tercatat mulai Tahun 2020 sampai tahun 2023 Penduduk ber KTP-EI Per satuan penduduk mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih banyak yang berstatus PRR (*Print Ready Record*), oleh karena keterbatasan ribbon dan blanko KTP-EI pada tahun 2024. Demikian pula pada cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk juga

mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun 2023 sudah 96 persen kartu tanda penduduk yang diterbitkan. Hal ini juga terjadi pada Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), pada tahun 2024 turun dari tahun sebelumnya. Mayoritas kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.69
Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk ber KTP-El per satuan penduduk	persen	78	87	93	98	95,78
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	83,8	86,6	92	96	95,78
3	Persentase bayi berakte kelahiran	persen	93	98	N/A	97,85	98,54
4	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	47	54	60	57	56,83
5	Persentase Anak 0-18 Tahun berakte kelahiran	persen	79	90	94	96	96,5
6	Persentase pasangan berakte perkawinan	persen	39	45	61,77	63,65	66,56
7	Persentase Kecamatan yang melakukan Pelayanan Online Administrasi Kependudukan	persen	100	100	42	N/A	N/A
8	Persentase lembaga yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan public	persen	100	100	100	100	13,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, 2025

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selama kurun waktu Tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sejak Tahun 2020 seluruh Desa/Lembang di Kabupaten Tana Toraja telah memiliki BUMDes. Sementara itu, Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dari tahun 2023 sampai taun 2024 sejumlah 90 desa yang memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan pemerintahan desa yang baik. Untuk rata-rata

jumlah kelompok binaan PKK juga mengalami peningkatan dari 75 persen pada Tahun 2020 menjadi 90 persen pada Tahun 2024. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.70

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Desa	83	83	83	90	90
2	Jumlah BUMDes yang telah terbentuk	BUMDES	112	112	112	112	112
3	Persentase Lembang yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	persen	100	100	100	100	100
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	persen	50	52	55	60	70
5	Persentase PKK aktif	persen	75	75	85	88	90
6	Jumlah Posyandu aktif	posyandu	448	448	448	448	448

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja, 2025

Indeks Desa Membangun (IDM) menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa, yaitu tipologi dengan modal sosial, modal ekonomi dan modal lingkungan. Hingga tahun 2024 belum ada desa yang berstatus Desa Mandiri di Kabupaten Tana Toraja namun sudah ada 12 desa yang masuk dalam kategori Desa Maju. Perkembangan Desa Mandiri di Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71

Status Desa di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	STATUS DESA/LEMBANG	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	0	0	0	0	0
2	Maju	1	2	3	7	12
3	Berkembang	48	63	75	76	75
4	Tertinggal	46	34	32	29	25
5	Sangat Tertinggal	17	13	2	0	0
	JUMLAH	112	112	112	112	112

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja, 2025

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk adalah menjadi keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar. Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran.

Upaya pengendalian penduduk dilakukan dengan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah Peserta KB Baru pada tahun 2020 mencapai 2.706 orang kemudian meningkat menjadi 4.303 orang pada tahun 2024. Sedangkan untuk Jumlah Peserta KB Aktif pada tahun 2020 adalah 26.435 orang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi hanya 19.201 orang. Angka pemakaian kontrasepsi Pria/CPR bagi Pria mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebanyak 750 pria menggunakan kontrasepsi namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 hanya 111 pria yang menggunakan kontrasepsi, pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 343 orang. Jumlah Klinik KB yang ada di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 tercatat ada 31 unit klinik KB. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 hanya 65,92 persen meningkat menjadi 98,56 persen pada Tahun 2024. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72

Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta KB Baru	Orang	2.706	4.610	2.314	3.934	4.303
2	Jumlah Peserta KB Aktif	Orang	26.435	25.712	13.096	18.303	19.201
3	Jumlah Kelompok Akseptor	Orang	87	87	87	1.350	1.356
4	Jumlah Klinik KB	Unit	26	26	29	41	31
5	Angka pemakaian kontrasepsi Pria/CPR bagi Pria	Orang	750	830	111	234	343
6	Persentase PUS peserta KB Aktif	persen	65.92	68.44	72.69	68,21	98,56
7	Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR dan UPPKAS) di Setiap Kecamatan	persen	100	100	100	61,04	81,05

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Cakupan kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB	persen	100	100	100	100	100

Sumber : DPPPA PP dan KB Kabupaten Tana Toraja, 2025

9. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan, namun sub urusan yang ditangani hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Jumlah arus penumpang angkutan umum selamata lima tahun terakhir menunjukkan tren peninigkatan. Arus penumpang umum pada tahun 2024 sejumlah 5.030.000 orang. Jumlah Angkutan Umum yang di Uji Kir juga mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2024 sebanyak 2.503.000 kendaraan yang diuji KIR. Jumlah orang yang melalui terminal pertahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat 2.800.000 orang yang melalui terminal. Peningkatan ini juga didukung oleh sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik yang selama lima tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat 85 persen sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.73

Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1,780,480	1.950.000	2,550,000	4,830,000	5.030.000
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	Unit	1	1	1	3	3
3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Unit	1,191	-	1,963	1.478	2.503.000
4	Jumlah Orang Melalui Terminal Pertahun	Orang	1,560,320	2.540.000	1,891,000	2,500,000	2.800.000
5	Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	persen	70	72	78	80	85

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja, 2025

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan Aplikasi Informatika. Adapun capaian indikator kinerja untuk bidang komunikasi dan informatika di Tana Toraja menunjukkan bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 sebesar 2,75 atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 1,70.

Cakupan Layanan Telekomunikasi di Tahun 2024 tercatat diangka diangka 94,34 persen atau mengalami kenaikan sebesar 3,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi rumah tangga dengan akses internet juga mengalami peningkatan, tercatat 54,93 persen rumah tangga dengan akses internet. Untuk persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yakni tetap diangka 63 persen. Untuk menampilkan informasi mengenai potensi daerah, sosialisasi kebijakan/program yang diambil Pemerintah Daerah, forum interaktif antara pemerintah dan masyarakat, hal tersebut dapat diakses melalui website pemda Kabupaten Tana Toraja. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.74
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	-	-	1,62	1,70	2,75
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	persen	68.26	71.67	85,00	90,5	94,34
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	4.98	6.37	49,74	49,79	54,93
4	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	persen	30.0	63.0	63.0	63	63
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah	persen	13.0	29.0	30,3	30,3	40

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	19	19	52,6	52,6	52,6
7	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	Skor	10	10	10	10	16

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, 2025

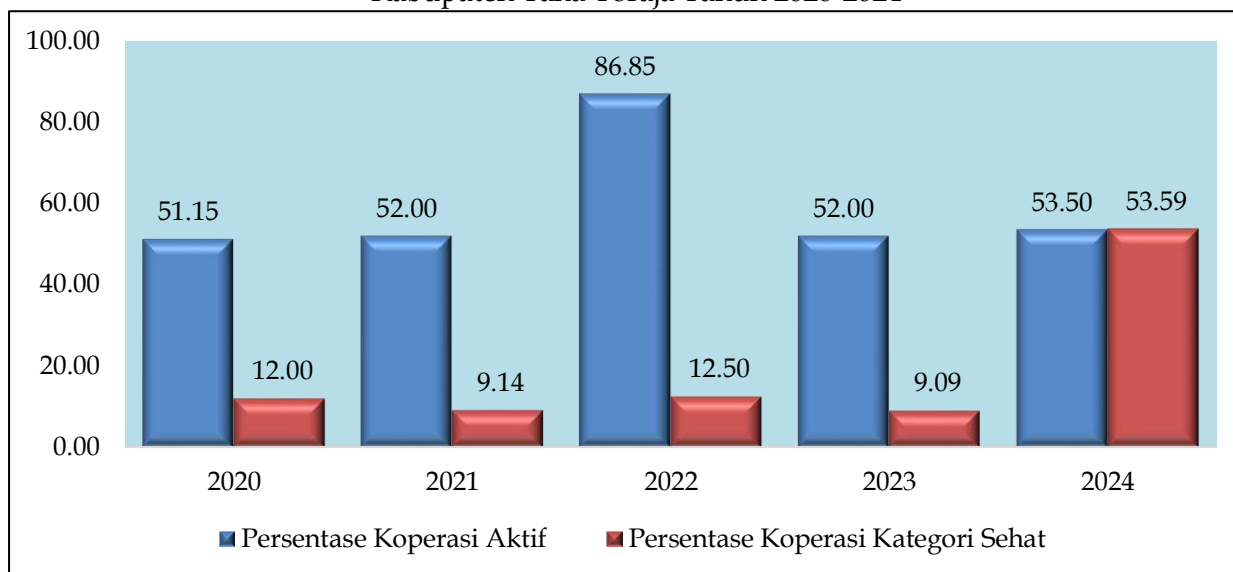
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampun pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perijinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi: 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Grafik 2.72

Persentase Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Kategori Sehat
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, 2025

Persentase koperasi aktif meningkat selama 2 (dua) tahun terakhir. Pada tahun 2024 koperasi yang aktif sejumlah 53,5 persen. Demikian pula dengan usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan pada tahun 2024, sejumlah 28,06 persen usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tana Toraja, meskipun pertumbuhannya hanya 4 persen di tahun 2024 tergolong menurun disbanding tahun 2023 sejumlah 7,46 persen. Hal ini didukung oleh adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, adanya kemudahan akses dalam permodalan, serta adanya peningkatan SDM koperasi. Kinerja urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75

Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	persen	51,15	52,00	86,85	52	53,5
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	persen	3,18	52,00	8,6	7,46	28,6
3	Persentase koperasi yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen	persen	10,3	8,22	11,4	9,14	9,09

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Persentase tingkat pertumbuhan UKM	persen	121,29	11,17	6,16	7,46	4
5	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam yang difasilitasi Izin usaha	persen	0.6	0.9	0,57	0	0
6	Persentase Koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan	persen	13.79	12.06	13,14	14,28	11,36
7	Prosentase koperasi yang memiliki kategori SEHAT	persen	10.34	10.92	12,57	9,14	9,09
8	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Koperasi	persen	8.62	7.47	34,28	12,57	17,04
9	Persentase Koperasi yang terfasilitasi untuk diberdayakan	persen	10.34	10.91	34,28	10,85	17,04
10	Persentase usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan	persen	0.97	1.16	0,35	0,55	0,09
11	Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha	persen	0.95	1.21	0,28	0,31	0,06

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, 2025

12. Urusan Penanaman Modal dan Investasi

Potensi di Kabupaten Tana Toraja Antara lain kopi, hortikutura dan tentu saja pariwisata baik itu daya tarik wisata budaya maupun wisata alam. Potensi tersebut telah dikelola sebanyak 95 persen sampai dengan tahun 2024 dengan realisasi PMDN/PMA baru mencapai 15 persen. Rendahnya realisasi PMDN dikarenakan infrastruktur yang belum merata, masih terbatasnya promosi investasi serta adanya ketidakpastian ekonomi global. Selanjutnya capaian urusan penanaman modal dan invesatasi dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.76
Kinerja Urusan Penanaman Modal dan Investasi
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Potensi investasi yang dikelola	persen	57,14	35,50	45	95	95
2	Persentase Realisasi Investasi PMDN/PMA	persen	52	5	5	12	15
3	Persentase Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (Tepat Waktu)	persen	94,44	99,44	99.00	100	100
4	Persentase perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal	persen	100	100	91	95	75

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase jumlah data informasi pendukung penanaman modal yang tersedia	persen	79	85	91	95	95

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tana Toraja, 2025

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan pemuda dan olah raga dapat dilihat dari persentase organisasi pemuda yang aktif dimana capaiannya pada Tahun 2024 sebesar 100 persen, Persentase wirausaha muda capaiannya pada Tahun 2024 hanya sebesar 2 persen, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi sebesar 35 persen pada Tahun 2024, sedangkan untuk Cakupan pembinaan atlet muda pada tahun 2024 capaiannya sebesar 95 persen. Jumlah atlet berprestasi pada Tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Pada tahun 2023 hanya 33 orang atlet yang berprestasi, namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 41 orang. Untuk indikator peningkatan SDM kepramukaan mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 hanya 92,3 persen, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2024. Adapun capaian untuk indikator Pembangunan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.77

Capaian Pembangunan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	35	19	75	75	100
2	Persentase wirausaha muda	persen	25	5	10	2	2
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	persen	45	30	30	35	35
4	Cakupan pembinaan atlet muda	persen	78	107	85	100	95
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	88	88	18	33	41
6	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	persen	0	0	65	71	47
7	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	persen	40	10	72	80	75
8	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	persen	0	0	65	80	47
9	Presentase Peningkatan SDM Kepramukaan	persen	0	25	85	92,3	100

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, 2025

14. Urusan Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1) statistik dasar; (2) statistik sektoral dan; (3) statistik khusus.

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pemerintah Kabupaten Tana telah memiliki sistem data dan statistik terintegrasi. Adapun capaian untuk indikator kinerja urusan Statistik sebagai berikut :

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKTOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi terhadap pembangunan daerah	persen	NA	NA	30,3	30,3	40

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, 2025

15. Urusan Persandian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi. Saat ini Kabupaten Tana Toraja memiliki 1 (satu) orang personil yang kompeten dalam bidang persandian. Idealnya pada setiap PD mempunyai 1 (satu) orang

yang kompeten dalam persandian, sehingga pengelolaan persandian di Kabupaten Tana Toraja bisa tertangani secara optimal.

Untuk Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi) pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dinilai dengan cara mengisi format instrumen dari Badan Siber dan Sandi Negara, dari pengisian tersebut didapatkan nilai 16 (enam belas) yang menandakan tingkat kematangan keamanan informasi di Kabupaten Tana Toraja masih sangat rendah artinya Kematangan Keamanan Informasi di Kabupaten Tana Toraja belum ada penerapan keamanan informasi yang memadai

Di Kabupaten Tana Toraja saat ini untuk Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dilaksanakan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79

Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	skor	10	10	10	10	16
2	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Tana Toraja, 2025

16. Urusan Kebudayaan

Cagar budaya merupakan warisan budaya suatu bangsa, dengan menjaga dan melestarikannya kita bisa menjaga sejarah bangsa. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah usaha dinamis yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan nilai serta keberadaan cagar budaya melalui cara pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan terhadap cagar budaya tersebut. Kesenian dan kebudayaan dalam masyarakat juga harus kita jaga dan lestarikan. Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tana Toraja ditunjukkan dengan indikator Persentase budaya lokal yang dilestarikan, Jumlah penyelenggaraan festival

seni dan budaya dan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan 1 kali setiap tahun kecuali pada tahun 2020 tidak ada pelaksanaan Festival Seni dan Budaya diakibatkan adanya Pandemi Covid-19, Kemudian pada tahun 2022 juga tidak dilaksanakan. Pada tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan festival seni dan budaya dilaksanakan. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi pada Tahun 2024 sebanyak 120 karya budaya. Untuk Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2024 sebanyak 21 cagar budaya. Kemudian sebanyak 100 persen objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan pada tahun 2024. Capaian kinerja urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.80

Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg.	0	1	0	2	3
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	21,48	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	karya budaya	0	2	34	114	120
4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	4	4	4	15	21
5	Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	persen	0	11	27,5	100	100
6	Presentase kesenian tradisional yang dikembangkan	persen	26.16	30.84	34,57	44,85	50
7	Presentase sejarah lokal yang disusun/ dibukukan	persen	0	13.33	26,66	26,66	27
8	Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	11.57	13.22	43.76	21,48	22

Sumber Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, 2025

17. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan untuk indikator jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020 hanya 732 orang yang berkunjung ke perpustakaan, jumlah ini terus meningkat

sampai pada tahun 2024 sebanyak 17.213 orang yang berkunjung ke perpustakaan. Peningkatan ini melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 peningkatan pengunjung perpustakaan sejumlah 112,6 persen meningkat 36,05 point dibandingkan tahun 2023 sebesar 76,55 persen. Hal ini didukung oleh peningkatan jumlah koleksi buku yang terus mengalami peningkatan. Sampai pada tahun 2024 perpustakaan daerah Kabupaten Tana Toraja telah mengoleksi 9.544 judul buku dengan jumlah 37.584 exemplar. Kondisi ini juga ditunjang oleh suasana perpustakaan yang nyaman oleh karena sarana dan prasarana perpustakaan yang semakin lengkap serta pemanfaatan teknologi dan layanan digital. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.81
Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	persen	1,69	2,65	1,65	76,55	112,6
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp	12.630	12.930	28.780	30.072	37.584
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	persen	24	27	26	28	37
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	orang	732	9.085	8.282	10.115	17.213
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	2.499	2.649	6.878	6.995	9.544

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, 2025

18. Urusan Kearsipan

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan. Capaian kinerja perpustakaan untuk indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada Tahun 2020 sebesar 89 persen meningkat menjadi 90,00 persen pada Tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.82

Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	89	89	90	89,06	90
2	Prosentase dokumen arsip daerah yang diamankan dan dilestarikan	persen	100	100	100	85	93,75

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja, 2025

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

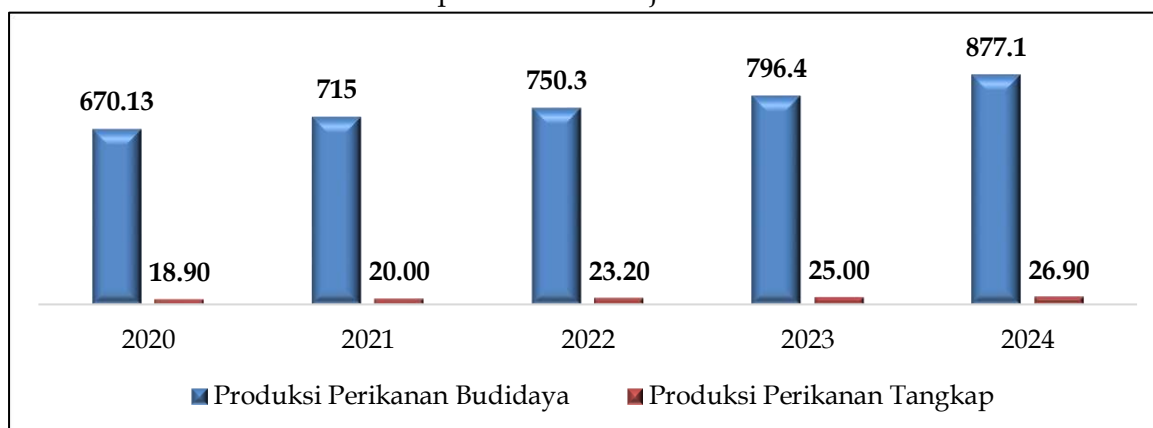
1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup : sub urusan perikanan tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); sub urusan perikanan budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi perikanan darat seluas 3.675 Ha dan potensi perikanan tangkap pada aliran sungai seluas 40 Ha. Produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan dari sebesar 670,13 ton pada tahun 2020 menjadi 877,1 ton pada tahun 2024. Sementara itu produksi perikanan tangkap hanya 26,9 ton pada tahun 2024.

Grafik 2.73

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap (Ton)
Kabupaten Tana Toraja 2020-2024



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja, 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem budidaya, pemerintah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan pembinaan terhadap pembudidaya ikan dengan cakupan pada Tahun 2024 sebanyak 530 orang. Untuk jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR) sampai pada tahun 2024 jumlah tetap sebanyak 30 unit. Produksi perikanan meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 produksi perikanan hanya 689,21 ton kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 904 ton. Dengan meningkatnya jumlah produksi perikanan juga berpengaruh terhadap produksi produk hasil olahan perikanan, dimana pada Tahun 2020 hanya dapat menghasilkan 4.030 kg kini menjadi 4.430 kg pada Tahun 2024. Produksi benih ikan juga mengalami peningkatan selama lima tahun. Pada Tahun 2020 sejumlah 1.172.140 ekor meningkat terus setiap tahunnya dan pada tahun 2024 produksi benih sebanyak 1.298.960 ekor. Peningkatan produksi benih ini didorong oleh perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung pembenihan ikan. Secara rinci kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan	Ton	689,21	712,55	773,5	796,4	904
2	Konsumsi ikan	Kg /Kapita/ tahun	15	15,4	15,8	16,1	41,50
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Orang	519	524	519	519	530
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	18,9	20,60	23,20	25,00	26,9
6	Jumlah Unit Perbenihan Rakyat (UPR)	Unit	30	30	30	30	30
7	Produksi Benih	Ekor	1.172.140	1.205.100	1.231.800	1.267.540	1.298.960
8	Produksi produk hasil olahan perikanan	Kg	4.030	4.280	4.410	4.410	4.430
9	Jumlah produk perikanan yang dipasarkan	Ton	3.480	4.280	4.410	4.410	4.430

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja, 2025

2. Urusan Pariwisata

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja, tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata unggulan dan jumlah objek wisata yang dibangun/dikembangkan oleh karena itu, pembangunan/pengembangan objek wisata terus dilakukan setiap tahun dengan jumlah yang bervariasi. Jumlah kunjungan Wisatawan pada tahun 2024 meningkat menjadi 503.861 orang yang terdiri dari 6.400 wisatawan mancanegara dan 497.461 wisatawan nusantara. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023 dimana hanya 491.505 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tana Toraja. Peningkatan jumlah wisatawan ini telah menggeliat setelah terjadinya penurunan kunjungan wisatawan akibat pembatasan social akibat Pandemi Covid-19. Meskipun begitu lama kunjungan wisata masih selama 3 hari. Jumlah kunjungan objek wisata unggulan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 sebanyak 12 objek wisata. Pada tahun 2024 terdapat 1 objek wisata yang dibangun/dikembangkan.

Tabel 2.84

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Wisatawan Mancanegara	orang	830	100	1.335	4.024	6.400
2	Wisatawan Nusantara	orang	93.787	78.193	480.631	487.481	497.461
	Jumlah		94.617	78.293	481.966	491.505	503.861

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, 2025

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja juga dipengaruhi oleh objek wisata yang dipromosikan. Pada Tahun 2020 hanya 66 persen obyek wisata yang dipromosikan kemudian pada tahun 2024 seluruh obyek wisata yang dipromosikan. Hal ini tentunya juga berdampak positif terhadap peningkatan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Tana Toraja. Pada tahun 2024 PAD sektor pariwisata sebesar Rp. 5.832.065.131, meningkat 26,37 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 4.293.833.613. Secara rinci kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.85

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisata	Orang	94.617	78.293	481.966	491.505	503.861
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	3	3	3	3	3
3	Jumlah Obyek wisata unggulan	OW	15	12	13	13	12
4	Jumlah Obyek destinasi yang dibangun/ dikembangkan	OW	11	3	4	4	1
5	Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/ memenuhi standar kompetensi	Persen	63	67	55	45	95
6	Prosentase obyek wisata yang dipromosikan	Persen	66	80	85	100	100

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja, 2025

3. Urusan Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 mencapai 22,33 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian Tana Toraja.

Tabel 2.86

Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (persen)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	23,45	23,42	22,30	22,14	22,33

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, Toraja dalam Angka, 2025

Produksi tanaman pangan terlihat dari produksi padi, yang mengalami penurunan dari 159.684 ton pada Tahun 2023 menjadi 153.439 ton pada Tahun 2024.



Penurunan produksi padi pada tahun 2023 ini terjadi karena rendahnya curah hujan akibat el nino. Menurunnya produksi padi tidak sejalan dengan produksi jagung yang meningkat dari 1.996 ton pada tahun 2023 menjadi 509.609 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan teknologi pertanian di Kabupaten Tana Toraja. Produksi tanaman hortikultura terlihat dari Produksi Bawang merah dan cabe. Produksi bawang merah tidak terpengaruh dengan adanya perubahan iklim, mengalami peningkatan jumlah produksi. Dimana tanaman bawang merah dapat tumbuh baik pada curah hujan 300 – 2.500 mm/thn. Produksi bawang merah di tahun 2024 sebanyak 22,69 ton meningkat dari tahun 2023 yang hanya 14,5 ton. Sementara itu produksi tanaman cabe mengalami penurunan di tahun 2024 sebanyak 15,4 ton. Tahun 2023 produksi cabe sebanyak 205,93 ton menjadi 190,53 ton di tahun 2024, kondisi curah hujan pada tahun 2024 berpengaruh terhadap produksi produksi tanaman cabe.

Produksi perkebunan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2023. Produksi kopi mengalami peningkatan dari angka 3.701 ton pada Tahun 2023 meningkat menjadi 3.701,21 ton pada Tahun 2024. Kondisi curah hujan yang rendah menyebabkan banyaknya pohon kopi yang berbunga hingga menghasilkan buah. Hal inilah yang mendorong peningkatan produksi kopi pada tahun 2024. Sementara itu produksi cengkeh juga mengalami peningkatan dari 203 ton pada tahun 2023 meningkat menjadi 203,01 ton pada tahun 2024. Sementara itu produksi tanaman perkebunan lain yaitu tanaman kakao tidak mengalami peningkatan produksi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 produksi kakao 1.420 ton, pada tahun 2024 produksinya tetap 1.420 ton.

Pada bidang peternakan, populasi kerbau, babi, sapi potong maupun kambing mengalami penurunan. Populasi sapi pada tahun 2024 sebanyak 19.275 ekor turun dari tahun 2023 sebanyak 22.738 ekor. Demikian pula dengan populasi babi tahun 2023 sebanyak 339.849 ekor turun menjadi 313.863 ekor pada tahun 2024.

Produksi daging sapi, produksi daging kambing, produksi daging ayam ras pedaging maupun produksi telur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 sebanyak 48.170 kg, namun pada tahun 2024 turun menjadi 38.039 kg. Produksi Daging ayam ras pedaging pada tahun 2023 sebanyak 133.865 kg turun menjadi hanya 133.242 kg pada tahun 2024. Demikian pula dengan Produksi telur, pada tahun 2023 sebanyak 1.109.628 turun

menjadi 1.054.106 kg pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat 8 unit Dam parit yang dibangun/ direhabilitasi/ dipelihara. Untuk kasus penyakit hewan menular turun menjadi 15 persen pada tahun 2024, setelah pada tahun 2023 kasus penyakit hewan menular yang terjadi sebanyak 30 persen. Sementara itu serangan organisme pengganggu tanaman meningkat menjadi 45 persen dibanding pada tahun 2023, hanya 30 persen. Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi padi	Ton	181.663,00	174.740,00	172.189	159.684	153.439
2	Produksi Jagung	Ton	12.766	620	3.860	1.996	509.609
3	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	Ton/Ha	6,70	6,70	6,70	6,73	6,73
4	Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	Ton/Ha	6.61	8.96	7,55	7,56	6,71
5	Produksi Bawang merah	Ton	37,5	39,75	14.0	14,5	22,69
6	Produksi Cabe	Ton	138	264,4	279,10	205,93	190,53
7	Produksi Kopi	Ton	3.948	4.482	3,568	3.701	3.701,21
8	Produksi Cengkeh	Ton	184	194	194	203	203,01
9	Produksi Kakao	Ton	1.288	1.334	1,334	1.420	1.420
10	Populasi Kerbau	Ekor	25.713	25.391	24,325	22.738	19.275
11	Populasi Babi	Ekor	339.824	342.457	346,710	339.849	313.863
12	Populasi Sapi potong	Ekor	7.361	7.250	7,260	7.065	6.763
13	Populasi Kambing	Ekor	12.164	12.273	12,430	12.608	12.183
14	Populasi Ayam ras pedaging	Ekor	10.246	10.446	10,846	11.146	9.987
15	Populasi Ayam ras petelur	Ekor	0	4.500	-	200	1.130
16	Produksi Daging sapi	Kg	42.769	58.096	79,702	48.170	38.039
17	Produksi Daging kambing	Kg	1.594	1.252	1,290	835	835
18	Produksi Daging ayam ras pedaging	Kg	37.729	135.708	208,785	133.865	133.242
19	Produksi telur	Kg	637.899	681.281	1.118.954	1.109.628	1.054.106
20	Angka morbiditas hewan						
	- Sapi	Ekor	2.208	1.302	2,015	2.720	1.073
	- Kerbau	Ekor	7.714	8.126	13,127	23.315	1.781
	- Kambing	Ekor	3.649	2.067	516	315	254
	- Babi	Ekor	101.947	132.362	123,271	235.000	161.262
21	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (Unit)	persen	6,67	50	0	0	0
22	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Unit)	Unit	25	23	16	14	19
23	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit (Unit)	Unit	20	3	0	0	8

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
24	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	persen	11,57	19,93	21,17	22,87	15
25	Persentase penurunan serangan OPT	persen	10-20	40	40-50	30	45

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja, 2025

4. Urusan Perdagangan

Pada urusan perdagangan, pemerintah daerah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standardisasi perlindungan konsumen. Kewenangan dalam perijinan dan pendaftaran perusahaan untuk saat ini belum tersedia data di Kabupaten Tana Toraja, lingkupnya ada di penanaman modal.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah penyumbang terbesar kedua dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Tana Toraja. Pada tahun 2024 sebanyak 20,40 persen kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, meningkat 0,62 persen dari tahun sebelumnya yaitu 19,78 persen.

Tabel 2.88

Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (persen)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	17,61	18,26	19,25	19,78	20,40

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, Toraja dalam Angka, 2025

Pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yaitu pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Pelaksanaan kewenangan dalam standardisasi perlindungan konsumen dilaksanakan dengan

melaksanakan kinerja capaian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 persentase UTTP 11,10 persen mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 11,40 persen. Kemudian pada tahun 2024 UTTP yang ditera mengalami peningkatan menjadi 86,0 persen. Kinerja cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 hanya 34,00 persen meningkat pada tahun 2024 menjadi 99,5 persen. Pada Urusan Perdagangan, capaian indikator kinerja dari Tahun 2020 - 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.89

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase UTTP yang ditera	persen	11,10	12,40	33,66	45,09	86,00
2	Perkembangan nilai ekspor	persen	- 8,90	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang	persen	7,04	N/A	34,00	54,91	99,50
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	persen	82,19	N/A	85,47	96,15	N/A

Sumber : Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, 2025

5. Urusan Perindustrian

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Tana Toraja selama lima tahun terakhir menunjukkan angka fluktuasi. Pada tahun 2024 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Tana Toraja hanya 7,86 persen.

Tabel 2.90

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	7,69	7,85	8,10	7,81	7,86

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, Toraja dalam Angka, 2025

Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami penurunan dari angka 8,10 persen pada tahun 2023 turun menjadi 8,0 persen pada tahun 2024. Kondisi industri kecil

dan menengah yang berkembang di Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan pesat dibandingkan pada tahun 2023. Pada tahun 2023 sebanyak -5,57 persen industri kecil dan menengah yang berkembang dan meningkat menjadi 29,20 persen pada tahun 2024. Hal ini didukung oleh potensi pariwisata yang tinggi, ketersediaan bahan baku lokal, serta adanya pendidikan dan pelatihan dari pemerintah. Capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.91
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	15,27	60,45	10,39	8,10	8,00
2	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	persen	-65,75	-0,89	51,37	-5,57	29,20
3	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	persen	3,33	12,81	30,11	42,61	N/A
4	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	persen	83,53	23,60	46,88	60,76	N/A
5	Persentase produk unggulan yang dipasarkan	persen	44,44	44,44	44,44	66,66	N/A

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja, 2025

6. Urusan Transmigrasi

Lokasi satuan penempatan transmigrasi di Kabupaten Tana Toraja tahun 2024 yaitu di UPT Su'pi Lembang Pakala dan Lembang Simbuang Kecamatan Mengkendek. Sebanyak 58,33 persen transmigran yang ditempatkan di lokasi tersebut. Capaian kinerja urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.92
Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase penempatan transmigrasi	persen	100	87,50	58,33	58,33	58,33
2	Persentase lokasi transmigrasi yang diklarifikasi terhadap tata batas kawasan hutan	persen	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Toraja, 2025

D. Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Indikator kinerja tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, diantaranya yaitu dari peringkat dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun peringkat dan status kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.93
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Nilai	C	CC	CC	CC	CC
2	Cakupan Presentase Jumlah Urusan Pemerintahan Yang difasilitasi, dimonitoring, dan dievaluasi	persen	100	100	89,52	90	81,36
3	Persentase kebijakan Pemerintahan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan sesuai rencana	persen	100	100	82,36	85	77,54
4	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan sesuai rencana	persen	100	82,36	94,44	95	92,87

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja, 2025

2. Sekretariat DPRD

Urusan pendukung pemerintahan salah satunya adalah Sekretariat DPRD. Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dari tersedianya rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten Tana Toraja. Untuk capaian kinerja tersebut, dari awal RPJMD sampai akhir RPJMD semuanya tersedia rencana kinerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Demikian pula dengan kinerja indikator tersusunnya dan terintegrasinya program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran

dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 semua dokumen tersusun. Indikator terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD, capaiannya dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 semua terintegrasi. Secara rinci kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.94
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja, 2025

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Capaian kinerja indikator Perencanaan Pembangunan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yaitu 100 persen. Secara rinci kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.95
Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	persen	100	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan perangkat daerah	persen	80	80	100	100	100
6	Prosentase konsistensi capaian program yang memenuhi target sesuai dokumen perencanaan	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelibangda Kabupaten Tana Toraja, 2025

2. Keuangan

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Penetapan APBD Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2020 sampai tahun 2024 telah tepat waktu. Untuk indikator Opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah pemerintah Kabupaten Tana Toraja tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan capaian yang sesuai target yang diharapkan yaitu WTP setelah sebelumnya dari tahun 2020-2022 mendapat Opini WDP.

Tabel 2.96
Opini BPK Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, 2025

Peningkatan PAD Kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah dampak terjadinya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tana Toraja menurun, hal ini berdampak terhadap jumlah PAD yang defisit pada angka 15,34 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 setelah pembatasan mobilitas menjadi lebih longgar, PAD Kabupaten Tana Toraja mulai menggeliat pada angka 0,63 persen. Pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan menjadi 9,43 persen dari tahun 2023 yang berada pada angka 0,55 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak khususnya Pajak Kendaraan bermotor yang sebelumnya dicatatkan pada pendapatan transfer.

Tabel 2.97

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan PAD	Persen	-15,34	0,63	4,70	0,55	9,43

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, 2025

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap APBD Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tana Toraja yaitu 4,87 persen kemudian pada tahun 2024 menjadi 66,93 persen. Peningkatan SILPA ini terjadi dikarenakan adanya sisa lebih Penggunaan Anggaran oleh Perangkat Daerah, baik itu yang ada di Kas daerah maupun yang ada pada Bendahara Pengeluaran oleh karena sampai dengan waktu yang ditentukan anggaran pada Perangkat Daerah tidak dapat diserap.

Persentase belanja pendidikan (20 persen) dari APBD dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 sudah di atas angka 20 persen atau telah melampaui mandatory spending sebesar 20 persen. Peningkatan belanja ini dialokasikan pada peningkatan alokasi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja hibah. Untuk belanja kesehatan, mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami

peningkatan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten Tana Toraja dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan.

Untuk persentase Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan desa terhadap APBD mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 sebanyak 88,28 persen APBD yang dialokasikan untuk belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa. Adanya perubahan besaran alokasi anggaran ini dipicu oleh besaran belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan Tepat Waktu. Demikian pula dengan Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah melakukannya secara Tepat Waktu. Secara rinci kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.98
Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	4,87	9,01	9,74	12,87	66,93
2	Persentase belanja pendidikan terhadap APBD (20%)	persen	15,27	18,14	16,91	29,91	84,11
3	Persentase belanja kesehatan terhadap APBD (10%)	persen	16,97	21,23	24,73	35,52	73,48
4	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa terhadap APBD	persen	16,94	6,04	4,20	12,86	88,28
5	Penandatanganan Persetujuan Bersama Ranperda APBD Pokok dan APBD Perubahan Tepat Waktu	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	ya
6	Penyampaian Laporan Keuangan Ke BPK RI Tepat Waktu	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	ya
7	Prosentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Yang Bersertifikat	persen	40	43	43	57	

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, 2025

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepegawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pemberhentian ASN dan pensiun. Kinerja urusan penunjang kepegawaian adalah persentase pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang difasilitasi BKPSDM Kabupaten Tana Toraja pada tahun berjalan, persentase pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2023 sebanyak 41,83 persen sementara itu pada tahun 2024 hanya 0,07 persen. Capaian Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami penurunan. Pada tahun 2024 tercatat hanya 0,07 persen Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural. Sementara itu semua perangkat daerah telah memiliki Jabatan pimpinan tinggi.

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah pada Tahun 2024 sebanyak 135 orang, Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah pada tahun 2024 sebanyak 4.068 orang, meningkat dari tahun 2023 dengan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah sebanyak 3.680 orang. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.99
Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	6,25	0	8	41,83	0,07
2.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	34	36	33	27	28
3.	Persentase ASN yang menduduki jabatan structural	persen	77,21	80,02	87	72	8,74

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	34	36	33	28	28
5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	798	174	160	145	135
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	318	2893	2824	3.680	4.068

Sumber : BKPSDM Kabupaten Tana Toraja, 2025

4. Penelitian dan Pengembangan

Untuk capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat dari persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian kinerja indikator ini dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yaitu 100 persen. Kinerja Urusan Pengelolaan Perencanaan dan Kelitbangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 hingga tahun 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.100

Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan kemanfaatan penelitian dan pengembangan	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelibangda Kabupaten Tana Toraja, 2025

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Fungsi pengawasan internal pemerintahan memiliki peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Melalui pengawasan ini diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang hemat. Kinerja fungsi penunjang pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten diukur melalui beberapa indikator. Indikator tersebut antara lain Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai dan Jumlah temuan BPK.

Capaian tindak lanjut temuan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020, tindak lanjut temuan yaitu 30 persen kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 74 persen, namun pada tahun 2023 turun menjadi 69,96 persen. Tahun 2024 tindak lanjut temuan 70,18 persen.

Sedangkan penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2024 sebanyak 70,18 persen. Jumlah temuan BPK dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 hanya terdapat 42 temuan namun pada tahun 2024 tercatat 899 jumlah temuan BPK. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.101
Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan	persen	33	74	73	69,96	70,18
2	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI	persen	63	74	70,00	69,96	70,18
3	Jumlah temuan BPK	Temuan	42	44	40	837	899

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, 2025

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum meliputi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Untuk unsur pemerintahan umum di Daerah, dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 jumlah masyarakat yang memiliki wawasan

kebangsaan sebesar 66,67 persen setelah tahun 2024 meningkat menjadi 75 persen. Demikian pula dengan capaian jumlah organisasi masyarakat yang memiliki wawasan pada tahun 2024 telah mencapai 90 persen.

Untuk capaian tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pilkada hanya diperoleh pada Tahun 2020 dan Tahun 2024. Pada tahun 2020 sebanyak 80,65 persen partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada dan pada tahun 2024 turun menjadi hanya 75 persen. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak ada pelaksanaan pemilu/pilkada. Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Pemerintahan Umum disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.102
Kinerja Urusan Pemerintahan Umum
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	Persen	66,67	80	80	85	75
2	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan	Persen	66,67	80	80	85	90
3	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	Persen	80,65	-	-	-	75
4	Cakupan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	75	75	75	5,77	96,31
5	Capaian kegiatan peningkatan peran partai politik dan pendidikan politik	Persen	100	100	100	100	100
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	Persen	20	30	30	49,04	61,28
7	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang tepat sasaran	persen	100	100	100	100	78,24
8	Cakupan Kegiatan Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	persen	100	100	100	28,93	93,72

Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Tana Toraja, 2025

2.1.5. ASPEK PEMBANGUNAN LAINNYA

2.1.5.1. CAPAIAN TARGET INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Tana Toraja diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing 6 (enam) bidang urusan dan jenis pelayanan pada RKPD Kabupaten Tana Toraja. Indikator SPM untuk tahun 2020-2024 terdiri atas 29 indikator. Adapun capaian indikator SPM Kabupaten Tana Tora selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Capaian SPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDIDIKAN					
Pendidikan Dasar					
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	N/A	91.61%	100%	99,53%	82,95%
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	N/A	6.10%	100%	48,27%	100%
Pendidikan Anak Usia Dini					
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	N/A	21.85%	50,27%	50,27%	63,66%
KESEHATAN					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	93.56%	100%	96,34%	83%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	89.4%	100%	91,46%	99,24%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	94.38%	100%	96,87%	100%
Pelayanan Kesehatan Balita					
Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	50.21%	100%	59,04%	85%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Capaian SPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	97%	100%	98,96%	90%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	11%	100%	30,4%	68,9%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	87%	100%	53,1%	70%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	9%	100%	4,1%	33,4%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	100%	100%	23,61%	93,5%
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
Persentase Jumlah Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	N/A	91%	100%	53%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	100%	100%	100%	26,9%
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)					
Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	N/A	100%	100%	100%	57,8%
PEKERJAAN UMUM					
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	N/A	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik					
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	N/A	100%	100%	100%	100%
PERUMAHAN RAKYAT					
Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni					
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	100%	100%	100 %	100%



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Capaian SPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A	100%	100%	100 %	100%
TRANTIBUMLINMAS					
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum					
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	N/A	100%	100%	100 %	100%
Pelayanan informasi rawan bencana					
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	N/A	100%	100%	100 %	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	N/A	100%	100%	100 %	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	N/A	100%	100%	100 %	100%
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	N/A	55.56%	100%	100 %	100%
SOSIAL					
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti					
Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%	67%	67%	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti					
Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti					
Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	N/A	100%	82%	82%	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	N/A	100%	100%	100%	100%



Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Capaian SPM				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota					
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	N/A	100%	100%	100%	100%

Sumber : OPD dan Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja, 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh khususnya dalam konteks kesehatan ibu, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks dan saling terkait antara lain :

1. Faktor Sosial dan Ekonomi : Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak, status sosial ekonomi keluarga, termasuk pendapatan dan akses ke layanan kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam membuat keputusan terkait Kesehatan.
2. Faktor Kesehatan dan Pelayanan : Kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk perawatan antenatal, persalinan, dan pasca-persalinan, akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, ketersediaan peralatan dan persediaan kesehatan yang memadai, pelatihan bagi penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
3. Faktor Determinan Dekat : komplikasi obstetrik seperti pendarahan, preeklamsia, dan infeksi, status kesehatan ibu, termasuk status reproduksi dan riwayat Kesehatan.
4. Faktor Determinan Jauh : faktor demografi dan sosiokultural, termasuk latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi keluarga dan kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak
5. Faktor Lainnya : akses ke informasi dan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak, keterlibatan masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, penanganan kasus komplikasi kehamilan dan persalinan yang efektif dan efisien.



2.1.5.2. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;

15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkatan kabupaten. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2024 dari 17 tujuan terdapat 74 indikator Capaian target Kabupaten Tana Toraja tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.104
Capaian Target Indikator TPB/SDG's
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	TUJUAN/INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN						
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	N/A	12.7%	12.7%	-	-	Dinas Sosial
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	N/A	100%	84,10%	90%	90%	Dinas Kesehatan
1.3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	N/A	13.292 Rumah Tangga	11.472 Rumah Tangga	9.167 Rumah Tangga	9.167 Rumah Tangga	Dinas Sosial
1.4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	N/A	28.60%	28.60%	100%	100%	Dinas PUTR
1.5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	N/A	15.18%	15.18%	84,20%	84,20%	Dinas PRKP
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	N/A	97.21	99.53	99,05	99,05	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	N/A	77.26	82.69	83,03	83,03	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.8	Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	N/A	73.00%	83%	95%	95%	Dinas Dukcapil



NO	TUJUAN/INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN						
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	N/A	7.41%	7.75%	7,65%	7,65%	Dinas Kesehatan
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	N/A	16.26%	16.43	15,42% (eppgbm)	15,42% (e-ppgbm)	Dinas Kesehatan
2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil	N/A	35.80%	3.91%	3,9%	3,9%	Dinas Kesehatan
2.4	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	N/A	60.03%	73.49	75,7%	75,7%	Dinas Kesehatan
2.5	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	N/A	79.19	15.8	84,14	84,14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	N/A	3	2	131/100.0 00KH	131/100.0 00KH	Dinas Kesehatan
3.2	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	N/A	0	3	0,00098	0,00098	Dinas Kesehatan
3.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	N/A	18	16	0,013	0,013	Dinas Kesehatan
3.4	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	N/A	61	270	86,13	86,13	Dinas Kesehatan
3.5	Kejadian Malaria per 1000 orang	N/A	0.0014	3,37	0,5	0,5	Dinas Kesehatan
3.6	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	N/A	100%	95%	89,54%	89,54%	Dinas Kesehatan
3.7	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	N/A	100%	100%	84,44%	84,44%	Dinas Kesehatan
4	TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	N/A	98%	96.18%	96%	96%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.2	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	N/A	70.12%	69.54%	84,5%	84,5%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.3	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	N/A	54.32%	52.43%	69,84%	69,84%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan



NO	TUJUAN/INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	N/A	116.60%	108.51%	109,24%	109,24%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	N/A	110.26%	87.03%	108,45%	108,45%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.6	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	N/A	7.96 thn	9 thn	8,25 thn	8,25 thn	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.7	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	N/A	96.96%	99.4%	93,45%	93,45%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.8	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	N/A	100%	98.5%	95,29%	95,29%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.9	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	N/A	100%	83.8%	95,8%	95,8%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	N/A	75.50%	65.20%	77,84%	77,84%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4.11	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	N/A	70.26%	34.68%	67,05%	67,05%	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
5	TUJUAN 5 : MENCAPAI MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN						
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	N/A	90	0	0	0	Dinas PPPA, PPKB
5.2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	N/A	28	28 kasus	0,047 (22/46.401x100)	0,047 (22/46.401x100)	Dinas PPPA, PPKB
5.3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	N/A	100%	76%	100%	100%	Dinas PPPA, PPKB
5.4	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	N/A	N/A	N/A	76,35%	76,35%	Dinas Kominfo dan Persandian
6	TUJUAN 6 : KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN						
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	N/A	84.12%	84.12%	100%	100%	Dinas PUTR
6.2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	N/A	N/A	84%	85,9%	85,9%	Dinas Kesehatan
6.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	N/A	83.75%	85,42%	86,03%	N/A	Dinas PUTR



NO	TUJUAN/INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	
6.4	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	N/A	159	159	159	159	Dinas Kesehatan
7	TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA						
7.1	Bauran energi terbarukan	-	-	-	-	-	-
8	TUJUAN 8 : PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	N/A	5.19%	5.12 %	3,66%	5,20%	Bappelitbangda
8.2	PDB per kapita	N/A	28.36 juta	30.09 juta	32,38 juta	34,74 juta	Bappelitbangda
8.3	Persentase tenaga kerja formal	N/A	73.74%	47,38%	45,24%	45,24%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.4	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	N/A	11.17%	11.17%	8,71%	8,71%	Dinas Koperasi UKM
8.5	Upah rata-rata per jam pekerja	N/A	18.295	22.613	24.177	24.177	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	N/A	4.71%	2,31%	3,36%	3,36%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.7	Persentase setengah pengangguran	N/A	63.11	61,77%	57,27%	57,27%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.8	Jumlah wisatawan mancanegara	N/A	100	1.335	4.024	4.024	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
8.9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	N/A	78.193	480.631	487.481	487.481	Dinas Pariwisata
9	TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						
9.1	Jumlah bandara	N/A	2	2	2	2	Kementrian Perhubungan, Dinas Bina Marga Prop. Sulsel, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
9.2	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	N/A	-	-	7,81	7,81	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan



NO	TUJUAN/INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	
9.3	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	N/A	-	-	1,10	1,10	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
9.4	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	N/A	0.77	0.77%	-	-	Dinas Kominfo dan Persandian
9.5	Proporsi individu yang mengusasi/memiliki telpon genggam	N/A	0.67	81,25%	76,35%	76,35%	Dinas Kominfo dan Persandian
9.6	Proporsi individu yang menggunakan internet	N/A	N/A	49,76%	49,79%	49,79%	Dinas Kominfo dan Persandian
10	TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA						
10.1	Koefisien Gini*	N/A	0.378	0.355	0,350	0,320	Bappelitbangda
11	TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						
11.1	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	N/A	18.91	50.28%	36,86%	36,86%	Dinas Lingkungan Hidup
12	TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN						
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	N/A	90.50%	90.05%	7,6%	7,6%	Dinas Lingkungan Hidup
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	N/A	7.5%	7.5%	0,07%	0,07%	Dinas Lingkungan Hidup
13	TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA						
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	N/A	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	BPBD
14	TUJUAN 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
-	-	-	-	-	-	-	-
15	TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI						
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	N/A	N/A	53,85	62,99	62,99	Dinas Lingkungan Hidup
15.2	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	N/A	N/A	250 Ha	0,89 Ha	0,89 Ha	Dinas Lingkungan Hidup



NO	TUJUAN/INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN					OPD PENANGGUNG JAWAB
		2020	2021	2022	2023	2024	
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	N/A	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
16	TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN						
16.1	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	N/A	56	Laki-laki 12 kasus dan perempuan 28 kasus	0,021	0,021	Dinas P3A P2KB
16.2	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	N/A	56	Perempuan 20 kasus dan laki-laki 1 kasus	0,087	0,087	Dinas P3A P2KB
16.3	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	N/A	13.33%	13.33%	13,3	13,3	Dinas P3A P2KB
16.4	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	N/A	-	40%	32	32	BKPSDM
16.5	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	N/A	73%	83%	97,85	97,85	Dinas Dukcapil
16.6	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	N/A	0.041	0,044	0	0	Badan Kesbangpol
16.7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	N/A	96%	96%	100%	100%	Badan Kesbangpol
17	TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
17.1	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	N/A	0.77	0.77	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.2	Proporsi individu yang menggunakan internet	N/A	0.70	0.49	49,79	49.79	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	N/A	95.48	99,69 %	100	100	Bappelitbangda
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	N/A	100	87,87 %	100	100	Bappelitbangda

2.1.5.3. KERJASAMA DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melakukan kerja sama dengan kabupaten lain, kerja sama dengan Pihak Ketiga maupun dengan Pemerintah Pusat.

A. Kerjasama dengan Kabupaten Lain

1. Kabupaten Enrekang. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Enrekang tentang Pengendalian Inflasi. Perjanjian Kerja sama antara Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tana Toraja dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, pada tahun 2024.
2. Kabupaten Toraja Utara. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tentang Pengendalian Inflasi. Perjanjian kerja sama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan prindustri Kabupaten Tana Toraja dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Toraja Utara, pada tahun 2024.
3. Kabupaten Pinrang. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Pinrang tentang Pengendalian Inflasi Daerah, pada tahun 2024.
4. Kabupaten Morowali Utara. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2024.
5. BKPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah kabupaten Tana Toraja, Tahun 2020.

B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

1. Universitas Islam Makassar. Kesepakatan Bersama Universitas Islam Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada tahun 2024.



2. UKI Toraja. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan UKI Toraja, pada tahun 2024.
3. TIRTA BUISUN. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum daerah air minum dengan pemerintah Tana Toraja tentang Pelayanan Air Bersih melalui mobil tangki di Rujab Bupati Tana Toraja, pada tahun 2024.
4. PT. PLN Persero. Perjanjian Kerja sama antara PT. PLN (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tentang Pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja, pada tahun 2024.
5. CV. SMIDCO. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan CV. SMIDCO, pada tahun 2024.
6. KODIM 1414 Tana Toraja, Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola, pada tahun 2023.
7. Topografi Kodam XIV/Hasanuddin, Pekerjaan Swakelola Pemasangan dan Pengukuran Tugu Pilar Batas Utama (PBU), pada tahun 2023.
8. KAPABEL, Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan, pada tahun 2023.
9. PT. Citi link. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan PT. Citi Link tentang penyediaan jasa layanan penerbangan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023.
10. Yayasan Putra Samporna, Kerjasama bidang Pendidikan, pada tahun 2023.
11. Universitas Mulawarman, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pada tahun 2023.
12. PT. Telekomunikasi Indonesia. Kerja sama pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2022.
13. YESMa. Pelaksanaan Program Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (Inklusi) di Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2022.
14. PKK, Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tahun 2021.



15. Universitas Kristen Indonesia Paulus, Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur dan Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, Tahun 2021.

C. Sinergi Perencanaan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah (SINERGI)

1. Topografi Kodam XIV/ Hasanuddin. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Topografi Kodam XIV/Hasanuddin tentang Pekerjaan Swakelola Pemasangan dan Pengukuran Tugu Pilar Batas Utama (PBU) , pada tahun 2024.
2. BPJS Kesehatan. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan BPJS Kesehatan tentang Optimalisasi Program JKN, pada tahun 2024.
3. PT. TASPEN (PERSERO). Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan PT. Taspen (Persero) tentang Implementasi sistem informasi manajemen Gaji (SIM GAJI), pada tahun 2024.
4. BPJS Ketenagakerjaan. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palopo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024.

2.1.5.4. RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR OLEH APBN DI KABUPATEN TANA TORAJA

Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tana Toraja antara lain :

1. Makan Bergizi Gratis. MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Kabupaten Tana Toraja. Untuk itu Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 serta dilakukan pengecekan kesiapan di lapangan. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan kelancaran kegiatan, dengan fokus pada kesiapan gedung, suplier bahan makanan bergizi, peralatan makan yang akan digunakan, serta pengelolaan limbah dan kendaraan yang akan mendukung kegiatan. Untuk pembangunan MBG rencananya akan ditempatkan di 3 (tiga)

Kecamatan yaitu Kecamatan Mengkendek, Kecamatan Gandangbatu Sillanan dan Kecamatan Rembon.

2. Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi yang kurang mampu, kegiatan ini rencananya akan dibangun di Lembang Tinoring Kecamatan Mengkendek dengan jenjang Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas.

2.1.5.5. BUMD YANG MENDUKUNG PELAYANAN PEMDA

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah kabupaten Tana Toraja maka perlu didukung oleh BUMD, salah satunya adalah Perusahaan Umum Daerah TIRTA BUISUN. Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja. Pada tahun 2024 jumlah sambungan terpasang sebanyak 9.611 SR namun hanya terdapat 7.221 SR yang aktif. Kapasitas terpasang Perusahaan Umum Daerah TIRTA BUISUN sebanyak 201 Liter/detik yang berasal dari air permukaan dengan sistem IPA lengkap sebanyak 170 liter/detik dan mata air dengan sistem penyaringan sederhana sebanyak 31 liter/detik. Selain melayani masyarakat, Perusahaan Umum Daerah TIRTA BUISUN juga memberikan pelayanan Air Bersih kepada Pemerintah Daerah Tana Toraja berupa Pelayanan Air Bersih melalui mobil tangki ke rumah jabatan Bupati Tana Toraja serta pada saat pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan keuangan daerah dibandingkan dengan kebutuhan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah. Penyusunan gambaran keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah merupakan faktor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan

pengelolaan keuangan merupakan daya dukung manajemen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur di dalam : (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbagai peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut menekankan perlunya pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan pelayanan publik. Kerangka pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Tana Toraja secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang kesemuanya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber kekayaan negara secara proporsional demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Tantangan ke depan bagi daerah adalah bagaimana meningkatkan dan menjamin ketersediaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara memadai dalam rangka penyediaan layanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, baik menyangkut kuantitas maupun kualitas. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengelola pendapatan dan belanja tersebut secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan beberapa aspek berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi kinerja keuangan daerah masa lalu,

kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu dan kerangka pendanaan. Masing-masing aspek diuraikan dengan analisis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.2.1. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Kinerja keuangan daerah masa lalu menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengelola pendapatan yang terangkum dalam belanja daerah, serta pemanfaatan sisa anggaran untuk dipergunakan dalam pembiayaan daerah. Selain itu, kinerja keuangan masa lalu dapat digunakan untuk melakukan prediksi besarnya pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun selanjutnya.

2.2.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD

Kinerja pelaksanaan APBD menguraikan tentang pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir. Uraian mengenai kinerja pelaksanaan APBD dapat diketahui dari perkembangan maupun struktur dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Secara rinci, kinerja pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Sesuai ketentuan, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Daerah dan Dana Desa sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

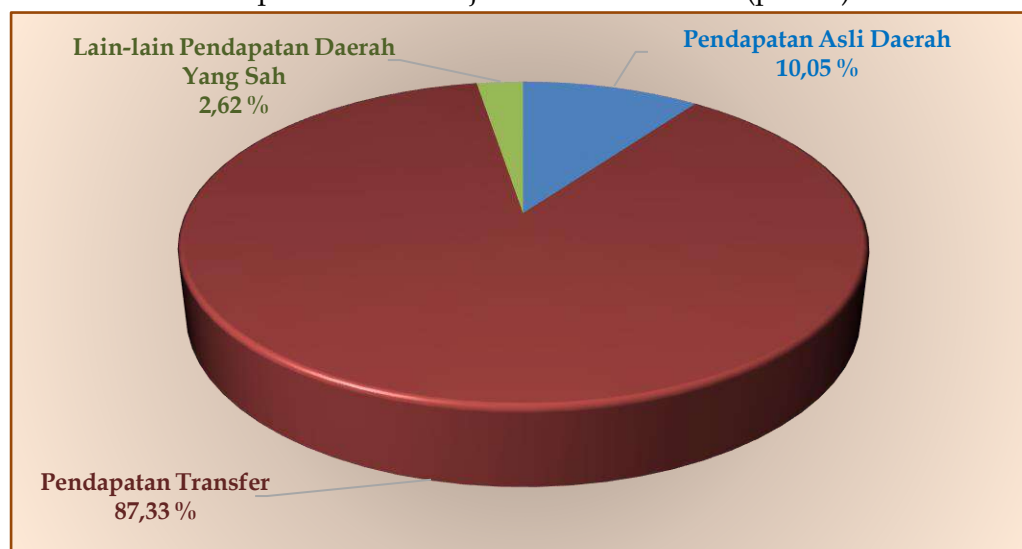
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selama periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan trend positif yang artinya pendapatan daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer namun penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,132 triliun sedangkan pada akhir tahun 2024 realisasi pendapatan daerah meningkat menjadi Rp. 1,170 triliun atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,91 persen. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) mengalami peningkatan dari Rp. 98,869 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 120,303 miliar pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,72 persen; Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari Rp. 1,002 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,025 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 0,60 persen; sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dari Rp. 31,202 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 25,092 miliar pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata minus 3,57 persen. Adanya penurunan penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah karena berkurangnya Pendapatan Hibah pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada Tahun 2023 tidak terdapat pendapatan hibah.

Apabila mencermati proporsi kontribusi rata-rata masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Daerah masih sangat tergantung kepada dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari masih besarnya proporsi Pendapatan Transfer khususnya Transfer Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja. Untuk mengetahui rata-rata proporsi kontribusi komponen Pendapatan Daerah dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.74
Rata-rata Proporsi Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024 (persen)



Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

Gambaran lebih rinci tentang kondisi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel 2.105

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

KODE	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rupiah)					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.132.594.863.534,75	1.102.376.766.452,96	1.178.979.065.165,89	1.150.998.385.487,56	1.170.796.828.768,33	0,91
4.1	Pendapatan Asli Daerah	98.869.145.954,19	91.038.034.051,96	155.614.158.158,89	110.532.585.548,31	120.303.212.779,33	10,72
4.1.1	Pajak Daerah	11.028.317.168,50	13.007.460.300,00	16.895.994.990,00	17.674.858.876,62	18.201.813.460,75	13,86
4.1.2	Retribusi Daerah	7.163.530.253,75	7.803.351.613,00	9.700.817.563,00	9.647.556.143,00	75.809.837.736,04	179,62
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.599.872.702,00	8.489.122.352,00	6.868.812.604,00	6.886.848.931,00	7.403.450.543,00	(3,15)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	72.077.425.829,94	61.738.099.786,96	122.148.533.001,89	76.323.321.597,69	18.888.111.039,54	(7,32)
4.2.	Pendapatan Transfer	1.002.523.593.365,56	970.730.833.219,00	986.985.226.574,00	1.023.499.197.776,25	1.025.400.814.768,00	0,60
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	881.259.230.146,00	879.005.244.626,00	918.949.073.551,00	932.398.187.155,00	975.152.047.373,00	1,35
4.2.1.1	Dana Perimbangan	757.792.840.121,00	754.231.210.626,00	808.038.933.551,00	806.947.604.155,00	872.056.914.373,00	2,19
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	11.426.556.537,00	14.529.160.306,00	12.125.384.811,00	7.432.272.202,00	6.003.577.000,00	(11,83)
4.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.126.649.935,00	8.054.962.143,00	13.470.445.969,00	5.645.860.767,00	5.640.053.850,00	26,06
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	544.504.787.000,00	537.030.126.000,00	536.792.955.194,00	571.927.985.067,00	608.895.750.794,00	2,90
4.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.403.498.410,00	108.205.037.747,00	108.364.018.925,00	79.460.004.990,00	100.507.941.570,00	5,59
4.2.1.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	153.184.436.220,00	127.294.397.430,00	137.286.128.652,00	142.481.481.129,00	151.009.591.159,00	0,18
4.2.1.2.	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	21.071.841.000,00	-	-
4.2.1.5	Dana Desa	123.466.390.025,00	124.774.034.000,00	110.910.140.000,00	104.378.742.000,00	103.095.133.000,00	(4,29)
4.2.2	Transfer Antar Daerah	77.411.275.238,56	50.843.115.593,00	68.036.153.023,00	91.101.010.621,25	50.248.767.395,00	(2,86)
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	38.444.804.838,56	38.946.655.068,00	43.117.349.822,00	61.573.498.121,25	44.102.385.645,00	6,61
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	38.966.470.400,00	11.896.460.525,00	24.918.803.201,00	29.527.512.500,00	6.146.381.750,00	(5,17)
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31.202.124.215,00	40.607.899.182,00	36.379.680.433,00	16.966.602.163,00	25.092.801.221,00	3,57
4.3.1.	Pendapatan Hibah	19.135.206.657,00	28.101.016.487,00	21.662.336.317,00	-	8.707.527.000,00	(19,01)
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	12.066.917.558,00	12.506.882.695,00	14.717.344.116,00	16.966.602.163,00	16.385.274.221,00	8,29

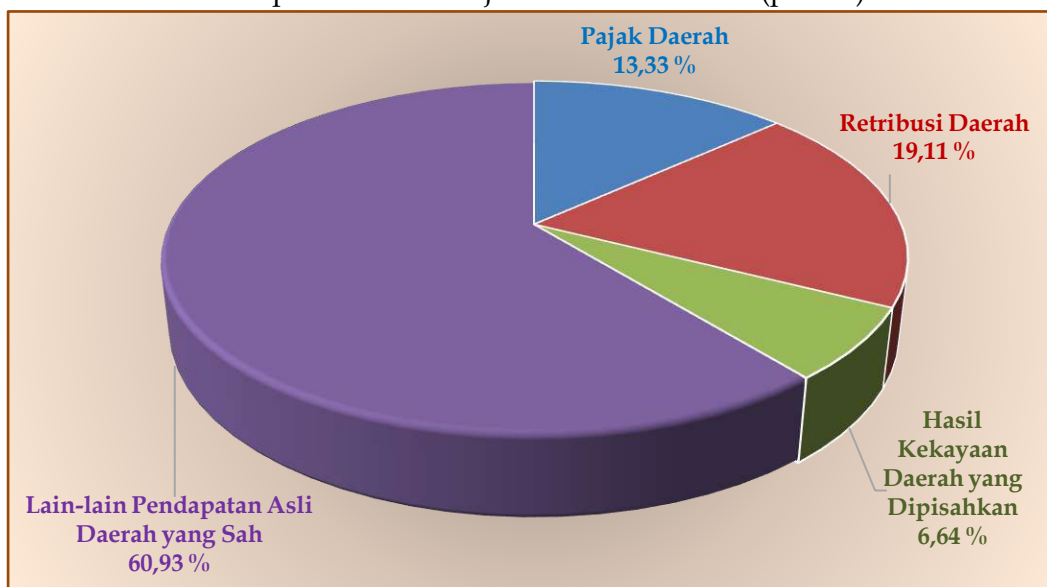
Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja tumbuh rata-rata 10,72 persen per tahun dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari Retribusi Daerah sebesar 179,62 persen kemudian disusul oleh Pajak Daerah sebesar 13,86 persen. Sedangkan pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berkontribusi negatif terhadap perkembangan PAD Kabupaten Tana Toraja yakni dengan nilai masing-masing sebesar minus 3,15 persen dan 7,32 persen. Untuk mengetahui rata-rata proporsi kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.75
Rata-rata Proporsi Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024 (persen)



Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

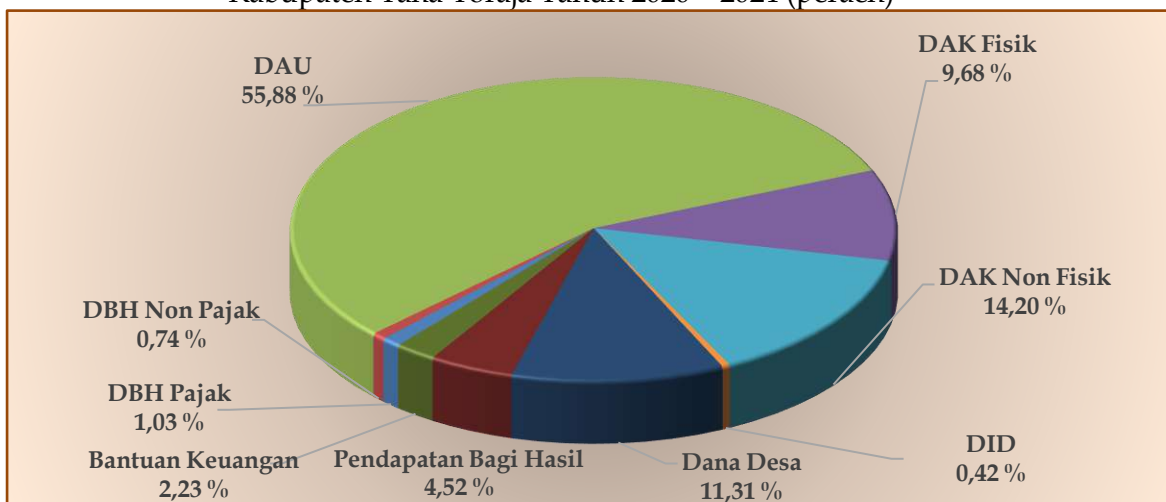
2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Bukan Pajak; DAU; DAK Fisik dan Non Fisik, kemudian Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Secara umum, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Tana Toraja hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,35 persen per tahun. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya komponen penerimaan yang pertumbuhan rata-ratanya bernilai minus diantaranya penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang pertumbuhannya sebesar minus 11,83 persen serta Dana Desa sebesar minus 4,29 persen. Meskipun demikian, komponen lain seperti Dana Bagi Hasil SDA dan komponen DAK Fisik bertumbuh positif masing-masing sebesar 26,06 persen dan 5,59 persen. Sedangkan Transfer Antar Daerah tumbuh rata-rata minus 2,86 persen pertahun sebagai dampak dari Bantuan Keuangan yang mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar minus 5,17 persen. Meskipun demikian, Pendapatan Bagi Hasil mengalami pertumbuhan positif yakni rata-rata sebesar 6,61 persen pertahun. Rata-rata proporsi kontribusi komponen Pendapatan Transfer dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.76

Rata-rata Proporsi Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024 (peraeen)



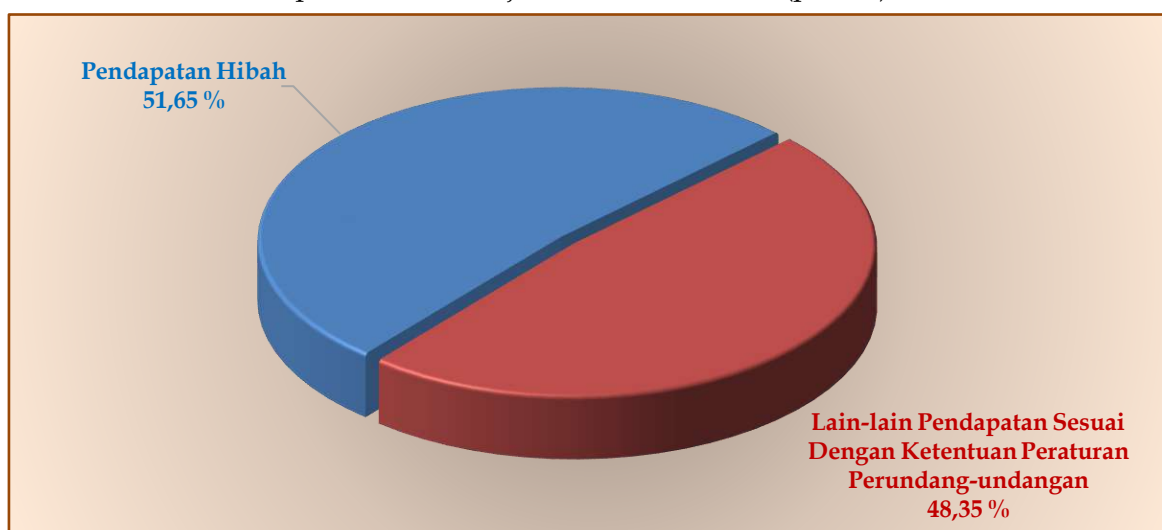
Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tana Toraja mengalami pertumbuhan sebesar 3,57 persen per tahun. Meskipun mengalami pertumbuhan yang bernilai positif namun salah satu komponen dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yakni Pendapatan Hibah mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar minus 19,01 persen pertahun. Hal tersebut diakibatkan karena Pendapatan Hibah pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, secara khusus pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak memperoleh penerimaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Untuk mengetahui rata-rata proporsi konstribusi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.77

Rata-rata Proporsi Konstribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024 (persen)



Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah belanja yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang memiliki sifat mengurangi nilai kekayaan bersih daerah. Belanja Daerah juga merupakan komitmen dan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan administratif dan seluruh aspek pembangunan kepada publik

dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat melalui alokasi dana dalam APBD yang berkualitas. Belanja Daerah dikelompokkan dalam empat jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Seiring dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selama periode tahun 2020-2024 yang mengalami fluktuasi dengan trend positif, Belanja Daerah juga mengalami hal yang sama dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,62 persen. Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,112 triliun sedangkan pada tahun 2024 realisasi Belanja Daerah meningkat menjadi Rp. 1,220 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9,74 persen. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal yang mengalami pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar 5,54 persen dan 7,14 persen. Meskipun demikian, Belanja Transfer mengalami pertumbuhan minus 2,82 persen sebagai akibat dari berkurangnya transfer Dana Desa khususnya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

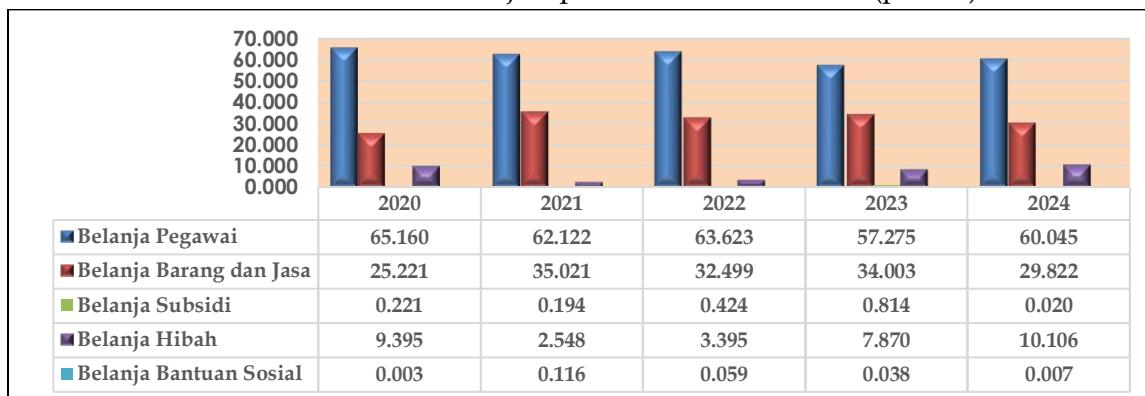
Realisasi penggunaan Belanja Daerah terbesar diperuntukkan bagi Belanja Operasi sebesar 66,12 persen dimana sebahagian besar belanja tersebut diserap oleh item Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Selain itu, realisasi Penggunaan Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Modal sebesar 17,54 persen, Belanja Transfer sebesar 15,24 persen dan Belanja Tak Terduga sebesar 1,10 persen.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Pertumbuhan rata-rata Belanja Operasi dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 sebesar 5,54 persen pertahun. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dari sisi besaran belanja pada Belanja Operasi masih didominasi oleh item Belanja Pegawai sedangkan yang terkecil adalah item Belanja Bantuan Sosial. Adapun perkembangan persentase alokasi Belanja Operasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.78

Alokasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020-2024 (persen)



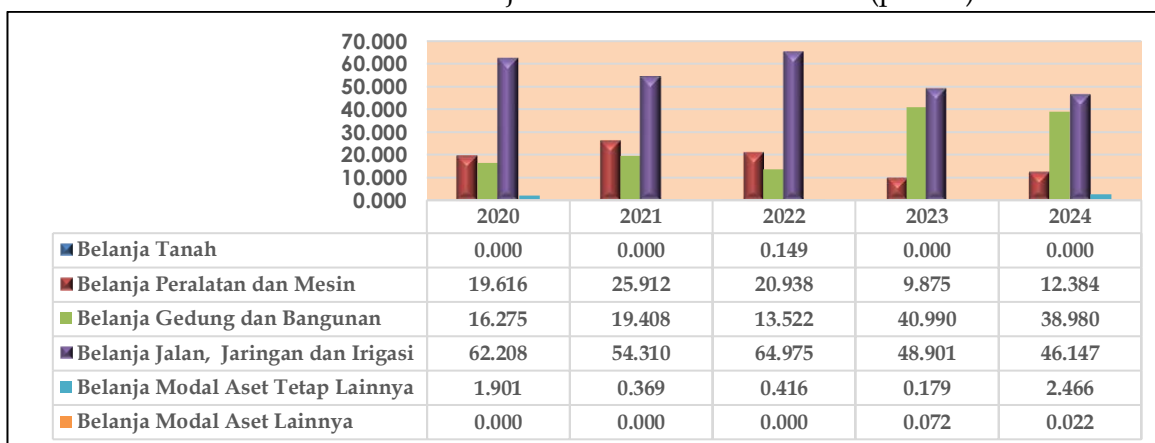
Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya. Pertumbuhan rata-rata Belanja Modal dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 sebesar 7,14 persen pertahun dimana pertumbuhan rata-rata terbesar berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yaitu sebesar 345,60 persen, sedangkan dari sisi jumlah belanja, dalam kurun waktu yang sama masih dikuasai oleh item Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi. Adapun perkembangan persentase alokasi Belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.79

Alokasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 - 2024 (persen)



Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

C. Belanja Tak Terduga

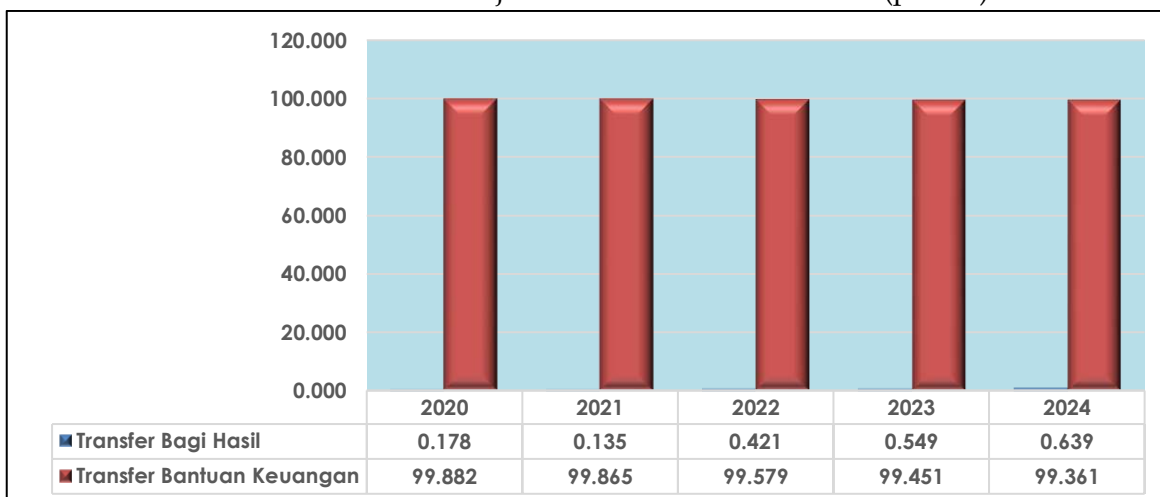
Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pertumbuhan rata-rata Belanja Tak Terduga dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 sebesar minus 30,84 persen pertahun yang diakibatkan karena adanya pengalokasian anggaran belanja pada tahun 2020 sangat besar dalam rangka penanganan Covid-19.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil yang dialokasikan untuk bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dan Transfer Bantuan Keuangan yang dialokasikan untuk bantuan keuangan umum dan khusus kepada desa. Pertumbuhan rata-rata Belanja Transfer dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 sebesar minus 2,82 persen pertahun dimana nilai tersebut dipengaruhi oleh Transfer Bantuan Keuangan berupa Dana Desa yang mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Adapun perkembangan persentase alokasi Belanja Transfer disajikan pada grafik berikut ini.

Grafik 2.80

Alokasi Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 - 2024 (persen)



Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025



Tabel 2.106

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

KODE	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.	BELANJA DAERAH	1.112.242.904.839,58	1.049.701.513.679,57	1.164.206.582.539,29	1.120.371.567.936,58	1.220.647.580.625,54	2,62
5.1.	Belanja Operasi	677.970.759.366,05	708.956.211.333,57	752.730.337.016,00	767.485.041.641,58	840.182.701.568,54	5,54
5.1.1.	Belanja Pegawai	441.762.507.116,00	440.418.572.040,00	478.913.139.970,00	439.575.227.282,37	504.484.794.838,60	3,75
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.993.682.474,05	248.283.221.027,57	244.626.356.271,00	260.965.864.945,21	250.560.788.888,94	11,60
5.1.4.	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.373.697.200,00	3.191.265.688,00	6.246.043.000,00	170.033.701,00	32,69
5.1.5.	Belanja Hibah	63.696.569.776,00	18.061.428.266,00	25.553.335.087,00	60.404.458.414,00	84.911.484.140,00	36,70
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	18.000.000,00	819.292.800,00	446.240.000,00	293.448.000,00	55.600.000,00	1.072,70
5.2.	Belanja Modal	191.525.186.723,53	155.404.494.851,00	243.567.025.418,29	189.432.485.973,00	213.863.167.624,00	7,14
5.2.1.	Belanja Tanah	-	-	363.780.000,00	-	-	-
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	37.569.459.855,60	40.268.649.540,00	50.997.727.016,00	18.672.715.298,00	26.485.740.010,00	3,07
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	31.170.135.375,00	30.161.338.486,00	32.934.746.713,00	77.649.107.836,00	83.363.710.210,00	37,27
5.2.4.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	119.144.404.176,93	84.400.315.825,00	158.257.859.416,00	92.634.917.839,00	98.692.143.495,00	5,86
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.641.187.316,00	574.191.000,00	1.012.912.273,29	338.750.000,00	5.273.573.909,00	345,60
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	136.995.000,00	48.000.000,00	-
5.3.	Belanja Tak Terduga	56.515.100.000,00	3.557.364.000,00	1.016.990.375,00	463.829.000,00	909.713.000,00	(30,84)
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	56.515.100.000,00	3.557.364.000,00	1.016.990.375,00	463.829.000,00	909.713.000,00	(30,84)
5.4.	Belanja Transfer	186.231.858.750,00	181.783.443.495,00	166.892.229.730,00	162.990.211.322,00	165.691.998.433,00	(2,82)
5.4.1.	Transfer Bagi Hasil	332.377.150,00	244.598.427,00	702.531.730,00	895.355.875,00	1.059.337.803,00	51,64
5.4.1.1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab./Kota dan Desa	157.085.650,00	129.631.427,00	144.816.162,00	242.767.000,00	278.470.000,00	19,15
5.4.1.2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab./Kota Kepada Pemerintah Desa	175.291.500,00	114.967.000,00	557.715.568,00	652.588.875,00	780.867.803,00	96,84
5.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	185.899.481.600,00	181.538.845.068,00	166.189.698.000,00	162.094.855.447,00	164.632.660.630,00	(2,92)
5.4.2.1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kab./Kota kepada Desa	61.825.474.200,00	56.764.811.068,00	55.279.558.000,00	57.716.113.447,00	61.537.527.630,00	0,06
5.4.2.2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab./Kota kepada Desa	124.074.007.400,00	124.774.034.000,00	110.910.140.000,00	104.378.742.000,00	103.095.133.000,00	(4,42)

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Tana Toraja terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA).
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu antara tahun 2020 - 2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 44,30 persen. Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami pertumbuhan rata-rata 45,51 persen sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mengalami pertumbuhan rata-rata minus 25,00 persen yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.

Gambaran tentang realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan beserta komponen yang mendukung disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.107

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

KODE	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	36.456.486.410,23	55.443.674.105,40	105.118.924.878,79	117.785.304.077,44	145.412.121.628,42	44,30
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	36.456.486.410,23	55.443.674.105,40	108.118.924.878,79	117.785.304.077,44	148.412.121.628,42	45,51
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.456.486.410,23	55.443.674.105,40	108.118.924.878,79	117.785.304.077,44	148.412.121.628,42	45,51
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	(25,00)
6.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	(25,00)
PEMBIAYAAN NETTO		56.808.445.105,40	108.118.926.878,79	119.891.407.505,39	148.412.121.628,42	95.561.369.771,21	22,35

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025



2.2.1.2. NERACA DAERAH

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana yang merupakan rekening utama dan masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Tana Toraja serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu 2020 – 2024 dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini.



Tabel 2.108
Neraca Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2.1	ASET DAERAH	3.400.594.423.001,90	3.496.810.439.458,00	3.542.859.917.185,23	3.621.140.460.185,62	3.606.438.688.723,23
3.2.1.1	ASET LANCAR	109.657.159.293,70	167.793.295.432,97	182.105.334.622,34	214.496.797.782,11	139.317.335.064,66
3.2.1.1.1	Kas dan Setara Kas	57.137.568.443,40	108.299.547.190,79	117.832.096.933,41	148.432.810.293,42	95.561.958.269,21
	Kas di Kas Daerah	44.047.092.182,91	97.195.558.165,46	94.698.354.187,67	124.981.341.707,97	78.561.606.254,17
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.598.154.300,00	682.628.000,00	770.159.000,00	720.247.500,00	663.948.900,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	1.145.616.777,00	386.638.419,00	234.095.217,00	432.915.588,00	105.054.078,00
	Kas di Bendahara JKN	1.163.746.043,00	513.453.688,00	139.714.861,00	247.688.437,42	142.440.414,75
	Kas di Bendahara BLUD	5.193.352.812,49	8.727.948.306,33	21.816.726.885,74	18.359.486.732,48	12.061.564.566,74
	Kas di Bendahara Dana BOS	3.750.482.990,00	612.698.300,00	115.708.965,00	109.539.920,00	268.091.208,00
	Kas di Bendahara Dana BOK	-	-	-	3.467.911.017,00	3.665.673.624,00
	Kas Lainnya	239.123.338,00	180.622.312,00	57.337.817,00	113.679.390,55	93.579.223,55
3.2.1.1.2	Piutang Pendapatan	14.640.630.923,17	41.544.134.335,17	30.696.787.799,84	24.709.398.456,21	31.591.906.695,47
	Piutang Pajak Daerah	1.470.945.997,00	2.014.708.079,00	2.596.232.543,00	2.615.881.624,52	3.253.843.541,15
	Piutang Retribusi	738.535.415,00	1.213.467.990,00	873.285.640,00	890.300.240,00	657.900.240,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.431.149.511,17	29.491.923.837,17	8.288.284.806,84	7.327.660.934,69	12.281.205.068,32
	Piutang Transfer Antar Daerah	-	8.824.034.429,00	18.938.984.810,00	13.875.555.657,00	15.398.957.846,00
3.2.1.1.3	Penyisihan Piutang	(1.010.509.398,69)	(16.280.715.133,33)	(1.866.447.070,50)	(1.862.141.734,43)	(7.727.294.670,32)
	Penyisihan Piutang Pendapatan	(1.010.509.398,69)	(16.280.715.133,33)	(1.866.447.070,50)	(1.862.141.734,43)	(7.727.294.670,32)
3.2.1.1.4	Beban Dibayar Dimuka	3.020.713.250,00	-	-	3.954.561.460,00	2.717.655.576,00
	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	3.020.713.250,00	-	-	3.954.561.460,00	2.717.655.576,00
3.2.1.1.5	Persediaan	35.868.756.075,82	34.230.329.040,34	35.442.896.959,59	39.262.169.306,91	17.173.109.194,30
	Persediaan Bahan Pakai Habis	448.472.150,00	191.018.372,00	213.912.900,00	39.262.169.306,91	17.173.109.194,30
	Persediaan Bahan/Material	7.245.838.225,82	6.290.472.468,34	8.338.698.124,59	-	-



KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persediaan Barang Lainnya	28.174.445.700,00	27.748.838.200,00	26.890.285.935,00	-	-
3.2.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	41.241.192.808,00	37.302.310.129,00	40.441.810.197,00	40.553.850.404,00	43.702.450.311,00
3.2.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.238.013.500,00	-	-	-	-
	Dana Bergulir	1.653.607.612,00	1.653.607.612,00	1.642.507.612,00	-	-
	Investasi Non Permanen Lainnya	4.238.013.500,00	4.238.013.500,00	4.238.013.500,00	5.880.521.112,00	5.880.521.112,00
	Penyisihan Dana Bergulir	(1.653.607.612,00)	(5.891.621.112,00)	(5.880.521.112,00)	(5.880.521.112,00)	(5.880.521.112,00)
3.2.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	37.003.179.308,00	37.302.310.129,00	40.441.810.197,00	40.553.850.404,00	43.702.450.311,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	37.003.179.308,00	37.302.310.129,00	40.441.810.197,00	40.553.850.404,00	43.702.450.311,00
3.2.1.3	ASET TETAP	3.219.817.777.168,87	3.260.833.904.341,70	3.289.077.079.549,56	3.335.261.532.886,18	3.393.764.207.967,24
3.2.1.3.1	Tanah	1.697.974.807.085,00	1.711.049.955.685,00	1.711.483.135.685,00	1.680.593.849.821,00	1.685.481.943.321,00
	Tanah	1.697.974.807.085,00	1.711.049.955.685,00	1.711.483.135.685,00	1.680.593.849.821,00	1.685.481.943.321,00
3.2.1.3.2	Peralatan dan Mesin	370.987.496.782,12	408.943.995.097,78	445.818.122.748,78	468.304.361.762,78	496.858.409.459,78
	Peralatan dan Mesin	370.987.496.782,12	408.943.995.097,78	445.818.122.748,78	468.304.361.762,78	496.858.409.459,78
3.2.1.3.3	Gedung dan Bangunan	619.743.770.610,95	658.374.652.403,42	683.827.975.210,61	698.018.089.098,07	787.157.017.198,06
	Bangunan Gedung	619.743.770.610,95	658.374.652.403,42	683.827.975.210,61	698.018.089.098,07	787.157.017.198,06
3.2.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.389.448.543.547,50	1.409.214.274.590,35	1.473.670.194.363,82	1.554.485.373.633,93	1.672.220.944.370,18
	Jalan, Jembatan dan Jaringan	1.389.448.543.547,50	1.409.214.274.590,35	1.473.670.194.363,82	1.554.485.373.633,93	1.672.220.944.370,18
3.2.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	36.928.874.387,00	39.487.667.991,00	41.186.155.196,00	44.970.937.518,00	50.358.386.427,00
	Aset Tetap Lainnya	36.928.874.387,00	39.487.667.991,00	41.186.155.196,00	44.970.937.518,00	50.358.386.427,00
3.2.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.400.269.255,00	31.570.711.465,00	50.552.496.972,00	79.925.199.772,02	41.855.792.847,77
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.400.269.255,00	31.570.711.465,00	50.552.496.972,00	79.925.199.772,02	41.855.792.847,77
3.2.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(964.665.984.498,70)	(997.807.352.890,85)	(1.117.461.000.626,65)	(1.255.482.020.964,62)	(1.406.259.857.077,75)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(964.665.984.498,70)	(997.807.352.890,85)	(1.117.461.000.626,65)	(1.255.482.020.964,62)	(1.406.259.857.077,75)



KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2.1.3.8	Properti Investasi	-	-	-	71.905.077.142,00	74.392.680.142,20
	Properti Investasi	-	-	-	71.905.077.142,00	74.392.680.142,20
3.2.1.3.9	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	(7.459.334.897,00)	(8.301.108.721,00)
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	(7.459.334.897,00)	(8.301.108.721,00)
3.2.1.5	ASET LAINNYA	29.878.293.731,33	30.880.929.554,33	31.235.692.816,33	30.828.279.113,33	29.654.695.380,33
3.2.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	417.445.000,00	417.445.000,00	1.057.527.533,00	1.057.527.533,00	766.730.000,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	417.445.000,00	417.445.000,00	1.057.527.533,00	1.057.527.533,00	766.730.000,00
3.2.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	252.407.500,00	252.407.500,00	252.407.500,00	252.407.500,00	252.407.500,00
	Kemitraan dengan pihak Ketiga	252.407.500,00	252.407.500,00	252.407.500,00	252.407.500,00	252.407.500,00
3.2.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	(58.547.016.063,00)	1.751.992.685,00	1.349.556.085,00	1.260.195.360,00	1.036.739.261,00
	Goodwill	2.797.513.993,00	1.751.992.685,00	2.922.313.993,00	3.089.208.993,00	3.137.208.993,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(61.344.530.056,00)	-	(1.572.757.908,00)	(1.829.013.633,00)	(2.100.469.732,00)
3.2.1.5.4	Aset Lain-lain	87.755.457.294,33	28.459.084.369,33	28.576.201.698,33	28.258.148.720,33	27.598.818.619,33
	Aset Lain-lain	87.755.457.294,33	28.459.084.369,33	115.547.535.233,67	28.258.148.720,33	112.843.196.069,67
	Akumulasi Penusutan aset lain-lain	-	-	(86.971.333.535,34)	-	(85.244.377.450,34)
3.2.2	KEWAJIBAN	71.539.681.230,00	120.281.237.555,07	59.175.509.673,55	52.217.344.459,33	40.459.139.580,33
3.2.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	71.539.681.230,00	120.281.237.555,07	59.154.759.501,55	52.217.344.459,33	40.459.139.580,33
3.2.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	67.685.915.010,00	180.622.312,00	1.560.587.817,00	20.688.665,00	8.373.498,00
	Utang PPh Pusat	239.123.338,00	-	1.503.250.000,00	-	7.785.000,00
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	67.446.791.672,00	180.622.312,00	57.337.817,00	20.688.665,00	588.498,00
3.2.2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.785.000,00	7.785.000,00	7.785.000,00	7.785.000,00	-



KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	7.785.000,00	7.785.000,00	7.785.000,00	7.785.000,00	-
3.2.2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	7.687.500,00	7.687.500,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	7.687.500,00	7.687.500,00
3.2.2.1.4	Utang Belanja	3.845.981.220,00	120.092.126.845,07	57.161.042.981,55	52.181.183.294,33	40.443.078.582,33
	Utang Belanja Lain-lain	3.845.981.220,00	120.092.126.845,07	57.161.042.981,55	52.181.183.294,33	40.443.078.582,33
3.2.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	703.398,00	425.343.703,00	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	703.398,00	425.343.703,00	-	-
3.2.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	20.750.172,00	-	-
3.2.2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	20.750.172,00	-	-
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	20.750.172,00	-	-
3.2.3	EKUITAS DANA	3.329.054.741.771,90	3.376.529.201.902,93	3.483.684.407.511,68	3.568.923.115.726,48	3.565.979.549.142,90
3.2.3.1	EKUITAS	3.329.054.741.771,90	3.376.529.201.902,93	3.483.684.407.511,68	3.568.923.115.726,48	3.565.979.549.142,90
3.2.3.1.1	Ekuitas	3.329.054.741.771,90	3.376.529.201.902,93	3.483.684.407.511,68	3.568.923.115.726,48	3.565.979.549.142,90
	Ekuitas	3.329.054.741.771,90	3.376.529.201.902,93	3.376.529.201.902,93	3.568.923.115.726,48	3.565.979.549.142,90
	Surplus/Defisit - LO	-	-	158.485.850.154,26	-	-
	Koreksi	-	-	(51.330.644.545,51)	-	-
3.2.3.1.2	Ekuitas SAL	-	-	-	-	-
	Estimasi Perubahan SAL	-	-	-	-	-
	Surplus/Defisit	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.400.594.423.001,90	3.496.810.439.458,00	3.542.859.917.185,23	3.621.140.460.185,81	3.606.438.688.723,23



KODE	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.2.4	RASIO KEUANGAN					
	Rasio Lancar	1,533	1,395	3,077	4,108	3,443
	Rasio Cepat	1,031	1,110	2,478	3,356	3,019
	Rasio Total Hutang terhadap Aset	0,021	0,034	0,017	0,014	0,011
	Rasio Total Hutang terhadap Modal	0,021	0,036	0,017	0,015	0,011

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

A. Aset Daerah

Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama periode tahun 2020 - 2024 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,49 persen pertahun. Meskipun pertumbuhan rata-rata komponen Aset Lainnya mengalami penurunan pertumbuhan yakni sebesar minus 0,15 persen pertahun yang diakibatkan oleh objek Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain, akan tetapi komponen lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan. Komponen tersebut yaitu Aset Lancar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,07 persen, komponen Investasi Jangka Panjang sebesar 1,73 persen dan komponen Aset Tetap sebesar 1,32 persen.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja selama periode tahun 2020 - 2024 mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 4,24 persen pertahun. Kondisi tersebut diakibatkan oleh penurunan yang berasal dari komponen Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami pertumbuhan sebesar minus 4,23 persen, sedangkan komponen Kewajiban Jangka Panjang sebesar 0,00 persen.

C. Ekuitas Dana

Secara konseptual, Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas Dana menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja selama periode tahun 2020 - 2024 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,74 persen pertahun.

D. Rasio Keuangan

Untuk mengetahui tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain berupa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Tana Toraja yaitu :

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 2.109
Rasio Lancar Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO.	TAHUN	AKTIVA LANCAR	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO
1	2020	109.657.159.293,70	71.539.681.230,00	1,533
2	2021	167.793.295.432,97	120.281.237.555,07	1,395
3	2022	182.105.334.622,34	59.154.759.501,55	3,078
4	2023	214.496.797.782,11	52.217.344.459,33	4,108
5	2024	139.317.335.064,66	40.459.139.580,33	3,443
Rata-rata		162.673.984.439,16	68.730.432.465,26	2,711

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata Rasio Lancar Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 sebesar 2,711 dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 4,108 dan terendah pada tahun 2021 dengan nilai 1,395. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih sehat karena aktiva lancar masih lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan Rasio Cepat dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Rasio Cepat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.

Tabel 2.110
Rasio Cepat Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO.	TAHUN	AKTIVA LANCAR	PERSEDIAAN	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	RASIO
1	2020	109.657.159.293,70	35.868.756.075,82	71.539.681.230,00	1,031
2	2021	167.793.295.432,97	34.230.329.040,34	120.281.237.555,07	1,110
3	2022	182.105.334.622,34	35.442.896.959,59	59.154.759.501,55	2,479
4	2023	214.496.797.782,11	39.262.169.306,91	52.217.344.459,33	3,356
5	2024	139.317.335.064,66	17.173.109.194,30	40.459.139.580,33	3,019
Rata-rata		162.673.984.439,16	32.395.452.115,39	68.730.432.465,26	2,199

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata Rasio Cepat Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 sebesar 2,199 dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 3,356 dan terendah pada tahun 2020 dengan nilai 1,031. Dari table di atas menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih sehat karena aktiva lancar yang sudah dikurang dengan persediaan masih lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti

mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya.

Rasio solvabilitas terdiri atas :

a. Rasio Total Hutang terhadap Aset

Rasio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran atas jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kemampuan membayar hutang kepada para pemberi pinjaman berdasarkan aset yang dimiliki.

Tabel 2.111

Rasio Hutang terhadap Aset Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO.	TAHUN	HUTANG	ASET	RASIO
1	2020	71.539.681.230,00	3.400.594.423.001,90	0,021
2	2021	120.281.237.555,07	3.496.810.439.458,00	0,034
3	2022	59.175.509.673,55	3.542.859.917.185,23	0,017
4	2023	52.217.344.459,33	3.621.140.460.185,62	0,014
5	2024	40.459.139.580,33	3.606.438.688.723,23	0,011
Rata-rata		68.734.582.499,66	3.533.568.785.710,80	0,020

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

Rata-rata Rasio Hutang terhadap Aset Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebesar 0,020. Angka rasio yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai aset yang dimiliki.

b. Rasio Total Hutang terhadap Modal

Rasio ini merupakan rasio yang memberikan gambaran atas jaminan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kemampuan membayar hutang kepada para pemberi pinjaman berdasarkan modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 2.112

Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO.	TAHUN	HUTANG	MODAL	RASIO
1	2020	71.539.681.230,00	3.329.054.741.771,90	0,021
2	2021	120.281.237.555,07	3.376.529.201.902,93	0,036
3	2022	59.175.509.673,55	3.483.684.407.511,68	0,017
4	2023	52.217.344.459,33	3.568.923.115.726,48	0,015
5	2024	40.459.139.580,33	3.565.979.549.142,90	0,011
Rata-rata		68.734.582.499,66	3.464.834.203.211,18	0,020

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

Rata-rata Rasio Hutang terhadap Modal Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024 sebesar 0,020. Angka rasio yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai modal yang dimiliki.

2.2.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MASA LALU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Tana Toraja di masa lalu berfokus pada pemenuhan kebutuhan prioritas pembangunan, baik pada aspek pelayanan publik maupun untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan sebagaimana dijabarkan pada RPJMD sebelumnya. Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan Kabupaten Tana Toraja.

2.2.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tana Toraja pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk mengetahui kinerja suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap. Semakin besar realisasi belanja, maka akan semakin bagus kinerja suatu daerah. Selain itu analisis proporsi realisasi terhadap anggaran digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Realisasi rata-rata penyerapan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 88,66 Persen. Terdiri dari Belanja Operasi dengan rata-rata penyerapannya sebesar 89,40 persen dimana serapan tertinggi pada komponen Belanja Pegawai sebesar 93,63 persen dan terendah pada komponen Belanja Subsidi sebesar 69,28 persen, Belanja Modal penyerapannya sebesar 79,99 dan komponen Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memiliki serapan terbesar yakni 98,45 persen dan terendah berasal dari Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 13,22 persen. Rata-rata Serapan Belanja Tak Terduga sebesar 44,57 persen, sedangkan Belanja Transfer memiliki rata-rata penyerapan sebesar 99,80 persen dimana serapan tertinggi berasal dari komponen Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar 99,85 persen.

Untuk mengetahui lebih jelas gambaran tentang proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2.113

Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

KODE	URAIAN	CAPAIAN KINERJA								
		2020			2021			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
5	BELANJA DAERAH	1.255.474.940.000,00	1.112.242.904.839,58	86,99	1.204.509.633.921,00	1.049.701.513.679,57	87,15	1.315.658.615.541,00	1.164.206.582.539,29	88,49
5.1.	Belanja Operasi	740.416.718.482,00	677.970.759.366,05	89,45	811.913.230.273,00	708.956.211.333,57	87,32	838.240.263.350,00	752.730.337.016,00	89,80
5.1.1	Belanja Pegawai	452.595.162.780,00	441.762.507.116,00	95,64	472.926.792.060,00	440.418.572.040,00	93,13	511.921.470.477,00	478.913.139.970,00	93,55
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	218.836.221.920,00	170.993.682.474,05	83,34	308.286.559.749,00	248.283.221.027,57	80,54	279.559.895.865,00	244.626.356.271,00	87,50
5.1.4	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	1.715.603.200,00	1.373.697.200,00	80,07	3.901.882.783,00	3.191.265.688,00	81,79
5.1.5	Belanja Hibah	67.467.333.782,00	63.696.569.776,00	67,51	27.573.883.264,00	18.061.428.266,00	65,50	42.202.714.225,00	25.553.335.087,00	60,55
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.000.000,00	18.000.000,00	22,50	1.410.392.000,00	819.292.800,00	58,09	654.300.000,00	446.240.000,00	68,20
5.2	Belanja Modal	263.618.506.318,00	191.525.186.723,53	72,98	206.915.659.578,00	155.404.494.851,00	75,11	297.079.325.106,00	243.567.025.418,29	81,99
5.2.1	Belanja Tanah	1.600.000.000,00	-	26,81	-	-	-	420.000.000,00	363.780.000,00	86,61
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	30.456.122.317,00	37.569.459.855,60	71,37	48.910.596.148,00	40.268.649.540,00	82,33	59.913.430.233,00	50.997.727.016,00	85,12
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	35.917.137.746,00	31.170.135.375,00	84,91	46.239.518.830,00	30.161.338.486,00	65,23	40.381.824.927,00	32.934.746.713,00	81,56
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	192.267.626.255,00	119.144.404.176,93	68,16	111.181.080.600,00	84.400.315.825,00	75,91	195.247.714.146,00	158.257.859.416,00	81,05
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.377.620.000,00	3.641.187.316,00	79,71	584.464.000,00	574.191.000,00	98,24	1.116.355.800,00	1.012.912.273,29	90,73
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Belanja Tak Terduga	63.284.550.000,00	56.515.100.000,00	39,35	3.606.710.070,00	3.557.364.000,00	98,63	13.431.728.517,00	1.016.990.375,00	7,57
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	63.284.550.000,00	56.515.100.000,00	39,35	3.606.710.070,00	3.557.364.000,00	98,63	13.431.728.517,00	1.016.990.375,00	7,57
5.4	Belanja Transfer	188.155.165.200,00	186.231.858.750,00	99,60	182.074.034.000,00	181.783.443.495,00	99,84	166.907.298.568,00	166.892.229.730,00	99,99
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	400.000.000,00	332.377.150,00	87,99	400.000.000,00	244.598.427,00	61,15	717.600.568,00	702.531.730,00	97,90



KODE	URAIAN	CAPAIAN KINERJA								
		2020			2021			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
5.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab./Kota dan Desa	200.000.000,00	157.085.650,00	89,53	200.000.000,00	129.631.427,00	64,82	50.000.000,00	144.816.162,00	96,54
5.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab./Kota Kepada Pemerintah Desa	200.000.000,00	175.291.500,00	87,65	200.000.000,00	114.967.000,00	57,48	567.600.568,00	557.715.568,00	98,26
5.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	187.755.165.200,00	185.899.481.600,00	99,37	181.674.034.000,00	181.538.845.068,00	99,93	166.189.698.000,00	166.189.698.000,00	100,00
5.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kab./Kota kepada Desa	61.936.253.800,00	61.825.474.200,00	99,82	56.900.000.000,00	56.764.811.068,00	99,76	55.279.558.000,00	55.279.558.000,00	100,00
5.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab./Kota kepada Desa	125.138.472.400,00	124.074.007.400,00	99,15	124.774.034.000,00	124.774.034.000,00	100,00	110.910.140.000,00	110.910.140.000,00	100,00
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025



KODE	URAIAN	CAPAIAN KINERJA						RATA-RATA PENYERAPAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2023			2024				
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%		
5	BELANJA DAERAH	1.267.963.198.157,00	1.120.371.567.936,58	88,36	1.345.598.922.280,00	1.220.647.580.625,54	90,71	88,66	2,62
5.1.	Belanja Operasi	869.589.006.243,00	767.485.041.641,58	88,26	931.814.451.025,52	840.182.701.568,54	90,17	89,40	5,54
5.1.1	Belanja Pegawai	493.338.142.708,00	439.575.227.282,37	89,10	532.274.517.488,52	504.484.794.838,60	94,78	93,63	3,75
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	302.287.437.198,00	260.965.864.945,21	86,33	297.920.363.997,00	250.560.788.888,94	84,10	83,32	11,60
5.1.4	Belanja Subsidi	7.378.500.000,00	6.246.043.000,00	84,65	170.190.000,00	170.033.701,00	99,91	69,28	32,69
5.1.5	Belanja Hibah	66.192.886.337,00	60.404.458.414,00	91,26	101.393.779.540,00	84.911.484.140,00	83,74	78,90	36,70
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	392.040.000,00	293.448.000,00	74,85	55.600.000,00	55.600.000,00	100,00	80,23	1.072,70
5.2	Belanja Modal	231.068.015.039,00	189.432.485.973,00	81,98	242.343.791.254,48	213.863.167.624,00	88,25	79,99	7,14
5.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-	86,61	-
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	19.615.411.317,00	18.672.715.298,00	95,19	30.940.442.058,48	26.485.740.010,00	85,60	94,32	3,07
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	82.329.764.567,00	77.649.107.836,00	94,31	88.843.041.885,00	83.363.710.210,00	93,83	84,34	37,27
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	128.360.355.720,00	92.634.917.839,00	72,17	116.678.245.700,00	98.692.143.495,00	84,58	75,14	5,86
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	339.050.000,00	338.750.000,00	99,91	5.519.061.611,00	5.273.573.909,00	95,55	98,45	345,60
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	423.433.435,00	136.995.000,00	32,35	363.000.000,00	48.000.000,00	13,22	13,22	-
5.3	Belanja Tak Terduga	4.300.000.000,00	463.829.000,00	10,79	5.500.000.000,00	909.713.000,00	16,54	44,57	(30,84)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.300.000.000,00	463.829.000,00	10,79	5.500.000.000,00	909.713.000,00	16,54	44,57	(30,84)
5.4	Belanja Transfer	163.006.176.875,00	162.990.211.322,00	99,99	165.940.680.000,00	165.691.998.433,00	99,85	99,80	(2,82)
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	911.093.875,00	895.355.875,00	98,27	1.200.000.000,00	1.059.337.803,00	88,28	85,74	51,64
5.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab./Kota dan Desa	255.000.000,00	242.767.000,00	95,20	280.000.000,00	278.470.000,00	99,45	86,91	19,15



KODE	URAIAN	CAPAIAN KINERJA						RATA-RATA PENYERAPAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2023			2024				
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%		
5.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab./Kota Kepada Pemerintah Desa	656.093.875,00	652.588.875,00	99,47	920.000.000,00	780.867.803,00	84,88	85,55	96,84
5.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	162.095.083.000,00	162.094.855.447,00	100,00	164.740.680.000,00	164.632.660.630,00	99,93	99,85	(2,92)
5.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kab./Kota kepada Desa	57.716.341.000,00	57.716.113.447,00	100,00	61.645.547.000,00	61.537.527.630,00	99,82	99,88	0,06
5.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab./Kota kepada Desa	104.378.742.000,00	104.378.742.000,00	100,00	103.095.133.000,00	103.095.133.000,00	100,00	99,83	(4,42)
.									

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya pendapatan transfer dari pusat/dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Dua rasio yang mewakili tersebut, meskipun menunjukkan kemandirian daerah, namun memiliki makna yang berbeda atas angka-angkanya. Rasio PAD terhadap totalnya memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah. Kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat dipresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Komponen utama yaitu Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang sejatinya menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. Gambaran Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.114

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER / PERIMBANGAN (Rp)	RASIO TRANSFER TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
1	2	3	4
2020	1,132,594,863,534.75	925,112,318,127.00	81.68
2021	1,102,376,766,452.96	919,887,717,626.00	83.45
2022	1,178,979,065,165.89	918,949,073,551.00	77.94
2023	1,150,998,385,487.56	932,398,187,155.00	81.01
2024	1,170,796,828,768.33	975,152,047,373.00	83.29

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

C. Rasio Fiskal Daerah

Ruang Fiskal Daerah Ruang fiskal (fiscal space) dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah daerah atau secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang

sifatnya tidak mengikat untuk secara bebas dialokasikan sesuai kebijakan pemerintah daerah (diskresi) untuk menggunakannya sesuai prioritas pembangunan daerah. Ruang fiskal diperoleh dari total pendapatan daerah setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan peruntukannya serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, Kondisi ruang fiskal daerah pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menunjukkan trend fluktuatif yaitu pada Tahun 2020 capaiannya tercatat sebesar 37,98 Persen dan turun pada Tahun 2024 menjadi 34,68 persen. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 42,53 persen. Untuk mengetahui perkembangan ruang fiskal daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Selisih	Ruang Fiskal
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	1,132,594,863,534.75	19,135,206,657	241,587,934,630	441,762,507,116.00	-	430,109,215,131.75	37.98
2021	1,102,376,766,452.96	28,101,016,487	235,499,435,177	440,418,572,040.00	-	398,357,742,748.96	36.14
2022	1,178,979,065,165.89	21,662,336,317	245,650,147,577	478,913,139,970.00	-	432,753,441,301.89	36.71
2023	1,150,998,385,487.56	-	221,941,486,119	439,575,227,282.37	-	489,481,672,086.19	42.53
2024	1,170,796,828,768.33	8,707,527,000	251,517,532,729	504,484,794,838.60	-	406,086,974,200.73	34.68

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

D. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur

Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran daerah Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.116
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO.	TAHUN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN)	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	2020	441.762.507.116,00	1.112.242.904.839,58	39,72
2	2021	440.418.572.040,00	1.049.701.513.679,57	41,96



NO.	TAHUN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN)	PERSENTASE
1	2	3	4	5
3	2022	478.913.139.970,00	1.167.206.582.539,29	41,03
4	2023	439.575.227.282,37	1.120.371.567.936,58	39,23
5	2024	504.484.794.838,60	1.223.647.580.625,54	41,23

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

Alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, dari sisi nominal mengalami penurunan tetapi dari segi persentase mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pada tahun 2022, meskipun mengalami peningkatan dari sisi nominal namun jika dilihat dari sisi persentase mengalami penurunan.

Jika membandingkan data tahun 2020 dan tahun 2024, maka total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun dari sisi prosentase. Peningkatan proporsi alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur ini merupakan akibat dari peningkatan jumlah penerimaan pegawai PPPK yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat namun tidak berarti bahwa kebijakan keuangan daerah tidak berorientasi pada program untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah yang lebih mengarah pada upaya pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan alokasi belanja pembangunan daerah untuk pemenuhan layanan masyarakat secara langsung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 2.117

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
I.	BELANJA PEGAWAI	441.762.507.116,00	440.418.572.040,00	478.913.139.970,00	439.575.227.282,37	504.484.794.838,60
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	290.547.277.021,00	295.932.629.845,00	302.682.350.014,00	308.253.768.090,00	361.236.150.886,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	97.086.095.756,00	103.934.821.997,00	102.186.963.849,00	20.793.904.346,00	18.567.580.754,00



NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.686.895.194,00	487.606.600,00	10.353.681.618,00	89.282.476.629,37	101.695.371.680,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.154.872.662,00	12.132.410.158,00	10.529.745.568,00	11.010.713.893,00	13.024.525.817,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	165.834.469,53	166.000.470,00	165.095.854,00	165.985.696,00	154.809.813,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	505.045.530,47	701.440.000,00	590.880.000,00	590.880.000,00	670.200.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	32.616.486.483,00	27.063.662.970,00	52.404.423.067,00	9.477.498.628,00	9.136.155.888,60

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

2.2.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sebaliknya pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Sementara penerimaan pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Analisis pembiayaan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir. Pada bagian ini akan dicermati kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang ditempuh dalam periode sebelumnya, lebih mengarah pada

pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Selanjutnya pada setiap kebijakan penganggaran tersebut, digambarkan komponen-komponen penerimaan untuk menutup defisit atau bahkan alokasi pengeluaran pembiayaan kalau mencapai penganggaran surplus pada saat realisasi pendapatan melebihi kebutuhan alokasi belanja daerah.

Tabel 2.118
Analisis Realisasi Surplus/Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.132.594.863.534,75	1.102.376.766.452,96	1.178.979.065.165,89	1.150.998.385.487,56	1.170.796.828.768,33
Dikurangi Realisasi :						
2	Belanja Daerah	1.112.242.904.839,58	1.049.701.513.679,57	1.164.206.582.539,29	1.120.371.567.936,58	1.220.647.580.625,54
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00
A	Surplus/Defisit Riil	20.351.958.695,17	52.675.252.773,39	11.772.482.626,60	30.626.817.550,98	(52.850.751.857,21)
Ditutupi oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah :						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.456.486.410,23	55.443.674.105,40	108.118.924.878,79	117.785.304.077,44	148.412.121.628,42
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	36.456.486.410,23	55.443.674.105,40	108.118.924.878,79	117.785.304.077,44	148.412.121.628,42
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	56.808.445.105,40	108.118.926.878,79	119.891.407.505,39	148.412.121.628,42	95.561.369.771,21

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2023 terjadi surplus anggaran dimana surplus anggaran terbesar terjadi pada tahun 2021 sebesar 52,67 miliar lebih namun pada tahun 2024 terjadi deficit anggaran sebesar 52,85 miliar lebih. Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) juga mengalami peningkatan dimana nilai terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 148,41 miliar lebih. Di masa mendatang diharapkan SiLPA semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinerginya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar

dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Tana Toraja.

2.2.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Pada bagian sebelumnya, telah disajikan kinerja dan kebijakan keuangan di masa lalu. Berdasarkan data dan informasi tersebut, dapat dilakukan analisis terhadap proyeksi keuangan di masa depan dan arah kebijakannya. Hal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan dimana aspek keuangan daerah merupakan sumber daya utama bagi berjalannya roda pembangunan di Kabupaten Tana Toraja. Kerangka pendanaan meliputi penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan daerah yang dikelola berdasarkan azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

2.2.3.1. ASUMSI MAKRO EKONOMI DAN KONDISI SOSIAL DAERAH

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat tertentu memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan daerah yang mampu diperoleh ke depan. Artinya, indikator-indikator dimaksud selain menggambarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, juga menggambarkan kondisi yang menunjukkan sejumlah peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerahnya ke depan.

Tabel 2.119

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,67	71,73	72,18	72,64	73,10	73,24	74,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,79	10,01	9,45	8,85	8,25	7,68	7,06
3	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	3,98	3,23	3,13	3,07	3,00	2,95	2,87
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20	7,32	7,38	7,42	7,48	7,57	7,68
5	PDRB per Kapita (Juta Rp.)	34,74	35,45	43,12	52,33	61,53	79,98	89,14
6	Gini Rasio	0,320	0,318	0,317	0,315	0,314	0,312	0,311
7	Proporsi kontribusi PDRB ADHB kab/kota terhadap provinsi	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	36,30	39,28	42,26	45,24	48,22	51,20	53,86
9	IKLH	73,24	74,30	74,51	74,72	74,93	75,15	75,70

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja, 2025

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Tana Toraja diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Tana Toraja lima tahun ke depan, yakni mencakup asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, indeks gini ratio, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan indeks Pembangunan manusia (IPM). Keenam indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tana Toraja untuk lima tahun ke depan diasumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi, sehingga Tana Toraja tetap diharapkan menjadi salah satu pilar perekonomian di Sulawesi Selatan. Asumsi pertumbuhan ekonomi ini, tidak hanya diharapkan secara konsisten meningkat, tetapi juga diharapkan menjadi lebih inklusif dan berkualitas tinggi sehingga tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diharapkan menurun secara signifikan untuk lima tahun ke depan. Dengan demikian, stabilitas harga-harga dapat tercipta dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi, melebihi capaian dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui capaian indikator makro ekonomi daerah yang menjadi asumsi dasar tersebut, diharapkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran IPM Tana Toraja akan terus membaik, bukan hanya pada nilai indeksnya tetapi juga dari sisi peringkatnya ditingkat provinsi. Indikator makro ekonomi daerah yang tinggi akan menjamin kemampuan keuangan rumah tangga masyarakat juga meningkat dan kemampuan kapasitas keuangan daerah Tana Toraja juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini menjadi syarat mutlak pencapaian kualitas manusia di Tana Toraja yang semakin tinggi, yang ditunjukkan dengan angka IPM yang semakin membaik.

2.2.3.2. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi : pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tana



Toraja yang terdiri dari komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam kurun waktu tahun 2026 - 2030. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisis trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan. Selain menggunakan pertimbangan hasil analisis trend, proyeksi dirumuskan dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian dan pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Tana Toraja, kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta kondisi ekonomi makro yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja sehingga diharapkan hasil dari proyeksi tersebut lebih realistis.

Pendapatan daerah Kabupaten Tana Toraja diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata 4,64 persen yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan sebesar 4,37 persen, Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan sebesar 4,60 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 9,63 persen. Sedangkan dari sisi belanja daerah Kabupaten Tana Toraja diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,75 persen yang terdiri dari komponen Belanja Operasi mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,30 persen, Belanja Modal mengalami pertumbuhan sebesar 14,90 persen, Belanja Tak Terduga direncanakan tetap diangka 10 miliar pertahun dan Belanja Transfer mengalami pertumbuhan sebesar 3,91 persen. Untuk mengetahui lebih jelas tentang proyeksi pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2030 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.120

Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030

KODE	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.170.796.828.768,33	1.187.824.767.000,00	1.291.517.471.000,00	1.339.650.170.000,00	1.383.841.428.000,00	1.440.033.499.000,00	1.488.632.164.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	120.303.212.779,33	165.340.947.608,00	165.498.096.000,00	172.931.271.000,00	183.899.385.000,00	194.659.522.000,00	204.519.081.000,00
4.1.1	Pajak Daerah	18.201.813.460,75	56.007.738.608,00	48.767.647.000,00	51.950.942.000,00	57.080.380.000,00	61.731.904.000,00	65.436.796.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	75.809.837.736,04	89.032.552.000,00	92.779.809.000,00	94.053.127.000,00	96.989.938.000,00	98.615.952.000,00	101.807.502.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.403.450.543,00	7.300.000.000,00	8.867.885.000,00	9.831.876.000,00	10.793.964.000,00	11.769.571.000,00	12.328.832.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.888.111.039,54	13.000.657.000,00	15.082.755.000,00	17.095.326.000,00	19.035.103.000,00	22.542.095.000,00	24.945.951.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.025.400.814.768,00	1.003.263.251.392,00	1.101.419.612.000,00	1.140.855.147.000,00	1.172.684.421.000,00	1.216.578.474.000,00	1.254.168.987.000,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	975.152.047.373,00	932.859.972.000,00	1.055.334.435.000,00	1.091.746.127.000,00	1.119.960.618.000,00	1.159.563.295.000,00	1.195.474.462.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	103.095.133.000,00	98.847.239.000,00	103.533.443.000,00	106.824.613.000,00	110.746.062.000,00	115.356.329.000,00	119.047.731.000,00
4.2.1.7	Dana Bagi Hasil (DBH)	11.643.630.850,00	13.009.051.000,00	14.392.952.000,00	15.286.906.000,00	15.756.304.000,00	16.408.153.000,00	17.164.808.000,00
4.2.1.7.1	DBH Pajak	6.003.577.000,00	8.200.751.000,00	8.743.066.000,00	9.391.524.000,00	9.627.988.000,00	9.955.987.000,00	10.364.182.000,00
4.2.1.7.2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	5.640.053.850,00	4.308.300.000,00	5.149.886.000,00	5.345.382.000,00	5.578.316.000,00	5.852.166.000,00	6.150.626.000,00
4.2.1.7.3	DBH Lainnya	-	500.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00
4.2.1.8	Dana Alokasi Umum (DAU)	608.895.750.794,00	601.564.378.000,00	654.599.693.000,00	667.709.066.000,00	681.169.512.000,00	707.238.709.000,00	730.292.086.000,00
4.2.1.9	Dana Alokasi Khusus (DAK)	251.517.532.729,00	219.439.304.000,00	282.808.347.000,00	301.925.542.000,00	312.288.740.000,00	320.560.104.000,00	328.969.837.000,00
4.2.1.9.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.507.941.570,00	35.131.785.000,00	89.809.374.000,00	103.140.327.000,00	111.120.531.000,00	117.309.084.000,00	124.483.056.000,00
4.2.1.9.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	151.009.591.159,00	184.307.519.000,00	192.998.973.000,00	198.785.215.000,00	201.168.209.000,00	203.251.020.000,00	204.486.781.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	50.248.767.395,00	70.403.279.392,00	46.085.177.000,00	49.109.020.000,00	52.723.803.000,00	57.015.179.000,00	58.694.525.000,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	44.102.385.645,00	49.863.261.392,00	36.833.252.000,00	38.870.712.000,00	41.365.233.000,00	44.380.326.000,00	45.420.378.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	6.146.381.750,00	20.540.018.000,00	9.251.925.000,00	10.238.308.000,00	11.358.570.000,00	12.634.853.000,00	13.274.147.000,00



KODE	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		4	5	6	7	8
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.092.801.221,00	19.220.568.000,00	24.599.763.000,00	25.863.752.000,00	27.257.622.000,00	28.795.503.000,00	29.944.096.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	8.707.527.000,00	-	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	6.500.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	16.385.274.221,00	19.220.568.000,00	20.099.763.000,00	20.863.752.000,00	21.757.622.000,00	22.795.503.000,00	23.444.096.000,00
5.	BELANJA DAERAH	1.220.647.580.625,54	1.235.317.919.611,00	1.287.817.471.000,00	1.335.850.170.000,00	1.379.941.428.000,00	1.436.033.499.000,00	1.484.532.164.000,00
5.1.	Belanja Operasi	840.182.701.568,54	908.129.974.839,00	922.261.441.000,00	930.319.472.000,00	948.942.755.000,00	970.340.678.000,00	968.235.545.000,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	504.484.794.838,60	564.953.941.842,00	570.157.252.000,00	574.313.657.000,00	578.982.521.000,00	582.628.729.000,00	587.153.995.000,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.560.788.888,94	289.233.173.062,00	290.602.702.000,00	291.476.973.000,00	280.986.450.000,00	284.244.911.000,00	299.601.932.000,00
5.1.4.	Belanja Subsidi	170.033.701,00	248.101.500,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.1.5.	Belanja Hibah	84.911.484.140,00	53.578.924.435,00	60.872.264.000,00	63.897.386.000,00	88.339.608.000,00	102.829.618.000,00	80.829.618.000,00
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	55.600.000,00	115.834.000,00	129.223.000,00	131.456.000,00	134.176.000,00	137.420.000,00	150.000.000,00
5.2.	Belanja Modal	213.863.167.624,00	155.383.355.772,00	183.423.322.000,00	218.606.487.000,00	238.660.029.000,00	265.321.805.000,00	310.403.199.000,00
5.2.1.	Belanja Tanah	-	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	26.485.740.010,00	24.981.237.345,00	31.752.746.000,00	37.025.330.000,00	42.875.655.000,00	48.414.156.000,00	56.826.279.000,00
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	83.363.710.210,00	68.984.409.979,00	71.279.837.000,00	88.788.721.000,00	92.241.180.000,00	104.557.953.000,00	119.963.748.000,00
5.2.4.	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.692.143.495,00	57.808.101.000,00	73.729.875.000,00	85.972.816.000,00	96.557.271.000,00	105.239.669.000,00	126.200.619.000,00
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.273.573.909,00	3.299.607.448,00	3.343.337.000,00	3.449.367.000,00	3.557.167.000,00	3.615.886.000,00	3.868.998.000,00
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	48.000.000,00	310.000.000,00	317.527.000,00	370.253.000,00	428.756.000,00	494.141.000,00	543.555.000,00
5.3	Belanja Tak Terduga	909.713.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	909.713.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	165.691.998.433,00	161.804.589.000,00	172.132.708.000,00	176.924.211.000,00	182.338.644.000,00	190.371.016.000,00	195.893.420.000,00
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	1.059.337.803,00	1.600.000.000,00	1.700.000.000,00	1.800.000.000,00	1.900.000.000,00	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00



KODE	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3		4	5	6	7	8
5.4.1.1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab./Kota dan Desa	278.470.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00
5.4.1.2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab./Kota Kepada Pemerintah Desa	780.867.803,00	1.200.000.000,00	1.250.000.000,00	1.300.000.000,00	1.350.000.000,00	1.400.000.000,00	1.450.000.000,00
5.4.2.	Transfer Bantuan Keuangan	164.632.660.630,00	160.204.589.000,00	170.432.708.000,00	175.124.211.000,00	180.438.644.000,00	188.371.016.000,00	193.793.420.000,00
5.4.2.1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kab./Kota kepada Desa	61.537.527.630,00	61.357.350.000,00	66.899.265.000,00	68.299.598.000,00	69.692.582.000,00	73.014.687.000,00	74.745.689.000,00
5.4.2.2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kab./Kota kepada Desa	103.095.133.000,00	98.847.239.000,00	103.533.443.000,00	106.824.613.000,00	110.746.062.000,00	115.356.329.000,00	119.047.731.000,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	145.412.121.628,42	47.493.152.611,00	(3.700.000.000,00)	(3.800.000.000,00)	(3.900.000.000,00)	(4.000.000.000,00)	(4.100.000.000,00)
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	148.412.121.628,42	47.493.152.611,00	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	148.412.121.628,42	47.493.152.611,00	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	145.412.121.628,42	47.493.152.611,00	(3.700.000.000,00)	(3.800.000.000,00)	(3.900.000.000,00)	(4.000.000.000,00)	(4.100.000.000,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	95.561.369.771,21	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, maka ditetapkan arah kebijakan Pendapatan Daerah yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tana Toraja;
- b) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- c) Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- d) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, terutama melalui penginventarisasian, pengelolaan dan pendayagunaan aset dan keuangan daerah termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
- e) Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan pemberian kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan secara cepat, mudah dan murah dalam pemungutan pendapatan;
- f) Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), penyempurnaan sistem pungutan melalui peningkatan implementasi Sistem Informasi Online dengan menerapkan e-pajak dan e-retribusi agar terwujud pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- g) Peningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Transfer;
- h) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,

alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2026-2030 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yang diprioritaskan untuk membiayai :

- a) Belanja Wajib dan mengikat terkait urusan rutin dan operasional, serta pemenuhan alokasi pelayanan dasar serta peningkatan ekonomi masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten Tana Toraja;
- b) Pencapaian visi dan misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Program Pembangunan Nasional;
- c) Pemerataan pembangunan yang berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Tana Toraja dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah;
- d) Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah dan fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji serta fungsi infrastruktur pelayanan publik sekurang-kurangnya 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan atau pinjaman daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

2.2.3.3. PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tana Toraja selama 5 (lima) tahun kedepan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

A. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Untuk pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) periode tahun 2026-2030 diproyeksikan rata-rata sebesar minus 26,48 persen. Walaupun mengalami tren yang menurun, nilai SiLPA masih dapat menutupi defisit yang diakibatkan besarnya nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan dibanding dengan nilai pendapatan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2.121

Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	148.412.121.628,42	47.493.152.611,00	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00	(26,48)

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

B. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat periode tahun 2026-2030 dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan rata-rata belanja wajib dan



mengikat pada kurun waktu tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil proyeksi, direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan rata-rata belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam kurun waktu tahun 2026-2030 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 1,63 persen atau rata-rata nilai nominal sebesar Rp. 10,189 miliar lebih pertahun. Untuk mengetahui lebih rinci proyeksi kebutuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.122

Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
A.	Belanja Wajib dan Mengikat	670.176.793.271,60	741.566.838.843,21	742.289.960.000,00	751.237.868.000,00	761.321.165.000,00	772.999.745.000,00	783.047.415.000,00	1,50
1	Belanja Pegawai	504.484.794.838,60	564.953.941.842,00	570.157.252.000,00	574.313.657.000,00	578.982.521.000,00	582.628.729.000,00	587.153.995.000,00	0,77
2	Bagi Hasil Pajak	278.470.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	650.000.000,00	10,21
3	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	780.867.803,00	1.200.000.000,00	1.250.000.000,00	1.300.000.000,00	1.350.000.000,00	1.400.000.000,00	1.450.000.000,00	3,86
4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya/Partai Politik	164.632.660.630,00	160.204.589.000,00	170.432.708.000,00	175.124.211.000,00	180.438.644.000,00	188.371.016.000,00	193.793.420.000,00	3,89
B.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
1	Penyertaan Modal pada BUMD	3.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	673.176.793.271,60	726.758.530.842,00	747.289.960.000,00	756.237.868.000,00	766.321.165.000,00	777.999.745.000,00	788.047.415.000,00	1,63

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025



C. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta belanja wajib dan mengikat maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2026 - 2030 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut diperoleh pertumbuhan rata-rata sebesar 6,65 persen dimana kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2026 sebesar Rp. 545,527 miliar lebih dan meningkat menjadi Rp. 701,484 miliar lebih pada tahun 2030. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2026 - 2030 dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 2.123

Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030

NO	URAIAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
				2026	2024	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan Daerah	1.170.796.828.768,33	1.187.824.767.000,00	1.291.517.471.000,00	1.339.650.170.000,00	1.383.841.428.000,00	1.440.033.499.000,00	1.488.632.164.000,00	4,64
2	Sisa Lebih (riil) Perhitungan Anggaran	148.412.121.628,42	47.493.152.611,00	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00	(26,48)
	TOTAL PENDAPATAN	1.319.208.950.396,75	1.235.317.919.611,00	1.292.817.471.000,00	1.340.850.170.000,00	1.384.941.428.000,00	1.441.033.499.000,00	1.489.532.164.000,00	3,93
	Dikurangi :								
1	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
2	Belanja Wajib dan Mengikat	670.176.793.271,60	726.758.530.842,00	742.289.960.000,00	751.237.868.000,00	761.321.165.000,00	772.999.745.000,00	783.047.415.000,00	1,50
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	646.032.157.125,15	508.559.388.769,00	545.527.511.000,00	584.612.302.000,00	618.620.263.000,00	663.033.754.000,00	701.484.749.000,00	6,65

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

D. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- a) Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah yang dialokasikan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b) Prioritas II, merupakan program pembangunan daerah yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
- c) Prioritas III, merupakan program pembangunan daerah yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.



Tabel 2.124

Baseline Tahun 2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2030

NO	URAIAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	646.032.157.125,15	508.559.388.769,00	545.527.511.000,00	584.612.302.000,00	618.620.263.000,00	663.033.754.000,00	701.484.749.000,00
1	PRIORITAS I	381.158.972.000,00	294.964.445.000,00	283.674.305.000,00	298.152.274.000,00	284.565.320.000,00	298.365.189.000,00	294.623.594.000,00
2	PRIORITAS II	226.111.254.000,00	177.995.786.000,00	218.211.004.000,00	233.844.920.000,00	272.192.915.000,00	291.734.851.000,00	322.682.984.000,00
3	PRIORITAS III	38.761.931.125,15	35.599.157.769,00	43.642.202.000,00	52.615.108.000,00	61.862.028.000,00	72.933.714.000,00	84.178.171.000,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Tana Toraja, diolah 2025

2.2.4. SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tana Toraja dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada APBD. Oleh sebab itu, pemerintah daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah.

2.2.4.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

Pembangunan Kabupaten Tana Toraja selain bersumber dari APBD Kabupaten Tana Toraja, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di kabupaten/kota.

2.2.4.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH NON PEMERINTAH

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha melalui :

A. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri :

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau

5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

B. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah untuk pembiayaan Pembangunan infrastruktur daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
5. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;

8. Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya adalah bersumber dari :

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;
2. Pemerintah daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

C. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarana tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya.

Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan

mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Sub bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan berbagai isu-isu strategis yang bisa mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tana Toraja lima tahun ke depan. Pada gambaran umum kondisi daerah yang telah disajikan pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa masih ada permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan intervensi pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan pada perbedaan/kesenjangan (gap) antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan target yang ditentukan. Berbeda dengan permasalahan, isu strategis besumber dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Tana Toraja, baik berpengaruh positif maupun negatif.

2.3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Identifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun dapat secara efektif mengatasi atau meminimalkan permasalahan yang ada, sehingga solusi yang diterapkan lebih tepat sasaran. Berdasarkan identifikasi kinerja pembangunan yang telah disajikan dalam gambaran umum kondisi Kabupaten Tana Toraja pada Bab II, terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi, antara lain :

A. Belum Optimalnya Tata kelola Pemerintahan yang Belum Terdigitalisasinya Layanan Publik

Kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan anggaran daerah masih menjadi tantangan di Kabupaten Tana Toraja. Meskipun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023 dan diharapkan tahun-tahun selanjutnya juga bisa memperoleh opini tersebut, namun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih belum optimal. Penurunan nilai Monitoring Center for

Prevention (MCP) KPK dalam aspek pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi pajak menunjukkan masih adanya celah dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah. Data dari RKPD 2024 mengindikasikan bahwa Kabupaten Tana Toraja mencatatkan nilai MCP pada aspek Barang Milik Daerah sebesar 35,50 persen, dan Optimalisasi Pajak sebesar 54,46 persen pengawasan APIP sebesar 51,59 persen, yang merupakan nilai terendah dibandingkan aspek lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan dalam pengelolaan hal tersebut agar lebih akuntabel dan transparan.

Birokrasi yang lambat dan kurang efisien dalam pelayanan publik masih menjadi hambatan bagi efektivitas pemerintahan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) memperoleh 56,64 (2024), namun capaian ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun Kabupaten Tana Toraja telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan efektivitas perangkat daerah, implementasinya masih menghadapi hambatan dalam sinkronisasi sistem dan koordinasi lintas perangkat daerah, yang menghambat proses pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan digital di Kabupaten Tana Toraja juga belum optimal. Meskipun Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2024 telah mencapai skor 2,75 dengan predikat Baik, penerapan infrastruktur digital masih belum merata. Selain itu, kurangnya integrasi layanan administrasi pemerintahan dengan aplikasi pendukung lainnya menjadi kendala dalam efektivitas layanan berbasis elektronik.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Kabupaten Tana Toraja telah mengembangkan sistem pengaduan publik berbasis digital, tetapi pemanfaatannya masih belum maksimal. Masyarakat masih kurang terlibat dalam pengawasan kebijakan daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Perlu adanya edukasi dan literasi digital bagi masyarakat agar lebih aktif dalam memberikan masukan serta mengakses layanan digital yang telah disediakan pemerintah.

Minimnya penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam inovasi dan transformasi digital juga menjadi tantangan utama. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tana Toraja mengalami penurunan dari 15,32 pada 2023 menjadi 15,60 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penerapan inovasi di sektor pemerintahan. Untuk meningkatkan efektivitas transformasi digital, perlu dilakukan penguatan kapasitas ASN dalam pemanfaatan teknologi, analisis data, serta integrasi sistem layanan elektronik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tana Toraja masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan transparansi anggaran, efisiensi birokrasi, optimalisasi layanan digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan yang lebih progresif dalam integrasi sistem digital, edukasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas ASN sangat diperlukan untuk mendukung visi Kabupaten Tana Toraja sebagai kota yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif dalam tata kelola pemerintahan.

B. Belum Optimalnya Kualitas SDM yang Mendukung Daya Saing dan Keberlanjutan Budaya Daerah

Kesehatan Ketimpangan layanan kesehatan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Tana Toraja, terutama dalam distribusi tenaga medis dan akses layanan keluarga. Selain itu, angka stunting pada tahun 2023 tercatat sebesar 36,9 persen dan diharapkan setelah dilakukan survey SSGI pada akhir tahun 2024 oleh kementerian kesehatan angka prevalensi stunting di Tana Toraja dapat menurun, walaupun masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen. Meskipun demikian, intervensi pemerintah daerah tetap diperlukan untuk menekan angka stunting lebih jauh guna memastikan generasi mendatang mendapatkan nutrisi yang cukup. Program penanganan stunting juga masih menghadapi kendala di beberapa kelurahan/Lembang yang mengalami keterbatasan anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Oleh karena itu, perlu adanya penguatan program pemberian gizi tambahan yang berkelanjutan, dengan



memastikan distribusi yang merata dan peningkatan pendanaan bagi wilayah-wilayah yang masih memiliki angka stunting tinggi. Di sisi lain, cakupan layanan kesehatan lansia dan pekerja rentan meningkat signifikan hingga mencapai telah melakukan kerjasama dengan BPJS Tenaga kerja untuk meningkatkan menjadi 10.000 tenaga kerja rentan yang di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. hal mencerminkan keberhasilan program pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Pengembangan budaya dan pariwisata daerah di Tana Toraja menjadi Permasalahan dalam lima tahun ke depan karena masih banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi daya tarik kunjungan ke Kabupaten Tana Toraja. Pencapaian pengelolaan kebudayaan yang belum optimal terutama dalam pengembangan obyek pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, peningkatan daya tarik Wisata dan pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan sangat berpeluang untuk ditingkatkan mengacu pada kekayaan potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Tana Toraja.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga mengalami peningkatan hal ini sangat jauh dari Falsafah Budaya hidup orang Toraja dimana Falsafah Tallu Lolona yaitu Lolo Tau, Lolon Tananan, Lolo Patuoan. Lolo Tau dijadikan yang pertama karena bagaimana menghargai sesama manusia, berdasarkan data dari Polres Tana Toraja kasus Kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak 70 kasus dengan rincian kejahatan terhadap anak 49 kasus dan kejahatan terhadap perempuan 21 kasus. Kondisi ini mengindikasikan perlunya edukasi gender yang lebih masif serta penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Optimalisasi peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) serta peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan harus menjadi prioritas kebijakan untuk menekan angka kasus tersebut.

Selain itu, pemanfaatan layanan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) masih belum maksimal, sehingga perlu adanya penguatan sistem rujukan dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal fasilitas kesehatan tingkat pertama, Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 mempunyai Lima Belas (15) dan pada tahun 2024 mengalami penambahan menjadi 17 (Tujuh belas) puskesmas yang

menyediakan layanan rawat inap dari 22 Puskesmas yang ada di Tana Toraja. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas serta sarana dan prasarana puskesmas menjadi kebutuhan mendesak untuk tetap mendukung program UHC di Kabupaten Tana Toraja.

Upaya pengembangan layanan kesehatan juga harus diperluas dengan peningkatan kapasitas Rumah Sakit Lakipadada guna memberikan pelayanan yang lebih komprehensif bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan layanan kesehatan berbasis teknologi, seperti program Halo Dokter atau Dokter Keluarga, perlu diperluas agar dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam menangani keluhan kesehatan minor secara cepat dan efisien. Terdapat pula 144 jenis penyakit yang tidak dapat dicover oleh BPJS di rumah sakit, tetapi hanya bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga penguatan layanan kesehatan primer menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam sektor pendidikan, angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 9,06 persen dan perempuan 8,52 persen. Angka Harapan lama sekolah juga menjadi perhatian, berdasarkan jensi kelamin pada tahun 2024 adalah 14,10 persen untuk laki-laki dan 14,37 persen untuk perempuan. Akses terhadap pendidikan berkualitas serta ketersediaan tenaga pendidik di beberapa wilayah masih belum merata, yang berkontribusi terhadap ketimpangan kualitas pendidikan di Kabupaten Tana Toraja.

Ketidaksesuaian keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri semakin memperparah kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tana Toraja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 mencapai 3,98 persen. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan program pelatihan vokasi, magang industri, dan wirausaha mandiri guna meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif.

C. Belum Meratanya ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung Konektivitas wilayah

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi



daerah. Namun, hingga tahun 2024, pemerataan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kemantapan jalan di Tana Toraja hanya 60,70 persen, sementara sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Konektivitas antarwilayah, khususnya dari pusat kota Makale menuju kecamatan-kecamatan yang terpencil di wilayah Barat, masih menghadapi berbagai hambatan. Akses jalan ke wilayah Simbuang dan Mappak misalnya, masih didominasi jalan tanah dan jalan berbatu, yang tidak dapat dilalui kendaraan secara optimal pada musim hujan. Hal ini berdampak pada keterbatasan mobilitas penduduk dan distribusi barang dan jasa, termasuk logistik pangan dan layanan kesehatan. Dalam konteks perencanaan wilayah, belum optimalnya konektivitas juga menyebabkan distribusi pembangunan cenderung terpusat di kawasan perkotaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Indeks Pembangunan Wilayah (IPW) Kabupaten Tana Toraja menunjukkan nilai 0,476, mencerminkan ketimpangan antar kecamatan masih tinggi. Wilayah dengan IPW rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dan akses infrastruktur yang lebih rendah.

Kondisi infrastruktur jembatan juga memperlihatkan tantangan yang cukup signifikan. Dari total 118 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten, sekitar 24 persen di antaranya memerlukan rehabilitasi karena mengalami kerusakan struktural akibat usia bangunan atau bencana alam. Kondisi ini memperburuk akses masyarakat antarwilayah, terutama bagi pelajar dan petani yang sangat bergantung pada infrastruktur tersebut untuk kegiatan sehari-hari.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi juga belum merata. Cakupan pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan PDAM baru menjangkau sekitar 38 persen rumah tangga di Tana Toraja. Di beberapa wilayah pedalaman, masyarakat masih mengandalkan sumber air dari sungai dan mata air yang belum teruji kualitasnya. Sementara itu, cakupan sanitasi layak baru mencapai 63 persen, yang menunjukkan masih banyak warga yang belum memiliki akses ke jamban sehat, terutama di wilayah pegunungan dan perbukitan.

Konektivitas digital juga menjadi tantangan dalam era transformasi digital saat ini. Berdasarkan data Dinas Kominfo Tana Toraja, dari total 159 desa dan kelurahan, masih ada desa masih belum memiliki akses internet yang stabil. Ketimpangan ini menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan layanan publik berbasis digital, pembelajaran daring, serta pengembangan ekonomi digital di kalangan UMKM dan petani milenial.

Sektor transportasi publik juga belum berkembang secara optimal. Saat ini, hanya terdapat 3 trayek angkutan umum tetap yang beroperasi di wilayah perkotaan, sementara akses angkutan ke kecamatan dan desa masih bergantung pada kendaraan pribadi atau ojek. Hal ini meningkatkan biaya logistik dan menghambat konektivitas ekonomi antarwilayah, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah merespons kondisi tersebut dengan mengalokasikan belanja infrastruktur didalam APBD setiap tahunnya. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan jalan strategis, pembangunan jembatan penghubung antardesa, serta revitalisasi infrastruktur irigasi. Salah satu proyek prioritas adalah lanjutan pembangunan jalan poros Makale-Simbuang, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat kabupaten.

Namun, tantangan pendanaan masih menjadi kendala dalam pemerataan infrastruktur. Dari kebutuhan investasi infrastruktur yang diperkirakan mencapai Rp 1,1 triliun untuk lima tahun ke depan, baru sekitar 32 persen yang dapat dipenuhi dari APBD dan dana transfer pusat. Oleh karena itu, sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pembukaan ruang investasi swasta menjadi strategi yang perlu diperkuat. Mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga mulai dipertimbangkan untuk pembangunan infrastruktur strategis, seperti terminal terpadu dan sentra logistik

Selain keterbatasan fisik, aspek perencanaan dan koordinasi lintas sektor juga perlu diperbaiki. Integrasi antara rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana teknis sektoral masih belum optimal. Akibatnya, beberapa proyek infrastruktur tidak selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat atau terkendala perizinan lahan. Peningkatan kapasitas

kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan.

Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Kabupaten Tana Toraja tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan sosial. Dengan strategi pembangunan yang lebih terarah, kolaboratif, dan partisipatif, diharapkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah dapat ditingkatkan secara signifikan, guna mendukung visi Tana Toraja sebagai kabupaten yang Produktif, Maju, dan Berkelanjutan pada tahun 2045.

D. Belum Signifikannya Pengurangan Kemiskinan dan Belum Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun capaian tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2023 masih berada di angka 12,46 persen dan pada tahun 2024 berada di angka 10,65 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada kisaran 8,70 persen. Ketimpangan pendapatan juga masih menjadi tantangan, tercermin dari nilai Gini Ratio sebesar 0,367, yang menunjukkan kesenjangan antar kelompok pendapatan cukup lebar. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan belum menjangkau kelompok rentan secara merata.

Dari sisi ketahanan pangan, Kabupaten Tana Toraja masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan ekologis. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sekitar 9,2 persen rumah tangga masih tergolong dalam kategori rawan pangan. Meskipun kabupaten ini memiliki potensi lahan pertanian yang luas, sekitar 47,3 persen dari total luas wilayah, tantangan berupa keterbatasan akses irigasi, perubahan iklim, dan rendahnya produktivitas lahan menyebabkan produksi pangan belum mampu menjamin ketersediaan pangan yang merata sepanjang tahun. Selain itu, ketergantungan terhadap komoditas tertentu seperti padi dan kopi membuat sistem pangan lokal kurang diversifikasi.



Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, terutama di sektor pertanian dan UMKM, menjadi prioritas yang mendesak. Saat ini, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tana Toraja masih cukup besar, namun sebagian besar pelaku usaha tani masih beroperasi dalam skala kecil dengan akses terbatas terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar. Program pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, serta kemitraan berbasis koperasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga miskin.

Di sisi lain, intervensi pemerintah daerah dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan perlu lebih terintegrasi. Peningkatan cadangan pangan daerah, pemanfaatan pekarangan produktif, serta pengembangan pertanian berbasis agroekologi masih belum optimal diterapkan. Saat ini, hanya sekitar 35 persen desa di Tana Toraja yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), yang menunjukkan lemahnya sistem penyimpanan dan distribusi pangan lokal. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini untuk menghadapi kerawanan pangan akibat bencana atau krisis harga belum berjalan maksimal.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dibutuhkan sinergi lintas sektor serta kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), integrasi program perlindungan sosial, serta penguatan kelembagaan pangan desa menjadi kunci dalam mempercepat pengurangan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh. Dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang berbasis bukti, Kabupaten Tana Toraja dapat mencapai target pengurangan kemiskinan di bawah 10 persen dan meningkatkan status ketahanan pangan secara signifikan dalam lima tahun ke depan.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem distribusi yang adil, transparan, dan berkelanjutan demi kedaulatan pangan nasional dan dapat membantu dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Tana Toraja.

E. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Tarik Investasi

Keterbatasan akses pasar masih menjadi tantangan utama bagi UMKM Kabupaten Tana Toraja, meskipun jumlah usaha mikro yang terdaftar berdasarkan jenis ijin yang di terbitkan pada Dinas PTSP pada 2024 sebanyak 2.344 unit. Namun, peningkatan omzet belum semuanya terjadi pada UMKM tersebut, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha masih kesulitan memperluas jangkauan pasar. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya integrasi dengan pasar modern dan digital, serta keterbatasan permodalan akibat tingginya tingkat Non-Performing Loan (NPL) dalam program kredit usaha. Hal ini menghambat pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian Kabupaten Tana Toraja.

Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tana Toraja tercatat sebesar 76,41 persen pada 2024. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor perdagangan dan jasa berkontribusi terhadap rendahnya angka partisipasi tenaga kerja di sektor formal. Stabilitas ekonomi lokal serta peran signifikan UMKM dalam menyerap tenaga kerja turut memberikan kontribusi dalam menjaga keseimbangan ketenagakerjaan.

Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar 22,30 persen di ikuti oleh perdagangan dan jasa memberikan kontribusi sebesar 20,40 persen terhadap PDRB, menunjukkan rendahnya diversifikasi ekonomi daerah. Oleh karena itu, strategi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri kreatif, teknologi, dan pariwisata perlu dioptimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dari sisi identitas daerah, hingga kini belum memiliki ikon resmi yang mencerminkan identitasnya sebagai kota pariwisata dan sejarah. Pengembangan landmark kota dapat memperkuat citra Tana Toraja di tingkat nasional dan global. Kabupaten Tana Toraja memiliki beberapa destinasi wisata unggulan yang mencakup wisata religi, alam, dan buatan, seperti Patung Kristus Raja Di Buntu Burake dan Ollon. Ruang publik seperti Kolam Makale dan Pasar Seni terus berkembang, sementara wisata belanja dan kuliner belum menjadi daya tarik utama. Namun, potensi wisata ini belum dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan

meningkatkan daya tarik wisatawan. Oleh karena itu, perencanaan yang lebih strategis dalam pengelolaan destinasi wisata dan ekowisata berbasis budaya serta sejarah menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kabupaten Tana Toraja.

Selain ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata dan pertanian, Kabupaten Tana Toraja juga menghadapi permasalahan lain yang menghambat pertumbuhan ekonominya. Ketidaksesuaian keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri juga memperlambat serapan tenaga kerja, yang berimbas pada produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Banyaknya tenaga kerja dengan skill rendah yang memilih untuk mencoba peruntungan di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Rendahnya daya saing industri lokal serta minimnya transformasi ekonomi berbasis inovasi dan industri hijau semakin memperparah tantangan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mendorong insentif investasi di sektor industri kreatif dan teknologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan industri yang dinamis.

F. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Kabupaten Tana Toraja memiliki kondisi geografis yang unik dan rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, dan kekeringan. Namun, pengelolaan lingkungan hidup dan upaya mitigasi bencana masih belum optimal. Berdasarkan data BPBD Tana Toraja, selama tahun 2023 tercatat 87 kejadian bencana alam, dengan tanah longsor sebagai jenis bencana paling dominan yang terjadi di 46 titik. Hal ini menunjukkan kerentanan lingkungan yang tinggi, terutama di kawasan perbukitan dan wilayah dengan tingkat kerusakan hutan yang signifikan.

Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, pembukaan hutan untuk pertanian, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi turut memperburuk kondisi ini. Data dari Dinas Lingkungan Hidup mencatat bahwa sekitar 2.413 hektar hutan lindung mengalami degradasi sedang hingga berat. Laju deforestasi di wilayah Tana Toraja mencapai 0,9 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata provinsi yang hanya 0,6 persen. Hal ini menyebabkan berkurangnya kapasitas daya dukung lingkungan dalam menyerap air dan menahan erosi tanah.

Sistem pengelolaan sampah juga menjadi permasalahan yang belum tertangani secara maksimal. Dari total 78.542 ton timbulan sampah rumah tangga per tahun, hanya sekitar 37 persen yang berhasil terkelola melalui sistem pengangkutan dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sisanya masih dibuang sembarangan ke sungai, jurang, atau dibakar, yang berkontribusi terhadap pencemaran udara dan air. TPA Tana Malia yang menjadi lokasi utama pembuangan sampah saat ini telah melebihi kapasitas tampung sebesar 120 persen, sehingga mendesak untuk direvitalisasi atau digantikan dengan sistem pengelolaan yang lebih modern.

Dari sisi kualitas air, pencemaran badan air semakin meningkat. Sungai-sungai besar seperti Sungai Sa'dan mengalami penurunan kualitas berdasarkan parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Total Suspended Solid (TSS). Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air tahun 2023, 60 persen titik pantau sungai menunjukkan status tercemar ringan hingga sedang. Pencemaran ini berasal dari limbah domestik dan aktivitas pertanian tanpa pengolahan limbah yang memadai.

Kondisi tata ruang dan perizinan pembangunan juga belum sepenuhnya memperhatikan aspek lingkungan. Banyak pemukiman dan bangunan publik masih berada di zona rawan bencana, terutama di bantaran sungai dan lereng curam. Berdasarkan kajian risiko bencana BPBD, sekitar 23.000 jiwa atau 11,4 persen populasi tinggal di wilayah yang tergolong sangat rawan longsor. Hal ini menunjukkan rendahnya penerapan prinsip mitigasi bencana dalam pengendalian tata ruang dan pembangunan.

Upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan masih sangat terbatas. Luas lahan kritis yang sudah direhabilitasi melalui program penghijauan belum maksimal selama lima tahun terakhir, sementara luas lahan kritis di kabupaten ini diperkirakan cukup besar. Rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya alokasi anggaran lingkungan menjadi penyebab lambannya pemulihan kawasan ekosistem yang rusak.

Program mitigasi bencana seperti pembentukan desa tangguh bencana juga belum menjangkau seluruh wilayah rawan. Hingga akhir 2024, belum cukup setengah dari desa dari 159 desa/kelurahan yang telah memiliki status Desa Tangguh Bencana (Destana). Keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, dan sarana prasarana



kebencanaan menjadi tantangan utama dalam memperluas cakupan program ini. Di sisi lain, sistem peringatan dini bencana masih bersifat manual dan belum didukung teknologi pemantauan yang memadai.

Kualitas udara dan pemantauan emisi juga belum menjadi perhatian utama. Meskipun aktivitas pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan pembakaran biomassa meningkat, Tana Toraja belum memiliki sistem pemantauan kualitas udara berbasis sensor. Hal ini menyulitkan pengawasan terhadap polusi dan potensi gangguan kesehatan masyarakat akibat udara tercemar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk prevalensi penyakit pernapasan dan menurunkan indeks kualitas lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan prioritas penguatan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana dengan target-target strategis. Di antaranya adalah penurunan luas lahan kritis sebesar 10 persen, peningkatan cakupan pengelolaan sampah menjadi 50 persen, serta peningkatan jumlah desa tangguh bencana menjadi 40 desa. Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas lembaga lingkungan hidup, BPBD, dan integrasi data spasial risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan.

Namun demikian, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta dukungan pemerintah pusat dan provinsi. Pendekatan berbasis ekosistem, penguatan edukasi lingkungan di sekolah, serta pengembangan ekonomi hijau seperti ekowisata dan pertanian berkelanjutan perlu dikedepankan. Dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam dan keselamatan masyarakat, Kabupaten Tana Toraja dapat mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan aman dari bencana. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Toraja masih belum optimal, dengan peningkatan timbulan sampah yang signifikan setiap tahunnya. Dengan TPA yang masih open dumping pengelolaan sampah masih menghadapi kendala kapasitas TPA yang hampir penuh. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang sampah menyebabkan belum maksimalnya sampah yang didaur ulang, sementara mayoritas masih dibuang ke TPA tanpa pengolahan lanjutan. Kabupaten Tana Toraja belum memiliki bank sampah dan 1 TPS3R di Lokasi



TPA, kondisi ini yang membuat Kabupaten Tana Toraja belum mampu mengoptimalkan sistem daur ulang sampah berbasis ekonomi sirkular untuk mengurangi volume yang berakhir di TPA.

Kabupaten Tana Toraja menghadapi berbagai ancaman bencana perkotaan, termasuk banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan kekeringan. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana 2023, masih cukup luas area terdampak bencana. Tanpa mitigasi yang optimal, risiko ini dapat merusak infrastruktur, menghambat perekonomian, dan meningkatkan jumlah korban jiwa. Kabupaten Tana Toraja juga mengalami tingginya risiko bencana akibat banjir, tanah longsor, dan kebakaran di beberapa wilayah rawan, yang diperburuk oleh minimnya sistem peringatan dini bencana dan kapasitas respons tanggap darurat. Risiko tanah longsor cukup tinggi di beberapa Kecamatan yang memiliki tingkat kemiringan lahan, terutama di kawasan perbukitan.

Belum optimalnya penerapan teknologi mitigasi bencana, termasuk sistem peringatan dini berbasis teknologi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam dan iklim ekstrem, masih menjadi kendala dalam pengurangan dampak bencana di Kabupaten Tana Toraja. Sistem drainase masih mengalami tantangan, terutama dalam penanganan genangan air selama musim hujan yang berulang di beberapa titik perkotaan.

Tantangan lain yang dihadapi Kabupaten Tana Toraja adalah kurangnya kebijakan dan regulasi yang mendorong partisipasi swasta dalam pengelolaan sampah dan mitigasi bencana, sehingga peluang investasi dalam solusi lingkungan belum maksimal. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama mengingat timbulan sampah yang meningkat dari tahun ke tahun. Kapasitas TPA yang hampir penuh berisiko mengalami overcapacity dalam waktu dekat jika tidak ada solusi pengelolaan sampah yang lebih baik dan inovatif.

2.3.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang. Selain dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Tana Toraja diidentifikasi melalui berbagai pertimbangan di antaranya dengan mempertimbangkan (1). Dinamika internasional, nasional dan regional, serta tujuan pembangunan berkelanjutan yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tana Toraja; (2). Kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tana Toraja; (3). Kebijakan pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Tana Toraja; (4). Potensi Daerah; dan (5). Isu didalam KLHS.

A. Demografi Global

Krisis global yang berkepanjangan telah memperburuk ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ketimpangan layanan kesehatan menjadi semakin nyata, terutama di negara berkembang. Di sisi lain, perubahan sistem pendidikan berbasis teknologi berisiko mengesampingkan peran pendidikan informal dan memperlebar jurang digital. Urbanisasi pesat menambah tekanan terhadap infrastruktur sosial dasar, memperkuat urgensi model pembangunan komunitas yang adaptif dan partisipatif. Gerakan kota inklusif dan penguatan peran komunitas menjadi solusi penting dalam mengatasi ketimpangan ini secara berkelanjutan.

B. Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim

Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi bencana , memperparah krisis lingkungan seperti eksploitasi air tanah, penurunan kualitas lingkungan, serta krisis sampah plastik dan limbah industri. Dunia merespons dengan kebijakan ambisius seperti net-zero emissions, standarisasi ruang terbuka hijau, dan dorongan terhadap sanitasi berkelanjutan. Namun, implementasi di tingkat lokal dan regional masih

menjadi tantangan. Diperlukan sinergi kebijakan dan penguatan kapasitas untuk menghadapi tantangan ini secara sistematis.

C. Penguatan Layanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pemerintah terus mendorong reformasi sistem kesehatan nasional serta penyediaan layanan sanitasi yang merata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam bidang pendidikan, masih terdapat tantangan berupa kurangnya regulasi insentif bagi tenaga pendidik non-formal, serta belum optimalnya kebijakan penguatan vokasi dan pendidikan keterampilan. Untuk mengatasi kesenjangan digital, program nasional peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu beradaptasi di era digital. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan perangkat masyarakat di tingkat nasional sebagai bagian dari peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan.

Rumah sakit daerah dan Fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama di wilayah seperti Kabupaten Tana Toraja perlu dioptimalisasi untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan merata. Peningkatan kapasitas kader kesehatan sangat penting, khususnya dalam intervensi stunting, yang menjadi isu kesehatan utama. Selain itu, sistem perlindungan sosial berbasis daerah perlu diperkuat untuk menjamin keamanan sosial masyarakat, terutama kelompok rentan. Pemerataan layanan publik yang cepat dan responsif menjadi keharusan guna mengurangi kesenjangan antar wilayah

D. Pembangunan Wilayah dan Kota Berbasis Budaya, Inklusi dan Keberlanjutan

Pemerintah pusat menempatkan Tana Toraja didalam RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV fokusnya Pengembangan Kota Kecil. Pengembangan kota heritage dan wisata berbasis sejarah sebagai strategi memperkuat identitas budaya. Kebijakan nasional pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengarusutamaan kota inklusif mencerminkan arah pembangunan yang mengedepankan aksesibilitas dan keberagaman. Program Dana Kelurahan juga menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berbasis komunitas dan transparansi anggaran di tingkat lokal.

E. Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur harus berbasis pada perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menunjang konektivitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan sarana sanitasi di daerah tertinggal dan peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan.

F. Kesenjangan Gender dalam Pembangunan SDM yang Berbudaya

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan karena masih terdapat ketimpangan di wilayah perkotaan dan pedesaan di kabupaten Tana Toraja dalam akses layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Di sektor pendidikan, masih terdapat keterbatasan dalam akses ke pendidikan berkualitas, rendahnya literasi digital, serta kurangnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi industri berbasis teknologi. Selain itu, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengindikasikan perlunya penguatan sistem perlindungan sosial dan regulasi yang lebih ketat untuk menjamin hak dan keselamatan kelompok rentan.

Dalam konteks lokal yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai budaya, pemberdayaan perempuan dan laki-laki secara setara menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Perempuan Toraja memiliki peran sosial dan budaya yang signifikan, namun dalam ranah pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan, masih terdapat kesenjangan partisipasi. Oleh karena itu, penting untuk mendorong akses pendidikan yang merata, pelatihan keterampilan, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan, pembangunan SDM di Toraja tidak hanya akan lebih berkualitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur budaya setempat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan harmoni sosial.

Kesetaraan akses bagi anak laki-laki dan perempuan perlu dijamin, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tantangan seperti putus sekolah karena pernikahan dini, beban domestik yang tinggi pada anak perempuan, dan stereotip gender masih perlu diatasi dengan pendekatan budaya yang sensitif. Peran aktif orang

tua, sekolah, serta tokoh adat dalam mendukung kesetaraan pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan yang setara akan membentuk generasi Toraja yang memiliki nilai budaya kuat, namun juga terbuka terhadap perubahan dan kemajuan, sekaligus memastikan potensi anak-anak, tanpa memandang jenis kelamin, berkembang secara optimal.

Dalam bidang kesehatan, kesetaraan gender juga harus tercermin dalam pembangunan infrastruktur, distribusi tenaga kesehatan, serta penyediaan alat kesehatan yang memadai dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki. Perempuan yang berdaya secara ekonomi dan sosial dapat menjadi agen perubahan dalam keluarga dan masyarakat, mendorong pola asuh yang lebih baik, serta memperkuat ketahanan sosial. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan afirmatif, seperti program pelatihan keterampilan berbasis gender, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, serta penguatan peran perempuan dalam kewirausahaan dan pemerintahan desa. Selain itu, pelibatan tokoh adat dan agama sangat penting untuk memastikan bahwa pendekatan pembangunan berperspektif gender tetap sejalan dengan nilai-nilai budaya Toraja. Kesetaraan gender bukan hanya tujuan, tetapi juga sarana untuk menciptakan SDM yang unggul, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Di banyak wilayah terpencil di Tana Toraja, masih terdapat keterbatasan fasilitas kesehatan dasar, seperti puskesmas yang kurang lengkap dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama perempuan hamil dan anak-anak. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah tertentu juga menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan yang nyaman dan sensitif terhadap isu-isu gender, termasuk kesehatan reproduksi. Alat kesehatan yang tersedia pun sering kali belum memenuhi standar pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pendekatan budaya lokal dalam pembangunan layanan kesehatan yang inklusif dan adil gender. Pelibatan masyarakat, khususnya perempuan, dalam perencanaan dan pengelolaan layanan kesehatan akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam layanan kesehatan akan

menjadi salahsatu pondasi utama bagi terwujudnya SDM yang sehat, cerdas, produktif, dan berbudaya di Tana Toraja.

G. Penguatan Ketahanan Pangan dan Daya Saing Ekonomi

Terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menghadapi dinamika perubahan iklim dan tekanan global terhadap sistem pangan. Kabupaten Tana Toraja di beberapa kecamatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup untuk menopang kemandirian pangan, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan produktif, minimnya akses teknologi pertanian modern, serta rendahnya efisiensi dalam rantai distribusi hasil pertanian. Ketergantungan pada komoditas tertentu juga membuat daerah ini rentan terhadap fluktuasi harga dan gagal panen. Untuk itu, diversifikasi pertanian, penguatan kapasitas petani, serta pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan gudang penyimpanan sangat diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal akan memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan serta mendukung ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Toraja secara keseluruhan.

Daya saing ekonomi lokal di Kabupaten Tana Toraja juga sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi khas dan sumber daya lokal yang dimiliki. Sektor pariwisata budaya yang kuat, produk kopi Toraja yang sudah dikenal secara internasional, serta kerajinan tangan tradisional adalah aset penting yang bisa dikembangkan untuk memperkuat posisi ekonomi daerah. Namun, masih terdapat tantangan seperti terbatasnya akses pasar, lemahnya kapasitas kewirausahaan masyarakat, serta belum optimalnya dukungan infrastruktur dan digitalisasi UMKM. Penguatan ekosistem kewirausahaan lokal, pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi, serta promosi dan branding produk unggulan daerah harus menjadi prioritas kebijakan. Dengan strategi yang tepat, Tana Toraja dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokalnya, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap pusat-pusat ekonomi regional seperti Makassar, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat setempat.

H. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah permasalahan transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dan semakial digital dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif, inklusif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme koreksi antar aktor dapat dioptimalkan. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya langkah transformatif dalam mewujudkan collaborative governance, juga pada proses untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Rasa aman dan keadilan untuk semua yang diperoleh oleh masyarakat kabupaten Tana Toraja pun menjadi bagian dari Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Kabupaten Tana Toraja dalam pembangunan lima tahun kedepan.

I. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tana Toraja yang masih diatas dua digit menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Sesuai dengan Isu di dalam KLHS pun Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan

usaha mikro dan kecil. 3) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu database yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

J. Pariwisata dan Pertanian sebagai Faktor Unggulan

Kabupaten Tana Toraja terus mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah. Dalam sektor pariwisata, Tana Toraja dikenal dengan kekayaan budaya dan keindahan alamnya, seperti Buntu Burake, Ollon dan beberpa, yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp290 miliar untuk pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, termasuk akses jalan ke destinasi wisata dan pengembangan Bandara Buntu Kunik (BBK) . Upaya ini bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang sempat menurun akibat pandemi, namun mulai menunjukkan tren positif dengan 480.631 wisatawan pada tahun 2022.

Di sektor pertanian, masyarakat di Tana Toraja belum secara maksimal memanfaatkan lahan tidur untuk mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, potensi hortikultura seperti cabai katokkon sebagai unggulan, bawang, dan kentang terus dikembangkan dengan dukungan pemerintah pusat, propinsi dan pihak swasta, termasuk bantuan benih dan pelatihan bagi petani muda . Kopi Toraja, baik varian Arabika maupun Robusta, telah dikenal di pasar internasional dan menjadi komoditas unggulan yang mendukung ekspor daerah. Sinergi antara pengembangan pariwisata dan pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. VISI DAN MISI

3.1.1.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut bersumber dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Tana Toraja Tahun 2025-2045.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu :

“Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya”

Rumusan Visi ini merupakan arah besar yang merefleksikan harapan dan komitmen pemerintah Tana Toraja untuk membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai luhur budaya. Selain itu, visi ini memberi penekanan bahwa semua warga Tana Toraja mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, semua kebutuhan pokok warga Tana Toraja terpenuhi dengan harga-harga yang terjangkau, dan mendapatkan akses permodalan yang mudah serta pekerjaan layak untuk semua dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Secara garis besar, visi di atas mengandung tiga pokok visi, yaitu :



1. Tana Toraja Maju

Suatu kondisi dimana Daerah menunjukkan kemandirian yang bertumpu pada potensi sumber daya yang dimiliki, namun tetap mengembangkan kerjasama dan menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya diarahkan pada terwujudnya kemajuan ekonomi dengan mendorong sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri kreatif dan pariwisata berbasis budaya, dan memastikan bahwa pelestarian alam dan budaya lokal tetap menjadi prioritas utama.

2. Tana Toraja Berdaya Saing

Suatu kondisi dimana masyarakat Tana Toraja semakin berdaya saing karena memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas yang ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan (litbang), serta inovasi sehingga mampu memberi solusi baru dalam pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan memanfaatkan teknologi dan riset, Tana Toraja diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk lokal, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Nilai Budaya

Suatu kondisi dimana masyarakat Tana Toraja mampu menyikapi dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya yang ada, sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Nilai-nilai budaya lokal seperti adat istiadat, seni, tradisi, dan kearifan lokal harus terus dijaga dan dikembangkan untuk memperkuat identitas dan mempererat hubungan sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat menjaga kelestarian warisan leluhur, menciptakan rasa kebanggaan, serta memperkuat solidaritas dalam komunitas. Selain itu, nilai-nilai ini juga menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor ekonomi, terutama pariwisata, yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga martabat manusia. Salah satu kearifan lokal Masyarakat Tana Toraja adalah Tana Toraja Masero. Secara harafiah, masero berarti bersih, yaitu bersih perumahan, bersih lingkungan dan bersih



wilayah. Secara filosofis, Masero juga berarti Masyarakat besar dan mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran budaya.

Untuk memperkuat pencapaian visi tersebut, ditetapkan tagline pembangunan daerah yakni TANA TORAJA MASERO, yang merupakan akronim dari enam prinsip pembangunan daerah yaitu Maju Mandiri, Aman, Sehat Sejahtera, Ekologis, Religius, dan Optimis. Tagline ini menjadi bentuk konkret dan operasionalisasi dari visi besar yang ingin dicapai, sekaligus menjadi arah kebijakan yang berakar pada realitas dan potensi khas Tana Toraja.

Konsep Maju Mandiri berkaitan erat dengan aspek "maju" dalam visi, yaitu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemandirian menjadi kunci agar masyarakat tidak tergantung, melainkan mampu berdiri sendiri melalui penguatan potensi lokal seperti swasembada pangan, energi terbarukan, pengembangan ekonomi kreatif serta transformasi menuju ekonomi hijau dan biru. Hal ini menciptakan daya saing yang berbasis pada sumber daya dan inovasi lokal.

Selanjutnya, prinsip Aman menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi dan pariwisata yang kondusif. Keamanan yang tinggi, masyarakat yang rukun, serta pelayanan publik yang berkualitas akan meningkatkan daya tarik Tana Toraja sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Ini merupakan wujud dari "berdaya saing" yang disebut dalam visi, karena daerah yang aman dan tertib adalah daya tarik tersendiri bagi investor maupun wisatawan.

Sehat Sejahtera memperkuat aspek kesejahteraan sosial, melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat, pengelolaan kebersihan, dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor kewirausahaan dan industri kreatif. Hal ini menciptakan masyarakat yang kuat secara fisik dan ekonomi, serta mampu bersaing dalam dinamika global.

Ekologis menjadi manifestasi dari nilai budaya dan kearifan lokal yang menghargai alam sebagai bagian dari kehidupan. Prinsip Tallulolona - manusia, hewan, dan tumbuhan - menjadi panduan dalam menjaga harmoni antara pembangunan dan lingkungan. Inilah keunikan Tana Toraja yang menjadi keunggulan tersendiri dalam

bersaing secara berkelanjutan.

Nilai Religius memperkuat dimensi spiritual dan sosial masyarakat Toraja. Dengan tetap memelihara nilai keagamaan dan menjaga toleransi antarumat beragama, Tana Toraja menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Nilai budaya Toraja yang menjunjung tinggi adat istiadat dan toleransi menjadi pondasi kuat untuk pembangunan yang inklusif.

Akhirnya, prinsip Optimis mendorong semangat, mentalitas positif, dan keseimbangan jiwa dalam menghadapi tantangan zaman. Optimisme adalah kekuatan tak kasat mata yang mendorong masyarakat untuk terus maju, kreatif, dan inovatif dalam mencapai visi besar daerah.

Dengan demikian, TANA TORAJA MASERO bukan sekadar slogan, tetapi adalah representasi nilai-nilai dan strategi nyata dalam mewujudkan Tana Toraja yang Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya.

Tabel 3.1
Penyelarasan Visi RPJMD Kab. Tana Toraja, RPJMD Prov. Sulsel dan RPJMN
Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2025-2029	Visi RPJMN Tahun 2025-2029
(1)	(2)	(3)
Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya	Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter	Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

3.1.1.2. MISI

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi kabupaten Tana Toraja disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan *“Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya”*, maka ditetapkan 6 (enam) Misi yang disebut sebagai *“Annan Lalan Kameloan”* sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital;



2. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dari Desa secara merata;
4. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan;
5. Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis Pertanian, UMKM dan Pariwisata;
6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan pokok-pokok visi dan misi RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Tana Toraja Tahun 2025 - 2029

No	Pokok-Pokok Visi	Misi
(1)	(2)	(3)
1.	Tana Toraja Maju	(3) Melanjutkan pembangunan infrastruktur dari Desa secara merata;
		(4) Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan;
		(5) Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis Pertanian, UMKM dan Pariwisata;
		(6) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
2.	Tana Toraja Berdaya saing	(1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital;
		(2) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya;
3.	Nilai Budaya	(2) Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya;

Penjelasan masing-masing misi sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.3

Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029

No	Misi	Penjelasan Misi
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital	Mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap aspek penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan transformasi digital, layanan publik didigitalisasi sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, serta pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi.
2.	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya;	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas agar masyarakat selalu dalam kondisi prima, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan guna menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan mampu bersaing, serta pemberdayaan ekonomi untuk mendukung produktivitas dan kemandirian finansial. Selain itu, penguatan aspek budaya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas serta landasan moral, sehingga setiap individu tidak hanya unggul dalam bidang keilmuan dan keterampilan, tetapi juga menjaga dan meneruskan warisan budaya daerah.
3.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur dari Desa secara merata;	Pemerataan pembangunan infrastruktur yang dimulai dari tingkat desa. Upaya ini mencakup peningkatan akses jalan, fasilitas dasar, dan layanan publik yang mendukung konektivitas antar desa serta antar wilayah, sehingga setiap daerah, baik yang terpencil maupun yang sudah berkembang, mendapatkan manfaat yang setara. Dengan memperkuat infrastruktur di tingkat desa, diharapkan potensi ekonomi lokal dapat tumbuh, meningkatkan mobilitas, dan menurunkan kesenjangan pembangunan, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan kemajuan dan kesejahteraan secara merata.

No	Misi	Penjelasan Misi
(1)	(2)	(3)
4.	Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan;	Memastikan kebutuhan pokok tersedia dan biaya hidup tetap terjangkau melalui kemandirian pangan. Ini dicapai dengan meningkatkan produktivitas, diversifikasi komoditas, dan inovasi budidaya, sehingga harga pangan stabil dan masyarakat tidak bergantung pada pasokan luar.
5.	Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis Pertanian, UMKM dan Pariwisata;	Mengembangkan ekonomi lokal berbasis pertanian, UMKM, dan pariwisata untuk memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Dengan mengoptimalkan potensi sektor-sektor tersebut, diharapkan perekonomian lokal tumbuh inklusif dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
6.	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang mencakup penanganan bencana, perlindungan mata air, dan penyediaan infrastruktur persampahan. Penanganan bencana dilakukan melalui sistem kesiapsiagaan dan respons cepat untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan, sementara perlindungan mata air memastikan sumber air tetap bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem. Di sisi lain, tersedianya infrastruktur persampahan yang memadai mendukung pengelolaan sampah secara efisien untuk mencegah pencemaran lingkungan

3.1.1.3. KESELARASAN MISI RPJMD KABUPATEN TANA TORAJA, RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN RPJMN TAHUN 2025-2029

Keselarasan misi antara RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN sangat penting untuk memastikan pembangunan nasional dan daerah berjalan serasi dan terintegrasi. RPJMN menjadi landasan hukum untuk penyusunan RPJMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. RPJMD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

harus selaras dengan RPJMN, baik dalam hal visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan.

Keselarasan RPJMD Kabupaten Tana Toraja, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan adanya keselarasan ini, diharapkan tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara efisien dan efektif di tingkat daerah. Adapun keselarasan RPJMD Kabupaten Tana Toraja, RPJMD Prov. Sulawesi Selatan dan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Tana Toraja, RPJMD Prov. Sulsel dan RPJMN Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital	Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
2.	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya	Misi 1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, dan Berdaya saing	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur



No	Misi RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur dari Desa secara merata	Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
4.	Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan	Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan



No	Misi RPJMD Kab. Tana Toraja Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis Pertanian, UMKM dan Pariwisata	Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
			Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
			Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6.	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

3.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran dan selanjutnya menuntun perumusan arah kebijakan, strategi dan program prioritas Pembangunan daerah.



Adapun tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pelayanan Pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
3. Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif;
5. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Selanjutnya 6 (enam) tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 15 (lima belas) sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Meningkatnya kualitas dan cakupan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inovatif;
3. Meningkatnya pemerataan dan derajat kesehatan masyarakat;
4. Membaiknya kualitas dan inklusifitas layanan pendidikan;
5. Menguatnya nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah;
6. Membaiknya kualitas pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat;
7. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur daerah secara merata;
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan di wilayah Perdesaan;
9. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan;
10. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan;
11. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pencari kerja;



12. Meningkatnya daya saing dan kualitas produk UMKM dan industri;
13. Berkembangnya destinasi dan daya tarik pariwisata daerah;
14. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
15. Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.



Tabel 3.5

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital	Mengembangkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Meningkatnya kualitas dan cakupan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inovatif
2	Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	Meningkatnya pemerataan dan derajat kesehatan Masyarakat Membaiknya kualitas dan inklusifitas layanan pendidikan Menguatnya nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah Membaiknya kualitas pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat
3	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata	Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur daerah secara merata Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan di wilayah Perdesaan
4	Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan



No.	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(3)
5	Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	Meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pencari kerja
			Meningkatnya daya saing dan kualitas produk UMKM dan industri
			Berkembangnya destinasi dan daya tarik pariwisata daerah
6	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
			Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim



Tabel 3.6
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tana Toraja 2025-2030

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Misi 1 : Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital;	Tujuan 1.1 Mengembangkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan		Indeks Reformasi Birokrasi		angka	56,64 (CC)	58,64 (CC)	61,50 (B)	64,34 (B)	67,19 (B)	70,03 (BB)	72,88 (BB)	
			Sasaran 1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah		Nilai SAKIP	angka	56,59 (CC)	61,34 (B)	65,49 (B)	69,62 (B)	73,76 (BB)	77,90 (BB)	82,03 (A)	
			Sasaran 1.1.2 Meningkatnya kualitas dan cakupan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inovatif		Opini BPK	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	angka	74,67	74,70	74,83	75,43	76,03	76,36	77,22	
					Indeks Inovasi Daerah	angka	15,60	18,36	36,30	38,60	40,89	45,48	52,36	
					Indeks SPBE	angka	2,75	2,88	3,01	3,14	3,27	3,40	3,53	
2	Misi 2 : Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya	Tujuan 2.1 Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		angka	71,67	71,73	72,18	72,64	73,10	73,24	74,00	
			Sasaran 2.1.1 Meningkatnya pemerataan dan derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan	angka	84,61	85,15	85,69	86,21	86,74	87,28	87,81	
					Indeks Pembangunan Gender	angka	89,05	89,24	89,49	89,74	89,99	90,23	90,48	
			Sasaran 2.1.2 Membaiknya kualitas dan inklusifitas layanan Pendidikan		Indeks Pendidikan	angka	67,31	67,70	68,09	68,48	68,87	69,25	69,64	
			Sasaran 2.1.3 Menguatnya nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	57,53	58,96	60,39	61,82	63,24	64,68	66,11	
			Sasaran 2.1.4 Membaiknya kualitas pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat		Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	persen	2,15	3,2	4,25	5,3	6,35	7,4	8,45	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Misi 3 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata	Tujuan 3.1 Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan		Gini Rasio		angka	0,320	0,318	0,317	0,315	0,314	0,312	0,311	
			Sasaran 3.1.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan infrastruktur daerah secara merata		Indeks layanan infrastruktur	angka	69,40	71,10	72,81	74,51	76,22	77,92	79,63	
			Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan di wilayah Perdesaan		Persentase Desa Mandiri	persen	0	0	0,89	0,89	1,79	2,69	3,57	
4	Misi 4 : Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan	Tujuan 4.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif		Laju pertumbuhan ekonomi		persen	5,20	7,32	7,38	7,42	7,48	7,57	7,68	
				Tingkat Kemiskinan		persen	10,79	10,01	9,45	8,85	8,25	7,68	7,06	
			Sasaran 4.1.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan		Pertumbuhan PDRB sector Pertanian, kehutanan dan perikanan (atas dasar harga berlaku)	persen	22,33	23,80	23,98	24,16	24,36	24,53	24,71	
			Sasaran 4.1.2 Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan		Indeks Ketahanan Pangan	angka	76,88	77,03	78,32	78,96	79,60	80,24	80,87	
5	Misi 5 : Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	Tujuan 5.1 Meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal		Tingkat Pengangguran Terbuka		persen	3,98	3,23	3,13	3,07	3,00	2,95	2,87	
			Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas pencari kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76,41	82,99	83,03	83,62	84,13	84,27	84,92	
			Sasaran 5.1.2 Meningkatnya daya saing dan kualitas produk UMKM dan Industri		Kontibusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	persen	7,86	8,00	8,45	8,90	9,33	9,78	9,97	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Sasaran 5.1.3 Berkembangnya destinasi dan daya Tarik pariwisata daerah		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	persen	2,51	2,78	3,08	3,42	3,79	4,12	4,56	
6	Misi 6 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Tujuan 6.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		angka	73,24	74,30	74,51	74,72	74,93	75,15	75,70	
				Penurunan intensitas emisi GRK		persen	36,30	39,28	42,26	45,24	48,22	51,20	53,86	
			Sasaran 6.1.1 Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Air	angka	63,33	74,15	74,35	74,55	74,75	74,95	75,04	
					Indeks Kualitas Udara	angka	92,94	79,63	79,93	80,23	80,53	80,83	81,23	
					Indek Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,82	64,69	64,76	64,83	64,90	64,97	65,04	
			Sasaran 6.1.2 Meningkatnya Kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim		Indeks Resiko Bencana	angka	110,72	109,45	108,60	106,48	104,35	102,22	100,09	



3.2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KAB. TANA TORAJA TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan daerah sebagai prioritas pembangunan tahunan. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.7

Tahapan Pembangunan Tahunan Periode Tahun 2025-2030

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Memantapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai pondasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.	Membangun SDM unggul, sehat, produktif, dan berbudaya yang siap menggerakkan pembangunan daerah.	Mempercepat pemerataan dan keterhubungan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan kota.	Mencapai kemandirian pangan dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.	Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal (pertanian, UMKM, pariwisata) yang berdaya saing.	Memantapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai pondasi pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam kerangka pencapaian misi yang ditata melalui tahapan pembangunan diatas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan. Arah kebijakan merupakan pernyataan strategis yang menggambarkan pilihan-pilihan kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan misi yang menjadi pedoman umum dalam menerapkan focus dan prioritas yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan. Untuk itu dirumuskan arah kebijakan sebagai arahan umum kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan setiap misi pembangunan, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tahun 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)
Misi 1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital		
1. Mengembangkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan digitalisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta transparansi, pengawasan, dan kapasitas aparatur guna mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih optimal
	2. Meningkatnya kualitas dan cakupan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inovatif	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, layanan publik satu pintu berbasis digital, dan penyederhanaan prosedur layanan melalui otomatisasi sistem untuk memperluas dan mempermudah akses layanan publik.
Misi 2. Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya		
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	3. Meningkatnya pemerataan dan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan peningkatan mutu layanan kesehatan melalui distribusi tenaga medis, digitalisasi layanan, serta penyediaan layanan yang terjangkau serta memperkuat edukasi kesehatan dan promosi hidup sehat kepada masyarakat



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)
	4. Membaiknya kualitas dan inklusifitas layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan yang diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan fasilitas pendidikan
	5. Menguatnya nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah	Mengembangkan pendidikan budaya, penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, serta penguatan pelestarian tradisi dalam rangka menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal.
	6. Membaiknya kualitas pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktifitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non-formal.
Misi 3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata		
3. Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan	7. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur daerah secara merata	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana public vital, serta pemerataan infrastruktur
	8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan di wilayah Perdesaan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan hingga ke desa
Misi 4. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan		
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	9. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan, dan memperkuat infrastruktur pendukung seperti pasar dan distribusi hasil pertanian
	10. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan biaya hidup yang terjangkau.



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)
Misi 5. Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata		
5. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal	11. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pencari kerja	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pencari kerja melalui pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar
	12. Meningkatnya daya saing dan kualitas produk UMKM dan industri	Penguatan koperasi dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan, serta memfasilitasi pemasaran produk lokal
	13. Berkembangnya destinasi dan daya tarik pariwisata daerah	Mengembangkan potensi wisata budaya dan alam mencakup peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal untuk mendukung pengelolaan pariwisata dan menciptakan lapangan pekerjaan
Misi 6. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	14. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mengembangkan perlindungan sumber daya alam, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, serta peningkatan kesadaran masyarakat
	15. Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penguatan sistem peringatan dini bencana, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, edukasi masyarakat tentang perubahan iklim, dan penghijauan untuk mengurangi dampaknya

Selanjutnya, dirumuskan strategi pembangunan yang memuat langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Rumusan strategi pembangunan dimaksud sebagaimana table berikut :



Tabel 3.9
Rumusan Strategi Pembangunan

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi 1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital			
1. Mengembangkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan digitalisasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta transparansi, pengawasan, dan kapasitas aparatur guna mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih optimal	1. Pengembangan dan integrasi sistem perencanaan dan keuangan berbasis digital
			2. Meningkatkan akses publik terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja melalui website resmi
			3. Penyediaan akses layanan publik terhadap dokumen perencanaan dan laporan keuangan
			4. Penguatan sistem pengawasan Internal Pemerintah
			5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
	2. Meningkatnya kualitas dan cakupan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inovatif	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, layanan publik satu pintu berbasis digital, dan penyederhanaan prosedur layanan melalui otomatisasi sistem untuk memperluas dan mempermudah akses layanan publik.	1. Peningkatan jaringan internet dan perangkat teknologi di seluruh OPD dan wilayah kerja
			2. Mengembangkan sistem smart-government untuk mendukung birokrasi yang lebih cepat dan akuntabel
			3. Meningkatkan kompetensi ASN dalam penggunaan sistem digital dan aplikasi pelayanan publik
			4. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan ASN



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			5. Penguatan layanan satu pintu digital yang mengintegrasikan semua layanan
			6. Meningkatkan layanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas
Misi 2. Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya			
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	3. Meningkatnya pemerataan dan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan peningkatan mutu layanan kesehatan melalui distribusi tenaga medis, digitalisasi layanan, serta penyediaan layanan yang terjangkau serta memperkuat edukasi kesehatan dan promosi hidup sehat kepada masyarakat	1. Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan yang berkualitas 2. Pemerataan distribusi tenaga Kesehatan di daerah terpencil dan pelosok 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga medis 4. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan 5. Penyediaan digitalisasi dan modernisasi layanan Kesehatan 6. Pemenuhan dan perkuatan intervensi pencegahan stunting dan gizi buruk sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran 7. Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak 8. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta mendorong eliminasi penyakit tropis terabaikan



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	4. Membaiknya kualitas dan inklusifitas layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan yang diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan fasilitas pendidikan	9. Penyediaan Makanan Bergizi Gratis bagi peserta didik jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar
			1. Memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh penduduk usia sekolah di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil
			2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan kompetensi berbasis TIK, dan peningkatan kesejahteraan guru
			3. Pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan inklusif
			4. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan dengan pelatihan vokasi
			5. Memperluas akses layanan pendidikan melalui penguatan Program pendidikan alternatif dan Sekolah Rakyat
	5. Menguatnya nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah	Mengembangkan pendidikan budaya, penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya, serta penguatan pelestarian tradisi dalam rangka menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal.	1. Meningkatkan promosi budaya melalui event atau festival budaya tahunan
			2. Mendukung kegiatan seni dan pelestarian budaya dengan dukungan pembiayaan dan apresiasi bagi karya lokal tradisional
	6. Membaiknya kualitas pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktifitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non-formal.	1. Mendorong pelestarian adat, seni, dan budaya masyarakat melalui pengkatan peran Lembaga adat



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			2. Mengintegrasikan nilai budaya dalam Pendidikan
			3. Pemberdayaan SDM bagi masyarakat berbasis kearifan lokal
Misi 3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata			
3. Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan	7. Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pembangunan infrastruktur daerah secara merata	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana publik vital, serta pemerataan infrastruktur	1. Peningkatan pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi, embung dan jaringannya, bendung dan jaringannya
			2. Peningkatan Pembangunan fasilitas air bersih, sanitas dan persampahan di Kawasan perdesaan dan permukiman
			3. Penguatan infrastruktur digital dan telekomunikasi
			4. Penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan di wilayah Perdesaan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan hingga ke desa	1. Reboisasi dan konservasi daerah tangkapan air untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur
			2. Peningkatan jalan, jembatan dan akses transportasi antar wilayah yang belum terjangkau
			3. Pengembangan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim seperti pengendalian banjir dan konservasi air



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			4. Peningkatan pengelolaan limbah dan peningkatan kapasitas infrastruktur lingkungan hidup seperti TPA, drainase dll
Misi 4. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan			
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	9. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan, dan memperkuat infrastruktur pendukung seperti pasar dan distribusi hasil pertanian	1. Mengembangkan dan merevitalisasi sarana, prasarana, menguatkan kelembagaan, dan dukungan operasional lainnya dalam pengelolaan komoditas unggulan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan
			2. Mengembangkan sistem perdagangan langsung antar petani dan konsumen dan mendorong pembentukan BUMDes sebagai distributor hasil pertanian guna pemangkasan distribusi hasil pertanian
			3. Mengembangkan diversifikasi bahan pangan berbasis produk lokal
	10. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dengan biaya hidup yang terjangkau.	1. Menata dan merevitalisasi pasar tradisional agar layak, higienis, dan kompetitif
			2. Mengembangkan aplikasi dan platform digital informasi harga bahan pokok harian
			3. Mengembangkan pusat distribusi bahan pokok di wilayah strategis
			4. Mengendalikan inflasi Daerah melalui penguatan produksi dan distribusi pangan serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi 5. Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata			
5. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal	11. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pencari kerja	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pencari kerja melalui pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar	1. Peningkatan kompetensi tenaga kerja
			2. Peningkatan layanan dan administrasi ketenagakerjaan
			3. Penguatan dan pengawasan perlindungan tenaga kerja
			4. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja berbasis potensi ekonomi lokal
			5. Mengembangkan kolaborasi dengan sekolah kejuruan dan memfasilitasi pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja untuk menghasilkan sumberdaya yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi
	12. Meningkatnya daya saing dan kualitas produk UMKM dan industri	Penguatan koperasi dan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan, serta memfasilitasi pemasaran produk lokal	1. Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, dan akuntansi sederhana bagi pelaku UMKM dan koperasi
			2. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi melalui pelatihan pengelolaan kelembagaan, administrasi, dan tata kelola yang baik
			3. Memberikan pelatihan teknologi produksi dan pengemasan produk agar UMKM dapat bersaing di pasar yang lebih luas



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			4. Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan (bank dan non-bank) untuk penyediaan kredit mikro dengan bunga rendah
			5. Menyelenggarakan promosi produk unggulan melalui pameran, festival, dan bazar daerah serta partisipasi dalam event nasional
			6. Mendorong pemanfaatan platform digital dan marketplace lokal untuk memperluas jangkauan pasar
			7. Mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Kabupaten/Kota
	13. Berkembangnya destinasi dan daya Tarik pariwisata daerah	Mengembangkan potensi wisata budaya dan alam mencakup peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal untuk mendukung pengelolaan pariwisata dan menciptakan lapangan pekerjaan	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wisata: akses jalan, toilet umum, papan informasi, fasilitas penginapan, dll
			2. Mengembangkan desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal
			3. Menata kawasan wisata agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan
			4. Membentuk dan mempromosikan brand pariwisata Tana Toraja yang unik dan berbasis budaya
			5. Menyelenggarakan festival budaya, pameran wisata, dan event tematik skala nasional/internasional



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			6. Memfasilitasi sertifikasi keterampilan kerja pariwisata melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan 7. Mengembangkan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai nilai wisata (souvenir, makanan khas, kerajinan) 8. Mengembangkan sistem kemitraan strategis dengan pelaku industri nasional dan internasional 9. Meningkatkan standar sarana wisata agar ramah bagi anak, lansia, dan ibu hamil dan penyandang disabilitas
Misi 6. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	14. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mengembangkan perlindungan sumber daya alam, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, serta peningkatan kesadaran masyarakat	1. Mengembangkan perlindungan sumber daya alam, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, serta peningkatan kesadaran masyarakat 2. Mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara, tanah, dan air secara berkala 3. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R) 4. Meningkatkan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 5. Mendorong pemilahan sampah dari sumber (rumah tangga, pasar, sekolah)



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			6. Menyusun peraturan daerah tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai
			7. Memfasilitasi UMKM daur ulang dan inovasi produk dari limbah non-organik
			8. Melakukan reboisasi dan penghijauan di daerah rawan longsor, gundul, dan sempadan Sungai
			9. Menyelenggarakan kampanye publik, pelatihan, dan sekolah lapang tentang lingkungan hidup
	15. Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penguatan sistem peringatan dini bencana, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, edukasi masyarakat tentang perubahan iklim, dan penghijauan untuk mengurangi dampaknya	1. Peningkatan kapasitas sistem peringatan dini bencana melalui upaya mengembangkan sistem deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana
			2. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dengan pemanfaatan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan
			3. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim melalui sosialisasi dan pelatihan adaptasi perubahan iklim
			4. Rehabilitasi dan penghijauan kawasan kritis yaitu di daerah rawan longsor dan sumber mata air
			5. Penguatan kebijakan dan regulasi lingkungan

4.2.2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program Prioritas Pembangunan Daerah berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Kabuapten Tana Toraja Tahun 2025-2029. Program prioritas ini dihasilkan dari pengelompokan 68 Prioritas Bupati yang tercantum dalam dokumen Visi dan Misi yang diserahkan ke KPUD. Olehnya itu, Program Prioritas Pembangunan Daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja Kepala Daerah terpilih. Pengelompokan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029

No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Darerah RPJMD
1	Membentuk klinik investasi dalam mempermudah perizinan dan menjaga iklim investasi yang kondusif	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
2	Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3	Memberikan perhatian dan peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN	Program Kepegawaian Daerah	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Pelayanan publik yang ramah bagi warga negara penyandang disabilitas terutama untuk fasilitas umum	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Program Rehabilitasi Sosial	
5	Membangun sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
6	Meningkatkan koordinasi antar instansi dan pemerintah desa untuk mengurangi duplikasi program guna memperbaiki efisiensi dan efektivitas anggaran	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
7	Merefitalisasi fasilitas fisik sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas
8	Memastikan ketersediaan guru di desa-desa pelosok dengan pemberian tunjangan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
9	Beasiswa pendidikan lanjut bagi tenaga pendidik berbasis kinerja	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
10	Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sekolah melalui berbagai pelatihan	Program Pengelolaan Pendidikan	
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
11	Membangun ruang literasi berkualitas melalui revitalisasi perpustakaan daerah dan memastikan sekolah memiliki perpustakaan dan bahan bacaan berkualitas	Program Pembinaan Perpustakaan	
		Program Pengelolaan Pendidikan	
12	Pelatihan vokasi (pelatihan disertai dengan dukungan pemagangan yang nyata)	Program Pengelolaan Pendidikan	
13	Merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas puskesmas dan posyandu di semua desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Darerah RPJMD
14	Kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
15	Memastikan seluruh masyarakat Tana Toraja terlindungi oleh program jaminan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
16	Mengefisiensi rujukan dengan dukungan teknologi informasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
17	Ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan berkualitas di semua desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
18	Ibu sehat, anak sehat : Pasokan gizi untuk anak hingga usia 5 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
19	KOLLING (Kontrol Keliling) secara berkala dilakukan di semua desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
20	Memberikan beasiswa afirmasi untuk calon tenaga medis dan tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
21	Mendorong pelestarian adat, seni dan budaya masyarakat desa melalui peningkatan peran lembaga adat	Program Pengembangan Kebudayaan	
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
22	Budayawan Berkarya (dukungan pembiayaan dan apresiasi karya lokal tradisional)	Program Pengembangan Kebudayaan	
23	Melakukan Festival kebudayaan setiap tahunnya	Program Pengembangan Kebudayaan	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
24	Menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non formal	Program Pembinaan Sejarah	
		Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	
25	Program creative school project (SMA dan SMK)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
26	Festival tahunan anak muda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
27	Desa naik kelas, mendorong desa menjadi desa mandiri dan unggul	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
28	Menyediakan infrastruktur desa yang memadai, mencakup air bersih (pipanisasi), sanitasi dan pengelolaan sampah	Program Pengembangan Perumahan	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
		Program Pengelolaan Persampahan	
29	Memfasilitasi pembangunan satu wahana/lapangan olahraga ditingkat kecamatan/desa	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
30	Membangun dan memperbaiki jalan yang menghubungkan antar Kecamatan dan pusat kegiatan lokal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan jalan	
31	Merevitalisasi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi yang bersih dan nyaman	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
32	Fasilitasi internet gratis ditempat-tempat umum yang strategis	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
33	Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian : membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan
34	Mendorong diversifikasi bahan pangan berbasis produk lokal	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
35	Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
36	Memperkuat jaringan pasar penyedia kebutuhan pokok	Program Perekonomian dan Pembangunan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
37	Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak dan obat-obatan ke petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha Masyarakat berdasarkan potensi wilayah
38	Pemberian kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
39	Petani penyuluh tiap desa	Program Penyuluhan Pertanian	
40	Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan teknologi terkini	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
41	Memfasilitasi para pekebun melakukan peremajaan tanaman terutama kopi yang saat ini memiliki brand ternama	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
42	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular hewan ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
43	Pengadaan bibit ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
44	Pendampingan unit usaha dan memperbaiki tata niaga produk hewan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
45	Hilirisasi komoditi pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
46	Mendorong hak paten produk kopi	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
47	Fasilitasi layanan, kegiatan, branding yang menjadi daya tarik bagi wisatawan ; menciptakan produk dan brand dan berciri Toraja	Program Pemasaran Pariwisata	
48	Membangun desa-desa wisata yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk mempermudah akses dari dan menuju tujuan wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Program Penyelenggaraan jalan	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
49	Kerjasama pelatihan dan pemagangan dengan pihak swasta bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
50	Menciptakan simpul kreativitas (creative hub) di perkotaan yang menghubungkan pekerja, investor dan inventor kreatif	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
51	Akhir pekan di Tana Toraja	Program Pemasaran Pariwisata	
52	Rumah Tongkonan menjadi rumah tinggal wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
53	Manajemen satu pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	
54	Wisata ramah untuk semua	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
55	Mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pelayanan Penanaman Modal	
56	Memberikan dukungan peningkatan teknik industri, manajemen dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM	
57	Memfasilitasi akses pendanaan yang mudah	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
58	Meningkatkan pembelian produk lokal melalui pengadaan belanja barang pemerintah dan pihak swasta	Program Perekonomian dan Pembangunan/Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
59	Membangun sarana UMKM di sepanjang jalur wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	
60	Membangun ruang dan fasilitas yang mendukung kegiatan industri kreatif seperti co-working space, studio dan galeri seni	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif	
61	Berkolaborasi dengan desainer memberikan masukan desain kemasan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Ekraf	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan UMKM	
62	Pelatihan bagi pelaku UMKM segera on board ke platform digital	Program Pengembangan UMKM	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	
63	Dukungan akses pasar dalam bentuk promosi, pameran, serta fasilitas yang memudahkan distribusi produk kreatif	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
64	Pelatihan dan sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) terkait pemandu wisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif	
65	Pembangunan gedung Toraja creative city (program yang menghubungkan seni, budaya dan pengembangan ekonomi lokal)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
66	Membangun pasar kreatif produk anak muda	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
67	Membentuk relawan muda kreatif di setiap kecamatan (aktor penggerak berbasis kewilayahan)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
68	Mencetak sebanyak-banyaknya wirausaha muda setiap tahunnya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
69	Meningkatkan kapasitas lembaga ketahanan bencana dan membangun sistem peringatan dini yang akurat dan handal	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
		Program Penanggulangan Bencana	
		Program Penanganan Bencana	
70	Membangun kesadaran bencana warga melalui edukasi di sekolah-sekolah dan organisasi sosial, disesuaikan dengan konteks awal	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Program Penanggulangan Bencana	
71	Tersedianya infrastruktur persampahan yang memenuhi standar dari hulu hingga hilir, serta memperbanyak infrastruktur yang mendukung ekonomi sirkular	Program Pengelolaan Persampahan	
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
72	Meningkatkan pelibatan aktor non pemerintah dalam berpartisipasi menjaga lingkungan berbasis desa	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	
73	Menginisiasi perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pembuatan peta rawan bencana, dorongan untuk memperluas ruang terbuka hijau dan perlindungan mata air	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Penanggulangan Bencana	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	



No.	Program Unggulan KDH Terpilih	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
74	Melakukan pembersihan sungai-sungai	Program Pengelolaan Persampahan	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
75	Mendorong PERDA perlindungan mata air	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	

Enam program prioritas pembangunan sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel diatas merupakan prioritas yang ditetapkan untuk mewujudkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada tabel kesesuaian berikut ini.

Tabel 3.11
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah

No.	Misi Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
2.	Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya	Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas
3.	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata	Menguatkan interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
4.	Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian Pangan	Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan



No.	Misi Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
5.	Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha Masyarakat berdasarkan potensi wilayah
6.	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana disajikan pada tabel keselarasan berikut ini :



Tabel 3.12

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
1	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Teknologi informasi	6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Prioritas Nasional 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
2	Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
			Prioritas Nasional 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur



No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
			Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
3	Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4	Peningkatan kualitas an kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri



No	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Nasional
5	Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi daerah	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
6	Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur



Tabel 3.13

Program Prioritas Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2030

No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Visi: Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing berdasarkan Nilai Budaya																	
Misi 1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang tangkas dan dinamis melalui transformasi digital																	
Prioritas Pembangunan Daerah :mamin Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi																	
1	Tujuan 1 : mengembangkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,64 (CC)	58,64 (CC)		61,50 (B)		64,34 (B)		67,19 (B)		70,03 (BB)		72,88 (BB)		
1	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	Angka	56,59 (CC)	61,34 (B)		65,49 (B)		69,62 (B)		73,76 (BB)		77,90 (BB)		82,03 (A)		
		Opini BPK	Nilai	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					60.570.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Outcome : Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	85	100		100		100		100		100		100		
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan					4.942.715.000		5.250.000.000		5.350.000.000		5.450.000.000		5.550.000.000		5.750.000.000	Inspektorat Daerah
	Outcome : menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Tindak lanjut	70,18	73,10		75,00		76,89		78,79		80,68		82,58		
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					650.965.000		1.075.000.000		1.360.000.000		1.555.000.000		1.835.000.000		2.385.000.000	Kecamatan
	Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelavanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	85,71	87,57		88,79		90,15		91,19		92,35		93,54		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Program Rehabilitasi Sosial					154.150.000		225.000.000		250.000.000		300.000.000		325.000.000		400.000.000	Dinas Sosial
	Outcome : Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	persen	23,40	24,80		26,20		27,60		29,00		30,40		31,80		
5	Program Kepegawaian Daerah					578.495.000		750.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000		1.250.000.000	BKP SDM
	Outcome : Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	persen	82,00	83,90		87,46		89,24		91,02		92,80		94,58		
	Outcome : Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	6,00	8,61		10,65		12,69		14,76		16,77		18,81		
	Outcome : Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	persen	92,80	93,64		94,48		95,32		96,16		97,00		97,84		
	Outcome : Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	persen	90,00	91,44		92,88		94,32		95,76		97,20		98,64		
2	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan cakupan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	Angka	74,67	74,70		74,83		75,43		76,03		76,36		77,22		
		Indeks Inovasi Daerah	Angka	15,60	18,36		36,30		38,60		40,89		45,48		52,36		
		Indeks SPBE	Angka	2,75	2,88		3,01		3,14		3,27		3,40		3,53		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					1.587.300.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.775.000.000		1.800.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	angka	2,75	2,88		3,01		3,14		3,27		3,40		3,53		
		Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	persen	91,16	91,75		92,34		92,93		93,52		94,11		94,70		
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					32.911.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		225.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Outcome : Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					173.231.191.000		182.500.000.000		190.100.000.000		191.500.000.000		198.200.000.000		208.300.000.000	BPKPD
	Outcome : Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	persen	20,07	22,14		24,62		27,10		31,23		35,36		40,32		
	Outcome : Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	persen	82,73	85,87		87,12		88,38		89,63		90,88		92,14		
		Persentase Penurunan SILPA	persen	35,60	32,38		30,26		26,03		21,80		17,58		9,13		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	angka	69,122	70,468		71,814		73,160		74,506		75,852		77,198		
	Outcome : Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	persen	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
9	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					1.090.000.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		2.200.000.000	BKP SDM
	Outcome : Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	persen	82,00	83,91		85,59		87,27		88,95		90,636		92,31		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Outcome : Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	persen	4,35	8,03		11,71		17,23		22,75		31,95		42,99		
	Outcome : Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	persen	6,60	8,61		10,65		12,69		14,73		16,77		18,81		
	Outcome : Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	persen	0,391	0,977		1,564		2,150		2,373		3,323		3,909		
10	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					1.719.296.000		1.900.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000	BAPPELIT BANGDA
	Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	84,94	85,18		85,41		85,65		85,88		86,12		86,35		
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Kelarasan RPJMD dengan Renstra PD	persen	100	100		100		100		100		100		100		
11	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					53.896.000		125.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		400.000.000	BAPPELIT BANGDA
	Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	persen	100	100		100		100		100		100		100		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					862.062.000		900.000.000		925.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000	Inspektorat Daerah
	Outcome : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka	2,570	2,781		2,898		3,015		3,132		3,249		3,366		
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	angka / huruf	2	2		3		3		3		3		3			
Misi 2 : Memperkuat Pembangunan SDM yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berbudaya																	
Prioritas Pembangunan Daerah : Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas																	
2	Tujuan 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	Indeks Pembangunan Manusia	angka	71,67	71,73		72,18		72,64		73,10		73,24		74,00		
3	Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	angka	84,61	85,15		85,69		86,21		86,74		87,28		87,81		
		Indeks Pembangunan Gender	angka	89,05	89,24		89,49		89,74		89,99		90,23		90,48		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					95.821.678.393		98.900.000.000		102.750.000.000		103.250.000.000		106.800.000.000		115.900.000.000	Dinas Kesehatan
						20.695.111.314		22.700.000.000		23.800.000.000		24.050.000.000		24.350.000.000		26.650.000.000	RSUD Lakipadada
	Outcome : Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Angka	80,92	78,20		75,48		72,76		70,04		67,32		64,59		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Data SSGI/SKI	persen	27,50	24,51		21,52		18,53		15,54		12,55		9,56		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Data Sigizi/e-PPGBM	persen	13,12	11,82		10,52		9,22		7,92		6,62		5,32		Dinas Kesehatan
		Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	persen	80,28	82,33		84,37		86,42		88,46		90,52		92,55		Dinas Kesehatan



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	persen	34,69	37,52		40,34		43,17		45,99		48,81		51,64		Dinas Kesehatan
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment successrate)	Angka	70,96	72,91		74,87		76,82		78,78		80,73		82,69		Dinas Kesehatan
	Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Angka	85,101	86,568		88,035		89,502		90,969		92,436		93,903		RSUD Lakiapada
		Persentase Pencapaian SPM Rumah Sakit	persen	94,24	94,79		95,34		95,89		96,44		96,99		97,54		RSUD Lakiapada
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana					4.566.142.000		4.650.000.000		4.700.000.000		4.750.000.000		4.775.000.000		4.800.000.000	DPPPA PP dan KB
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	angka	55,00	58,97		62,94		66,91		70,88		74,85		78,82		
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	17,50	16,41		15,23		14,23		13,14		12,05		10,96		
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					1.767.060.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.925.000.000		2.000.000.000	DPPPA PP dan KB
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	persen	70,00	71,93		73,86		75,79		77,72		79,65		81,58		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia					2.787.760.600		2.850.000.000		2.900.000.000		2.950.000.000		3.000.000.000		3.100.000.000	Dinas Kesehatan
	Outcome : Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	persen	40,34	41,90		45,02		48,14		57,50		62,18		69,98		
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman					474.171.800		500.000.000		600.000.000		700.000.000		850.000.000		900.000.000	
	Outcome : Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	persen	68,80	66,39		68,98		71,57		74,16		76,75		79,34		Dinas Kesehatan



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Sasaran 2 : Membaiknya kualitas dan inklusifitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	angka	67,31	67,70		68,09		68,48		68,87		69,25		69,64		
6	Program Pengelolaan Pendidikan					100.090.340.127		104.150.000.000		109.500.000.000		111.200.000.000		115.600.000.000		126.200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	persen	99,59	99,66		99,71		99,76		99,80		99,85		99,90		
		Persentase Anak Usia 13- 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	persen	96,50	96,83		97,20		97,57		97,94		98,31		98,68		
		Persentase Anak Usia 14- 18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	persen	2,00	2,49		2,83		3,18		3,52		3,87		4,22		
		Literasi Membaca	persen	51,98	52,71		53,83		54,75		55,68		56,59		57,52		
		Numerasi	persen	49,60	50,41		51,12		51,83		52,54		53,16		54,87		
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	14,82	14,83		14,84		14,85		14,86		14,87		14,88		
		Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	persen	14,78	15,41		16,04		16,67		17,30		17,93		18,56		
7	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					-		50.000.000		100.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Outcome : Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	angka	0,020	0,020		0,019		0,017		0,015		0,014		0,012		
		Persentase Guru SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	33,00	33,99		38,60		43,22		47,83		52,45		57,06		
		Persentase Guru SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	32,00	36,47		39,74		43,02		46,30		49,58		52,86		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	persen	90,00	91,20		92,01		92,82		93,63		94,45		95,26		
8	Program Pembinaan Perpustakaan					514.306.800		575.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000		675.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Outcome : Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	angka	68,16	68,81		69,46		70,11		70,76		71,41		72,06		
5	Sasaran 3: Menguatnya nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	57,53	58,96	60,39	61,82	63,24	64,68	66,11		angka	57,53	58,96	60,39	61,82	63,24
9	Program Pengembangan Kebudayaan					755.194.000		800.000.000		825.000.000		850.000.000		875.000.000		900.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	persen	24,00	25,89		27,33		28,77		30,20		31,64		33,08		
10	Program Pengembangan Kesenian Tradisional					1.062.491.000		1.150.000.000		1.175.000.000		1.200.000.000		1.225.000.000		1.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	persen	50,00	53,76		57,25		60,74		64,24		67,73		71,22		
11	Program Pembinaan Sejarah					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	persen	7,77	8,37		9,50		10,62		11,75		12,87		14,00		
6	Sasaran 4: Membaiknya kualitas pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	persen	2,15	3,2	4,25	5,3	6,35	7,4	8,45		persen	2,15	3,2	4,25	5,3	6,35



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.329.779.265		1.400.000.000		1.425.000.000		1.450.000.000		1.475.000.000		1.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
	Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	96,31	96,62		97,11		97,60		98,09		100		100		
Misi 3 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dari Desa Secara Merata																	
Prioritas Pembangunan Daerah : Menguatkan interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar																	
3	Tujuan 1: Menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan	Gini Rasio	angka	0,320	0,318		0,317		0,315		0,314		0,312		0,311		
7	Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur daerah secara merata	Indeks layanan infrastruktur	angka	69,40	71,10		72,81		74,51		76,22		77,92		79,63		
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					572.384.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000	Dinas Perhubungan
	Outcome : Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	persen	94,00	94,54		95,08		95,63		96,17		96,72		97,26		
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	persen	70,00	72,16		74,22		76,27		78,33		80,38		82,44		
2	Program Penyelenggaraan jalan					63.255.200.000		71.800.000.000		78.900.000.000		79.300.000.000		84.200.000.000		103.400.000.000	Dinas PUTR
	Outcome : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	60,70	38,89		43,60		47,71		52,12		56,53		60,94		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Sasaran 2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan di wilayah Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	persen	0	0		0,89		0,89		1,79		2,69		3,57		
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa					229.809.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000	DPML
	Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	persen	90,00	91,20		92,49		93,77		95,05		96,34		97,61		
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	persen	50,00	51,20		54,12		57,03		62,87		71,63		77,47		
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					928.094.000		1.200.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000	DPML
	Outcome : Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	persen	75,00	76,09		78,88		81,68		84,47		87,26		90,06		
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	persen	85,00	86,35		87,88		89,41		90,95		92,48		94,02		
5	Program Pengembangan Perumahan					280.000.000		350.000.000		400.000.000		425.000.000		475.000.000		600.000.000	Dinas PRKP
	Outcome : Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	persen	100	100		100		100		100		100		100		
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum					478.300.000		650.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000	Dinas PRKP
	Outcome : Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	persen	75,00	76,66		78,32		79,98		81,64		83,30		84,96		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					2.295.000.000		2.400.000.000		2.500.000.000		2.550.000.000		2.650.000.000		3.000.000.000	Dinas PUTR
	Outcome : Meningkatnya akses 56system56kat terhadap 56system penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	persen	88,90	89,31		89,69		90,06		90,44		90,82		91,20		
		Kapasitas Air Baku (dihitung dari data SimSPAM)	m3/ dtk	0,201	0,222		0,243		0,264		0,285		0,306		0,327		
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah					8.759.545.300		8.900.000.000		9.050.000.000		9.150.000.000		9.250.000.000		9.500.000.000	Dinas PUTR
	Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	persen	90,20	90,55		91,19		92,45		93,09		93,73				
9	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional					200.000.000		250.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		475.000.000	Dinas PUTR
	Outcome : Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	persen	37,00	44,39		45,95		47,51		49,07		50,63		52,19		
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					675.000.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000		775.000.000		800.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Outcome : Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	medali	40	42		45		48		50		53		56		
11	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					618.630.000		750.000.000		850.000.000		950.000.000		1.150.000.000		1.250.000.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	Outcome : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Outcome : Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Outcome : Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	persen	43,40	48,13		52,86		57,59		62,32		67,05		71,78		
	Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	100	100		100		100		100		100		100		
12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					620.000.000		650.000.000		675.000.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Outcome : Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	98,80	100		100		100		100		100		100		
Misi 4 : Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah Melalui Kemandirian																	
Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan																	
4	Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Laju pertumbuhan ekonomi	persen	5,20	7,32		7,38		7,42		7,48		7,57		7,68		
		Tingkat Kemiskinan	persen	10,79	10,01		9,45		8,85		8,25		7,68		7,06		
9	Sasaran 1: Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan	Kontibusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	persen	22,33	23,80		23,98		24,16		24,36		24,53		24,71		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					750.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000	Dinas PUTR
	Outcome : Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	persen	89,00	90,65		91,62		92,59		93,56		94,53		95,49		
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	persen	88,00	88,79		89,53		90,25		90,99		91,72		92,46		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian					1.925.500.000		2.250.000.000		2.350.000.000		2.450.000.000		2.550.000.000		3.000.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Outcome : Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	ha	13.140,90	13.161,20		13.170,20		13,179,50		13.188,80		13,198,00		13.207,30		
		Proporsi sawah irigasi	persen	40,45	42,38		44,30		46,22		48,14		50,06		51,97		
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian					776.135.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.350.000.000		1.750.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Outcome : Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (padi)	ton	114.919	121.213		142.035		155.916		162.856		169.797		176.737		
		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (jagung)	ton	106	533		1.133		2.034		4.736		6.680		8.489		
		Produktivitas Pertanian (Padi)	ton/ha	6,81	6,89		6,97		7,05		7,13		7,21		7,29		
		Produktivitas Pertanian (Jagung)	ton/ha	7,63	7,70		7,77		7,84		7,91		7,98		8,05		
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	15,00	16,00		17,15		18,29		19,44		20,59		20,74		
		Indeks pertanaman (IP) padi	angka	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		
4	Program Penyuluhan Pertanian					620.006.000		650.000.000		675.000.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	persen	11,00	11,98		13,36		16,12		18,88		23,02		27,15		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					97.014.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		300.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Outcome : Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	15,00	18,00		22,00		26,00		31,00		35,00		40,00		
10	Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	angka	76,88	77,03		78,32		78,96		79,60		80,24		80,87		
6	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat					88.035.000		150.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		500.000.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Outcome : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	skor	88,30	88,62		88,94		89,26		89,58		89,90		90,22		
7	Program Perekonomian dan Pembangunan					599.598.900		750.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		1.100.000.000	Sekretariat Daerah
	Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	angka	(2/9) esensi	(3/9) proaktif		(3/9) proaktif		(4/9) strategis		(5/9) strategis		(6/9) strategis		(6/9) unggul		
	Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan administari pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	persen	100	100		100		100		100		100		100		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tingkat Efektivitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	persen	68 (efektif)	68 (efektif)		70 (efektif)		70 (efektif)		72 (efektif)		72 (efektif)		74 (efektif)		
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					309.885.500		350.000.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Outcome : Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persen	96,82	97,25		97,89		98,54		99,18		99,83		100		
Misi 5 : Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, UMKM, dan Pariwisata																	
Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha Masyarakat berdasarkan potensi wilayah																	
5	Tujuan 1: Meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	3,98	3,23		3,13		3,07		3,00		2,95		2,87		
11	Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas dan Kualitas pencari kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76,41	82,99		83,03		83,62		84,13		84,27		84,92		
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					117.200.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Outcome : Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase wirausaha Pemuda	persen	1,134	1,658		1,904		2,150		2,395		2,641		3,312		
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					124.497.000		135.000.000		150.000.000		175.000.000		185.000.000		200.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Outcome : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					-		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		300.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Outcome : Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	persen	2,02	2,15		2,55		2,96		3,77		4,38		4,99		
4	Program Pelayanan Penanaman Modal					205.160.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Outcome : Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	99,00	100		100		100		100		100		100		
12	Sasaran 2: Meningkatnya daya saing dan kualitas produk UMKM dan Industri	Kontibusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	7,86	8,00		8,45		8,90		9,33		9,78		9,97		
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)					30.593.000		50.000.000		125.000.000		200.000.000		250.000.000		400.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	persen	0,09	0,13		0,27		0,48		0,77		1,12		1,84		
		Pertumbuhan Wirausaha	persen	4,00	5,80		7,28		10,25		13,21		16,18		22,11		
6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian					28.117.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		200.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Outcome : Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	persen	8,62	10,48		12,78		15,08		18,54		23,14		28,90		
7	Program Pengembangan UMKM					-		200.000.000		250.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Outcome : Meningkatnya legalitas koperasi	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	persen	0,06	0,09		0,35		0,86		1,10		1,34		1,67		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					679.285.000		800.000.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.300.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Outcome : Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	persen	54,00	59,00		64,00		69,00		74,00		80,00		85,00		
9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi					17.804.500		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindag
	Outcome : Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen	94,00	95,63		96,29		96,94		97,60		98,26		98,92		
10	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik					363.072.000		450.000.000		500.000.000		525.000.000		550.000.000		600.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Outcome : Meningkatnya jangkauan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	persen	87,77	88,35		88,91		89,48		90,04		90,60		91,90		
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	46,88	49,53		52,18		54,83		57,48		60,13		62,78		
13	Sasaran 3: Berkembangnya destinasi dan daya Tarik pariwisata daerah	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	persen	2,51	2,78		3,08		3,42		3,79		4,12		4,56		
11	Program Pemasaran Pariwisata					305.500.000		600.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.750.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Outcome : Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Capaian Target Kunjungan Wisata	persen	100	100		100		100		100		100		100		
12	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					1.173.520.000		1.750.000.000		2.750.000.000		3.000.000.000		4.000.000.000		5.500.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Outcome : Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	persen	2,51	2,78		3,08		3,42		3,79		4,12		4,56		
13	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif					200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		400.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	persen	100	100		100		100		100		100		100		
Misi 6 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan																	
Prioritas Pembangunan Daerah : Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan																	
6	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	73,24	74,30		74,51		74,72		74,93		75,15		75,70		
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	36,30	39,28		42,26		45,24		48,22		51,20		53,86		
14	Sasaran 1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	angka	63,33	74,15		74,35		74,55		74,75		74,95		75,04		
		Indeks Kualitas Udara	angka	92,94	79,63		79,93		80,23		80,53		80,83		81,23		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,82	64,69		64,76		64,83		64,90		64,97		65,04		
1	Program Pengelolaan Persampahan					2.721.376.000		2.800.000.000		2.900.000.000		2.950.000.000		3.100.000.000		3.500.000.000	DLH
	Outcome : Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	persen	37,02	32,50		33,00		33,50		34,00		34,50		35,00		
2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							25.000.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		100.000.000	DLH
	Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Cakupan Lembang/ Kelurahan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	persen	6,29	9,43		12,58		15,72		18,87		22,01		25,16		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					56.824.000		75.000.000		125.000.000		175.000.000		225.000.000		300.000.000	DLH
	Outcome : Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	angka	63,33	74,15		74,35		74,55		74,75		74,95		75,04		
		Indeks Kualitas Udara	angka	92,94	79,63		79,93		80,23		80,53		80,83		81,23		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,82	64,69		64,76		64,83		64,90		64,97		65,04		
4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					-		-		-		-		250.000.000		-	DLH
	Outcome : Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		
5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD					4.544.225.000		5.800.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		7.500.000.000		8.000.000.000	Sekretariat DPRD
	Outcome : Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketetapan penetapan Perda APBD Tahun N	tepat / tidak tepat	tepat	tepat		tepat		tepat		tepat		tepat		tepat		
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	persen	54,54	61,68		68,45		75,23		82,00		88,78		95,55		
	Outcome : Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	persen	90,00	100		100		100		100		100		100		
15	Sasaran 2: Meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	angka	110,72	109,45		108,60		106,48		104,35		102,22		100,09		
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					2.308.060.000		2.400.000.000		2.500.000.000		2.575.000.000		2.675.000.000		2.750.000.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
	Outcome : Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan kebakaran	persen	100	100		100		100		100		100		100		



No.	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah/ Outcome	Indikator	Satuan Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030 (Transisi)		
					Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	Trgt	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Outcome : Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100		100		100		100		100		100		
7	Program Penanggulangan Bencana					10.166.538.000		10.200.000.000		10.225.000.000		10.250.000.000		10.275.000.000		10.300.000.000	BPBD
	Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Outcome : Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Outcome : Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Pengangan Pasca Bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100		
8	Program Penanganan Bencana					73.600.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		350.000.000	Dinas Sosial
	Outcome : Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan kesiapsiagaannya	persen	100	100		100		100		100		100		100		



3.3. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

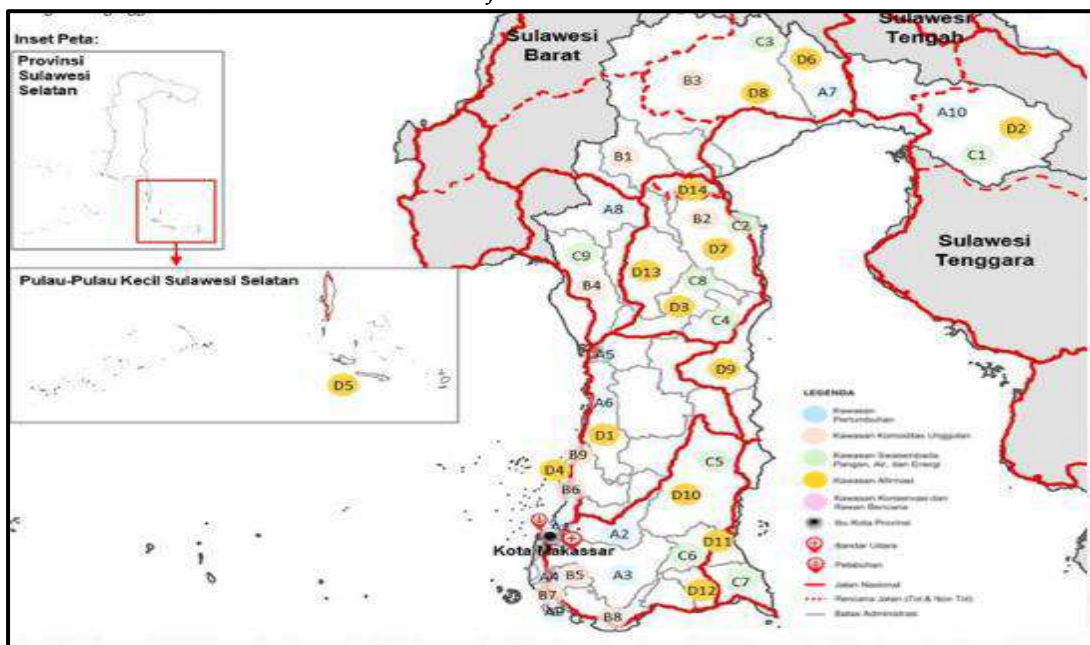
3.3.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH NASIONAL

Kebijakan pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mengamanatkan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia yang akan diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dengan menetapkan sasaran, tema dan arah kebijakan pembangunan wilayah.

Pembangunan wilayah pada RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan agar dapat berperan sebagai wadah pelaksanaan visi-misi dan berbagai program prioritas yang ditekankan untuk mendukung pencapaian target di tahun 2029 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan tercapainya Indeks Modal Manusia sebesar 0,59, penurunan kemiskinan sebesar 4,5 persen dan kemiskinan ekstrem menuju 8 persen.

Sebagai upaya mendorong peningkatan pembangunan wilayah, maka RPJMN Tahun 2025-2029 menetapkan highlight intervensi umum dan highlight intervensi khusus sebagai penjabaran peran pemerintah provinsi lingkup Pulau Sulawesi dalam pencapaian rencana jangka menengah untuk mengurangi kesenjangan wilayah yang diarahkan menjadi “Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA” melalui perspektif pembangunan kewilayahan dan pendekatan wilayah dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan termasuk sasaran pembangunan terhadap provinsi provinsi di dalamnya.

Gambar 3.1
Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan
dalam RPJMN Tahun 2025-2029



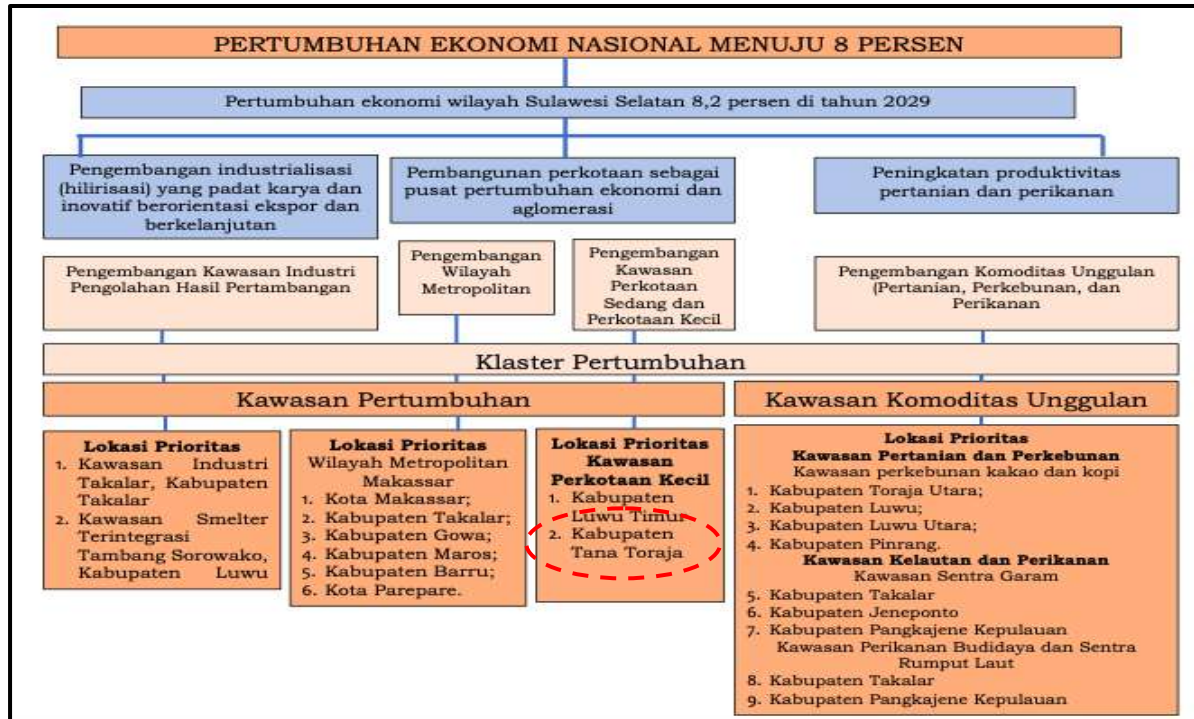
Sumber : Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029

Perspektif pembangunan kewilayahan difokuskan pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hirarki dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem OSS, serta pengendalian pemanfaatan ruang; penyediaan data dan informasi geospasial; pertanahan; pemenuhan layanan dasar; penyediaan infrastruktur dasar; dan penguatan otonomi dan keuangan daerah.

Pendekatan pembangunan kewilayahan didorong untuk mendukung pertumbuhan berkualitas berkelanjutan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan serta pembangunan daerah afirmasi dan perdesaan. Prioritas pembangunan daerah afirmasi dan perdesaan di Sulawesi Selatan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya Pembangunan. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan dan pusat pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2

Alur Pikir Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam
RPJMN Tahun 2025-2029 Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, diolah

3.3.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI SELATAN

Pembangunan kewilayahan Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada tematik transformasi ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Pandang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan Kawasan Pembangunan di Sulawesi Selatan diarahkan pada 5 (lima) Kawasan Dimana Kabupaten Tana Toraja termasuk dalam Kawasan Palopo (Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara dan Tana Toraja) yang diarahkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone, Pusat Pertumbuhan Industri Pengolahan SDA Mineral serta Pusat Pariwisata Budaya.

Kawasan pembangunan Palopo diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone dan Industri Berbasis Riset dan Teknologi serta Pusat Pariwisata Budaya, untuk itu sasaran pembangunan wilayah Kawasan Palopo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.14

Sasaran Pembangunan Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030

Sasaran Pembangunan	Tahun	Indeks
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	2025	5,39
	2029	7,79
	2030	8,09
PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	2025	36,61
	2029	48,14
	2030	52,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2025	3,89
	2029	3,53
	2030	3,43
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	9,44-8,85
	2029	8,67-7,67
	2030	8,46-7,85
Rasio Gini	2025	0,314
	2029	0,289
	2030	0,282
Indeks Pembangunan Manusia	2025	72,37
	2029	74,53
	2030	75,09
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	39,28
	2029	51,20
	2030	54,50

Sumber : BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Palopo yang diarahkan sebagai kawasan pertumbuhan, akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah melalui :

Pertama, peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan



prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan layanan dasar kesehatan dasar yang diprioritaskan pada penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan antara lain melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya penuntasan TBC, eliminasi penyakit tropis terabaikan serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak.

Kedua, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan dan kearifan local social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan serta penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenities, aksesibilitas dan ancillary yang baik.

Ketiga, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru pengembangan komoditas unggulan pangan sebagai pendukung IKN berbasis prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru, melalui swasembada pangan yang diarahkan pada yang diarahkan pada pengembangan kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan Sekitarnya di kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Timur, dan kabupaten Luwu Utara, pengembangan kawasan komoditas unggulan berupa kawasan perkebunan kakao di kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Luwu, dan kawasan perkebunan kopi di kabupaten Toraja Utara,



peningkatan produktivitas lahan pertanian di kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Luwu Timur, pengembangan pangan hewani yang diprioritaskan pada kabupaten Luwu Utara, pengembangan pangan local dan nabati yang diprioritaskan di kabupaten Luwu Timur, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Luwu, pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang diprioritaskan pada pengembangan pangan akuatik (blue food) di kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Timur, dan pengembangan produktivitas perikanan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan di kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Timur, kabupaten Luwu Utara, dan kota Palopo. Selain itu pengembangan kawasan Palopo, juga diprioritaskan pada dukungan percepatan hilirisasi industry berbasis SDA unggulan serta penguatan industry padat karya terampil, padat teknologi inovasi dan berorientasi ekspor serta aglomerasi industry diprioritaskan pada kawasan smelter terintegrasi tambang Sorowako dan kawasan industry Indonesia Huali Industry Park di kabupaten Luwu Timur, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industry, usaha masyarakat dan investasi yang terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibilitas dan ancillary yang baik.

Keempat, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi penguatan logistic, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan yang diprioritaskan pada kabupaten Luwu, dan kabupaten Luwu Utara, serta kota Palopo, kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi serta rantai pasok ekspor produk perikanan khususnya perikanan budidaya yang diprioritaskan pada kabupaten Luwu dan kabupaten Luwu Timur.



Kelima, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria, peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan yang diarahkan pada pengembangan kawasan afirmasi yaitu kawasan transmigrasi Mahalona melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik di kabupaten Luwu Timur, kawasan Teluk Bone DSK berupa pemerataan pembangunan kawasan melalui pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dukungan dan fasilitasi peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, serta diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan di kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, kabupaten Luwu Timur dan kota Palopo, pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal.

Keenam, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan Kawasan Watampone juga diarahkan pada pengembangan smart city; dan penguatan kerjasama antar daerah



untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah serta penguatan Kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah. Selain itu sebagai dukungan terhadap prioritas nasional pengembangan Kawasan Palopo juga diarahkan pada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Ketujuh, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman, penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim berbasis CWIS yang diprioritaskan di kabupaten Luwu, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangkit listrik, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa dukungan pengembangan bandar udara di kabupaten Tana Toraja, kabupaten Luwu Timur, dan kabupaten Luwu, pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kedelapan, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan



bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir yang diprioritaskan pada kabupaten Luwu Utara dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di kabupaten Luwu, kabupaten Luwu Utara, dan kabupaten Luwu Timur, serta kota Palopo. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbutan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

3.3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH TANA TORAJA

Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 mengacu pada arah Pembangunan Kewilayahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja 2025-2045 berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten yang diarahkan sebagai berikut :

A. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja mempertimbangkan dengan kriteria :

- Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh
- Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten



- Memiliki potensi ekspor
- Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
- Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal
- Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energy
- Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi
- Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi
- Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
- Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten
- Memiliki pusat pengembangan produk unggulan
- Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pada kriteria di atas, maka KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja, yaitu :

- a. Kawasan perkotaan baru satelit bandar udara Toraja dan sekitarnya di Kecamatan Mengkendek
- b. Kawasan desa wisata di koridor jalan lingkar pariwisata
- c. Kawasan pengembangan ternak dan perkebunan Simbuang-Mappak di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak
- d. Kawasan pengembangan ternak dan perkebunan Masanda di Kecamatan Masanda
- e. Kawasan agrowisata Gandasil di Kecamatan Gandangbatu Sillanan
- f. Kawasan perkebunan Kurra-Bittuang di Kecamatan Kurra dan Kecamatan Bittuang



- g. Kawasan perkotaan satelit Bittuang di Kecamatan Bituang
- h. Kawasan perkotaan satelit Ge'tengan di Kecamatan Mengkendek
- i. Kawasan perkotaan satelit Rantetayo di Kecamatan Rantetayo
- j. Kawasan perkotaan satelit Uluvalu-Malimbong-Rembon di Kecamatan Uluvalu, Kecamatan Malimbong dan Kecamatan Rembon
- k. Kawasan perkotaan satelit Bonggakaradeng di Kecamatan Bonggakaradeng, dan
- l. Kawasan wisata alam Buntu Sarira dan wisata alam permandian Tilanga' di Kecamatan Makale Utara.

B. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Dengan mempertimbangkan kriteria penetapan kawasan strategis diatas dikaitkan dengan kondisi sosial budaya di Kabupaten Tana Toraja, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis adalah sebagai berikut.

- a. Kawasan Wisata Buntu Burake di Kecamatan Makale;
- b. Kawasan Wisata Buntu Kandora di Kecamatan Mengkendek;
- c. Kawasan Wisata Desa Adat Bebo' Tumbang Datu di Kecamatan Sangalla Utara;
- d. Kawasan Wisata Kaero-Makula di Kecamatan Sangalla';
- e. Kawasan Wisata Kuburan Adat Lemo di Kecamatan Makale Utara;
- f. Kawasan Wisata Sillanan di Kecamatan Gandangbatu Sillanan.

C. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tana Toraja dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam;
- Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Dengan mempertimbangkan kriteria penetapan kawasan strategis diatas dikaitkan dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tana Toraja, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Tana Toraja dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Wisata Alam Pango-Pango di Kecamatan Makale Selatan;
- b. Kawasan Wisata Karst dan Danau Assa di Kecamatan Sangalla;
- c. Kawasan Wisata Ollon di Kecamatan Bonggakaradeng;
- d. Kawasan Wisata Sarambu Assing di Kecamatan Bittuang;
- e. Kawasan Wisata Talondo Tallu di Kecamatan Bittuang.



D. Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Penggunaan Teknologi Tinggi

Dengan mempertimbangkan kriteria penetapan kawasan strategis diatas dikaitkan dengan sudut kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan penggunaan teknologi tinggi di Kabupaten Tana Toraja, maka kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis Kabupaten Tana Toraja dari sudut kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan penggunaan teknologi tinggi adalah kawasan panas bumi Bittuang di Kecamatan Bittuang.



Tabel 3.15

Arah Pembangunan Kecamatan se Kabupaten Tana Toraja berdasarkan
Kawasan Strategis Kabupaten Tana Toraja

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Makale	2. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata Buntu Burake	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya	Kawasan Pertumbuhan Kawasan Perkotaan Kecil	1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi. 2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal.
		4. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
2	Makale Utara	4. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata alam Buntu Sarira dan wisata alam permandian Tilanga	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata kuburan Adat Lemo	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya		



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3	Makale Selatan	3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata alam Pango-Pango	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing.
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan.
4	Sangalla	3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata Kaero-Makula	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata karst dan Danau Assa’	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital; 7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan; 8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.
5	Sangalla Utara	3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan desa wisata di koridor jalan lingkar pariwisata	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata Desa Adat Bebo' Tumbang Datu	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
6	Sangalla Selatan	3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata Kaero-Makula	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya		



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
7	Rantetayo	1. Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan Kawasan perkotaan satelit Rantetayo	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
		2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar				
8	Kurra	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan	Pengembangan Kawasan perkebunan Kurra-Bittuang	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA		
1	2	3	4	5	6	7		
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.						
9	Bittuang	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan	Pengembangan Kawasan perkebunan Kurra-Bittuang	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi				
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah						
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.						
				1. Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;			Pengembangan Kawasan perkotaan satelit Bittuang	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
				2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas				
				3. Memperkuat interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;				



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata Sarambu Assing	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengembangan Kawasan wisata Talondo Tallu	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah	Pengembangan Kawasan Panas Bumi Bittuang	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Penggunaan Teknologi Tinggi		
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.				



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
10	Masanda	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan 5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Kawasan pengembangan ternak dan perkebunan di Masanda	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
11	Malimbong Balepe'	1. Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 3. Memperkuat interkonektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kawasan perkotaan satelit Uluvalu-Malimbong-Rembon	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
12	Saaluputti	1. Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kawasan perkotaan satelit Ulu- Mambong- Rembon	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
13	Rembon	1. Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kawasan perkotaan satelit Ulu- Mambong- Rembon	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
14	Mengkendek	1. Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;	Kawasan perkotaan baru satelit bandar udara Toraja dan sekitarnya	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
		2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;				
		1. Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;	Kawasan perkotaan satelit Ge'tengan	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
		2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kawasan wisata Buntu Kandora	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya		



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
15	Gandangbatu Sillanan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan	Kawasan agrowisata Gandasil	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan				
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kawasan wisata Sillanan	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				

NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
16	Bonggakaradeng	1. Mengoptimalkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kawasan perkotaan satelit Bonggakaradeng	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
		3. Memperkuat interkoneksi antar wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kawasan wisata Ollon	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
17	Rano	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan	Kawasan Pengembangan Peternakan	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan				
18	Simbuang	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan	Kawasan pengembangan ternak dan perkebunan Simbuang-Mappak	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan				
19	Mappak	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dalam menunjang kemandirian pangan	Kawasan pengembangan ternak dan perkebunan Simbuang-Mappak	Kawasan Strategis dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		



NO	KECAMATAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI BERDASARKAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN	LOKASI PRIORITAS (RPJMN) UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN TANA TORAJA
1	2	3	4	5	6	7
		5. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan usaha masyarakat berdasarkan potensi wilayah				
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan				



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
2. Berpedoman pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
3. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
4. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
5. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
6. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Selain memperhatikan beberapa faktor tersebut, penentuan program beserta targetnya akan memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun ke depan sesuai dengan proyeksi kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, *outcome*, indikator kinerja, target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rencana strategis perangkat daerah hingga tahun 2030. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pembangunan daerah sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode tahun 2030-2035.

Program perangkat daerah disajikan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Secara lengkap, program perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
GRAND TOTAL					1.235.317.919.611		1.287.817.471.000		1.335.850.170.000		1.379.941.428.000		1.436.033.499.000		1.484.532.164.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					789.584.668.011		818.794.207.914		847.722.492.073		860.962.473.200		886.688.360.752		941.453.627.967	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					390.115.579.727		400.080.744.392		411.467.259.280		418.418.635.750		429.932.646.555		446.886.299.486	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					290.025.239.600		295.825.744.392		301.742.259.280		306.893.635.750		313.932.646.555		320.211.299.486	
Outcome : Terpernihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					100.090.340.127		104.150.000.000		109.500.000.000		111.200.000.000		115.600.000.000		126.200.000.000	
Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	persen	99,59	99,66		99,71		99,76		99,80		99,85		99,90		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	persen	96,50	96,83		97,20		97,57		97,94		98,31		98,68		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Anak Usia 14-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	persen	2,00	2,49		2,83		3,18		3,52		3,87		4,22		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Literasi Membaca	persen	51,98	52,71		53,83		54,75		55,68		56,59		57,52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Numerasi	persen	49,60	50,41		51,12		51,83		52,54		53,16		54,87		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	14,82	14,83		14,84		14,85		14,86		14,87		14,88		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	persen	14,78	15,41		16,04		16,67		17,30		17,93		18,56		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					-		30.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					-		50.000.000		100.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	angka	0,020	0,020		0,019		0,017		0,015		0,014		0,012		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	33,00	33,99		38,60		43,22		47,83		52,45		57,06		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	32,00	36,47		39,74		43,02		46,30		49,58		52,86		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	persen	90,00	91,20		92,01		92,82		93,63		94,45		95,26		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	persen	21,00	21,81		22,63		23,45		24,27		25,09		25,91		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					274.157.250.784		282.501.189.136		290.835.212.920		295.031.917.178		302.442.555.521		317.668.406.631	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					51.422.480.834		52.450.930.451		53.499.949.060		54.569.948.041		55.661.347.002		56.774.573.942	Dinas Kesehatan
					102.206.135.966		104.250.258.685		106.335.263.860		108.461.969.137		110.631.208.519		112.843.832.689	RSUD Lakipadada
Outcome : Terperihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi (Dinas Kesehatan)	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Kesehatan
Outcome : Terperihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi (RSUD Lakipadada)	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		RSUD Lakipadada
PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					95.821.678.393		98.900.000.000		102.750.000.000		103.250.000.000		106.800.000.000		115.900.000.000	Dinas Kesehatan
					20.695.111.314		22.700.000.000		23.800.000.000		24.050.000.000		24.350.000.000		26.650.000.000	RSUD Lakipadada



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	Angka	80,92	78,20		75,48		72,76		70,04		67,32		64,59		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Data SSGI/SKI	persen	27,50	24,51		21,52		18,53		15,54		12,55		9,56		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Data Sigizi/e-PPGBM	persen	13,12	11,82		10,52		9,22		7,92		6,62		5,32		Dinas Kesehatan
	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan	persen	80,28	82,33		84,37		86,42		88,46		90,52		92,55		Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	persen	34,69	37,52		40,34		43,17		45,99		48,81		51,64		Dinas Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment successrate)	Angka	70,96	72,91		74,87		76,82		78,78		80,73		82,69		Dinas Kesehatan
Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Angka	85,101	86,568		88,035		89,502		90,969		92,436		93,903		RSUD Lakipadada
	Persentase Pencapaian SPM Rumah Sakit	persen	94,24	94,79		95,34		95,89		96,44		96,99		97,54		RSUD Lakipadada
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.787.760.600		2.850.000.000		2.900.000.000		2.950.000.000		3.000.000.000		3.100.000.000	
Outcome : Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	persen	40,34	41,90		45,02		48,14		57,50		62,18		69,98		Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					474.171.800		500.000.000		600.000.000		700.000.000		850.000.000		900.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	persen	63,80	66,39		68,98		71,57		74,16		76,75		79,34		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					749.911.877		850.000.000		950.000.000		1.050.000.000		1.150.000.000		1.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					97.480.532.500		107.035.720.246		115.121.434.651		116.335.863.344		122.179.080.611		143.026.162.223	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					9.103.647.300		9.285.720.246		9.471.434.651		9.660.863.344		9.854.080.611		10.051.162.223	
Outcome : Terperintahnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					750.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.500.000.000		1.750.000.000		2.000.000.000	
Outcome : Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatkan akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	persen	89,00	90,65		91,62		92,59		93,56		94,53		95,49		Dinas PUTR
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	persen	88,00	88,79		89,53		90,25		90,99		91,72		92,46		Dinas PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.295.000.000		2.400.000.000		2.500.000.000		2.550.000.000		2.650.000.000		3.000.000.000	
Outcome : Meningkatnya akses System5kat terhadap System penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	persen	88,90	89,31		89,69		90,06		90,44		90,82		91,20		Dinas PUTR
	Kapasitas Air Baku (dihitung dari data SimSPAM	m3/dtk	0,201	0,222		0,243		0,264		0,285		0,306		0,327		Dinas PUTR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					200.000.000		250.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		475.000.000	
Outcome : Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/ TPST Regional	persen	37,00	44,39		45,95		47,51		49,07		50,63		52,19		Dinas PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					8.759.545.300		8.900.000.000		9.050.000.000		9.150.000.000		9.250.000.000		9.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	persen	90,20	90,55		91,19		92,45		93,09		93,73				Dinas PUTR



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.330.000.000		1.450.000.000		1.550.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.850.000.000	
Outcome : Meningkatnya sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	persen	36,35	41,27		43,66		46,05		48,43		50,82		53,21		Dinas PUTR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					9.394.300.000		9.450.000.000		9.500.000.000		9.550.000.000		9.575.000.000		9.750.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	persen	90,70	91,14		91,56		91,98		92,40		92,82		93,25		Dinas PUTR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					410.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000		575.000.000		600.000.000	
Outcome : Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	persen	91,90	93,06		93,91		94,76		95,61		96,45		97,30		Dinas PUTR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					63.255.200.000		71.800.000.000		78.900.000.000		79.300.000.000		84.200.000.000		103.400.000.000	
Outcome : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	60,70	38,89		43,60		47,71		52,12		56,53		60,94		Dinas PUTR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					171.100.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000	
Outcome : Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	persen	89,00	89,98		91,36		92,74		94,12		95,50		96,88		Dinas PUTR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.811.739.900		1.850.000.000		1.875.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	persen	87,00	88,03		89,07		90,11		91,15		92,19		93,23		Dinas PUTR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					3.423.933.800		4.004.746.476		4.454.841.406		4.730.938.234		5.008.056.998		5.911.218.138	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.455.633.800		2.504.746.476		2.554.841.406		2.605.938.234		2.658.056.998		2.711.218.138	
Outcome : Terperuhnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas PRKP



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					280.000.000		350.000.000		400.000.000		425.000.000		475.000.000		600.000.000	
Outcome : Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas PRKP
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas PRKP
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					-		200.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		500.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	persen	1,60	2,25		2,90		3,55		4,20		4,85		5,50		Dinas PRKP
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					210.000.000		300.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		600.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman kumuh	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	84,00	85,33		86,66		87,99		89,32		90,65		91,98		Dinas PRKP
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					478.300.000		650.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	persen	75,00	76,66		78,32		79,98		81,64		83,30		84,96		Dinas PRKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21.293.133.100		21.713.903.202		22.106.181.266		22.476.804.891		22.975.840.989		23.353.357.809	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					6.363.929.300		6.491.207.886		6.621.032.044		6.753.452.685		6.888.521.738		7.026.292.173	Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					1.835.975.800		1.872.695.316		1.910.149.222		1.948.352.207		1.987.319.251		2.027.065.636	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcome : Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi (Satpol PP)	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi (BPBD)	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					618.630.000		750.000.000		850.000.000		950.000.000		1.150.000.000		1.250.000.000	
Outcome : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome : Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	persen	100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome : Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	persen	43,40	48,13		52,86		57,59		62,32		67,05		71,78		Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.308.060.000		2.400.000.000		2.500.000.000		2.575.000.000		2.675.000.000		2.750.000.000	
Outcome : Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan kebakaran	persen	100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Outcome : Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					10.166.538.000		10.200.000.000		10.225.000.000		10.250.000.000		10.275.000.000		10.300.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulanang Bencana Daerah
Outcome : Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulanang Bencana Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Pengangan Pasca Bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100		Badan Penanggulanang Bencana Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.114.238.100		3.457.904.462		3.737.562.551		3.968.313.802		4.150.180.078		4.608.183.680	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.679.318.100		2.732.904.462		2.787.562.551		2.843.313.802		2.900.180.078		2.958.183.680	
Outcome : Terpernihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					167.470.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		500.000.000	
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					154.150.000		225.000.000		250.000.000		300.000.000		325.000.000		400.000.000	
Outcome : Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	persen	23,40	24,80		26,20		27,60		29,00		30,40		31,80		Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					39.700.000		100.000.000		200.000.000		250.000.000		275.000.000		400.000.000	
Outcome : Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					73.600.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		350.000.000	
Outcome : Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat kesiapsiagaannya	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					50.885.990.800		54.369.953.664		57.282.752.737		59.893.707.792		62.713.081.948		66.251.143.587	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.323.696.800		2.455.008.996		2.563.409.176		2.732.677.359		2.832.830.907		2.948.887.525	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.127.459.800		2.170.008.996		2.213.409.176		2.257.677.359		2.302.830.907		2.348.887.525	
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					124.497.000		135.000.000		150.000.000		175.000.000		185.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					51.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	persen	19,59	23,71		27,71		31,95		36,07		40,19		44,31		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					20.740.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000		170.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	jumlah pekerja	2.544	2.621		2.698		2.775		2.852		2.929		3.006		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.074.132.600		4.381.054.652		4.610.875.745		4.832.093.260		5.074.735.125		5.378.829.828	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					3.422.602.600		3.491.054.652		3.560.875.745		3.632.093.260		3.704.735.125		3.778.829.828	
Outcome : Terperihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		DPPPA PP dan KB
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					147.134.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas dan evektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	persen	1,20	1,47		1,51		1,56		1,60		1,65		1,69		DPPPA PP dan KB
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	persen	76,41	77,08		77,75		78,42		79,09		79,76		80,43		DPPPA PP dan KB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					402.960.000		410.000.000		425.000.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000	
Outcome : Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	0,030	0,042		0,054		0,066		0,078		0,090		0,102		DPPPA PP dan KB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					-		50.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	persen	12,00	14,18		16,12		18,05		19,99		21,92		23,86		DPPPA PP dan KB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					9.486.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	persen	7,00	8,53		10,21		11,90		13,58		15,26		16,95		DPPPA PP dan KB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					91.950.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		300.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuha Hak Anak (IPHA)	angka	60,75	62,63		64,51		66,39		68,27		70,15		72,03		DPPPA PP dan KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					-		30.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	0,030	0,043		0,052		0,061		0,070		0,079		0,080		DPPPA PP dan KB
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka	69,08	70,82		72,41		74,00		75,59		77,18		78,77		DPPPA PP dan KB
	Persentase Anak Korban Kekerasan	Angka	0,040	0,027		0,026		0,025		0,024		0,022		0,021		DPPPA PP dan KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					118.339.000		250.000.000		450.000.000		575.000.000		695.000.000		1.000.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					88.035.000		150.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		500.000.000	
Outcome : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	skor	88,30	88,62		88,94		89,26		89,58		89,90		90,22		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					-		50.000.000		125.000.000		175.000.000		225.000.000		350.000.000	
Outcome : Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	persen	1,29	1,11		0,94		0,77		0,59		0,42		0,25		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					30.304.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7.997.670.200		8.341.421.164		8.771.249.587		9.118.174.579		9.787.238.071		10.348.482.832	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					5.138.648.200		5.241.421.164		5.346.249.587		5.453.174.579		5.562.238.071		5.673.482.832	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		DLH
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					-		-		-		-		250.000.000		-	
Outcome : Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					56.824.000		75.000.000		125.000.000		175.000.000		225.000.000		300.000.000	
Outcome : Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	angka	63,33	74,15		74,35		74,55		74,75		74,95		75,04		DLH
	Indeks Kualitas Udara	angka	92,94	79,63		79,93		80,23		80,53		80,83		81,23		
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,82	64,69		64,76		64,83		64,90		64,97		65,04		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					72.572.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		300.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	persen	1,67	1,75		1,85		1,95		2,04		2,14		2,24		DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	persen	93,34	94,37		95,51		96,66		97,80		98,95		100		DLH



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	persen	51,85	54,54		59,35		64,16		68,97		73,78		78,59		DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					-		25.000.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Cakupan Lembang/ Kelurahan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	persen	6,29	9,43		12,58		15,72		18,87		22,01		25,16		DLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					-		25.000.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Cakupan Lembang/ Kelurahan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	persen	3,77	5,66		8,81		11,95		15,09		18,24		21,38		DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					8.250.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		DLH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.721.376.000		2.800.000.000		2.900.000.000		2.950.000.000		3.100.000.000		3.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani	persen	32,07	32,50		33,00		33,50		34,00		34,50		35,00		DLH



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.284.503.600		4.566.127.352		4.766.849.899		4.959.186.897		5.133.170.635		5.443.834.048	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					3.956.987.600		4.036.127.352		4.116.849.899		4.199.186.897		4.283.170.635		4.368.834.048	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					265.015.000		350.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000		500.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen	4,55	7,75		11,52		19,05		26,57		34,10		46,41		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	persen	56,83	58,71		61,21		63,72		66,23		68,74		71,25		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					26.590.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000		175.000.000		250.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					32.911.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		225.000.000	
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					3.000.000		30.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.238.896.000		3.772.612.860		4.065.065.117		4.258.366.420		4.497.533.748		4.747.584.423	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.080.993.000		2.122.612.860		2.165.065.117		2.208.366.420		2.252.533.748		2.297.584.423	
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		DPML
PROGRAM PENATAAN DESA					-		50.000.000		75.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		DPML
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					-		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	0	0		100		100		100		100		100		DPML
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					229.809.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		550.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	90,00	91,20		92,49		93,77		95,05		96,34		97,61		DPML
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	50,00	51,20		54,12		57,03		62,87		71,63		77,47		DPML
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					928.094.000		1.200.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000	
Outcome : Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	75,00	76,09		78,88		81,68		84,47		87,26		90,06		DPML
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	85,00	86,35		87,88		89,41		90,95		92,48		94,02		DPML



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.888.302.000		7.050.000.000		7.200.000.000		7.350.000.000		7.425.000.000		7.550.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					555.100.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000	
Outcome : Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,44	2,39		2,34		2,29		2,24		2,19		2,14		DPPPA PP dan KB
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Angka	18,00	16,65		15,30		13,95		12,60		11,25		9,90		DPPPA PP dan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.566.142.000		4.650.000.000		4.700.000.000		4.750.000.000		4.775.000.000		4.800.000.000	
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Angka	55,00	58,97		62,94		66,91		70,88		74,85		78,82		DPPPA PP dan KB
	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	17,50	16,41		15,23		14,23		13,14		12,05		10,96		DPPPA PP dan KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.767.060.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.925.000.000		2.000.000.000	
Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	70,00	71,93		73,86		75,79		77,72		79,65		81,58		DPPPA PP dan KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.158.593.800		5.377.933.996		5.571.492.676		5.766.922.529		5.964.260.980		6.163.546.200	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					4.586.209.800		4.677.933.996		4.771.492.676		4.866.922.529		4.964.260.980		5.063.546.200	
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					572.384.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Persen	94,00	94,54		95,08		95,63		96,17		96,72		97,26		Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	70,00	72,16		74,22		76,27		78,33		80,38		82,44		Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.189.713.300		4.384.128.126		4.529.810.689		4.651.406.902		4.748.935.040		4.872.413.741	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.239.341.300		2.284.128.126		2.329.810.689		2.376.406.902		2.423.935.040		2.472.413.741	
Outcome : Terperihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					363.072.000		450.000.000		500.000.000		525.000.000		550.000.000		600.000.000	
Outcome : Meningkatnya jangkauan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Mayarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	87,77	88,35		88,91		89,48		90,04		90,60		91,90		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	46,88	49,53		52,18		54,83		57,48		60,13		62,78		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.587.300.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.775.000.000		1.800.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Angka	2,75	2,88		3,01		3,14		3,27		3,40		3,53		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Persen	91,16	91,75		92,34		92,93		93,52		94,11		94,70		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.849.513.100		5.318.458.572		5.650.827.743		5.990.144.298		6.366.447.184		6.969.776.128	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					4.772.998.600		4.868.458.572		4.965.827.743		5.065.144.298		5.166.447.184		5.269.776.128	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	Persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	6,61	11,73		16,73		22,10		27,83		32,83		38,20		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	11,36	12,00		13,96		15,92		17,88		19,84		21,80		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					-		50.000.000		60.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kerjasama pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	persen	53,50	56,66		59,06		61,47		63,87		68,27		73,48		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					28.117.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	persen	8,62	10,48		12,78		15,08		18,54		23,14		28,90		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					17.804.500		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen	94,00	95,63		96,29		96,94		97,60		98,26		98,92		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					30.593.000		50.000.000		125.000.000		200.000.000		250.000.000		400.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	persen	0,09	0,13		0,27		0,48		0,77		1,12		1,84		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Pertumbuhan Wirausaha	persen	4,00	5,80		7,28		10,25		13,21		16,18		22,11		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				-			200.000.000		250.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000	
Outcome : Meningkatnya legalitas koperasi	Proporsi UMKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor	persen	0,06	0,09		0,35		0,86		1,10		1,34		1,67		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2.024.226.400		2.194.685.928		2.354.579.647		2.515.171.239		2.671.474.664		2.863.504.158	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.710.476.400		1.744.685.928		1.779.579.647		1.815.171.239		1.851.474.664		1.888.504.158	
Outcome : Terperhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				-			50.000.000		75.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	persen	93,00	94,00		95,00		97,00		99,00		100		100		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					48.020.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	
Outcome : Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	persen	2,77	3,22		3,67		4,12		4,57		5,00		5,47		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					205.160.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		350.000.000	
Outcome : Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	99,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					60.570.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	85,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	0,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					942.200.000		1.025.000.000		1.125.000.000		1.200.000.000		1.275.000.000		1.350.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					117.200.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000	
Outcome : Meningkatnya daya saing kepemudaan	persentase wirausaha Pemuda	persen	1,134	1,658		1,904		2,150		2,395		2,641		3,312		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					675.000.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000		775.000.000		800.000.000	
Outcome : Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	medali	40	42		45		48		50		53		56		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					150.000.000		175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					49.966.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					49.966.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,18	2,49		2,80		3,11		3,42		3,73		4,04		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					11.760.000		50.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					11.760.000		50.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000	
Outcome : Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematanan Keamanan Informasi)	skor	16,00	18,00		20,00		23,00		25,00		28,00		30,00		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.961.901.000		2.150.000.000		2.300.000.000		2.425.000.000		2.525.000.000		2.700.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					755.194.000		800.000.000		825.000.000		850.000.000		875.000.000		900.000.000	
Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	persen	24,00	25,89		27,33		28,77		30,20		31,64		33,08		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1.062.491.000		1.150.000.000		1.175.000.000		1.200.000.000		1.225.000.000		1.250.000.000	
Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	persen	50,00	53,76		57,25		60,74		64,24		67,73		71,22		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	persen	7,77	8,37		9,50		10,62		11,75		12,87		14,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					39.116.000		50.000.000		100.000.000		125.000.000		140.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	persen	22,00	26,04		29,99		33,94		37,89		41,84		45,79		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen	11,93	12,74		13,62		14,50		15,38		16,26		17,14		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					105.100.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		185.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	persen	1,11	1,73		2,07		2,41		2,74		3,08		3,42		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.723.642.112		2.853.522.018		2.948.592.458		3.044.564.308		3.141.455.594		3.239.284.706	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.209.335.312		2.253.522.018		2.298.592.458		2.344.564.308		2.391.455.594		2.439.284.706	
Outcome : Terperhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					514.306.800		575.000.000		600.000.000		625.000.000		650.000.000		675.000.000	
Outcome : Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	angka	68,16	68,81		69,46		70,11		70,76		71,41		72,06		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki dan dilestarikan	persen	0	0		100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					48.934.888		125.000.000		175.000.000		225.000.000		275.000.000		325.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					48.934.888		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	persen	73,00	76,64		79,19		84,30		89,41		94,52		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	persen	85,00	86,21		89,25		92,28		95,92		98,57		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					26.070.858.700		28.393.489.224		30.779.759.008		32.183.354.189		34.379.421.272		38.898.109.698	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					370.407.000		425.000.000		475.000.000		525.000.000		575.000.000		650.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					370.407.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000	
Outcome : Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produktivitas Perikanan Tangkap	ton/thn	25,56	26,12		26,69		27,25		27,81		28,37		28,94		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Produktivitas Perikanan Budidaya	ton/thn	749,14	780,88		812,36		844,36		876,10		907,84		939,58		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Produktifitas Budidaya Perikanan Darat	ton/thn	733,11	747,82		762,53		777,24		791,09		806,66		821,37		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	angka	41,50	42,35		43,20		44,05		44,90		45,75		46,60		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					5.962.633.200		6.994.285.464		8.331.671.173		8.920.804.597		10.261.720.689		12.679.455.102	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					4.283.613.200		4.369.285.464		4.456.671.173		4.545.804.597		4.636.720.689		4.729.455.102	
Outcome : Terperihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.173.520.000		1.750.000.000		2.750.000.000		3.000.000.000		4.000.000.000		5.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	persen	2,51	2,78		3,08		3,42		3,79		4,12		4,56		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					305.500.000		600.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.750.000.000	
Outcome : Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Capaian Target Kunjungan Wisata	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					-		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		300.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	persen	2,02	2,15		2,55		2,96		3,77		4,38		4,99		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		400.000.000	
Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					17.102.718.000		18.024.203.760		18.723.087.835		19.247.549.592		19.847.700.584		21.243.654.595	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					13.670.788.000		13.944.203.760		14.223.087.835		14.507.549.592		14.797.700.584		15.093.654.595	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					776.135.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.350.000.000		1.750.000.000	
Outcome : Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (padi)	ton	114.919	121.213		142.035		155.916		162.856		169.797		176.737		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (jagung)	ton	106	533		1.133		2.034		4.736		6.680		8.489		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Produktivitas Pertanian (Padi)	ton/ha	6,81	6,89		6,97		7,05		7,13		7,21		7,29		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Produktivitas Pertanian (Jagung)	ton/ha	7,63	7,70		7,77		7,84		7,91		7,98		8,05		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	persen	15,00	16,00		17,15		18,29		19,44		20,59		20,74		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Indeks pertanaman (IP) padi	angka	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.925.500.000		2.250.000.000		2.350.000.000		2.450.000.000		2.550.000.000		3.000.000.000	
Outcome : Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	ha	13.140,90	13.161,20		13.170,20		13.179,50		13.188,80		13.198,00		13.207,30		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Proporsi sawah irigasi	persen	40,45	42,38		44,30		46,22		48,14		50,06		51,97		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					97.014.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		300.000.000	
Outcome : Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	persen	15,00	18,00		22,00		26,00		31,00		35,00		40,00		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					13.275.000		30.000.000		75.000.000		100.000.000		150.000.000		250.000.000	
Outcome : Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT (Penyakit Bias)	persen	50,00	54,47		59,58		64,68		69,79		74,90		80,01		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase Penurunan Serangan OPT (Hama Tikus)	persen	45,00	48,01		53,41		58,82		64,22		69,62		75,02		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					-		25.000.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Unit Usaha yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					620.006.000		650.000.000		675.000.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000	
Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	persen	11,00	11,98		13,36		16,12		18,88		23,02		27,15		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.630.470.500		1.875.000.000		2.075.000.000		2.225.000.000		2.365.000.000		2.775.000.000	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					-		25.000.000		50.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	persen	21,43	22,57		23,29		25,45		27,60		29,76		32,64		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					620.000.000		650.000.000		675.000.000		700.000.000		725.000.000		750.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	98,82	100		100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					309.885.500		350.000.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000	
Outcome : Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persen	96,82	97,25		97,89		98,54		99,18		99,83		100		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					21.300.000		50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	persen	86,00	100		100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					679.285.000		800.000.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.300.000.000	
Outcome : Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	persen	54,00	59,00		64,00		69,00		74,00		80,00		85,00		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					912.369.000		975.000.000		1.050.000.000		1.115.000.000		1.155.000.000		1.350.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					912.369.000		950.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.075.000.000		1.250.000.000	
Outcome : Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	persen	98,00	99,00		100		100		100		100		100		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah industry kecil dan menengah pada level kab/kota	jumlah IKM	904	945		985		1.026		1.066		1.107		1.147		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Keberadaan Perbankan di tiap kecamatan	persen	21,06	26,32		31,58		36,84		42,10		47,37		53,62		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					-		25.000.000		50.000.000		65.000.000		80.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	persen	25,50	26,50		28,23		29,96		31,69		33,41		35,14		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					92.261.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					92.261.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	persen	2,91	2,91		3,45		4,26		5,07		6,15		7,23		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					55.749.396.020		58.260.170.342		60.052.873.749		61.588.931.224		63.243.709.849		65.267.584.046	
SEKRETARIAT DAERAH					30.801.810.120		31.648.742.224		32.325.217.069		32.936.721.410		33.658.455.838		34.740.624.955	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					24.582.100.220		25.073.742.224		25.575.217.069		26.086.721.410		26.608.455.838		27.140.624.955	
Outcome : Terpernihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Sekretariat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					5.620.111.000		5.825.000.000		5.950.000.000		6.000.000.000		6.150.000.000		6.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	angka	(39,37) tinggi	(39,40) tinggi		(39,45) tinggi		(39,59) tinggi		(40,00) tinggi		(43,00) tinggi		(45,00) tinggi		Sekretariat Daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otononi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					599.598.900		750.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000		1.100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	angka	(2/9) esensi	(3/9) proaktif		(3/9) proaktif		(4/9) strategis		(5/9) strategis		(6/9) strategis		(9/9) unggul		Sekretariat Daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas kebijakan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tingkat Efektivitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	persen	68 (efektif)	68 (efektif)		70 (efektif)		70 (efektif)		72 (efektif)		72 (efektif)		74 (efektif)		Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD					24.947.585.900		26.611.428.118		27.727.656.680		28.652.209.814		29.585.254.010		30.526.959.090	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					20.403.360.900		20.811.428.118		21.227.656.680		21.652.209.814		22.085.254.010		22.526.959.090	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terperihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					4.544.225.000		5.800.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		7.500.000.000		8.000.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Ketetapan penetapan Perda APBD Tahun N	tepat / tidak tepat	tepat	tepat		tepat		tepat		tepat		tepat		tepat		Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	persen	54,54	61,68		68,45		75,23		82,00		88,78		95,55		Sekretariat DPRD
Outcome : Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	persen	90,00	100		100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					239.793.063.960		251.568.891.961		261.020.119.380		264.168.345.083		272.600.416.335		285.502.419.682	
PERENCANAAN					5.091.003.800		5.409.168.036		5.751.851.397		5.970.888.425		6.191.306.193		6.563.132.317	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					3.317.811.800		3.384.168.036		3.451.851.397		3.520.888.425		3.591.306.193		3.663.132.317	
Outcome : Terperihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		BAPPELITBANGDA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.719.296.000		1.900.000.000		2.100.000.000		2.200.000.000		2.300.000.000		2.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	84,94	85,18		85,41		85,65		85,88		86,12		86,35		BAPPELITBANGDA
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	persen	100	100		100		100		100		100		100		BAPPELITBANGDA
	Persentase Klarasan RPJMD dengan Renstra PD	persen	100	100		100		100		100		100		100		BAPPELITBANGDA



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					53.896.000		125.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		400.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100	100		100		100		100		100		100		BAPPELITBANGDA
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100	100		100		100		100		100		100		BAPPELITBANGDA
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	persen	100	100		100		100		100		100		100		BAPPELITBANGDA
KEUANGAN					229.151.975.460		239.751.502.211		248.608.881.835		251.335.382.787		259.342.794.793		271.017.145.709	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					54.311.108.460		55.401.502.211		56.508.881.835		57.635.382.787		58.792.794.793		59.967.145.709	
Outcome : Terperuhnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					173.231.191.000		182.500.000.000		190.100.000.000		191.500.000.000		198.200.000.000		208.300.000.000	
Outcome : Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	persen	20,07	22,14		24,62		27,10		31,23		35,36		40,32		BPKAD
Outcome : Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	persen	82,73	85,87		87,12		88,38		89,63		90,88		92,14		BPKAD
	Persentase Penurunan SILPA	persen	35,60	32,38		30,26		26,03		21,80		17,58		9,13		BPKAD
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	angka	69,122	70,468		71,814		73,160		74,506		75,852		77,198		BPKAD
Outcome : Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	persen	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					727.107.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000		1.050.000.000		1.250.000.000	
Outcome : Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	persen	-9,3	0,99		1,10		1,21		1,54		1,76		2,09		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					882.569.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.250.000.000		1.300.000.000		1.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	16,30	16,61		16,92		17,23		17,54		17,85		18,16		BPKAD
	Return on Aset (ROA) BUMD	persen	2,02	2,52		3,03		3,53		4,03		4,53		5,03		BPKAD
Outcome : Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	persen	99,39	100		100		100		100		100		100		BPKAD
Outcome : Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	persen	100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
KEPEGAWAIAN					4.312.045.700		4.558.221.714		4.734.386.148		4.862.073.871		4.991.315.349		5.372.141.656	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					3.733.550.700		3.808.221.714		3.884.386.148		3.962.073.871		4.041.315.349		4.122.141.656	
Outcome : Terperihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					578.495.000		750.000.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000		1.250.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	persen	82,00	83,90		87,46		89,24		91,02		92,80		94,58		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Outcome : Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	6,00	8,61		10,65		12,69		14,76		16,77		18,81		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Outcome : Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	persen	92,80	93,64		94,48		95,32		96,16		97,00		97,84		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Outcome : Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	persen	90,00	91,44		92,88		94,32		95,76		97,20		98,64		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.090.000.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		2.200.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.090.000.000		1.650.000.000		1.700.000.000		1.750.000.000		1.800.000.000		2.200.000.000	
Outcome : Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	persen	82,00	83,91		85,59		87,27		88,95		90,636		92,31		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Outcome : Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	persen	4,35	8,03		11,71		17,23		22,75		31,95		42,99		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Outcome : Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	persen	6,60	8,61		10,65		12,69		14,73		16,77		18,81		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Outcome : Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	persen	0,391	0,977		1,564		2,150		2,373		3,323		3,909		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					148.039.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		350.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					148.039.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		350.000.000	
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	persen	100	100		100		100		100		100		100		BAPPELITBANGDA
Outcome : Meningkatnya Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi dan Teknologi	persen	3,70	3,70		11,11		14,81		22,22		25,93		29,63		BAPPELITBANGDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					15.385.167.000		15.921.997.800		16.242.437.756		16.566.786.511		16.920.122.241		17.577.524.686	
INSPEKTORAT DAERAH					15.385.167.000		15.921.997.800		16.242.437.756		16.566.786.511		16.920.122.241		17.577.524.686	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					9.580.390.000		9.771.997.800		9.967.437.756		10.166.786.511		10.370.122.241		10.577.524.686	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Inspektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.942.715.000		5.250.000.000		5.350.000.000		5.450.000.000		5.550.000.000		5.750.000.000	
Outcome : menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	tindak lanjut	70,18	73,10		75,00		76,89		78,79		80,68		82,58		Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					862.062.000		900.000.000		925.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka	2,570	2,781		2,898		3,015		3,132		3,249		3,366		Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	angka / huruf	2	2		3		3		3		3		3		Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN					50.627.616.720		52.965.795.934		55.010.611.853		56.641.524.090		58.373.854.572		61.212.931.663	
KECAMATAN					50.627.616.720		52.965.795.934		55.010.611.853		56.641.524.090		58.373.854.572		61.212.931.663	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					7.271.126.400		7.416.548.928		7.564.879.907		7.716.177.505		7.870.501.055		8.027.911.076	
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Makale
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					82.836.000		100.000.000		115.000.000		120.000.000		130.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	85,00	85,96		86,93		87,89		88,85		88,91		90,78		Kecamatan Makale
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.990.800.000		3.000.000.000		3.020.000.000		3.050.000.000		3.075.000.000		3.100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Makale
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	89,00	89,20		90,19		91,20		91,19		93,19		94,18		Kecamatan Makale
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.169.868.000		2.213.265.360		2.257.530.667		2.302.681.281		2.348.734.906		2.395.709.604	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Makale Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-		50.000.000		65.000.000		75.000.000		85.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	88,00	88,97		89,93		90,89		91,85		92,81		93,78		Kecamatan Makale Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.125.470.000		1.175.000.000		1.200.000.000		1.225.000.000		1.250.000.000		1.275.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Makale Utara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Makale Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.672.465.300		2.725.914.606		2.780.432.898		2.836.041.556		2.892.762.387		2.950.617.635	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terpenhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Makale Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					63.410.000		75.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	88,00	88,97		89,93		90,89		91,85		92,81		93,78		Kecamatan Makale Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					970.498.000		1.000.000.000		1.020.000.000		1.040.000.000		1.060.000.000		1.075.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Makale Selatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	73,00	75,76		78,50		81,25		83,99		86,74		89,49		Kecamatan Makale Selatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.780.845.200		1.816.462.104		1.852.791.346		1.889.847.173		1.927.644.116		1.966.196.999	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Sangalla'
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					25.620.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	88,00	88,97		89,93		90,89		91,85		92,81		93,78		Kecamatan Sangalla'



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					484.715.000		500.000.000		520.000.000		535.000.000		550.000.000		570.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sangalla'
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	87,00	88,00		88,97		89,92		90,89		91,85		92,81		Kecamatan Sangalla'
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA																
Outcome : Terpernihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00	2.072.054.200	95,00	2.113.495.284	95,00	2.155.765.190	95,00	2.198.880.493	100	2.242.858.103	100	2.287.715.265	Kecamatan Sanagalla Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	88,50	90,50		91,30		92,24		93,19		94,12		95,07		Kecamatan Sanagalla Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					429.700.000		440.000.000		450.000.000		470.000.000		485.000.000		500.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sanagalla Utara
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sanagalla Utara



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					31.375.000		35.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sangalla Utara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.440.678.000		1.469.491.560		1.498.881.391		1.528.859.019		1.559.436.199		1.590.624.923	
Outcome : Terpernihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Sangalla Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	83,00	85,00		86,19		87,89		89,58		91,28		92,67		Kecamatan Sangalla Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					246.724.000		275.000.000		300.000.000		320.000.000		335.000.000		350.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sangalla Selatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	86,00	89,00		89,34		90,80		90,26		93,72		95,18		Kecamatan Sangalla Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					-		25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Sangalla Selatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					3.769.785.200		3.845.180.904		3.922.084.522		4.000.526.213		4.080.536.737		4.162.147.472	
Outcome : Terperilihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Mengkendek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					38.288.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	86,00	88,50		88,60		89,45		90,30		91,14		91,99		Kecamatan Mengkendek
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					943.300.000		975.000.000		1.000.000.000		1.020.000.000		1.035.000.000		1.050.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mengkendek
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	86,67	88,33		89,52		90,86		92,20		93,54		94,89		Kecamatan Mengkendek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.000.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mengkendek



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.936.007.200		2.994.727.344		3.054.621.891		3.115.714.329		3.178.028.615		3.241.589.188	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Gandangbatu Sillanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					42.802.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	84,00	86,00		87,19		88,89		90,58		92,28		93,97		Kecamatan Gandangbatu Sillanan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					694.390.000		725.000.000		750.000.000		770.000.000		785.000.000		800.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Gandangbatu Sillanan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-			30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	95,00	96,00		96,73		97,06		97,39		97,72		98,05		Kecamatan Gandangbatu Sillanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.100.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Gandangbatu Sillanan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.447.036.800		1.475.977.536		1.505.497.087		1.535.607.028		1.566.319.169		1.597.645.552	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Saluputti
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					50.664.000		70.000.000		85.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	86,00	88,00		89,23		90,51		91,78		93,05		94,32		Kecamatan Saluputti
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					200.000.000		215.000.000		225.000.000		235.000.000		250.000.000		275.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Saluputti
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	88,00	89,00		89,67		90,67		91,67		92,67		93,67		Kecamatan Saluputti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.106.665.600		2.148.798.912		2.191.774.890		2.235.610.388		2.280.322.596		2.325.929.048	
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Rembon
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					45.135.000		60.000.000		75.000.000		85.000.000		100.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	87,00	89,00		90,12		91,05		91,97		92,89		93,82		Kecamatan Rembon



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					405.600.000		415.000.000		430.000.000		440.000.000		450.000.000		475.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Rembon
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Rembon
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					-		25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Rembon
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.216.750.700		1.241.085.714		1.265.907.428		1.291.225.577		1.317.050.088		1.343.391.090	
Outcome : Terperhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Malimbong Balepe'
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					39.667.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	86,00	88,00		89,23		90,51		91,78		93,05		94,32		Kecamatan Malimbong Balepe'
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					220.250.000		230.000.000		240.000.000		250.000.000		270.000.000		300.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Malimbong Balepe'
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	76,00	79,00		82,02		84,08		86,12		88,18		90,23		Kecamatan Malimbong Balepe'
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.185.100.520		2.228.802.530		2.273.378.581		2.318.846.153		2.365.223.076		2.412.527.537	
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Rantetayo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					37.694.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	85,00	87,00		88,53		90,14		91,73		93,33		94,93		Kecamatan Rantetayo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					650.400.000		665.000.000		680.000.000		700.000.000		720.000.000		750.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Rantetayo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Rantetayo



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.480.638.000		1.510.250.760		1.540.455.775		1.571.264.891		1.602.690.189		1.634.743.992	
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Kurra
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					57.100.000		70.000.000		85.000.000		100.000.000		120.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	87,00	88,00		88,42		89,82		91,21		92,61		93,99		Kecamatan Kurra
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					200.000.000		215.000.000		225.000.000		240.000.000		250.000.000		300.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Kurra
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	90,00	91,00		91,66		92,59		93,51		94,44		95,37		Kecamatan Kurra
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.316.981.000		1.343.320.620		1.370.187.032		1.397.590.773		1.425.542.589		1.454.053.440	
Outcome : Terpenihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Bonggakaradeng
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					41.771.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	84,00	88,00		88,20		89,54		90,89		92,23		93,57		Kecamatan Bonggakaradeng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					200.000.000		250.000.000		265.000.000		280.000.000		300.000.000		325.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bonggakaradeng
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bonggakaradeng
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.000.000		20.000.000		40.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bonggakaradeng
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					902.855.000		920.912.100		939.330.342		958.116.949		977.279.288		996.824.874	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Rano
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					24.956.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	92,00	94,00		94,50		95,00		95,50		96,00		96,00		Kecamatan Rano



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					7.000.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000		80.000.000		150.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Rano
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Rano
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					14.892.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Rano
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.372.923.200		1.400.381.664		1.428.389.297		1.456.957.083		1.486.096.225		1.515.818.149	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Bittuang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					37.372.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	83,00	85,00		86,51		87,65		88,79		89,93		91,07		Kecamatan Bittuang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					209.920.000		225.000.000		240.000.000		260.000.000		275.000.000		300.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bittuang
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	86,00	89,00		89,20		90,20		91,20		92,19		93,19		Kecamatan Bittuang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					10.000.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Bittuang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					775.028.800		790.529.376		806.339.964		822.466.763		838.916.098		855.694.420	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Masanda
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	78,00	80,00		81,51		82,65		83,79		84,93		86,67		Kecamatan Masanda
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20.000.000		50.000.000		75.000.000		85.000.000		100.000.000		200.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Masanda



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-			30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	78,00	80,00		81,00		83,13		84,73		86,32		87,92		Kecamatan Masanda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.136.618.600		1.159.350.972		1.182.537.991		1.206.188.751		1.230.312.526		1.254.918.777	
Outcome : Terperihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Simbuang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.131.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	85,00	87,00		89,46		90,67		91,87		93,08		94,28		Kecamatan Simbuang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					218.875.000		230.000.000		250.000.000		260.000.000		275.000.000		300.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Simbuang
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-			30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Simbuang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-			25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Simbuang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					1.398.333.000		1.426.299.660		1.454.825.653		1.483.922.166		1.513.600.610		1.543.872.622	
Outcome : Terperihinya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Kecamatan Mappak
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					35.519.000		50.000.000		65.000.000		75.000.000		90.000.000		125.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	85,00	87,00		91,21		96,26		95,29		97,34		98,38		Kecamatan Mappak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					200.000.000		215.000.000		225.000.000		240.000.000		250.000.000		300.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mappak
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					-		30.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mappak
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					7.492.000		25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		100.000.000	
Outcome : Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Mappak



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					7.221.158.400		7.542.964.160		7.739.123.443		27.936.305.912		41.114.532.030		8.368.822.671	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.221.158.400		7.542.964.160		7.739.123.443		27.936.305.912		41.114.532.030		8.368.822.671	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					2.507.808.000		2.557.964.160		2.609.123.443		2.661.305.912		2.714.532.030		2.768.822.671	
Outcome : Terpenihnya layanan penunjang urusan perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi	Persentase layanan penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	persen	90,00	95,00		95,00		95,00		95,00		100		100		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.329.779.265		1.400.000.000		1.425.000.000		1.450.000.000		1.475.000.000		1.500.000.000	
Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	96,31	96,62		97,11		97,60		98,09		100		100		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					803.063.872		825.000.000		850.000.000		20.875.000.000		33.900.000.000		1.000.000.000	
Outcome : Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	persen	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	persen	5,48	6,66		6,66		6,66		6,66		6,66		16,66		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.482.158.263		1.510.000.000		1.530.000.000		1.550.000.000		1.575.000.000		1.600.000.000	
Outcome : Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	persen	60,00	66,00		71,00		75,00		80,00		85,00		90,00		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas



BIDANG URUSAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH / OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												OPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
				TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	TGT.	PAGU (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi	persen	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					374.549.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000	
Outcome : Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					723.800.000		850.000.000		900.000.000		950.000.000		975.000.000		1.000.000.000	
Outcome : Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	persen	100	100		100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada akhir periode jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat.

4.2.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut :



Tabel 4.2

Penetapan Target Kinerja Indikator Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET 2025	TARGET TAHUN KE-					KET
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	71,67	71,73	72,18	72,64	73,10	73,24	74,00	
2	Tingkat Kemiskinan	persen	10,79	10,01	9,45	8,85	8,25	7,68	7,06	
3	Tingkat pengangguran Terbuka	persen	3,98	3,23	3,13	3,07	3,00	2,95	2,87	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,20	7,32	7,38	7,42	7,48	7,57	7,68	
5	PDRB per Kapita (ADHB)	juta rupiah	34,74	35,45	43,12	52,33	61,53	79,98	89,14	
6	Gini Rasio	angka	0,320	0,318	0,317	0,315	0,314	0,312	0,311	
7	Proporsi Kontribusi PDRB ADHB Kab/kota terhadap Provinsi	persen	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	36,30	39,28	42,26	45,24	48,22	51,20	53,86	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	73,24	74,30	74,51	74,72	74,93	75,15	75,70	



4.2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 4.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	56,64 (CC)	58,64 (CC)	61,50 (B)	64,34 (B)	67,19 (B)	70,03 (BB)	72,88 (BB)	
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	71,67	71,73	72,18	72,64	73,10	73,24	74,00	
3	Gini Rasio	angka	0,320	0,318	0,317	0,315	0,314	0,312	0,311	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,20	7,32	7,38	7,42	7,48	7,57	7,68	
5	Tingkat Kemiskinan	persen	10,79	10,01	9,45	8,85	8,25	7,68	7,06	
6	Tingkat pengangguran Terbuka	persen	3,98	3,23	3,13	3,07	3,00	2,95	2,87	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	73,24	74,30	74,51	74,72	74,93	75,15	75,70	
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	36,30	39,28	42,26	45,24	48,22	51,20	53,86	
9	Indeks Kesehatan	angka	84,61	85,15	85,69	86,21	86,74	87,28	87,81	
10	Indeks Pembangunan Gender	angka	89,05	89,24	89,49	89,74	89,99	90,23	90,48	
11	Indeks Pendidikan	angka	67,31	67,70	68,09	68,48	68,87	69,25	69,64	
12	Indeks Layanan Infrastruktur	angka	69,40	71,10	72,81	74,51	76,22	77,92	79,63	



4.2.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan daerah yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan telah mengakomodir seluruh Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten yang tersaji berdasarkan pengelompokkan aspek. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 4.4

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	76,88	77,03	78,32	78,96	79,60	80,24	80,87	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	persen	7,94	7,51	6,92	6,34	5,75	5,16	4,58	
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	220,78	224,81	228,84	232,87	236,90	240,93	244,97	
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	persen	70,16	72,88	75,60	78,31	81,03	83,74	86,46	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	angka	73,24	74,30	74,51	74,72	74,93	75,15	75,70	
6	Indeks Kualitas Air	angka	63,33	74,15	74,35	74,55	74,75	74,95	75,04	
7	Indeks Kualitas Udara	angka	92,94	79,63	79,93	80,23	80,53	80,83	81,23	
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,82	64,69	64,76	64,83	64,90	64,97	65,04	
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	3,95	4,80	11,10	17,40	23,70	30,00	36,30	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	88,12	89,50	90,89	92,27	93,66	95,05	96,43	
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	kg/Orang	42,03	44,37	46,70	49,03	51,37	53,70	56,04	
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	25,64	32,75	44,56	56,38	68,19	80	91,81	
13	Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	39,28	40,75	42,23	43,69	45,16	46,63	48,10	
14	Indeks Risiko Bencana	angka	110,72	109,45	108,60	106,48	104,35	102,22	100,09	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,67	1,05	1,43	1,81	2,19	2,57	2,95	
16	Rasio Penduduk	persen	106,82	107,15	107,41	107,67	107,93	108,20	108,46	
17	Kepadatan Penduduk	orang/km2	127	132	137	142	147	152	157	
18	Skor Pola Pangan Harapan	persen	88,30	88,62	88,94	89,26	89,58	89,90	90,22	
19	Kapasitas Air Baku (dihitung dr data SimSPAM)	m3/detik	0,201	0,222	0,243	0,264	0,285	0,306	0,327	
20	Indeks pertanaman (IP) padi	angka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
21	Proporsi sawah irigasi	persen	40,45	42,38	44,30	46,22	48,14	50,06	51,97	
22	Angka Konsumsi Ikan	angka	41,50	42,35	43,20	44,05	44,90	45,75	46,60	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
23	Produktivitas Perikanan Tangkap	ton/tahun	25,56	26,12	26,69	27,25	27,81	28,37	28,94	
24	Produktivitas Perikanan Budidaya	ton/tahun	749,14	780,88	812,36	844,36	876,10	907,84	939,58	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,20	7,32	7,38	7,42	7,48	7,57	7,68	
2	Tingkat Kemiskinan	persen	10,79	10,01	9,45	8,85	8,25	7,68	7,06	
3	PDRB per Kapita	Rp Juta	34,74	35,45	43,12	52,33	61,53	79,98	89,14	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,98	3,23	3,13	3,07	3,00	2,95	2,87	
5	Indeks Gini	angka	0,320	0,318	0,317	0,315	0,314	0,312	0,311	
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	71,67	71,73	72,18	72,64	73,10	73,24	74,00	
7	Usia Harapan Hidup	tahun	74,23	74,37	74,52	74,72	74,92	75,12	75,33	
8	Indeks Pembangunan Keluarga	angka	62,14	64,41	66,68	68,95	71,22	73,49	75,76	
9	Prevalensi Stunting (sigizi/e-PPGBM)	persen	13,12	11,82	10,52	9,22	7,92	6,62	5,32	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,77	8,84	8,99	9,09	9,20	9,32	9,41	
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,10	14,33	14,41	14,49	14,57	14,65	14,73	
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	76,61	77,75	78,61	79,47	80,33	81,19	82,05	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	persen	46,40	48,49	49,40	50,89	52,39	55,32	56,64	
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	57,53	58,97	60,41	61,82	63,25	64,68	66,11	
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	57,53	58,96	60,39	61,82	63,24	64,68	66,11	
16	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	angka	62,14	73,08	74,33	75,65	76,96	78,17	79,58	
17	Indeks Ketimpangan Gender	angka	0,471	0,465	0,454	0,449	0,442	0,413	0,402	
18	Indeks Pembangunan Gender	angka	89,05	89,24	89,49	89,74	89,99	90,23	90,48	
19	Proporsi kontribusi PDRB ADHB Kab/Kota terhadap provinsi	persen	1,40	1,43	1,46	1,49	1,52	1,55	1,58	
20	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	persen	80,28	82,33	84,37	86,42	88,46	90,52	92,55	
21	Jumlah Kematian Ibu	kasus	2	2	2	2	2	2	1	
22	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	kematian per 100.000 kelahiran hidup	80,92	78,20	75,48	72,76	70,04	67,32	64,59	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
23	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	persen	34,69	37,52	40,34	43,17	45,99	48,81	51,64	
24	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	angka	70,96	72,91	74,87	76,82	78,78	80,73	82,69	
25	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	96,78	97,23	97,68	98,13	98,58	99,03	99,48	
26	Literasi Membaca	persen	51,98	52,71	53,83	54,75	55,68	56,59	57,52	
27	Numerasi	persen	49,60	50,41	51,12	51,83	52,54	53,16	54,87	
28	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang ditamatkan	persen	14,78	15,41	16,04	16,67	17,30	17,93	1856	
29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	14,82	14,83	14,84	14,85	14,86	14,87	14,88	
30	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	persen	23,40	24,80	26,20	27,60	29,00	30,40	31,80	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio Ketergantungan	persen	49,37	48,21	46,87	45,53	44,19	42,85	41,51	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	persen	7,86	8,00	8,44	8,89	9,33	9,78	9,91	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	persen	1,69	1,70	1,71	1,72	1,73	1,74	1,75	
4	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen) (Berdasarkan data PDRB Menurut Lap Usaha Kab/Kota pada Sektor 13 dan 17 BPS)	persen	2,22	2,25	2,26	2,28	2,30	2,34	2,35	
5	Kontibusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku)	persen	22,33	23,80	23,98	24,16	24,36	24,53	24,71	
6	Kontibusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	persen	7,86	8,00	8,45	8,90	9,33	9,78	9,97	
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	16,30	16,61	16,92	17,23	17,54	17,85	18,16	
8	Produktifitas Budidaya Perikanan Darat	ton/ tahun	733,11	747,82	762,53	777,24	791,095	806,66	821,37	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
9	Pertumbuhan Wirausaha	persen	4,00	5,80	7,28	10,25	13,21	16,18	22,11	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76,41	82,99	83,03	83,62	84,13	84,27	84,92	
11	Indeks Inovasi Daerah	angka	15,60	18,36	36,30	38,60	40,89	45,48	52,36	
12	Indeks Ekonomi Hijau	angka	29,67	30,42	31,35	32,29	33,22	34,16	35,09	
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen	32,45	32,54	32,58	32,61	32,64	32,66	32,70	
14	Indeks Layanan Infrastruktur	angka	69,40	71,10	72,81	74,51	76,22	77,92	79,63	
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	persen	84,00	85,17	86,31	87,45	88,59	89,73	90,87	
16	Persentase Desa Mandiri	persen	0	0	0,89	0,89	1,79	2,69	3,57	
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	16,01	16,61	16,73	17,09	17,44	17,85	18,13	
18	Tingkat Inflasi	persen	1,87	1,72	1,57	1,42	1,27	1,12	0,97	
19	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	persen	10,367	10,243	10,119	9,995	9,871	9,747	9,623	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
20	Net Ekspor Barang dan Jasa (BPS, PDRB ADHK Kab/Kota Menurut Pengeluaran)	persen	-6,63	-6,425	-6,220	-6,15	-5,810	-5,605	-5,400	
21	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu Rupiah/orang/tahun	8.319	8.763	9.171	9.580	9.989	10.397	10.806	
22	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan non pangan	Rupiah	462.018	487.604	506.224	524.845	543.466	562.086	580.707	
23	Angka kriminilitas yang tertangani	Angka	278	279	281	283	285	288	300	
24	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	persen	2,51	2,78	3,08	3,42	3,79	4,12	4,56	
25	Kunjungan Wisatawan	orang	503.861	517.868	533.819	552.075	572.999	596.606	623.812	
26	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	persen	2,15	3,20	4,25	5,30	6,35	7,40	8,45	
27	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Kabupaten	IKM	904	945	985	1.026	1.066	1.107	1.147	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
28	Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	persen	19,47	21,24	23,01	24,78	26,55	28,32	30,09	
29	Return on Asset (ROA) BUMD	persen	2,02	2,52	3,03	3,53	4,03	4,53	5,03	
30	Produktifitas Padi	Ton/hektar	6,81	6,89	6,97	7,05	7,13	7,21	7,29	
31	Produktifitas Jagung	ton/hektar	7,63	7,70	7,77	7,84	7,91	7,98	8,05	
32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	76,41	77,08	77,75	78,42	79,09	79,76	80,43	
33	Pertumbuhan Investasi Daerah	persen	2,77	3,22	3,67	4,12	4,57	5,00	5,47	
34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	angka	69,122	70,468	71,814	73,160	74,506	75,852	77,198	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Hukum	angka	56,55	57,97	59,39	60,81	62,23	63,65	65,07	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	2,75	2,88	3,01	3,14	3,27	3,40	3,53	
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	74,67	74,70	74,83	75,43	76,03	76,36	77,22	
4	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase tindak kriminal yang ditangani	persen	85,81	86,72	87,63	88,54	89,95	90,36	91,27	
6	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,09	3,19	3,20	3,25	3,31	3,33	3,42	
7	Indeks Survey Penilaian Integritas	angka	64,53	65,61	66,69	67,77	68,85	69,93	71,01	
8	Nilai MCP KPK	skor	37,5	44	49	54	59	63	67	
9	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka	2,570	2,781	2,898	3,015	3,132	3,249	3,366	
10	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	84,94	85,18	85,41	85,65	85,88	86,12	86,35	
11	Nilai SAKIP	angka	56,59 (CC)	61,34 (B)	65,49 (B)	69,62 (B)	73,76 (BB)	77,90 (BB)	82,03 (A)	
12	Opini BPK	angka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
13	Persentasi Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	46,88	49,53	52,18	54,83	57,48	60,13	62,78	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	angka	74,67	74,70	74,83	75,43	76,03	76,36	77,22	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN KE-					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
15	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	persen	5,48	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	16,66	
16	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	persen	91,16	91,75	92,34	92,93	93,52	94,11	94,70	
17	Persentase Keberadaan Perbankan di tiap kecamatan	persen	21,06	26,32	31,58	36,84	42,10	47,37	52,62	
18	Persentase Anak Korban Kekerasan	persen	0,040	0,027	0,026	0,025	0,024	0,022	0,021	



4.2.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel 4.5

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
PENDIDIKAN										
1	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	persen	99,59	99,66	99,71	99,76	99,80	99,85	99,90	
2	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	persen	96,50	96,83	97,20	97,57	97,94	98,31	98,68	
3	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	persen	2,00	2,49	2,83	3,18	3,52	3,87	4,22	
4	Literasi Membaca	persen	51,98	52,71	53,83	54,75	55,68	56,59	57,52	
5	Numerasi	persen	49,60	50,41	51,12	51,83	52,54	53,16	54,87	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	persen	14,82	14,83	14,84	14,85	14,86	14,87	14,88	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	persen	14,78	15,41	16,04	16,67	17,30	17,93	1856	
8	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Indeks Pemerataan Guru	angka	0,020	0,020	0,019	0,017	0,015	0,014	0,012	
10	Persentase Guru SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	33,00	33,99	38,60	43,22	47,83	52,45	57,06	
11	Persentase Guru SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	32,00	36,47	39,74	43,02	46,30	49,58	52,86	
12	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/ D-IV	persen	90,00	91,20	92,01	92,82	93,63	94,45	95,26	
13	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	persen	21,00	21,81	22,63	23,45	24,27	25,09	25,91	
KESEHATAN										
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	kasus	80,92	78,20	75,48	72,76	70,04	67,32	64,59	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Data SSGI/SKI	persen	27,50	24,51	21,52	18,53	15,54	12,55	9,56	
3	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Data Sigizi/e-PPGBM	persen	13,12	11,82	10,52	9,22	7,92	6,62	5,32	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase persalinan di fasilitas Kesehatan	persen	80,28	82,33	84,37	86,42	88,46	90,52	92,55	
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	persen	34,69	37,52	40,34	43,17	45,99	48,81	51,64	
6	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment successrate)	angka	70,96	72,91	74,87	76,82	78,78	80,73	82,69	
7	IKM Rumah Sakit	angka	85,101	86,568	88,035	89,502	90,969	92,436	93,903	
8	Persentase Pencapaian SPM Rumah Sakit	persen	94,24	94,79	95,34	95,89	96,44	96,99	97,54	
9	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	persen	40,34	41,90	45,02	48,14	57,50	62,18	69,98	
10	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	persen	63,80	66,39	68,98	71,57	74,16	76,75	79,34	
11	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	persen	89,00	90,65	91,62	92,59	93,56	94,53	95,49	
2	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	persen	88,00	88,79	89,53	90,25	90,99	91,72	92,46	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	persen	88,90	89,31	89,69	90,06	90,44	90,82	91,20	
4	Kapasitas Air Baku (dihitung dr data SimSPAM)	m3/detik	0,201	0,222	0,243	0,264	0,285	0,306	0,327	
5	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	persen	37,00	44,39	45,95	47,51	49,07	50,63	52,19	
6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	persen	90,20	90,55	91,19	91,82	92,45	93,09	93,72	
7	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	persen	36,35	41,27	43,66	46,05	48,43	50,82	53,21	
8	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	persen	90,70	91,14	91,56	91,98	92,40	92,82	93,25	
9	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	persen	91,90	93,06	93,91	94,76	95,61	96,45	97,30	
10	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	60,70	38,89	43,60	47,71	52,12	56,53	60,94	
11	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	persen	89,00	89,98	91,36	92,74	94,12	95,50	96,88	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	persen	87,00	88,03	89,07	90,11	91,15	92,19	93,23	
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	persen	1,60	2,25	2,90	3,55	4,20	4,85	5,50	
4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	84,00	85,33	86,66	87,99	89,32	90,65	91,98	
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	persen	75,00	76,66	78,32	79,98	81,64	83,30	84,96	
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	persen	43,40	48,13	52,86	57,59	62,32	67,05	71,78	
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pengangan Pasca Bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	SOSIAL									
1	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	persen	23,40	24,80	26,20	27,60	29,00	30,40	31,80	
7	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
TENAGA KERJA										
1	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	persen	19,59	23,71	27,71	31,95	36,07	40,19	44,31	
3	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	angka	2,544	2,621	2,698	2,775	2,852	2,929	3,006	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	persen	1,20	1,47	1,51	1,56	1,60	1,65	1,69	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	persen	76,41	77,08	77,75	78,42	79,09	79,76	80,43	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	0,030	0,042	0,054	0,066	0,078	0,090	0,102	
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	persen	12,00	14,18	16,12	18,05	19,99	21,92	23,86	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	persen	7,00	8,53	10,21	11,90	13,58	15,26	16,95	
6	Indeks Pemenuha Hak Anak (IPHA)	angka	60,75	62,63	64,51	66,39	68,27	70,15	72,03	
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	0,030	0,043	0,052	0,061	0,070	0,079	0,088	
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	angka	69,08	70,82	72,41	74,00	75,59	77,18	78,77	
9	Persentase Anak Korban Kekerasan	persen	0,040	0,027	0,026	0,025	0,024	0,022	0,021	
	PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan	persen	88,30	88,62	88,94	89,26	89,58	89,90	90,22	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	persen	1,29	1,11	0,94	0,77	0,59	0,42	0,25	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LINGKUNGAN HIDUP										
1	Persentase Dokumen Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kualitas Air	angka	63,33	74,15	74,35	74,55	74,75	74,95	75,04	
3	Indeks Kualitas Udara	angka	92,94	79,63	79,93	80,23	80,53	80,83	81,23	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,82	64,69	64,76	64,83	64,90	64,97	65,04	
5	Persentase RTH	persen	1,67	1,75	1,85	1,95	2,04	2,14	2,24	
6	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	persen	93,34	94,37	95,51	96,66	97,80	98,95	100	
7	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	persen	51,85	54,54	59,35	64,16	68,97	73,78	78,59	
8	Cakupan Lembang/Kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya di Bidang Lingkungan Hidup	persen	6,29	9,43	12,58	15,72	18,87	22,01	25,16	
9	Cakupan Lembang/Kelurahan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	persen	3,77	5,66	8,81	11,95	15,09	18,24	21,38	
10	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Persentase Sampah yang Tertangani	persen	32,07	32,50	33,00	33,50	34,00	34,50	35,00	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	persen	4,55	7,75	11,52	19,05	26,57	34,10	46,41	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	persen	56,83	58,71	61,21	63,72	66,23	68,74	71,25	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	persen	0	0	100	100	100	100	100	
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	persen	90,00	91,20	92,49	93,77	95,05	96,34	97,61	
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	persen	50,00	51,20	54,12	57,03	62,87	71,63	77,47	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	persen	75,00	76,09	78,88	81,68	84,47	87,26	90,06	
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	persen	85,00	86,35	87,88	89,41	90,95	92,48	94,02	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	angka	2.44	2,39	2,34	2,29	2,24	2,19	2,14	
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	angka	18,00	16,65	15,30	13,95	12,60	11,25	9,90	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	angka	55,00	58,97	62,94	66,91	70,88	74,85	78,82	
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	17,50	16,41	15,23	14,23	13,14	12,05	10,96	
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	persen	70,00	71,93	73,86	75,79	77,72	79,65	81,58	
PERHUBUNGAN										
1	Konektivitas Darat	persen	94,00	94,54	95,08	95,63	96,17	96,72	97,26	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	persen	70,00	72,16	74,22	76,27	78,33	80,38	82,44	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	persen	87,77	88,35	88,91	89,48	90,04	90,60	91,90	
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	46,88	49,53	52,18	54,83	57,48	60,13	62,78	
3	Indeks SPBE	angka	2,75	2,88	3,01	3,14	3,27	3,40	3,53	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	persen	91,16	91,75	92,34	92,93	93,52	94,11	94,70	
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	persen	6,61	11,37	16,73	11,10	27,46	32,83	38,20	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persen	11,36	12,00	13,96	15,92	17,88	19,84	21,80	
3	Persentase Koperasi Aktif	persen	53,50	56,66	59,06	61,47	63,87	68,27	73,48	
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	persen	8,62	10,48	12,78	15,08	18,54	23,14	28,90	
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persen	94,00	95,63	96,29	96,94	97,60	98,26	98,92	
6	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	persen	0,09	0,13	0,27	0,48	0,77	1,12	1,84	
7	Pertumbuhan Wirausaha	persen	4,00	5,80	7,28	10,25	13,21	16,18	22,11	
8	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	persen	0,06	0,09	0,35	0,86	1,10	1,34	1,67	
	PENANAMAN MODAL									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	persen	93,00	94,00	95,00	97,00	99,00	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	persen	2,77	3,22	3,67	4,12	4,57	5,00	5,47	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	persen	99,00	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	persen	85,00	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	persen	0	100	100	100	100	100	100	
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	Persentase wirausaha Pemuda	persen	1,134	1,658	1,904	2,150	2,395	2,641	3,132	
2	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	medali	40	42	45	48	50	53	56	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
STATISTIK										
1	Indeks Pembangunan Statistik	angka	2,18	2,49	2,80	3,11	3,42	3,73	4,04	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PERSANDIAN										
1	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	persen	16,00	18,00	20,00	23,00	25,00	28,00	30,00	
KEBUDAYAAN										
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	persen	24,00	25,89	27,33	28,77	30,20	31,64	33,08	
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	persen	50,00	53,76	57,25	60,74	64,24	67,73	71,22	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	persen	7,77	8,37	9,50	10,62	11,75	12,87	14,00	
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	persen	22,00	26,04	29,99	33,94	37,89	41,84	45,79	
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen	11,93	12,74	13,62	14,50	15,38	16,26	17,14	
6	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	persen	1,11	1,73	2,07	2,41	2,74	3,08	3,42	
PERPUSTAKAAN										
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	angka	68,16	68,81	69,46	70,11	70,76	71,41	72,06	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki dan dilestarikan	persen	0	0	100	100	100	100	100	
KEARSIPAN										
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	angka	73,00	76,64	79,19	84,30	89,41	94,52	100	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	persen	85,00	86,21	89,25	92,28	95,92	98,57	100	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1	Produktivitas Perikanan Tangkap	ton/tahun	25,56	26,12	26,69	27,25	27,81	28,37	28,94	
2	Produktivitas Perikanan Budidaya	ton/tahun	749,14	780,88	812,36	844,36	876,10	907,84	939,58	
3	Produktifitas Budidaya Perikanan Darat	ton/tahun	733,11	747,82	762,53	777,24	791,095	806,66	821,37	
4	Angka Konsumsi Ikan	angka	41,50	42,35	43,20	44,05	44,90	45,75	46,60	
PARIWISATA										
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	persen	2,51	2,78	3,08	3,42	3,79	4,12	4,56	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Capaian Target Kunjungan Wisata	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	persen	2,02	2,15	2,55	2,96	3,77	4,38	4,99	
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100	
	PERTANIAN									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi)	ton	114.919	121.213	142.035	155.916	162.856	169.797	176.737	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung)	ton	106	533	1.133	2.034	4.736	6.680	8.489	
3	Produktivitas Pertanian (Padi)	ton/hektar	6,81	6,89	6,97	7,05	7,13	7,21	7,29	
4	Produktivitas Pertanian (Jagung)	ton/hektar	7,63	7,70	7,77	7,84	7,91	7,98	8,05	
5	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	angka	15,00	16,00	17,15	18,29	19,44	20,59	20,74	
6	Indeks pertanaman (IP) padi	angka	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
7	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	ha	13.140,90	13.161,20	13.170,20	13.179,50	13.188,80	13.198,00	13.207,30	
8	Proporsi sawah irigasi	persen	40,45	42,38	44,30	46,22	48,14	50,06	51,97	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	angka	15,00	18,00	22,00	26,00	31,00	35,00	40,00	
10	Persentase Penurunan Serangan OPT (Penyakit Bias)	persen	50,00	54,47	59,58	64,68	69,79	74,90	80,01	
11	Persentase Penurunan Serangan OPT (Hama Tikus)	persen	45,00	48,01	53,41	58,82	64,22	69,62	75,02	
12	Persentase Unit Usaha yang Memiliki Rekomendasi Usaha Obat Hewan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	persen	11,00	11,98	13,36	16,12	18,88	23,02	27,15	
PERDAGANGAN										
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	persen	21,43	22,57	23,29	25,45	27,60	29,76	32,64	
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	persen	98,82	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	persen	96,82	97,25	97,89	98,54	99,18	99,83	100	
4	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	persen	86,00	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	persen	54,00	59,00	64,00	69,00	74,00	80,00	85,00	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PERINDUSTRIAN										
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	persen	98,00	99,00	100	100	100	100	100	
2	Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota	IKM	904	945	985	1.026	1.066	1.107	1.147	
3	Persentase Keberadaan Perbankan di tiap kecamatan	persen	21,06	26,32	31,58	36,84	42,10	47,37	52,62	
4	Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	persen	25,50	26,50	28,23	29,96	31,69	33,41	35,14	
TRANSMIGRASI										
1	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	persen	2,91	2,91	3,45	4,26	5,07	6,15	7,23	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
SEKRETARIAT DAERAH										
1	Indeks Kematangan Organisasi	angka	(39,37) tinggi	(39,40) tinggi	(39,45) tinggi	(39,59) tinggi	(40,00) tinggi	(43,00) tinggi	(45,00) tinggi	
2	Efektivitas Kerjasama Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kematangan UKPBJ	angka	(2/9) esensi	(3/9) proaktif	(3/9) proaktif	(4/9) strategis	(5/9) strategis	(6/9) strategis	(9/9) unggul	
8	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Tingkat Efektivitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	angka	68 (efektif)	68 (efektif)	70 (efektif)	70 (efektif)	72 (efektif)	72 (efektif)	74 (efektif)	
SEKRETARIAT DPRD										
1	Ketetapan penetapan Perda APBD Tahun N	tepat/ tidak tepat	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	persen	54,54	61,68	68,45	75,23	82,00	88,78	95,55	
3	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	persen	90,00	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
PERENCANAAN										
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	angka	84,94	85,18	85,41	85,65	85,88	86,12	86,35	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kelarasan RPJMD dengan Renstra PD	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KEUANGAN										
1	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	persen	20,07	22,14	24,62	27,10	31,23	35,36	40,32	
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	persen	82,73	85,87	87,12	88,38	89,63	90,88	92,14	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase Penurunan SILPA	persen	35,60	32,38	30,26	26,03	21,80	17,58	9,13	
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	angka	69,122	70,468	71,814	73,160	74,506	75,852	77,198	
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	persen	-9,30	0,99	1,10	1,21	1,54	1,76	2,09	
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	16,30	16,61	16,92	17,23	17,54	17,85	18,16	
8	Return on Aset (ROA) BUMD	persen	2,02	2,52	3,03	3,53	4,03	4,53	5,03	
9	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	angka	99,39	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KEPEGAWAIAN										
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	persen	82,00	83,90	87,46	89,24	91,02	92,80	94,58	
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	6,00	8,61	10,65	12,69	14,73	16,77	18,81	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	persen	92,80	93,64	94,48	95,32	96,16	97,00	97,84	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	persen	90,00	91,44	92,88	94,32	95,76	97,20	98,64	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	persen	82,00	83,91	85,59	87,27	88,95	90,63	92,31	
2	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	persen	4,35	8,03	11,71	17,23	22,75	31,95	42,99	
3	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	persen	6,00	8,61	10,65	12,69	14,73	16,77	18,81	
4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	persen	0,391	0,977	1,564	2,150	2,737	3,323	3,909	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi dan Teknologi	persen	3,70	3,70	11,11	14,81	22,22	25,93	29,63	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
PENGAWASAN										
1	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	angka	70,18	73,10	75,00	76,89	78,79	80,68	82,58	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka	2,570	2,781	2,898	3,015	3,132	3,249	3,366	
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	angka	2	2	3	3	3	3	3	
UNSUR KEWILAYAHAN										
KECAMATAN MAKALE										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	85,00	85,96	86,93	87,89	88,85	89,81	90,78	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	89,00	89,20	90,19	91,20	92,19	93,19	94,18	
KECAMATAN MAKALE UTARA										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	88,00	88,97	89,93	90,89	91,85	92,81	93,78	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN MAKALE SELATAN										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	88,00	88,97	89,92	90,89	91,85	92,81	93,78	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	73,00	75,76	78,50	81,25	83,99	86,74	89,49	
KECAMATAN SANGALLA										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	88,00	90,00	91,03	92,07	93,11	94,14	95,19	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	87,00	88,00	88,97	89,92	90,89	91,85	92,81	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN SANGALLA UTARA										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	88,50	90,50	91,30	92,24	93,19	94,12	95,07	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN SANGALLA SELATAN										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	83,00	85,00	86,19	87,89	89,58	91,28	92,97	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	86,00	89,00	89,34	90,80	92,26	93,72	95,18	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN MENGKENDEK										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	86,00	88,50	88,60	89,45	90,30	91,14	91,99	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	86,67	88,33	89,52	90,86	92,20	93,54	94,89	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	84,00	86,00	87,19	88,89	90,58	92,28	93,97	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	95,00	96,00	96,73	97,06	97,39	97,72	98,05	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN SALUPUTTI										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	86,00	88,00	89,23	90,51	91,78	93,05	94,32	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	88,00	89,00	89,67	90,67	91,67	92,67	93,67	
KECAMATAN REMBON										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	87,00	89,00	90,12	91,05	91,97	92,89	93,82	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN MALIMBONG BALEPE										
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	persen	86,00	88,00	89,23	90,51	91,78	93,05	94,32	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	persen	76,00	79,00	82,02	84,08	86,12	88,18	90,23	
KECAMATAN RANTETAYO										
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	persen	85,00	87,00	88,53	90,14	91,73	93,33	94,93	
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN KURRA										
1	Persepsi masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan (IKM Kecamatan)	persen	87,00	88,00	88,42	89,82	91,21	92,61	93,99	
2	Cakupan desa dan kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	persen	90,00	91,00	91,66	92,59	93,51	94,44	95,37	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN BONGGAKARADENG										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	84,00	88,00	88,20	89,54	90,89	92,23	93,57	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN RANO										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	92,00	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KECAMATAN BITTUANG										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	83,00	85,00	86,51	87,65	88,79	89,93	91,07	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	86,00	89,00	89,20	90,20	91,20	92,19	93,19	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN MASANDA										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	78,00	80,00	81,51	82,65	83,79	84,93	86,07	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	78,00	80,00	81,00	83,13	84,73	86,32	87,92	
KECAMATAN SIMBUANG										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	85,00	87,00	89,46	90,67	91,87	93,08	94,28	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	
KECAMATAN MAPPAK										
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	persen	85,00	87,00	91,21	93,26	95,29	97,34	98,38	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang diberdayakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Temuan Audit BPK yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS										
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	96,31	96,62	97,11	97,60	98,09	100	100	



NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (TAHUN 2024)	2025	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KET.
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD	persen	5,48	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	16,66	
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	persen	60,00	66,00	71,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
5	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100	

4.2.5. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa target SPM harus mencapai 100 persen setiap tahunnya serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 4.6
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2030

BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
PENDIDIKAN							
Pendidikan Dasar							
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pendidikan Kesetaraan							
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pendidikan Anak Usia Dini							
Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
KESEHATAN							
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan Balita							
Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen



BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
Persentase Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen



BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)							
Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
PEKERJAAN UMUM							
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari							
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik							
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
PERUMAHAN RAKYAT							
Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota							
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota							
Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
TRANTIBUMLINMAS							
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum							
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen



BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
Pelayanan informasi rawan bencana							
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
SOSIAL							
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti							
Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti							
Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti							
Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen



BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET 2025	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota							
Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

4.2.6. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDG'S)

Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), pemerintah telah menyeleraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Bagi Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa tujuan SDGs harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari target perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sesuai dengan kondisi topografis Kabupaten Tana Toraja hanya melaksanakan 15 tujuan. Selanjutnya target indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.7
Penetapan Target Indikator
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's)
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2030

NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
1	TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	persen	10,79	10,01	9,45	8,85	8,25	7,68	7,06
1.2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	persen	91,40	92,80	94,20	95,60	97,00	98,40	99,80
1.3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	rumah tangga	10,994	12,821	14,648	16,475	18,402	20,129	21,956
1.4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	persen	85,86	87,52	89,18	90,84	92,50	94,16	95,82
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	99,40	99,47	99,54	99,61	99,68	99,75	99,82



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
1.7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	84,88	86,73	88,58	90,43	92,28	94,13	95,98
1.8	Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	96,00	96,37	96,74	97,11	97,48	97,85	98,22
2	TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	persen	7,33	6,73	6,13	5,53	4,93	4,33	3,73
2.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Dinas Kesehatan	persen	10,45	9,51	8,73	7,81	6,94	6,03	5,11
2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Dinas Kesehatan	persen	3,67	3,55	3,43	3,31	3,19	3,07	2,95
2.4	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	persen	77,50	79,29	81,08	82,87	84,66	86,45	88,24
2.5	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	angka	88,30	89,51	90,72	91,93	93,14	94,35	95,56
3	TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	angka	80,92	78,20	75,48	72,76	70,04	67,32	64,59
3.2	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	angka	0,93	0,88	0,83	0,78	0,73	0,68	0,63



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
3.3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	angka	0,0112	0,0096	0,0080	0,0064	0,0048	0,0032	0,0016
3.4	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	kasus	112,30	101,46	90,62	79,78	68,94	58,10	47,26
3.5	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	rasio	8,15	5,41	2,67	1,30	0,95	0,50	0,09
3.6	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	persen	96,78	97,23	97,68	98,13	98,58	99,03	99,48
3.7	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	97,00	97,31	97,62	97,93	98,24	98,55	98,86
4.2	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	95,00	95,42	95,84	96,26	96,68	97,10	97,52
4.3	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	80,00	81,74	83,48	85,22	86,96	88,70	90,44
4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	angka	92,00	93,24	94,48	95,72	96,96	98,20	94,44
4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	angka	97,00	97,43	97,86	98,29	98,72	99,15	99,58



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
4.6	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	tahun	8,77	8,84	8,99	9,09	9,20	9,32	9,41
4.7	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	95,00	95,75	96,50	97,25	98,00	98,75	99,50
4.8	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	96,20	96,79	97,38	97,97	98,56	99,15	99,74
4.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	angka	63,66	68,76	73,86	78,96	84,06	89,16	94,26
4.10	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	persen	73,00	74,76	76,52	78,28	80,04	81,80	83,56
5	TUJUAN 5 : MENCAPAI MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPPPA PPKB	kebijakan	1	1	1	1	2	2	2
5.2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	DPPPA PPKB	kasus	0.0333	0.0227	0,0174	0,0122	0,0072	0,0047	0,0023
5.3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	DPPPA PPKB	persen	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	persen	79,79	80,59	81,39	82,19	82,99	83,79	85,59



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
6	TUJUAN 6 : KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN									
6.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	persen	100	100	100	100	100	100	100
6.2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinas Kesehatan	orang	85,98	86,50	87,42	88,34	89,26	90,18	91,10
6.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	persen	85,86	87,52	89,18	90,84	92,50	94,16	95,82
6.4	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan	desa	100	100	100	100	100	100	100
7	TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
7.1	Bauran energi terbarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TUJUAN 8 : PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Bappelitbangda	persen	5,20	7,32	7,38	7,42	7,48	7,57	7,68
8.2	PDB per kapita	Bappelitbangda	juta rupiah	34,74	35,45	43,12	52,33	61,53	79,98	89,14
8.3	Persentase tenaga kerja formal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	persen	58,85	60,77	62,69	64,61	66,53	68,45	70,37



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
8.4	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi UKM, Perindag	persen	9,27	9,83	10,39	10,95	11,51	12,07	12,63
8.5	Upah rata-rata per jam pekerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	rupiah	21.464	23,151	24,838	26,525	28,212	29,899	31,586
8.6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	persen	3,98	3,23	3,13	3,07	3,00	2,95	2,87
8.7	Persentase setengah pengangguran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	persen	51,51	49,75	47,99	46,23	44,47	42,71	40,95
8.8	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	orang	4.237	4.876	5.086	5.302	5.941	6.367	6.793
8.9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	orang	499.624	512.992	528.733	546.773	567.058	590.239	617.019
9	TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1	Jumlah bandara	Kemenhub, Dinas Bina Marga Prov. Sulsel, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	jumlah bandara	1	1	1	1	1	1	1



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
9.2	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Dinas Koperasi UKM, Perindag	persen	7,86	7,92	8,05	8,11	8,22	8,31	8,41
9.3	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Dinas Koperasi UKM, Perindag	persen	6,67	6,71	6,79	6,87	6,95	7,11	7,27
9.4	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	persen	0,94	1,03	1,11	1,19	1,27	1,36	1,44
9.5	Proporsi individu yang mengusasi/memiliki telpon genggam	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	rasio	79,79	80,59	81,39	82,19	82,99	83,79	85,59
9.6	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	rasio	54,93	60,07	65,21	70,35	75,49	80,63	85,77
10	TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTARNEGARA									
10.1	Koefisien Gini*	Bappelitbangda	angka	0,320	0,318	0,317	0,315	0,314	0,312	0,311
11	TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	persen	32,07	35,27	41,67	44,87	51,27	60,87	73,67



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
12	TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup	persen	1,39	2,22	3,88	6,37	9,69	12,18	17,16
12.2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup	persen	29,95	34,12	38,29	42,46	46,63	50,80	54,97
13	TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	dokumen	0	1	1	1	1	1	1
14	TUJUAN 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
15.1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup	angka	56,00	56,22	56,44	56,66	56,88	57,10	57,32
15.2	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Lingkungan Hidup	angka	0,19	0,23	0,31	0,43	0,55	0,67	0,83



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
15.3	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dinas Lingkungan Hidup	dokumen	1	1	1	1	1	1	1
16	TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN									
16.1	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	DPPPA PPKB	angka	30	26	22	18	14	10	6
16.2	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DPPPA PPKB	persen	0,036	0,031	0,027	0,021	0,017	0,014	0,009
16.3	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sekretariat DPRD	persen	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	16,66
16.4	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKP SDM	persen	33,33	33,33	37,04	37,04	40,74	40,74	40,74
16.5	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	98,54	99,23	99,92	100	100	100	100
16.6	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Kesbangpol	rasio	0,00106	0,00097	0,00092	0,00086	0,00081	0,00076	0,00070



NO.	TUJUAN/INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	PROYEKSI				
						2026	2027	2028	2029	2030
16.7	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya	Badan Kesbangpol	rasio	0,96	0,96	0.96	0,97	0,97	0,98	0.98
17	TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	rasio	0,94	1,03	1,11	1,19	1,27	1,36	1,44
17.2	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	rasio	54,93	60,07	65,21	70,35	75,49	80,63	85,77
17.3	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Bappelitbangda	persen	99,69	99,81	99,93	100	100	100	100
17.4	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Bappelitbangda	persen	87,87	89,73	91,59	93,45	93,31	97,17	99,0



BAB V

P E N U T U P

5.1. KESIMPULAN SUBSTANSIAL

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada sejumlah peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Tana Toraja, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program strategis pasangan Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tana Toraja masa bakti 2025-2030. RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Periode 2025-2030 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tana Toraja berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.



2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja bertugas menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029.
3. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
4. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
5. Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam KUA-PPAS dan RAPBD.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
7. RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin dan bertanggung jawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

5.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana benar-benar telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegiatan pengendalian dilakukan setiap tahun berjalan selama periode RPJMD, sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan selama dua kali, yaitu di pertengahan periode RPJMD dan di akhir periode RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dilakukan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Tana Toraja, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi, BAPPELITBANGDA berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja.

Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi, digunakan sejumlah indikator sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (*Input*), digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya (dana/anggaran, sumberdaya manusia, peralatan/sarana prasarana dan material lainnya) yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Indikator Proses, untuk menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang telah dilakukan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Indikator Keluaran (*Output*), untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, sejauh mana terlaksana sesuai rencana.
4. Indikator Hasil (*Outcome*), untuk menggambarkan kondisi atau hasil nyata dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
5. Indikator Dampak (*Impact*), digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.

Hasil dari pengendalian dan evaluasi diharapkan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kelemahan dan hambatan yang terjadi selama



pelaksanaan rencana. Selain itu, hasil dari pengendalian dan evaluasi juga menjadi refleksi dan memberi umpan balik (*feedback*) bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Tana Toraja berikutnya (Tahun 2030-2035).

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG